



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

LKPD Kabupaten Demak disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Demak.

LKPD Kabupaten Demak disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan keuangan ini juga telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

LKPD Kabupaten Demak ini juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

LKPD Kabupaten Demak disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan demikian laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan



keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi sampai dengan tersaji sebagai satu entitas tunggal.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 53);



10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Demak nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Demak nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 38); dan
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 55).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Guna mempermudah pemahaman Catatan atas Laporan Keuangan ini maka disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.2. Inflasi
 - 2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - 2.1.4. Angka Kemiskinan
 - 2.1.5. Indek Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.6. Gini Ratio
 - 2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
 - 2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
 - 2.2.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. *Mandatory Spending*
- 3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025
 - 3.2.2. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - 3.2.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025
- 3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
 - 3.3.1. Pendapatan Daerah
 - 3.3.2. Belanja Daerah
 - 3.3.3. Pembiayaan Daerah



BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Keuangan Daerah
- 4.2. Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan Daerah
- 4.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII Informasi Penting Lainnya

- 7.1. Penanganan Dampak Inflasi
- 7.2. Tanah SMP N 5 Demak
- 7.3. Tanah dikuasai Pihak Lain
- 7.4. Daerah Irigasi Sumberejo

BAB VIII Penutup

Lampiran



BAB II

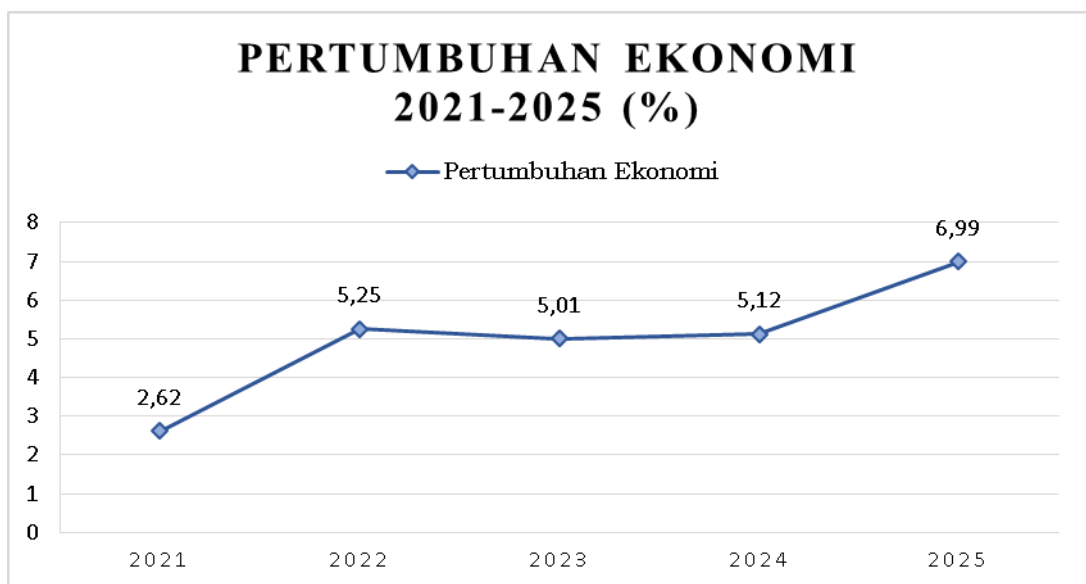
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Perkembangan kondisi daerah khususnya kondisi perekonomian akan mengindikasikan sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah adalah pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan gini ratio.

2.1.1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana dalam diagram sebagai berikut:



Sumber Data : Demak Dalam Angka 2026, <https://demakkab.bps.go.id/>

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Demak selama tahun 2021-2025 menunjukkan kinerja yang fluktuatif dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian (output agregat). Kondisi LPE Kabupaten Demak Tahun 2020 berada diangka minus 0,23 sebagai akibat pandemi covid-19 dan kembali meningkat secara signifikan sebagai dampak pemulihan ekonomi dalam kurun waktu 2 tahun atau tepatnya pada tahun 2022. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi dapat naik 1,87 jika dibandingkan dengan tahun 2024.

2.1.2. Inflasi

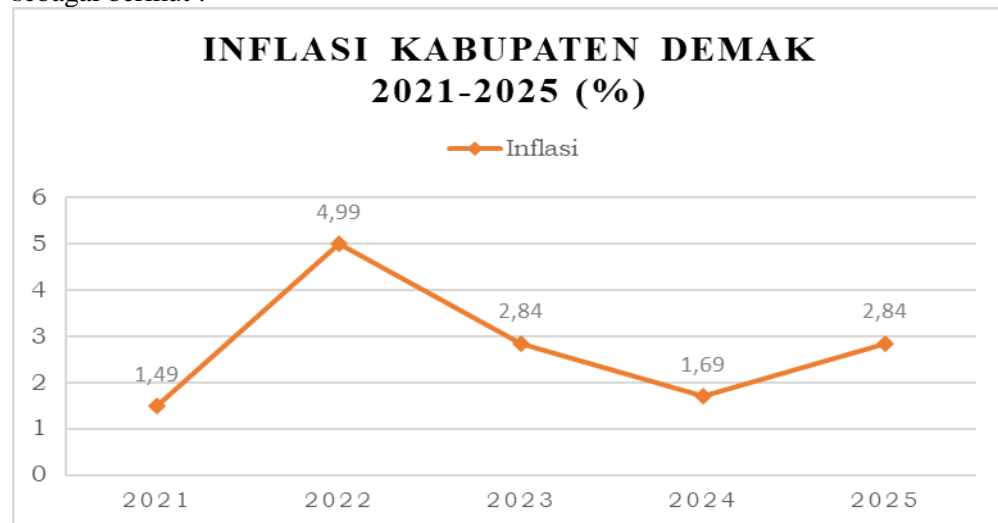
Stabilitas harga merupakan barometer stabilitas pertumbuhan ekonomi riil, karena inflasi yang dapat dikendalikan stabil dapat menjamin peningkatan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi



pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi Kabupaten Demak yang mengikuti laju inflasi kota Semarang tahun 2021-2025 mengalami fluktuatif dengan rata-rata inflasi tahunan mencapai 2,77%.

Informasi mengenai inflasi digunakan sebagai tolok ukur kestabilan perekonomian daerah. Laju inflasi di Kabupaten Demak mengikuti laju inflasi Kota Semarang (tidak dihitung sendiri) selama kurun waktu 5 tahun dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber Data : [\[Indikator Strategis\] Inflasi 9 Kota di Provinsi Jawa Tengah \(2022=100\) - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah](#)

Pada grafik tersebut terlihat inflasi tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa, pada tahun 2025 harga-harga komoditas kembali naik dibandingkan pada tahun 2024.

Inflasi juga terjadi di Jawa Tengah dan kota-kota lainnya. Jawa Tengah inflasi sebesar 2,72, Kabupaten Kudus sebesar 2,68, dan kota Semarang sebesar 2,84. Inflasi mengalami kenaikan di atas angka 2 pada tahun 2025 dibandingkan pada tahun 2024. Hal ini menandakan harga barang dan jasa di Jawa Tengah secara umum mengalami kenaikan.

2.1.3. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

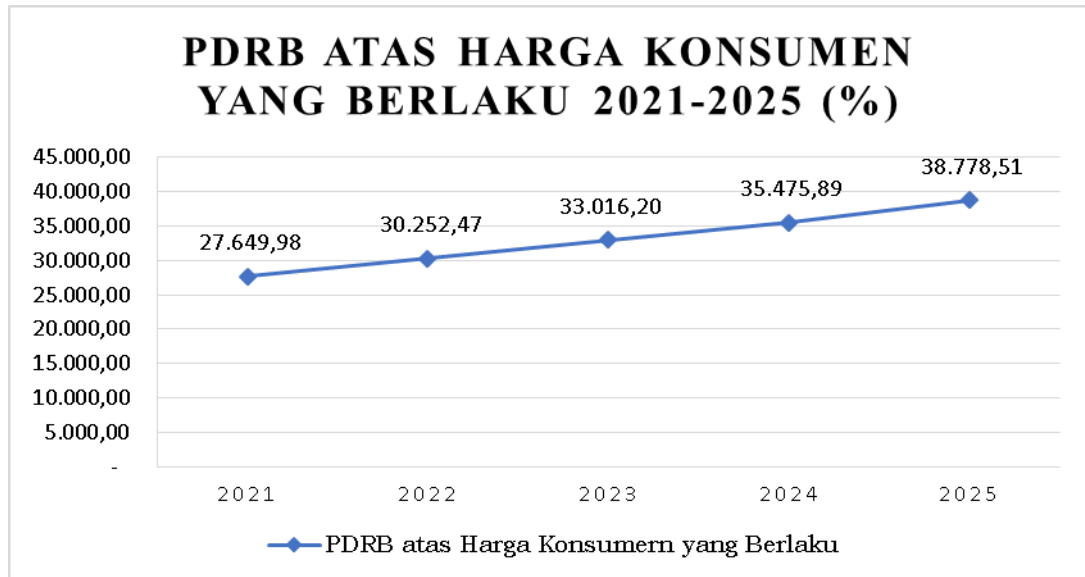
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan bagi hasil antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada di tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021 hingga 2025 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, PDRB per kapita tercatat sebesar 27.649,98 milyar rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2025 mencapai 38.778,51 milyar rupiah.



Kenaikan angka PDRB per kapita menurut pengeluaran sebagian besar dipengaruhi pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, serta jasa pendidikan.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mengalami peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya peningkatan riil kuantitas barang/jasa yang dihasilkan sebesar 9,31% dibanding tahun sebelumnya.



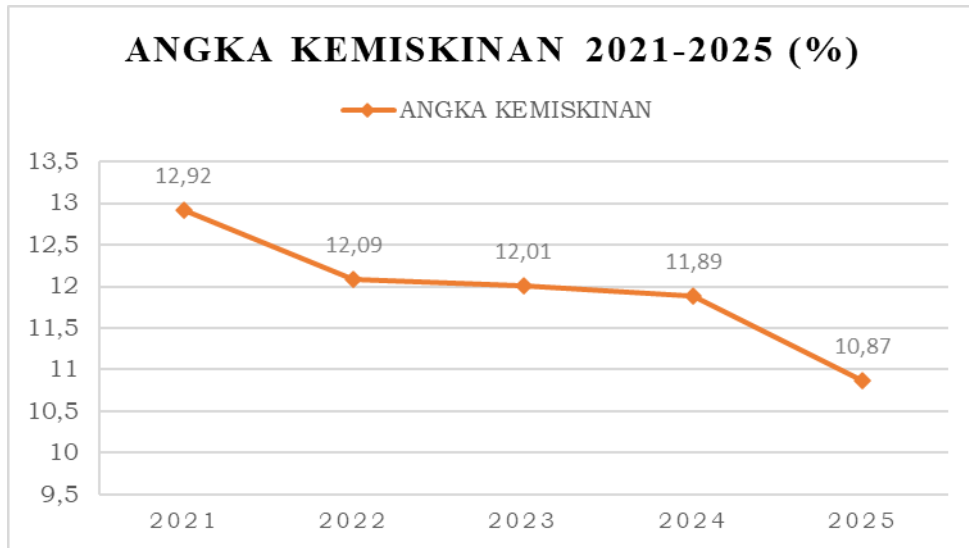
Sumber Data : Demak Dalam Angka 2026 (Data Sementara), <https://demakkab.bps.go.id/>

Upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, mendorong berkembangnya sektor riil, penguatan infrastruktur perlu terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.

Kebijakan ekonomi tahun 2025 diarahkan pada upaya mempertahankan perekonomian ditengah berita resesi global. dengan meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, mendorong realisasi investasi pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, pengembangan sektor unggulan daerah sebagai penyumbang terbesar pada pertumbuhan PDRB, meningkatkan kualitas serta kuantitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing tinggi, dan menjaga kestabilan harga pada kelompok kebutuhan masyarakat.

2.1.4. Angka Kemiskinan

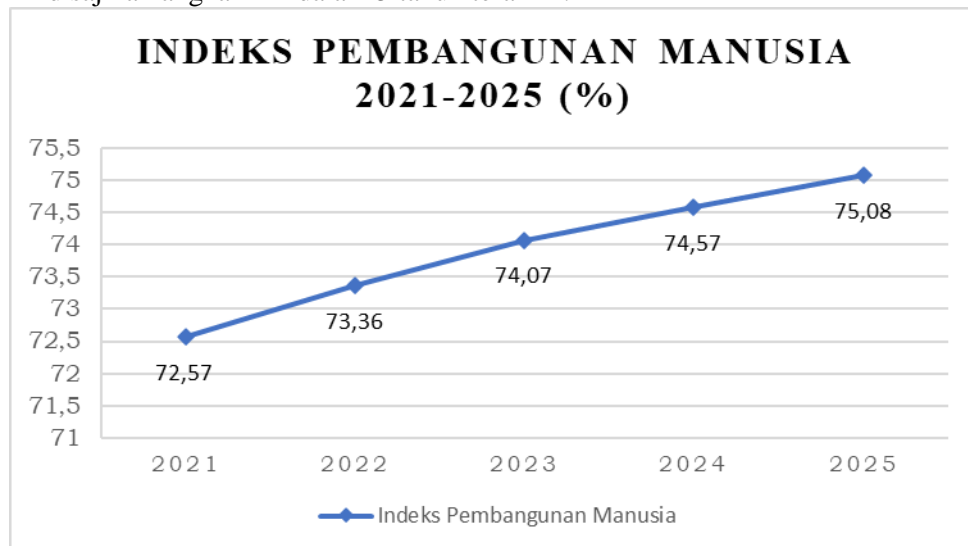
Pemerintah Kabupaten Demak dapat menekan angka kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 10,87% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 11,89% terjadi penurunan 1 % lebih. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Demak memiliki persentase yang cukup tinggi dikarenakan dampak dari adanya Covid-19 pada tahun 2020. Namun dari tahun 2021 hingga tahun 2025, angka kemiskinan terus menurun seiring dengan membaiknya perekonomian di Kabupaten Demak. Data angka kemiskinan dalam 5 tahun terakhir, disajikan sebagai berikut :



Sumber Data : [Kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2025\(1\)2025-09-22 - Infografik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak](#)

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM di Kabupaten Demak dalam 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2025 nilai IPM di Kabupaten Demak sebesar 75,08. Berikut ini disajikan angka IPM dalam 5 tahun terakhir:

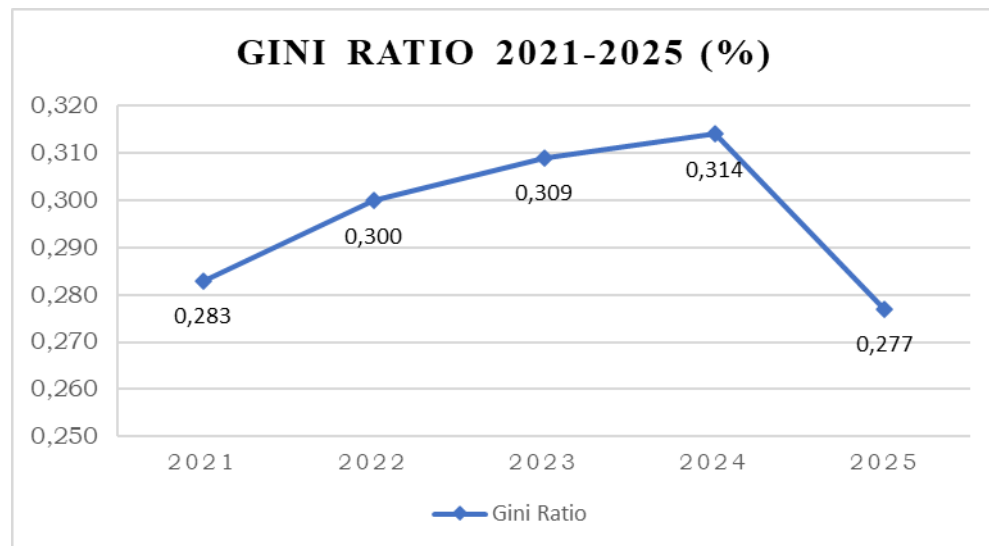


Sumber Data : [INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN DEMAK 2025 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak](#)



2.1.6. Gini Ratio

Gini ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran suatu wilayah secara menyeluruh. Gini ratio berkisar antara 0 sampai 1. Jika gini ratio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti kondisi masyarakat pada posisi sangat timpang atau ketimpangan benar-benar sempurna, dan gini ratio di Kabupaten Demak sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Namun tahun 2025 Gini Ratio di Kabupaten Demak turun secara signifikan pada angka 0,277 dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,314. Artinya pemerataan pendapatan/pengeluaran di Kabupaten Demak mengalami perbaikan. Bahkan nilai terbaik dari 5 tahun terakhir. Secara diagram disajikan pada gambar berikut ini:



Sumber Data : Demak Dalam Angka 2025, <https://demakkab.bps.go.id/>

2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penganggur terbuka, terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pada Tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka pada angka 4,58. Angka tersebut paling rendah diantara 5 tahun terakhir. Berikut disajikan grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Demak:



Sumber Data : Indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
[Infografik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak](#)

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja daerah sumber yang terbatas maka Pemerintah Kabupaten Demak dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan menetapkan kebijakan keuangan. Arah kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang terus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang yang berlaku. Kebijakan tersebut secara umum dapat disampaikan sebagai berikut.

2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

Seperti yang telah dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2025 rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 dianggarkan naik 15,27% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan opsen pajak PKB dan BBNKB yang di tahun 2024 masuk pada pendapatan transfer. Namun Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan dikarenakan perubahan rekening pendapatan BLUD yang pindah menjadi pendapatan retribusi. Sehingga kalau dilihat kenaikan per jenis pendapatan, maka pendapatan retribusi naik secara signifikan dan Lain-lain PAD yang Sah turun secara signifikan juga.

Adapun langkah-langkah konkret untuk pencapaian Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 adalah :



1. Mengintensifkan penagihan pembayaran piutang pajak, selain tetap meningkatkan promosi pembayaran pajak, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan melalui kegiatan-kegiatan seperti undian berhadiah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak, retribusi dan investasi dengan penguatan Mal Pelayanan Publik termasuk MPP digital;
3. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal penghitungan opsen pajak PKB dan BBNKB dan validitas data wajib pajak untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten;
4. Melakukan sinergi pemungutan opsen PKB dan BBNKB melalui pembentukan tim intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah, melakukan sinergi pelayanan bersama antara pelayanan pembayaran PBB-P2 dan pembayaran PKB, sosialisasi melalui media elektronik dan papan ruang untuk meningkatkan kesadaran pembayaran PKB dan BBNKB, dan pemberian apresiasi kepada desa yang taat dalam membayarkan PKB;
5. Mendorong kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan penyelenggaraan hiburan legal yang dapat berkontribusi pada penerimaan pajak dan retribusi;
6. Melakukan rehabilitasi pada pasar-pasar yang belum representatif untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar grosir/pertokoan;
7. Menata penerimaan retribusi melalui digitalisasi dan penerapan billing center untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan;
8. Memprioritaskan alokasi belanja operasional pada UPTD/Balai penghasil retribusi selain memberikan insentif pada unit penghasil retribusi;
9. Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan cermat dan menggiatkan penghapusan aset yang telah melewati waktu pakai;
10. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, terutama untuk penanganan banjir dan rob; dengan memperbaiki kualitas pelaporan dan pengusulan;
11. Mengupayakan peningkatan pendapatan Dana Insentif Fiskal dengan mengupayakan pemenuhan passing grade kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; mengupayakan pemenuhan standar pelayanan minimal terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air minum; menjaga iklim inovasi dan sinergi kebijakan; serta pemenuhan indikator kesejahteraan masyarakat; dan
12. Menguatkan kerja sama pemerintah-swasta untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dalam partisipasi pembangunan melalui program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah yang meliputi semua pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program kegiatan tahun 2025 maka kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga yang diarahkan untuk:



1. Belanja daerah digunakan dengan urutan prioritas membiayai kebutuhan belanja mengikat (gaji pegawai, tagihan listrik, tagihan air, dsb), kebutuhan belanja yang telah diatur penggunaannya oleh peraturan perundangan/mandatory spending (SPM, pemenuhan alokasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dsb), kebutuhan belanja untuk mendukung program unggulan daerah dan terakhir untuk membiayai belanja lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
2. Menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan membatasi belanja daerah untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar; mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%; serta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik;
3. Belanja yang bersumber dari DAU spesifik agar dipenuhi sesuai ketentuan perundangan;
4. Belanja pegawai agar dianggarkan dengan cermat, memperhatikan peraturan perundangan, dan secara bertahap melakukan penyesuaian maksimal 30% dari total belanja daerah pada tahun 2027. Selain itu, perlu dipersiapkan kebijakan sebagai antisipasi keberlanjutan pegawai tidak tetap/honorer/non ASN;
5. Penggunaan belanja barang dan jasa didorong untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak. Belanja barang dan jasa diprioritaskan untuk menggunakan produk dalam negeri, produk lokal, terutama UMKM, dan tenaga kerja dalam daerah guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan nilai tambah produksi. Belanja barang dan jasa harus mendasarkan prinsip selektif dan efisien, menghasilkan efek berganda pada sektor lainnya, dan berorientasi pelayanan;
6. Belanja hibah digunakan antara lain diberikan kepada lembaga/kelembagaan/partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan;
7. Belanja bantuan sosial dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta mendukung program prioritas;
8. Belanja modal digunakan dengan urutan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan, sosial, ketenteraman dan ketertiban, serta kebencanaan); belanja modal yang dapat berkontribusi pada pendapatan; dan belanja modal untuk mendukung program prioritas Bupati;
9. Belanja tidak terduga agar tetap dianggarkan untuk cadangan apabila terjadi keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial;
10. Belanja transfer diberikan kepada Pemerintah Provinsi atas bagi hasil pajak/pendapatan lainnya dan Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan; dan
11. Bantuan keuangan kepada Desa diarahkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan



wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, pendukung urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan, pengawasan, kewilayahan dan pemerintahan umum berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan capil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Unsur Pengawasan yaitu Inspektorat Daerah dan Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan serta Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Demak menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp171.217.674.971,34 namun tidak direncanakan pengeluaran pembiayaan baik penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD maupun pengeluaran yang lain.

2.3. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dan program dan kegiatan maksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dan



Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, direncanakan pendapatan sebesar Rp2.610.961.447.170,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp638.040.856.895,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.963.064.205.956,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp9.856.384.319,00.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Demak pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.661.324.819.563,83 atau 101,93% dari target, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp734.542.948.186,83, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.926.777.382.839,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp4.488.538,00.

Anggaran belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Demak pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp2.782.179.122.141,34 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.097.774.650.558,34, Belanja Modal sebesar Rp239.177.959.437,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.541.000.000,00, Transfer sebesar Rp443.685.512.146,00.

Realisasi belanja dan transfer daerah tahun 2025 sebesar Rp2.578.907.694.065,20 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.975.548.173.052,20, Belanja Modal sebesar Rp221.122.666.897,00, Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp339.610.000,00, Belanja Transfer sebesar Rp381.897.244.116,00.

Adapun untuk indikator kinerja APBD dapat dilihat dari Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi sebagai berikut:

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
4	Pendapatan	2.610.961.447.170,00	2.661.324.819.563,83	50.363.372.393,83	101,93
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	285.433.929.918,00	305.683.985.986,83	20.250.056.068,83	107,09
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	281.878.179.918,00	299.459.518.332,83	17.581.338.414,83	106,24
	DINAS KESEHATAN DAERAH	210.250.000,00	334.786.500,00	124.536.500,00	159,23
4	PENDAPATAN DAERAH	210.250.000,00	334.786.500,00	124.536.500,00	159,23
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	210.250.000,00	334.786.500,00	124.536.500,00	159,23
4.1.02	Retribusi Daerah	210.250.000,00	334.786.500,00	124.536.500,00	159,23
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	140.000.000.000,00	145.145.517.929,00	5.145.517.929,00	103,68
4	PENDAPATAN DAERAH	140.000.000.000,00	145.145.517.929,00	5.145.517.929,00	103,68
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.000.000.000,00	145.145.517.929,00	5.145.517.929,00	103,68
4.1.02	Retribusi Daerah	140.000.000.000,00	145.145.517.929,00	5.145.517.929,00	103,68
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	76.000.000.000,00	83.161.107.046,83	7.161.107.046,83	109,42
4	PENDAPATAN DAERAH	76.000.000.000,00	83.161.107.046,83	7.161.107.046,83	109,42
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	76.000.000.000,00	83.161.107.046,83	7.161.107.046,83	109,42
4.1.02	Retribusi Daerah	76.000.000.000,00	83.161.107.046,83	7.161.107.046,83	109,42
	PUSKESMAS MRANGGEN I	2.280.000.000,00	2.205.282.808,00	(74.717.192,00)	96,72

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.280.000.000,00	2.205.282.808,00	(74.717.192,00)	96,72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.280.000.000,00	2.205.282.808,00	(74.717.192,00)	96,72
4.1.02	Retribusi Daerah	2.280.000.000,00	2.205.282.808,00	(74.717.192,00)	96,72
	PUSKESMAS MRANGGEN II	1.772.482.000,00	1.846.024.901,00	73.542.901,00	104,15
4	PENDAPATAN DAERAH	1.772.482.000,00	1.846.024.901,00	73.542.901,00	104,15
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.772.482.000,00	1.846.024.901,00	73.542.901,00	104,15
4.1.02	Retribusi Daerah	1.772.482.000,00	1.846.024.901,00	73.542.901,00	104,15
	PUSKESMAS MRANGGEN III	2.594.000.000,00	2.567.695.718,00	(26.304.282,00)	98,99
4	PENDAPATAN DAERAH	2.594.000.000,00	2.567.695.718,00	(26.304.282,00)	98,99
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.594.000.000,00	2.567.695.718,00	(26.304.282,00)	98,99
4.1.02	Retribusi Daerah	2.594.000.000,00	2.567.695.718,00	(26.304.282,00)	98,99
	PUSKESMAS KARANGAWEN I	3.141.113.000,00	3.212.778.968,00	71.665.968,00	102,28
4	PENDAPATAN DAERAH	3.141.113.000,00	3.212.778.968,00	71.665.968,00	102,28
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.141.113.000,00	3.212.778.968,00	71.665.968,00	102,28
4.1.02	Retribusi Daerah	3.141.113.000,00	3.212.778.968,00	71.665.968,00	102,28
	PUSKESMAS KARANGAWEN II	2.954.300.000,00	3.020.637.764,00	66.337.764,00	102,25
4	PENDAPATAN DAERAH	2.954.300.000,00	3.020.637.764,00	66.337.764,00	102,25
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.954.300.000,00	3.020.637.764,00	66.337.764,00	102,25
4.1.02	Retribusi Daerah	2.954.300.000,00	3.020.637.764,00	66.337.764,00	102,25
	PUSKESMAS GUNTUR I	4.000.000.000,00	4.000.181.826,00	181.826,00	100,00
4	PENDAPATAN DAERAH	4.000.000.000,00	4.000.181.826,00	181.826,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.000.000.000,00	4.000.181.826,00	181.826,00	100,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.000.000.000,00	4.000.181.826,00	181.826,00	100,00
	PUSKESMAS GUNTUR II	2.382.305.484,00	2.407.731.037,00	25.425.553,00	101,07
4	PENDAPATAN DAERAH	2.382.305.484,00	2.407.731.037,00	25.425.553,00	101,07
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.382.305.484,00	2.407.731.037,00	25.425.553,00	101,07
4.1.02	Retribusi Daerah	2.382.305.484,00	2.407.731.037,00	25.425.553,00	101,07
	PUSKESMAS SAYUNG I	2.344.135.000,00	2.472.128.548,00	127.993.548,00	105,46
4	PENDAPATAN DAERAH	2.344.135.000,00	2.472.128.548,00	127.993.548,00	105,46
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.344.135.000,00	2.472.128.548,00	127.993.548,00	105,46
4.1.02	Retribusi Daerah	2.344.135.000,00	2.472.128.548,00	127.993.548,00	105,46
	PUSKESMAS SAYUNG II	2.200.000.000,00	2.572.373.261,00	372.373.261,00	116,93
4	PENDAPATAN DAERAH	2.200.000.000,00	2.572.373.261,00	372.373.261,00	116,93
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.200.000.000,00	2.572.373.261,00	372.373.261,00	116,93
4.1.02	Retribusi Daerah	2.200.000.000,00	2.572.373.261,00	372.373.261,00	116,93
	PUSKESMAS KARANGTENGAH	2.512.617.750,00	2.808.986.063,00	296.368.313,00	111,80
4	PENDAPATAN DAERAH	2.512.617.750,00	2.808.986.063,00	296.368.313,00	111,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.512.617.750,00	2.808.986.063,00	296.368.313,00	111,80
4.1.02	Retribusi Daerah	2.512.617.750,00	2.808.986.063,00	296.368.313,00	111,80
	PUSKESMAS BONANG I	4.375.200.000,00	4.673.584.371,00	298.384.371,00	106,82
4	PENDAPATAN DAERAH	4.375.200.000,00	4.673.584.371,00	298.384.371,00	106,82
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.375.200.000,00	4.673.584.371,00	298.384.371,00	106,82
4.1.02	Retribusi Daerah	4.375.200.000,00	4.673.584.371,00	298.384.371,00	106,82
	PUSKESMAS BONANG II	2.600.000.000,00	3.026.203.909,00	426.203.909,00	116,39
4	PENDAPATAN DAERAH	2.600.000.000,00	3.026.203.909,00	426.203.909,00	116,39

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.600.000.000,00	3.026.203.909,00	426.203.909,00	116,39
4.1.02	Retribusi Daerah	2.600.000.000,00	3.026.203.909,00	426.203.909,00	116,39
	PUSKESMAS DEMAK I	1.259.940.000,00	1.412.040.947,00	152.100.947,00	112,07
4	PENDAPATAN DAERAH	1.259.940.000,00	1.412.040.947,00	152.100.947,00	112,07
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.259.940.000,00	1.412.040.947,00	152.100.947,00	112,07
4.1.02	Retribusi Daerah	1.259.940.000,00	1.412.040.947,00	152.100.947,00	112,07
	PUSKESMAS DEMAK II	1.498.613.264,00	1.640.011.620,00	141.398.356,00	109,44
4	PENDAPATAN DAERAH	1.498.613.264,00	1.640.011.620,00	141.398.356,00	109,44
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.498.613.264,00	1.640.011.620,00	141.398.356,00	109,44
4.1.02	Retribusi Daerah	1.498.613.264,00	1.640.011.620,00	141.398.356,00	109,44
	PUSKESMAS DEMAK III	1.344.546.116,00	1.363.593.042,00	19.046.926,00	101,42
4	PENDAPATAN DAERAH	1.344.546.116,00	1.363.593.042,00	19.046.926,00	101,42
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.344.546.116,00	1.363.593.042,00	19.046.926,00	101,42
4.1.02	Retribusi Daerah	1.344.546.116,00	1.363.593.042,00	19.046.926,00	101,42
	PUSKESMAS WONOSALAM I	2.300.020.000,00	2.209.480.868,00	(90.539.132,00)	96,06
4	PENDAPATAN DAERAH	2.300.020.000,00	2.209.480.868,00	(90.539.132,00)	96,06
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.300.020.000,00	2.209.480.868,00	(90.539.132,00)	96,06
4.1.02	Retribusi Daerah	2.300.020.000,00	2.209.480.868,00	(90.539.132,00)	96,06
	PUSKESMAS WONOSALAM II	2.500.000.000,00	2.572.288.315,00	72.288.315,00	102,89
4	PENDAPATAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.572.288.315,00	72.288.315,00	102,89
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.500.000.000,00	2.572.288.315,00	72.288.315,00	102,89
4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000.000,00	2.572.288.315,00	72.288.315,00	102,89
	PUSKESMAS DEMPET	3.504.213.000,00	3.666.093.209,00	161.880.209,00	104,62
4	PENDAPATAN DAERAH	3.504.213.000,00	3.666.093.209,00	161.880.209,00	104,62
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.504.213.000,00	3.666.093.209,00	161.880.209,00	104,62
4.1.02	Retribusi Daerah	3.504.213.000,00	3.666.093.209,00	161.880.209,00	104,62
	PUSKESMAS KEBONAGUNG	2.165.120.000,00	2.760.383.500,00	595.263.500,00	127,49
4	PENDAPATAN DAERAH	2.165.120.000,00	2.760.383.500,00	595.263.500,00	127,49
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.165.120.000,00	2.760.383.500,00	595.263.500,00	127,49
4.1.02	Retribusi Daerah	2.165.120.000,00	2.760.383.500,00	595.263.500,00	127,49
	PUSKESMAS GAJAH I	2.631.996.018,00	2.793.350.842,00	161.354.824,00	106,13
4	PENDAPATAN DAERAH	2.631.996.018,00	2.793.350.842,00	161.354.824,00	106,13
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.631.996.018,00	2.793.350.842,00	161.354.824,00	106,13
4.1.02	Retribusi Daerah	2.631.996.018,00	2.793.350.842,00	161.354.824,00	106,13
	PUSKESMAS GAJAH II	1.650.000.000,00	2.000.391.891,00	350.391.891,00	121,24
4	PENDAPATAN DAERAH	1.650.000.000,00	2.000.391.891,00	350.391.891,00	121,24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.650.000.000,00	2.000.391.891,00	350.391.891,00	121,24
4.1.02	Retribusi Daerah	1.650.000.000,00	2.000.391.891,00	350.391.891,00	121,24
	PUSKESMAS KARANGANYAR I	2.229.631.000,00	2.510.193.678,00	280.562.678,00	112,58
4	PENDAPATAN DAERAH	2.229.631.000,00	2.510.193.678,00	280.562.678,00	112,58
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.229.631.000,00	2.510.193.678,00	280.562.678,00	112,58
4.1.02	Retribusi Daerah	2.229.631.000,00	2.510.193.678,00	280.562.678,00	112,58
	PUSKESMAS KARANGANYAR II	2.100.000.000,00	2.589.688.734,00	489.688.734,00	123,32
4	PENDAPATAN DAERAH	2.100.000.000,00	2.589.688.734,00	489.688.734,00	123,32
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.100.000.000,00	2.589.688.734,00	489.688.734,00	123,32

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
4.1.02	Retribusi Daerah	2.100.000.000,00	2.589.688.734,00	489.688.734,00	123,32
	PUSKESMAS MIJEN I	2.100.000.000,00	2.582.362.321,00	482.362.321,00	122,97
4	PENDAPATAN DAERAH	2.100.000.000,00	2.582.362.321,00	482.362.321,00	122,97
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.100.000.000,00	2.582.362.321,00	482.362.321,00	122,97
4.1.02	Retribusi Daerah	2.100.000.000,00	2.582.362.321,00	482.362.321,00	122,97
	PUSKESMAS MIJEN II	1.420.742.286,00	1.537.616.755,00	116.874.469,00	108,23
4	PENDAPATAN DAERAH	1.420.742.286,00	1.537.616.755,00	116.874.469,00	108,23
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.420.742.286,00	1.537.616.755,00	116.874.469,00	108,23
4.1.02	Retribusi Daerah	1.420.742.286,00	1.537.616.755,00	116.874.469,00	108,23
	PUSKESMAS WEDUNG I	3.300.500.000,00	3.553.139.531,00	252.639.531,00	107,65
4	PENDAPATAN DAERAH	3.300.500.000,00	3.553.139.531,00	252.639.531,00	107,65
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.300.500.000,00	3.553.139.531,00	252.639.531,00	107,65
4.1.02	Retribusi Daerah	3.300.500.000,00	3.553.139.531,00	252.639.531,00	107,65
	PUSKESMAS WEDUNG II	2.506.455.000,00	2.813.862.430,00	307.407.430,00	112,26
4	PENDAPATAN DAERAH	2.506.455.000,00	2.813.862.430,00	307.407.430,00	112,26
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.506.455.000,00	2.813.862.430,00	307.407.430,00	112,26
4.1.02	Retribusi Daerah	2.506.455.000,00	2.813.862.430,00	307.407.430,00	112,26
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.555.750.000,00	6.224.467.654,00	2.668.717.654,00	175,05
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.555.750.000,00	6.224.467.654,00	2.668.717.654,00	175,05
4	PENDAPATAN DAERAH	3.555.750.000,00	6.224.467.654,00	2.668.717.654,00	175,05
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.555.750.000,00	6.224.467.654,00	2.668.717.654,00	175,05
4.1.02	Retribusi Daerah	3.555.750.000,00	6.224.356.654,00	2.668.606.654,00	175,05
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	111.000,00	111.000,00	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.405.039.480,00	13.214.971.773,00	809.932.293,00	106,53
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.800.000.000,00	2.889.104.212,00	1.089.104.212,00	160,51
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.800.000.000,00	2.889.104.212,00	1.089.104.212,00	160,51
4	PENDAPATAN DAERAH	1.800.000.000,00	2.889.104.212,00	1.089.104.212,00	160,51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.800.000.000,00	2.889.104.212,00	1.089.104.212,00	160,51
4.1.02	Retribusi Daerah	1.800.000.000,00	2.889.104.212,00	1.089.104.212,00	160,51
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	32.500.000,00	34.860.000,00	2.360.000,00	107,26
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	32.500.000,00	34.860.000,00	2.360.000,00	107,26
4	PENDAPATAN DAERAH	32.500.000,00	34.860.000,00	2.360.000,00	107,26
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.500.000,00	34.860.000,00	2.360.000,00	107,26
4.1.02	Retribusi Daerah	32.500.000,00	34.860.000,00	2.360.000,00	107,26
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.877.539.480,00	5.594.582.561,00	(282.956.919,00)	95,19
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.877.539.480,00	5.594.582.561,00	(282.956.919,00)	95,19
4	PENDAPATAN DAERAH	5.877.539.480,00	5.594.582.561,00	(282.956.919,00)	95,19
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.877.539.480,00	5.594.582.561,00	(282.956.919,00)	95,19
4.1.02	Retribusi Daerah	5.620.539.480,00	5.289.247.700,00	(331.291.780,00)	94,11
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	257.000.000,00	305.334.861,00	48.334.861,00	118,81
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	215.000.000,00	316.915.000,00	101.915.000,00	147,40
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	215.000.000,00	316.915.000,00	101.915.000,00	147,40
4	PENDAPATAN DAERAH	215.000.000,00	316.915.000,00	101.915.000,00	147,40

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	215.000.000,00	316.915.000,00	101.915.000,00	147,40
4.1.02	Retribusi Daerah	215.000.000,00	316.915.000,00	101.915.000,00	147,40
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.742.500.000,00	3.613.550.000,00	(128.950.000,00)	96,55
	DINAS PERHUBUNGAN	3.742.500.000,00	3.613.550.000,00	(128.950.000,00)	96,55
4	PENDAPATAN DAERAH	3.742.500.000,00	3.613.550.000,00	(128.950.000,00)	96,55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.742.500.000,00	3.613.550.000,00	(128.950.000,00)	96,55
4.1.02	Retribusi Daerah	3.742.500.000,00	3.613.550.000,00	(128.950.000,00)	96,55
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.000.000,00	56.560.000,00	6.560.000,00	113,12
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.000.000,00	56.560.000,00	6.560.000,00	113,12
4	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	56.560.000,00	6.560.000,00	113,12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	56.560.000,00	6.560.000,00	113,12
4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000,00	56.560.000,00	6.560.000,00	113,12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	687.500.000,00	709.400.000,00	21.900.000,00	103,19
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	687.500.000,00	709.400.000,00	21.900.000,00	103,19
4	PENDAPATAN DAERAH	687.500.000,00	709.400.000,00	21.900.000,00	103,19
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	687.500.000,00	709.400.000,00	21.900.000,00	103,19
4.1.02	Retribusi Daerah	660.000.000,00	681.900.000,00	21.900.000,00	103,32
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.179.700.000,00	1.390.791.317,00	211.091.317,00	117,89
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	783.200.000,00	789.080.000,00	5.880.000,00	100,75
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	783.200.000,00	789.080.000,00	5.880.000,00	100,75
4	PENDAPATAN DAERAH	783.200.000,00	789.080.000,00	5.880.000,00	100,75
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	783.200.000,00	789.080.000,00	5.880.000,00	100,75
4.1.02	Retribusi Daerah	783.200.000,00	789.080.000,00	5.880.000,00	100,75
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	396.500.000,00	601.711.317,00	205.211.317,00	151,76
	DINAS PARIWISATA	396.500.000,00	601.711.317,00	205.211.317,00	151,76
4	PENDAPATAN DAERAH	396.500.000,00	601.711.317,00	205.211.317,00	151,76
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	396.500.000,00	601.711.317,00	205.211.317,00	151,76
4.1.02	Retribusi Daerah	396.500.000,00	598.247.867,00	201.747.867,00	150,88
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	3.463.450,00	3.463.450,00	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.311.922.027.772,00	2.341.014.320.487,00	29.092.292.715,00	101,26
	KEUANGAN	2.311.875.527.772,00	2.340.971.520.487,00	29.095.992.715,00	101,26
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.311.875.527.772,00	2.340.971.520.487,00	29.095.992.715,00	101,26
4	PENDAPATAN DAERAH	2.311.875.527.772,00	2.340.971.520.487,00	29.095.992.715,00	101,26
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	338.954.937.497,00	414.189.649.110,00	75.234.711.613,00	122,20
4.1.01	Pajak Daerah	287.837.738.497,00	340.767.901.524,00	52.930.163.027,00	118,39
4.1.02	Retribusi Daerah	8.657.500.000,00	9.602.374.500,00	944.874.500,00	110,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.959.699.000,00	38.477.679.571,00	4.517.980.571,00	113,30
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.500.000.000,00	25.341.693.515,00	16.841.693.515,00	298,14
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.963.064.205.956,00	1.926.777.382.839,00	(36.286.823.117,00)	98,15
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.757.715.935.508,00	1.731.624.084.417,00	(26.091.851.091,00)	98,52
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	205.348.270.448,00	195.153.298.422,00	(10.194.972.026,00)	95,04
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.856.384.319,00	4.488.538,00	(9.851.895.781,00)	0,05

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	4.488.538,00	4.488.538,00	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.856.384.319,00	-	(9.856.384.319,00)	-
	KEPEGAWAIAN	46.500.000,00	42.800.000,00	(3.700.000,00)	92,04
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	46.500.000,00	42.800.000,00	(3.700.000,00)	92,04
4	PENDAPATAN DAERAH	46.500.000,00	42.800.000,00	(3.700.000,00)	92,04
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.500.000,00	42.800.000,00	(3.700.000,00)	92,04
4.1.02	Retribusi Daerah	46.500.000,00	42.800.000,00	(3.700.000,00)	92,04
	UNSUR KEWILAYAHAN	20.750.000,00	-	(20.750.000,00)	-
	KECAMATAN	20.750.000,00	-	(20.750.000,00)	-
	KECAMATAN DEMAK	20.750.000,00	-	(20.750.000,00)	-
4	PENDAPATAN DAERAH	20.750.000,00	-	(20.750.000,00)	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.750.000,00	-	(20.750.000,00)	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.750.000,00	-	(20.750.000,00)	-
		-	20.750.000,00	20.750.000,00	-
	KELURAHAN BINTORO	-	14.500.000,00	14.500.000,00	-
4	PENDAPATAN DAERAH	-	14.500.000,00	14.500.000,00	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	14.500.000,00	14.500.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	14.500.000,00	14.500.000,00	-
	KELURAHAN BETOKAN	-	6.250.000,00	6.250.000,00	-
4	PENDAPATAN DAERAH	-	6.250.000,00	6.250.000,00	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.250.000,00	6.250.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	6.250.000,00	6.250.000,00	-
5	Belanja	2.782.179.122.141,34	2.578.907.768.659,20	(203.271.353.482,14)	92,69
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.788.674.455.305,64	1.696.367.653.040,20	(92.306.802.265,44)	94,84
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	830.852.358.835,00	793.376.678.359,00	(37.475.680.476,00)	95,49
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	830.852.358.835,00	793.376.678.359,00	(37.475.680.476,00)	95,49
5	BELANJA DAERAH	830.852.358.835,00	793.376.678.359,00	(37.475.680.476,00)	95,49
5.1	BELANJA OPERASI	796.799.874.116,00	760.643.220.227,00	(36.156.653.889,00)	95,46
5.1.01	Belanja Pegawai	619.213.485.297,00	587.833.690.813,00	(31.379.794.484,00)	94,93
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.650.350.819,00	116.719.442.739,00	(2.930.908.080,00)	97,55
5.1.05	Belanja Hibah	53.960.038.000,00	52.967.286.675,00	(992.751.325,00)	98,16
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.976.000.000,00	3.122.800.000,00	(853.200.000,00)	78,54
5.2	BELANJA MODAL	34.052.484.719,00	32.733.458.132,00	(1.319.026.587,00)	96,13
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.239.493.925,00	17.045.188.388,00	(1.194.305.537,00)	93,45
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.446.367.000,00	4.392.382.800,00	(53.984.200,00)	98,79
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.366.623.794,00	11.295.886.944,00	(70.736.850,00)	99,38
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	607.525.465.986,84	575.003.532.642,20	(32.521.933.344,64)	94,65
	DINAS KESEHATAN DAERAH	238.911.630.524,50	226.249.251.958,00	(12.662.378.566,50)	94,70
5	BELANJA DAERAH	238.911.630.524,50	226.249.251.958,00	(12.662.378.566,50)	94,70
5.1	BELANJA OPERASI	227.587.473.719,50	215.129.649.958,00	(12.457.823.761,50)	94,53
5.1.01	Belanja Pegawai	136.702.944.545,00	128.342.616.362,00	(8.360.328.183,00)	93,88
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.884.529.174,50	86.787.033.596,00	(4.097.495.578,50)	95,49
5.2	BELANJA MODAL	11.324.156.805,00	11.119.602.000,00	(204.554.805,00)	98,19

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	934.296.805,00	842.197.000,00	(92.099.805,00)	90,14
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.389.860.000,00	10.277.405.000,00	(112.455.000,00)	98,92
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	172.239.505.153,35	163.498.180.002,00	(8.741.325.151,35)	94,92
5	BELANJA DAERAH	172.239.505.153,35	163.498.180.002,00	(8.741.325.151,35)	94,92
5.1	BELANJA OPERASI	137.058.309.153,35	134.224.568.163,00	(2.833.740.990,35)	97,93
5.1.01	Belanja Pegawai	39.132.000.000,00	55.107.446.085,00	15.975.446.085,00	140,82
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.926.309.153,35	79.117.122.078,00	(18.809.187.075,35)	80,79
5.2	BELANJA MODAL	35.181.196.000,00	29.273.611.839,00	(5.907.584.161,00)	83,21
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.511.196.000,00	22.844.085.187,00	(4.667.110.813,00)	83,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.020.000.000,00	5.014.451.292,00	(1.005.548.708,00)	83,30
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.615.000.000,00	1.415.075.360,00	(199.924.640,00)	87,62
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	-
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	99.352.578.451,99	92.529.605.409,20	(6.822.973.042,79)	93,13
5	BELANJA DAERAH	99.352.578.451,99	92.529.605.409,20	(6.822.973.042,79)	93,13
5.1	BELANJA OPERASI	89.252.578.451,99	86.476.125.664,20	(2.776.452.787,79)	96,89
5.1.01	Belanja Pegawai	15.698.480.000,00	27.890.922.590,00	12.192.442.590,00	177,67
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.554.098.451,99	58.585.203.074,20	(14.968.895.377,79)	79,65
5.2	BELANJA MODAL	10.100.000.000,00	6.053.479.745,00	(4.046.520.255,00)	59,94
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.100.000.000,00	5.010.610.276,00	(3.089.389.724,00)	61,86
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	1.042.869.469,00	(957.130.531,00)	52,14
	PUSKESMAS MRANGGEN I	3.219.042.763,00	2.995.373.437,00	(223.669.326,00)	93,05
5	BELANJA DAERAH	3.219.042.763,00	2.995.373.437,00	(223.669.326,00)	93,05
5.1	BELANJA OPERASI	3.068.042.763,00	2.868.629.326,00	(199.413.437,00)	93,50
5.1.01	Belanja Pegawai	1.516.161.450,00	1.500.895.547,00	(15.265.903,00)	98,99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.551.881.313,00	1.367.733.779,00	(184.147.534,00)	88,13
5.2	BELANJA MODAL	151.000.000,00	126.744.111,00	(24.255.889,00)	83,94
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.000.000,00	126.744.111,00	(14.255.889,00)	89,89
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-
	PUSKESMAS MRANGGEN II	2.708.202.138,00	2.634.227.374,00	(73.974.764,00)	97,27
5	BELANJA DAERAH	2.708.202.138,00	2.634.227.374,00	(73.974.764,00)	97,27
5.1	BELANJA OPERASI	2.574.202.138,00	2.513.597.588,00	(60.604.550,00)	97,65
5.1.01	Belanja Pegawai	1.421.519.000,00	1.380.519.180,00	(40.999.820,00)	97,12
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.683.138,00	1.133.078.408,00	(19.604.730,00)	98,30
5.2	BELANJA MODAL	134.000.000,00	120.629.786,00	(13.370.214,00)	90,02
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.000.000,00	31.000.000,00	(13.000.000,00)	70,45
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	89.629.786,00	(370.214,00)	99,59
	PUSKESMAS MRANGGEN III	3.789.545.478,00	3.411.317.244,00	(378.228.234,00)	90,02
5	BELANJA DAERAH	3.789.545.478,00	3.411.317.244,00	(378.228.234,00)	90,02
5.1	BELANJA OPERASI	3.567.145.478,00	3.301.867.245,00	(265.278.233,00)	92,56
5.1.01	Belanja Pegawai	1.876.266.000,00	1.675.038.300,00	(201.227.700,00)	89,28
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.690.879.478,00	1.626.828.945,00	(64.050.533,00)	96,21
5.2	BELANJA MODAL	222.400.000,00	109.449.999,00	(112.950.001,00)	49,21
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.400.000,00	109.449.999,00	(12.950.001,00)	89,42
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	-
	PUSKESMAS KARANGAWEN I	4.304.800.821,00	3.998.290.098,00	(306.510.723,00)	92,88

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5	BELANJA DAERAH	4.304.800.821,00	3.998.290.098,00	(306.510.723,00)	92,88
5.1	BELANJA OPERASI	4.009.650.821,00	3.793.392.897,00	(216.257.924,00)	94,61
5.1.01	Belanja Pegawai	2.153.668.000,00	2.096.660.046,00	(57.007.954,00)	97,35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.855.982.821,00	1.696.732.851,00	(159.249.970,00)	91,42
5.2	BELANJA MODAL	295.150.000,00	204.897.201,00	(90.252.799,00)	69,42
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.150.000,00	204.897.201,00	(90.252.799,00)	69,42
	PUSKESMAS KARANGAWEN II	4.000.375.753,00	3.899.481.904,00	(100.893.849,00)	97,48
5	BELANJA DAERAH	4.000.375.753,00	3.899.481.904,00	(100.893.849,00)	97,48
5.1	BELANJA OPERASI	3.855.575.753,00	3.794.690.905,00	(60.884.848,00)	98,42
5.1.01	Belanja Pegawai	2.289.160.000,00	2.309.018.761,00	19.858.761,00	100,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.566.415.753,00	1.485.672.144,00	(80.743.609,00)	94,85
5.2	BELANJA MODAL	144.800.000,00	104.790.999,00	(40.009.001,00)	72,37
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.800.000,00	104.790.999,00	(35.009.001,00)	74,96
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-
	PUSKESMAS GUNTUR I	5.091.527.829,00	4.962.967.492,00	(128.560.337,00)	97,48
5	BELANJA DAERAH	5.091.527.829,00	4.962.967.492,00	(128.560.337,00)	97,48
5.1	BELANJA OPERASI	4.672.027.829,00	4.551.003.492,00	(121.024.337,00)	97,41
5.1.01	Belanja Pegawai	2.611.290.000,00	2.501.221.244,00	(110.068.756,00)	95,78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.060.737.829,00	2.049.782.248,00	(10.955.581,00)	99,47
5.2	BELANJA MODAL	419.500.000,00	411.964.000,00	(7.536.000,00)	98,20
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.500.000,00	213.580.000,00	(6.920.000,00)	96,86
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.000.000,00	198.384.000,00	(616.000,00)	99,69
	PUSKESMAS GUNTUR II	3.325.985.173,00	3.172.721.828,00	(153.263.345,00)	95,39
5	BELANJA DAERAH	3.325.985.173,00	3.172.721.828,00	(153.263.345,00)	95,39
5.1	BELANJA OPERASI	3.178.485.173,00	3.084.091.780,00	(94.393.393,00)	97,03
5.1.01	Belanja Pegawai	1.925.137.000,00	1.911.780.150,00	(13.356.850,00)	99,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.253.348.173,00	1.172.311.630,00	(81.036.543,00)	93,53
5.2	BELANJA MODAL	147.500.000,00	88.630.048,00	(58.869.952,00)	60,09
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.500.000,00	88.630.048,00	(58.869.952,00)	60,09
	PUSKESMAS SAYUNG I	3.482.416.355,00	3.295.208.832,00	(187.207.523,00)	94,62
5	BELANJA DAERAH	3.482.416.355,00	3.295.208.832,00	(187.207.523,00)	94,62
5.1	BELANJA OPERASI	3.377.116.355,00	3.202.983.832,00	(174.132.523,00)	94,84
5.1.01	Belanja Pegawai	1.943.817.000,00	1.921.865.490,00	(21.951.510,00)	98,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.433.299.355,00	1.281.118.342,00	(152.181.013,00)	89,38
5.2	BELANJA MODAL	105.300.000,00	92.225.000,00	(13.075.000,00)	87,58
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.300.000,00	92.225.000,00	(13.075.000,00)	87,58
	PUSKESMAS SAYUNG II	3.441.344.483,00	3.313.469.215,00	(127.875.268,00)	96,28
5	BELANJA DAERAH	3.441.344.483,00	3.313.469.215,00	(127.875.268,00)	96,28
5.1	BELANJA OPERASI	3.250.344.483,00	3.127.825.423,00	(122.519.060,00)	96,23
5.1.01	Belanja Pegawai	1.771.634.045,00	1.666.595.734,00	(105.038.311,00)	94,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.478.710.438,00	1.461.229.689,00	(17.480.749,00)	98,82
5.2	BELANJA MODAL	191.000.000,00	185.643.792,00	(5.356.208,00)	97,20
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.000.000,00	185.643.792,00	(5.356.208,00)	97,20
	PUSKESMAS KARANGTENGAH	3.845.676.253,00	3.632.490.452,00	(213.185.801,00)	94,46
5	BELANJA DAERAH	3.845.676.253,00	3.632.490.452,00	(213.185.801,00)	94,46

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.1	BELANJA OPERASI	3.725.176.253,00	3.542.913.452,00	(182.262.801,00)	95,11
5.1.01	Belanja Pegawai	2.199.092.203,00	2.089.178.889,00	(109.913.314,00)	95,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.526.084.050,00	1.453.734.563,00	(72.349.487,00)	95,26
5.2	BELANJA MODAL	120.500.000,00	89.577.000,00	(30.923.000,00)	74,34
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.500.000,00	89.577.000,00	(30.923.000,00)	74,34
	PUSKESMAS BONANG I	5.806.179.394,00	5.729.477.161,00	(76.702.233,00)	98,68
5	BELANJA DAERAH	5.806.179.394,00	5.729.477.161,00	(76.702.233,00)	98,68
5.1	BELANJA OPERASI	5.309.659.394,00	5.256.055.410,00	(53.603.984,00)	98,99
5.1.01	Belanja Pegawai	2.941.666.000,00	2.891.404.958,00	(50.261.042,00)	98,29
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.367.993.394,00	2.364.650.452,00	(3.342.942,00)	99,86
5.2	BELANJA MODAL	496.520.000,00	473.421.751,00	(23.098.249,00)	95,35
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	480.520.000,00	458.571.751,00	(21.948.249,00)	95,43
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.000.000,00	14.850.000,00	(1.150.000,00)	92,81
	PUSKESMAS BONANG II	3.871.568.301,00	3.843.126.474,00	(28.441.827,00)	99,27
5	BELANJA DAERAH	3.871.568.301,00	3.843.126.474,00	(28.441.827,00)	99,27
5.1	BELANJA OPERASI	3.641.068.301,00	3.613.153.694,00	(27.914.607,00)	99,23
5.1.01	Belanja Pegawai	2.194.082.000,00	2.193.253.264,00	(828.736,00)	99,96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.446.986.301,00	1.419.900.430,00	(27.085.871,00)	98,13
5.2	BELANJA MODAL	230.500.000,00	229.972.780,00	(527.220,00)	99,77
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.500.000,00	229.972.780,00	(527.220,00)	99,77
	PUSKESMAS DEMAK I	2.191.695.161,00	2.162.970.365,00	(28.724.796,00)	98,69
5	BELANJA DAERAH	2.191.695.161,00	2.162.970.365,00	(28.724.796,00)	98,69
5.1	BELANJA OPERASI	2.070.195.161,00	2.046.671.299,00	(23.523.862,00)	98,86
5.1.01	Belanja Pegawai	1.023.008.012,00	1.044.916.934,00	21.908.922,00	102,14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.047.187.149,00	1.001.754.365,00	(45.432.784,00)	95,66
5.2	BELANJA MODAL	121.500.000,00	116.299.066,00	(5.200.934,00)	95,72
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.500.000,00	116.299.066,00	(5.200.934,00)	95,72
	PUSKESMAS DEMAK II	2.394.173.869,00	2.321.081.685,00	(73.092.184,00)	96,95
5	BELANJA DAERAH	2.394.173.869,00	2.321.081.685,00	(73.092.184,00)	96,95
5.1	BELANJA OPERASI	2.295.873.869,00	2.244.481.685,00	(51.392.184,00)	97,76
5.1.01	Belanja Pegawai	1.323.275.000,00	1.302.155.445,00	(21.119.555,00)	98,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.598.869,00	942.326.240,00	(30.272.629,00)	96,89
5.2	BELANJA MODAL	98.300.000,00	76.600.000,00	(21.700.000,00)	77,92
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.300.000,00	76.600.000,00	(21.700.000,00)	77,92
	PUSKESMAS DEMAK III	2.186.402.867,00	2.095.990.208,00	(90.412.659,00)	95,86
5	BELANJA DAERAH	2.186.402.867,00	2.095.990.208,00	(90.412.659,00)	95,86
5.1	BELANJA OPERASI	2.144.902.867,00	2.059.065.208,00	(85.837.659,00)	96,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.119.756.405,00	1.086.806.599,00	(32.949.806,00)	97,06
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.025.146.462,00	972.258.609,00	(52.887.853,00)	94,84
5.2	BELANJA MODAL	41.500.000,00	36.925.000,00	(4.575.000,00)	88,98
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.500.000,00	36.925.000,00	(4.575.000,00)	88,98
	PUSKESMAS WONOSALAM I	3.707.444.206,00	3.351.701.097,00	(355.743.109,00)	90,40
5	BELANJA DAERAH	3.707.444.206,00	3.351.701.097,00	(355.743.109,00)	90,40
5.1	BELANJA OPERASI	3.430.997.851,00	3.120.755.429,00	(310.242.422,00)	90,96
5.1.01	Belanja Pegawai	1.638.510.000,00	1.645.574.729,00	7.064.729,00	100,43

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.792.487.851,00	1.475.180.700,00	(317.307.151,00)	82,30
5.2	BELANJA MODAL	276.446.355,00	230.945.668,00	(45.500.687,00)	83,54
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.446.355,00	230.945.668,00	(45.500.687,00)	83,54
	PUSKESMAS WONOSALAM II	3.990.642.198,00	3.813.928.182,00	(176.714.016,00)	95,57
5	BELANJA DAERAH	3.990.642.198,00	3.813.928.182,00	(176.714.016,00)	95,57
5.1	BELANJA OPERASI	3.561.958.098,00	3.472.422.998,00	(89.535.100,00)	97,49
5.1.01	Belanja Pegawai	1.680.578.168,00	1.657.051.004,00	(23.527.164,00)	98,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.881.379.930,00	1.815.371.994,00	(66.007.936,00)	96,49
5.2	BELANJA MODAL	428.684.100,00	341.505.184,00	(87.178.916,00)	79,66
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	428.684.100,00	341.505.184,00	(87.178.916,00)	79,66
	PUSKESMAS DEMPET	4.805.833.118,00	4.503.643.765,00	(302.189.353,00)	93,71
5	BELANJA DAERAH	4.805.833.118,00	4.503.643.765,00	(302.189.353,00)	93,71
5.1	BELANJA OPERASI	4.527.942.893,00	4.254.156.172,00	(273.786.721,00)	93,95
5.1.01	Belanja Pegawai	2.605.846.051,00	2.512.701.453,00	(93.144.598,00)	96,43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.922.096.842,00	1.741.454.719,00	(180.642.123,00)	90,60
5.2	BELANJA MODAL	277.890.225,00	249.487.593,00	(28.402.632,00)	89,78
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.250.552,00	177.051.614,00	(14.198.938,00)	92,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.639.673,00	72.435.979,00	(14.203.694,00)	83,61
	PUSKESMAS KEBONAGUNG	3.690.058.212,00	3.618.867.423,00	(71.190.789,00)	98,07
5	BELANJA DAERAH	3.690.058.212,00	3.618.867.423,00	(71.190.789,00)	98,07
5.1	BELANJA OPERASI	3.323.758.212,00	3.277.760.954,00	(45.997.258,00)	98,62
5.1.01	Belanja Pegawai	1.602.518.000,00	1.582.948.120,00	(19.569.880,00)	98,78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.721.240.212,00	1.694.812.834,00	(26.427.378,00)	98,46
5.2	BELANJA MODAL	366.300.000,00	341.106.469,00	(25.193.531,00)	93,12
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	366.300.000,00	341.106.469,00	(25.193.531,00)	93,12
	PUSKESMAS GAJAH I	3.706.012.672,00	3.615.892.991,00	(90.119.681,00)	97,57
5	BELANJA DAERAH	3.706.012.672,00	3.615.892.991,00	(90.119.681,00)	97,57
5.1	BELANJA OPERASI	3.479.012.672,00	3.417.438.205,00	(61.574.467,00)	98,23
5.1.01	Belanja Pegawai	1.799.952.252,00	1.765.813.114,00	(34.139.138,00)	98,10
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.679.060.420,00	1.651.625.091,00	(27.435.329,00)	98,37
5.2	BELANJA MODAL	227.000.000,00	198.454.786,00	(28.545.214,00)	87,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.000.000,00	178.613.786,00	(28.386.214,00)	86,29
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.841.000,00	(159.000,00)	99,21
	PUSKESMAS GAJAH II	2.607.551.818,00	2.581.078.980,00	(26.472.838,00)	98,98
5	BELANJA DAERAH	2.607.551.818,00	2.581.078.980,00	(26.472.838,00)	98,98
5.1	BELANJA OPERASI	2.508.951.818,00	2.484.917.180,00	(24.034.638,00)	99,04
5.1.01	Belanja Pegawai	1.241.387.000,00	1.227.292.909,00	(14.094.091,00)	98,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.267.564.818,00	1.257.624.271,00	(9.940.547,00)	99,22
5.2	BELANJA MODAL	98.600.000,00	96.161.800,00	(2.438.200,00)	97,53
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.600.000,00	96.161.800,00	(2.438.200,00)	97,53
	PUSKESMAS KARANGANYAR I	3.283.381.643,00	3.234.933.896,00	(48.447.747,00)	98,52
5	BELANJA DAERAH	3.283.381.643,00	3.234.933.896,00	(48.447.747,00)	98,52
5.1	BELANJA OPERASI	3.154.881.643,00	3.108.833.896,00	(46.047.747,00)	98,54
5.1.01	Belanja Pegawai	1.793.746.000,00	1.781.935.647,00	(11.810.353,00)	99,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.361.135.643,00	1.326.898.249,00	(34.237.394,00)	97,48



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.2	BELANJA MODAL	128.500.000,00	126.100.000,00	(2.400.000,00)	98,13
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.500.000,00	126.100.000,00	(2.400.000,00)	98,13
	PUSKESMAS KARANGANYAR II	3.359.925.139,00	3.107.450.848,00	(252.474.291,00)	92,49
5	BELANJA DAERAH	3.359.925.139,00	3.107.450.848,00	(252.474.291,00)	92,49
5.1	BELANJA OPERASI	3.006.725.139,00	2.971.738.848,00	(34.986.291,00)	98,84
5.1.01	Belanja Pegawai	1.593.226.000,00	1.568.875.410,00	(24.350.590,00)	98,47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.413.499.139,00	1.402.863.438,00	(10.635.701,00)	99,25
5.2	BELANJA MODAL	353.200.000,00	135.712.000,00	(217.488.000,00)	38,42
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.200.000,00	135.712.000,00	(19.488.000,00)	87,44
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	-	(198.000.000,00)	-
	PUSKESMAS MIJEN I	3.378.058.758,00	3.211.125.136,00	(166.933.622,00)	95,06
5	BELANJA DAERAH	3.378.058.758,00	3.211.125.136,00	(166.933.622,00)	95,06
5.1	BELANJA OPERASI	3.072.206.037,00	2.978.762.910,00	(93.443.127,00)	96,96
5.1.01	Belanja Pegawai	1.507.112.000,00	1.494.088.169,00	(13.023.831,00)	99,14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.565.094.037,00	1.484.674.741,00	(80.419.296,00)	94,86
5.2	BELANJA MODAL	305.852.721,00	232.362.226,00	(73.490.495,00)	75,97
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.500.000,00	48.605.000,00	(7.895.000,00)	86,03
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	249.352.721,00	183.757.226,00	(65.595.495,00)	73,69
	PUSKESMAS MIJEN II	2.366.903.196,00	2.296.766.921,00	(70.136.275,00)	97,04
5	BELANJA DAERAH	2.366.903.196,00	2.296.766.921,00	(70.136.275,00)	97,04
5.1	BELANJA OPERASI	2.241.903.196,00	2.173.826.920,00	(68.076.276,00)	96,96
5.1.01	Belanja Pegawai	1.195.794.000,00	1.154.542.591,00	(41.251.409,00)	96,55
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.046.109.196,00	1.019.284.329,00	(26.824.867,00)	97,44
5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	122.940.001,00	(2.059.999,00)	98,35
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	122.940.001,00	(2.059.999,00)	98,35
	PUSKESMAS WEDUNG I	4.824.101.717,00	4.347.398.691,00	(476.703.026,00)	90,12
5	BELANJA DAERAH	4.824.101.717,00	4.347.398.691,00	(476.703.026,00)	90,12
5.1	BELANJA OPERASI	4.359.101.717,00	3.934.951.942,00	(424.149.775,00)	90,27
5.1.01	Belanja Pegawai	2.270.129.000,00	2.106.226.130,00	(163.902.870,00)	92,78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.088.972.717,00	1.828.725.812,00	(260.246.905,00)	87,54
5.2	BELANJA MODAL	465.000.000,00	412.446.749,00	(52.553.251,00)	88,70
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.000.000,00	358.166.749,00	(51.833.251,00)	87,36
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	44.500.000,00	(500.000,00)	98,89
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	9.780.000,00	(220.000,00)	97,80
	PUSKESMAS WEDUNG II	3.642.902.542,00	3.575.513.574,00	(67.388.968,00)	98,15
5	BELANJA DAERAH	3.642.902.542,00	3.575.513.574,00	(67.388.968,00)	98,15
5.1	BELANJA OPERASI	3.355.402.542,00	3.296.975.324,00	(58.427.218,00)	98,26
5.1.01	Belanja Pegawai	1.760.296.000,00	1.725.773.820,00	(34.522.180,00)	98,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.106.542,00	1.571.201.504,00	(23.905.038,00)	98,50
5.2	BELANJA MODAL	287.500.000,00	278.538.250,00	(8.961.750,00)	96,88
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.500.000,00	274.188.250,00	(8.311.750,00)	97,06
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	4.350.000,00	(650.000,00)	87,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	214.749.489.753,00	197.811.114.693,00	(16.938.375.060,00)	92,11
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	214.749.489.753,00	197.811.114.693,00	(16.938.375.060,00)	92,11

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5	BELANJA DAERAH	214.749.489.753,00	197.811.114.693,00	(16.938.375.060,00)	92,11
5.1	BELANJA OPERASI	118.250.740.561,00	105.588.183.341,00	(12.662.557.220,00)	89,29
5.1.01	Belanja Pegawai	16.333.360.196,00	14.672.133.382,00	(1.661.226.814,00)	89,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.672.380.365,00	82.911.752.259,00	(10.760.628.106,00)	88,51
5.1.05	Belanja Hibah	8.245.000.000,00	8.004.297.700,00	(240.702.300,00)	97,08
5.2	BELANJA MODAL	96.498.749.192,00	92.222.931.352,00	(4.275.817.840,00)	95,57
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.207.099.885,00	1.080.608.652,00	(126.491.233,00)	89,52
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.354.507.000,00	11.487.293.000,00	(1.867.214.000,00)	86,02
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.937.142.307,00	79.655.029.700,00	(2.282.112.607,00)	97,21
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	84.288.576.409,00	83.092.752.146,00	(1.195.824.263,00)	98,58
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	84.288.576.409,00	83.092.752.146,00	(1.195.824.263,00)	98,58
5	BELANJA DAERAH	84.288.576.409,00	83.092.752.146,00	(1.195.824.263,00)	98,58
5.1	BELANJA OPERASI	78.721.476.409,00	77.596.126.085,00	(1.125.350.324,00)	98,57
5.1.01	Belanja Pegawai	5.076.730.509,00	4.616.555.662,00	(460.174.847,00)	90,94
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.204.745.900,00	66.554.570.423,00	(650.175.477,00)	99,03
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.440.000.000,00	6.425.000.000,00	(15.000.000,00)	99,77
5.2	BELANJA MODAL	5.567.100.000,00	5.496.626.061,00	(70.473.939,00)	98,73
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	567.100.000,00	513.687.061,00	(53.412.939,00)	90,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.632.000,00	(368.000,00)	99,63
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.900.000.000,00	4.883.307.000,00	(16.693.000,00)	99,66
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23.317.788.713,00	21.137.448.561,00	(2.180.340.152,00)	90,65
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.607.528.157,00	13.373.797.443,00	(1.233.730.714,00)	91,55
5	BELANJA DAERAH	14.607.528.157,00	13.373.797.443,00	(1.233.730.714,00)	91,55
5.1	BELANJA OPERASI	14.226.008.507,00	13.035.716.241,00	(1.190.292.266,00)	91,63
5.1.01	Belanja Pegawai	7.433.075.727,00	6.551.891.748,00	(881.183.979,00)	88,15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.792.932.780,00	6.483.824.493,00	(309.108.287,00)	95,45
5.2	BELANJA MODAL	381.519.650,00	338.081.202,00	(43.438.448,00)	88,61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	381.519.650,00	338.081.202,00	(43.438.448,00)	88,61
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.710.260.556,00	7.763.651.118,00	(946.609.438,00)	89,13
5	BELANJA DAERAH	8.710.260.556,00	7.763.651.118,00	(946.609.438,00)	89,13
5.1	BELANJA OPERASI	8.326.504.806,00	7.403.460.315,00	(923.044.491,00)	88,91
5.1.01	Belanja Pegawai	4.644.551.956,00	3.995.558.862,00	(648.993.094,00)	86,03
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.681.952.850,00	3.407.901.453,00	(274.051.397,00)	92,56
5.2	BELANJA MODAL	383.755.750,00	360.190.803,00	(23.564.947,00)	93,86
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	383.755.750,00	360.190.803,00	(23.564.947,00)	93,86
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	27.940.775.608,80	25.946.126.639,00	(1.994.648.969,80)	92,86
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.940.775.608,80	25.946.126.639,00	(1.994.648.969,80)	92,86
5	BELANJA DAERAH	27.940.775.608,80	25.946.126.639,00	(1.994.648.969,80)	92,86
5.1	BELANJA OPERASI	26.951.411.048,80	24.976.788.387,00	(1.974.622.661,80)	92,67
5.1.01	Belanja Pegawai	4.950.864.657,00	3.995.852.738,00	(955.011.919,00)	80,71
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.755.559.391,80	18.933.313.649,00	(822.245.742,80)	95,84
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.244.987.000,00	2.047.622.000,00	(197.365.000,00)	91,21
5.2	BELANJA MODAL	989.364.560,00	969.338.252,00	(20.026.308,00)	97,98

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	989.364.560,00	969.338.252,00	(20.026.308,00)	97,98
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	196.451.674.558,70	184.160.274.992,00	(12.291.399.566,70)	93,74
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.527.068.003,70	12.169.156.193,00	(2.357.911.810,70)	83,77
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	14.527.068.003,70	12.169.156.193,00	(2.357.911.810,70)	83,77
5	BELANJA DAERAH	14.527.068.003,70	12.169.156.193,00	(2.357.911.810,70)	83,77
5.1	BELANJA OPERASI	14.338.542.003,70	11.991.550.190,00	(2.346.991.813,70)	83,63
5.1.01	Belanja Pegawai	7.233.269.226,00	5.196.185.311,00	(2.037.083.915,00)	71,84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.035.272.777,70	6.725.364.879,00	(309.907.898,70)	95,59
5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00
5.2	BELANJA MODAL	188.526.000,00	177.606.003,00	(10.919.997,00)	94,21
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.526.000,00	177.606.003,00	(10.919.997,00)	94,21
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	974.345.000,00	929.575.314,00	(44.769.686,00)	95,41
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	974.345.000,00	929.575.314,00	(44.769.686,00)	95,41
5	BELANJA DAERAH	974.345.000,00	929.575.314,00	(44.769.686,00)	95,41
5.1	BELANJA OPERASI	974.345.000,00	929.575.314,00	(44.769.686,00)	95,41
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.345.000,00	929.575.314,00	(44.769.686,00)	95,41
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	18.573.183.130,00	17.284.969.793,00	(1.288.213.337,00)	93,06
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	18.573.183.130,00	17.284.969.793,00	(1.288.213.337,00)	93,06
5	BELANJA DAERAH	18.573.183.130,00	17.284.969.793,00	(1.288.213.337,00)	93,06
5.1	BELANJA OPERASI	18.347.865.530,00	17.065.364.543,00	(1.282.500.987,00)	93,01
5.1.01	Belanja Pegawai	15.276.198.830,00	14.143.207.855,00	(1.132.990.975,00)	92,58
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.071.666.700,00	2.922.156.688,00	(149.510.012,00)	95,13
5.2	BELANJA MODAL	225.317.600,00	219.605.250,00	(5.712.350,00)	97,46
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.317.600,00	219.605.250,00	(5.712.350,00)	97,46
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	361.350.000,00	330.064.000,00	(31.286.000,00)	91,34
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	361.350.000,00	330.064.000,00	(31.286.000,00)	91,34
5	BELANJA DAERAH	361.350.000,00	330.064.000,00	(31.286.000,00)	91,34
5.1	BELANJA OPERASI	361.350.000,00	330.064.000,00	(31.286.000,00)	91,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.350.000,00	330.064.000,00	(31.286.000,00)	91,34
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.823.954.024,00	25.099.409.659,00	(1.724.544.365,00)	93,57
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.823.954.024,00	25.099.409.659,00	(1.724.544.365,00)	93,57
5	BELANJA DAERAH	26.823.954.024,00	25.099.409.659,00	(1.724.544.365,00)	93,57
5.1	BELANJA OPERASI	25.158.495.024,00	23.472.183.065,00	(1.686.311.959,00)	93,30
5.1.01	Belanja Pegawai	10.749.416.724,00	9.646.383.535,00	(1.103.033.189,00)	89,74
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.409.078.300,00	13.825.799.530,00	(583.278.770,00)	95,95
5.2	BELANJA MODAL	1.665.459.000,00	1.627.226.594,00	(38.232.406,00)	97,70
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.450.791.000,00	1.413.724.694,00	(37.066.306,00)	97,45
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	214.668.000,00	213.501.900,00	(1.166.100,00)	99,46
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.414.655.247,00	9.617.029.880,00	(797.625.367,00)	92,34
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.414.655.247,00	9.617.029.880,00	(797.625.367,00)	92,34
5	BELANJA DAERAH	10.414.655.247,00	9.617.029.880,00	(797.625.367,00)	92,34
5.1	BELANJA OPERASI	9.759.224.747,00	9.012.329.882,00	(746.894.865,00)	92,35

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.1.01	Belanja Pegawai	4.605.001.947,00	4.064.246.640,00	(540.755.307,00)	88,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.154.222.800,00	4.948.083.242,00	(206.139.558,00)	96,00
5.2	BELANJA MODAL	655.430.500,00	604.699.998,00	(50.730.502,00)	92,26
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	655.430.500,00	604.699.998,00	(50.730.502,00)	92,26
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.429.828.225,00	17.154.614.083,00	(1.275.214.142,00)	93,08
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.429.828.225,00	17.154.614.083,00	(1.275.214.142,00)	93,08
5	BELANJA DAERAH	18.429.828.225,00	17.154.614.083,00	(1.275.214.142,00)	93,08
5.1	BELANJA OPERASI	17.965.614.325,00	16.718.356.583,00	(1.247.257.742,00)	93,06
5.1.01	Belanja Pegawai	5.513.843.225,00	4.658.024.351,00	(855.818.874,00)	84,48
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.451.771.100,00	12.060.332.232,00	(391.438.868,00)	96,86
5.2	BELANJA MODAL	464.213.900,00	436.257.500,00	(27.956.400,00)	93,98
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	464.213.900,00	436.257.500,00	(27.956.400,00)	93,98
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.793.526.900,00	13.477.316.634,00	(316.210.266,00)	97,71
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.793.526.900,00	13.477.316.634,00	(316.210.266,00)	97,71
5	BELANJA DAERAH	13.793.526.900,00	13.477.316.634,00	(316.210.266,00)	97,71
5.1	BELANJA OPERASI	13.775.926.900,00	13.463.322.634,00	(312.604.266,00)	97,73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.775.926.900,00	13.463.322.634,00	(312.604.266,00)	97,73
5.2	BELANJA MODAL	17.600.000,00	13.994.000,00	(3.606.000,00)	79,51
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.600.000,00	13.994.000,00	(3.606.000,00)	79,51
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	43.882.697.903,00	42.687.415.136,00	(1.195.282.767,00)	97,28
	DINAS PERHUBUNGAN	43.882.697.903,00	42.687.415.136,00	(1.195.282.767,00)	97,28
5	BELANJA DAERAH	43.882.697.903,00	42.687.415.136,00	(1.195.282.767,00)	97,28
5.1	BELANJA OPERASI	32.725.323.903,00	31.670.826.977,00	(1.054.496.926,00)	96,78
5.1.01	Belanja Pegawai	4.928.302.003,00	4.351.300.519,00	(577.001.484,00)	88,29
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.797.021.900,00	27.319.526.458,00	(477.495.442,00)	98,28
5.2	BELANJA MODAL	11.157.374.000,00	11.016.588.159,00	(140.785.841,00)	98,74
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.159.874.000,00	10.020.168.909,00	(139.705.091,00)	98,62
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	985.000.000,00	984.015.000,00	(985.000,00)	99,90
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.500.000,00	12.404.250,00	(95.750,00)	99,23
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.574.423.184,00	10.940.510.391,00	(633.912.793,00)	94,52
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.574.423.184,00	10.940.510.391,00	(633.912.793,00)	94,52
5	BELANJA DAERAH	11.574.423.184,00	10.940.510.391,00	(633.912.793,00)	94,52
5.1	BELANJA OPERASI	10.469.031.584,00	9.880.351.801,00	(588.679.783,00)	94,38
5.1.01	Belanja Pegawai	5.133.520.959,00	4.667.810.969,00	(465.709.990,00)	90,93
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.335.510.625,00	5.212.540.832,00	(122.969.793,00)	97,70
5.2	BELANJA MODAL	1.105.391.600,00	1.060.158.590,00	(45.233.010,00)	95,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.105.391.600,00	1.060.158.590,00	(45.233.010,00)	95,91
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.492.990.000,00	2.440.717.069,00	(52.272.931,00)	97,90
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.492.990.000,00	2.440.717.069,00	(52.272.931,00)	97,90
5	BELANJA DAERAH	2.492.990.000,00	2.440.717.069,00	(52.272.931,00)	97,90

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.1	BELANJA OPERASI	2.462.990.000,00	2.417.962.069,00	(45.027.931,00)	98,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.412.990.000,00	1.367.962.069,00	(45.027.931,00)	96,81
5.1.05	Belanja Hibah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-	100,00
5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	22.755.000,00	(7.245.000,00)	75,85
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	22.755.000,00	(7.245.000,00)	75,85
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.251.916.371,00	5.656.230.272,00	(595.686.099,00)	90,47
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.251.916.371,00	5.656.230.272,00	(595.686.099,00)	90,47
5	BELANJA DAERAH	6.251.916.371,00	5.656.230.272,00	(595.686.099,00)	90,47
5.1	BELANJA OPERASI	6.251.916.371,00	5.656.230.272,00	(595.686.099,00)	90,47
5.1.01	Belanja Pegawai	4.641.980.225,00	4.101.181.092,00	(540.799.133,00)	88,35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.609.936.146,00	1.555.049.180,00	(54.886.966,00)	96,59
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19.182.424.603,00	17.809.690.283,00	(1.372.734.320,00)	92,84
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	19.182.424.603,00	17.809.690.283,00	(1.372.734.320,00)	92,84
5	BELANJA DAERAH	19.182.424.603,00	17.809.690.283,00	(1.372.734.320,00)	92,84
5.1	BELANJA OPERASI	16.148.245.603,00	14.813.667.634,00	(1.334.577.969,00)	91,74
5.1.01	Belanja Pegawai	3.690.539.353,00	3.096.461.633,00	(594.077.720,00)	83,90
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.307.706.250,00	7.684.692.845,00	(623.013.405,00)	92,50
5.1.05	Belanja Hibah	4.150.000.000,00	4.032.513.156,00	(117.486.844,00)	97,17
5.2	BELANJA MODAL	3.034.179.000,00	2.996.022.649,00	(38.156.351,00)	98,74
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	464.179.000,00	440.255.499,00	(23.923.501,00)	94,85
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.570.000.000,00	2.555.767.150,00	(14.232.850,00)	99,45
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	128.440.000,00	127.172.847,00	(1.267.153,00)	99,01
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	128.440.000,00	127.172.847,00	(1.267.153,00)	99,01
5	BELANJA DAERAH	128.440.000,00	127.172.847,00	(1.267.153,00)	99,01
5.1	BELANJA OPERASI	128.440.000,00	127.172.847,00	(1.267.153,00)	99,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.440.000,00	127.172.847,00	(1.267.153,00)	99,01
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	91.235.000,00	89.983.926,00	(1.251.074,00)	98,63
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	91.235.000,00	89.983.926,00	(1.251.074,00)	98,63
5	BELANJA DAERAH	91.235.000,00	89.983.926,00	(1.251.074,00)	98,63
5.1	BELANJA OPERASI	91.235.000,00	89.983.926,00	(1.251.074,00)	98,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.235.000,00	89.983.926,00	(1.251.074,00)	98,63
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.104.070.000,00	1.919.820.954,00	(184.249.046,00)	91,24
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.104.070.000,00	1.919.820.954,00	(184.249.046,00)	91,24
5	BELANJA DAERAH	2.104.070.000,00	1.919.820.954,00	(184.249.046,00)	91,24
5.1	BELANJA OPERASI	1.904.070.000,00	1.719.925.954,00	(184.144.046,00)	90,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.804.070.000,00	1.619.925.954,00	(184.144.046,00)	89,79
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.895.000,00	(105.000,00)	99,95
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	199.895.000,00	(105.000,00)	99,95
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.481.761.968,00	6.094.517.784,00	(387.244.184,00)	94,03
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.481.761.968,00	6.094.517.784,00	(387.244.184,00)	94,03
5	BELANJA DAERAH	6.481.761.968,00	6.094.517.784,00	(387.244.184,00)	94,03
5.1	BELANJA OPERASI	5.978.270.168,00	5.613.916.888,00	(364.353.280,00)	93,91

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.1.01	Belanja Pegawai	3.782.213.168,00	3.572.758.721,00	(209.454.447,00)	94,46
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.196.057.000,00	2.041.158.167,00	(154.898.833,00)	92,95
5.2	BELANJA MODAL	503.491.800,00	480.600.896,00	(22.890.904,00)	95,45
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.741.800,00	299.694.896,00	(21.046.904,00)	93,44
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	182.750.000,00	180.906.000,00	(1.844.000,00)	98,99
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	363.805.000,00	332.080.774,00	(31.724.226,00)	91,28
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	363.805.000,00	332.080.774,00	(31.724.226,00)	91,28
5	BELANJA DAERAH	363.805.000,00	332.080.774,00	(31.724.226,00)	91,28
5.1	BELANJA OPERASI	273.349.200,00	245.607.775,00	(27.741.425,00)	89,85
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.349.200,00	245.607.775,00	(27.741.425,00)	89,85
5.2	BELANJA MODAL	90.455.800,00	86.472.999,00	(3.982.801,00)	95,60
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.455.800,00	86.472.999,00	(3.982.801,00)	95,60
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	77.792.899.213,00	72.024.228.509,00	(5.768.670.704,00)	92,58
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.093.195.297,00	9.280.678.631,00	(812.516.666,00)	91,95
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.093.195.297,00	9.280.678.631,00	(812.516.666,00)	91,95
5	BELANJA DAERAH	10.093.195.297,00	9.280.678.631,00	(812.516.666,00)	91,95
5.1	BELANJA OPERASI	10.031.171.297,00	9.228.278.631,00	(802.892.666,00)	92,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.048.203.967,00	3.368.356.259,00	(679.847.708,00)	83,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.982.967.330,00	5.859.922.372,00	(123.044.958,00)	97,94
5.2	BELANJA MODAL	62.024.000,00	52.400.000,00	(9.624.000,00)	84,48
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.024.000,00	52.400.000,00	(9.624.000,00)	84,48
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9.866.824.299,00	8.052.825.715,00	(1.813.998.584,00)	81,62
	DINAS PARIWISATA	9.866.824.299,00	8.052.825.715,00	(1.813.998.584,00)	81,62
5	BELANJA DAERAH	9.866.824.299,00	8.052.825.715,00	(1.813.998.584,00)	81,62
5.1	BELANJA OPERASI	9.526.402.299,00	7.732.894.914,00	(1.793.507.385,00)	81,17
5.1.01	Belanja Pegawai	5.366.713.232,00	3.710.922.361,00	(1.655.790.871,00)	69,15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.959.689.067,00	3.821.972.553,00	(137.716.514,00)	96,52
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
5.2	BELANJA MODAL	340.422.000,00	319.930.801,00	(20.491.199,00)	93,98
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.650.000,00	245.657.801,00	(19.992.199,00)	92,47
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.772.000,00	74.273.000,00	(499.000,00)	99,33
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.868.631.000,00	30.886.720.923,00	(1.981.910.077,00)	93,97
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	32.868.631.000,00	30.886.720.923,00	(1.981.910.077,00)	93,97
5	BELANJA DAERAH	32.868.631.000,00	30.886.720.923,00	(1.981.910.077,00)	93,97
5.1	BELANJA OPERASI	32.868.631.000,00	30.886.720.923,00	(1.981.910.077,00)	93,97
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.868.631.000,00	30.886.720.923,00	(1.981.910.077,00)	93,97
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	24.128.742.617,00	22.993.393.982,00	(1.135.348.635,00)	95,29
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	24.128.742.617,00	22.993.393.982,00	(1.135.348.635,00)	95,29
5	BELANJA DAERAH	24.128.742.617,00	22.993.393.982,00	(1.135.348.635,00)	95,29
5.1	BELANJA OPERASI	16.416.761.757,00	15.375.277.182,00	(1.041.484.575,00)	93,66
5.1.01	Belanja Pegawai	7.647.142.012,00	6.814.256.296,00	(832.885.716,00)	89,11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.769.619.745,00	8.561.020.886,00	(208.598.859,00)	97,62
5.2	BELANJA MODAL	7.711.980.860,00	7.618.116.800,00	(93.864.060,00)	98,78
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.106.479.460,00	1.076.332.800,00	(30.146.660,00)	97,28

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.605.501.400,00	6.541.784.000,00	(63.717.400,00)	99,04
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	750.415.000,00	739.085.472,00	(11.329.528,00)	98,49
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	750.415.000,00	739.085.472,00	(11.329.528,00)	98,49
5	BELANJA DAERAH	750.415.000,00	739.085.472,00	(11.329.528,00)	98,49
5.1	BELANJA OPERASI	750.415.000,00	739.085.472,00	(11.329.528,00)	98,49
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.415.000,00	544.085.472,00	(11.329.528,00)	97,96
5.1.05	Belanja Hibah	195.000.000,00	195.000.000,00	-	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	85.091.000,00	71.523.786,00	(13.567.214,00)	84,06
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	85.091.000,00	71.523.786,00	(13.567.214,00)	84,06
5	BELANJA DAERAH	85.091.000,00	71.523.786,00	(13.567.214,00)	84,06
5.1	BELANJA OPERASI	85.091.000,00	71.523.786,00	(13.567.214,00)	84,06
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.091.000,00	71.523.786,00	(13.567.214,00)	84,06
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	127.514.196.181,00	117.393.269.166,00	(10.120.927.015,00)	92,06
	SEKRETARIAT DAERAH	59.533.780.335,00	51.557.871.237,00	(7.975.909.098,00)	86,60
	SEKRETARIAT DAERAH	59.533.780.335,00	51.557.871.237,00	(7.975.909.098,00)	86,60
5	BELANJA DAERAH	59.533.780.335,00	51.557.871.237,00	(7.975.909.098,00)	86,60
5.1	BELANJA OPERASI	56.102.678.985,00	48.321.488.326,00	(7.781.190.659,00)	86,13
5.1.01	Belanja Pegawai	19.613.752.175,00	17.140.613.452,00	(2.473.138.723,00)	87,39
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.653.926.810,00	24.455.874.874,00	(2.198.051.936,00)	91,75
5.1.05	Belanja Hibah	9.635.000.000,00	6.525.000.000,00	(3.110.000.000,00)	67,72
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
5.2	BELANJA MODAL	3.431.101.350,00	3.236.382.911,00	(194.718.439,00)	94,32
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.393.501.350,00	3.199.985.911,00	(193.515.439,00)	94,30
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.600.000,00	11.977.000,00	(623.000,00)	95,06
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	24.420.000,00	(580.000,00)	97,68
	SEKRETARIAT DPRD	67.980.415.846,00	65.835.397.929,00	(2.145.017.917,00)	96,84
	SEKRETARIAT DPRD	67.980.415.846,00	65.835.397.929,00	(2.145.017.917,00)	96,84
5	BELANJA DAERAH	67.980.415.846,00	65.835.397.929,00	(2.145.017.917,00)	96,84
5.1	BELANJA OPERASI	67.552.955.846,00	65.459.297.927,00	(2.093.657.919,00)	96,90
5.1.01	Belanja Pegawai	41.888.564.896,00	40.808.313.963,00	(1.080.250.933,00)	97,42
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.664.390.950,00	24.650.983.964,00	(1.013.406.986,00)	96,05
5.2	BELANJA MODAL	427.460.000,00	376.100.002,00	(51.359.998,00)	87,98
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.460.000,00	376.100.002,00	(51.359.998,00)	87,98
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	505.120.929.768,00	434.044.259.524,00	(71.076.670.244,00)	85,93
	PERENCANAAN	13.113.485.384,00	12.161.267.205,00	(952.218.179,00)	92,74
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	13.113.485.384,00	12.161.267.205,00	(952.218.179,00)	92,74
5	BELANJA DAERAH	13.113.485.384,00	12.161.267.205,00	(952.218.179,00)	92,74
5.1	BELANJA OPERASI	12.608.003.984,00	11.677.805.548,00	(930.198.436,00)	92,62
5.1.01	Belanja Pegawai	5.555.162.630,00	4.918.908.832,00	(636.253.798,00)	88,55
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.052.841.354,00	6.758.896.716,00	(293.944.638,00)	95,83
5.2	BELANJA MODAL	505.481.400,00	483.461.657,00	(22.019.743,00)	95,64
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.981.400,00	471.561.657,00	(21.419.743,00)	95,66
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.500.000,00	11.900.000,00	(600.000,00)	95,20
	KEUANGAN	480.930.646.261,00	411.797.339.056,00	(69.133.307.205,00)	85,63

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	480.930.646.261,00	411.797.339.056,00	(69.133.307.205,00)	85,63
5	BELANJA DAERAH	480.930.646.261,00	411.797.339.056,00	(69.133.307.205,00)	85,63
5.1	BELANJA OPERASI	34.303.485.115,00	28.281.254.687,00	(6.022.230.428,00)	82,44
5.1.01	Belanja Pegawai	18.369.471.693,00	15.473.395.907,00	(2.896.075.786,00)	84,23
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.934.013.422,00	12.807.858.780,00	(3.126.154.642,00)	80,38
5.2	BELANJA MODAL	1.400.649.000,00	1.279.230.253,00	(121.418.747,00)	91,33
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.375.649.000,00	1.254.460.253,00	(121.188.747,00)	91,19
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	24.770.000,00	(230.000,00)	99,08
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.541.000.000,00	339.610.000,00	(1.201.390.000,00)	22,04
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.541.000.000,00	339.610.000,00	(1.201.390.000,00)	22,04
5.4	BELANJA TRANSFER	443.685.512.146,00	381.897.244.116,00	(61.788.268.030,00)	86,07
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.863.712.846,00	26.714.829.292,00	(148.883.554,00)	99,45
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	416.821.799.300,00	355.182.414.824,00	(61.639.384.476,00)	85,21
	KEPEGAWAIAN	9.223.025.523,00	8.299.666.955,00	(923.358.568,00)	89,99
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.223.025.523,00	8.299.666.955,00	(923.358.568,00)	89,99
5	BELANJA DAERAH	9.223.025.523,00	8.299.666.955,00	(923.358.568,00)	89,99
5.1	BELANJA OPERASI	9.157.825.523,00	8.235.248.355,00	(922.577.168,00)	89,93
5.1.01	Belanja Pegawai	6.238.816.123,00	5.471.002.404,00	(767.813.719,00)	87,69
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.919.009.400,00	2.764.245.951,00	(154.763.449,00)	94,70
5.2	BELANJA MODAL	65.200.000,00	64.418.600,00	(781.400,00)	98,80
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.200.000,00	64.418.600,00	(781.400,00)	98,80
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	917.501.000,00	862.287.205,00	(55.213.795,00)	93,98
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	917.501.000,00	862.287.205,00	(55.213.795,00)	93,98
5	BELANJA DAERAH	917.501.000,00	862.287.205,00	(55.213.795,00)	93,98
5.1	BELANJA OPERASI	917.501.000,00	862.287.205,00	(55.213.795,00)	93,98
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	917.501.000,00	862.287.205,00	(55.213.795,00)	93,98
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	936.271.600,00	923.699.103,00	(12.572.497,00)	98,66
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	936.271.600,00	923.699.103,00	(12.572.497,00)	98,66
5	BELANJA DAERAH	936.271.600,00	923.699.103,00	(12.572.497,00)	98,66
5.1	BELANJA OPERASI	936.271.600,00	923.699.103,00	(12.572.497,00)	98,66
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	936.271.600,00	923.699.103,00	(12.572.497,00)	98,66
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.411.650.954,00	17.654.476.281,00	(2.757.174.673,00)	86,49
	INSPEKTORAT DAERAH	20.411.650.954,00	17.654.476.281,00	(2.757.174.673,00)	86,49
	INSPEKTORAT DAERAH	20.411.650.954,00	17.654.476.281,00	(2.757.174.673,00)	86,49
5	BELANJA DAERAH	20.411.650.954,00	17.654.476.281,00	(2.757.174.673,00)	86,49
5.1	BELANJA OPERASI	17.969.114.454,00	15.304.804.631,00	(2.664.309.823,00)	85,17
5.1.01	Belanja Pegawai	8.563.994.564,00	7.736.859.924,00	(827.134.640,00)	90,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.405.119.890,00	7.567.944.707,00	(1.837.175.183,00)	80,47
5.2	BELANJA MODAL	2.442.536.500,00	2.349.671.650,00	(92.864.850,00)	96,20
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.442.536.500,00	2.349.671.650,00	(92.864.850,00)	96,20
	UNSUR KEWILAYAHAN	50.183.353.772,00	42.126.090.735,00	(8.057.263.037,00)	83,94
	KECAMATAN	50.183.353.772,00	42.126.090.735,00	(8.057.263.037,00)	83,94
	KECAMATAN MRANGGEN	2.573.995.724,00	2.212.861.667,00	(361.134.057,00)	85,97

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5	BELANJA DAERAH	2.573.995.724,00	2.212.861.667,00	(361.134.057,00)	85,97
5.1	BELANJA OPERASI	2.497.045.724,00	2.145.678.917,00	(351.366.807,00)	85,93
5.1.01	Belanja Pegawai	1.469.926.424,00	1.151.816.639,00	(318.109.785,00)	78,36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.027.119.300,00	993.862.278,00	(33.257.022,00)	96,76
5.2	BELANJA MODAL	76.950.000,00	67.182.750,00	(9.767.250,00)	87,31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.950.000,00	67.182.750,00	(9.767.250,00)	87,31
	KECAMATAN KARANGAWEN	3.358.094.984,00	2.715.379.577,00	(642.715.407,00)	80,86
5	BELANJA DAERAH	3.358.094.984,00	2.715.379.577,00	(642.715.407,00)	80,86
5.1	BELANJA OPERASI	3.200.094.984,00	2.571.674.327,00	(628.420.657,00)	80,36
5.1.01	Belanja Pegawai	2.363.403.384,00	1.794.093.715,00	(569.309.669,00)	75,91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.691.600,00	777.580.612,00	(59.110.988,00)	92,94
5.2	BELANJA MODAL	158.000.000,00	143.705.250,00	(14.294.750,00)	90,95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.000.000,00	143.705.250,00	(14.294.750,00)	90,95
	KECAMATAN GUNTUR	3.047.589.325,00	2.609.886.455,00	(437.702.870,00)	85,64
5	BELANJA DAERAH	3.047.589.325,00	2.609.886.455,00	(437.702.870,00)	85,64
5.1	BELANJA OPERASI	2.977.080.925,00	2.541.608.155,00	(435.472.770,00)	85,37
5.1.01	Belanja Pegawai	2.048.520.225,00	1.669.652.896,00	(378.867.329,00)	81,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	928.560.700,00	871.955.259,00	(56.605.441,00)	93,90
5.2	BELANJA MODAL	70.508.400,00	68.278.300,00	(2.230.100,00)	96,84
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.508.400,00	68.278.300,00	(2.230.100,00)	96,84
	KECAMATAN SAYUNG	3.596.294.675,00	2.894.738.502,00	(701.556.173,00)	80,49
5	BELANJA DAERAH	3.596.294.675,00	2.894.738.502,00	(701.556.173,00)	80,49
5.1	BELANJA OPERASI	3.417.856.475,00	2.730.455.403,00	(687.401.072,00)	79,89
5.1.01	Belanja Pegawai	2.537.685.175,00	1.911.470.505,00	(626.214.670,00)	75,32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.171.300,00	818.984.898,00	(61.186.402,00)	93,05
5.2	BELANJA MODAL	178.438.200,00	164.283.099,00	(14.155.101,00)	92,07
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.438.200,00	164.283.099,00	(14.155.101,00)	92,07
	KECAMATAN KARANGTENGAH	3.067.568.072,00	2.546.506.079,00	(521.061.993,00)	83,01
5	BELANJA DAERAH	3.067.568.072,00	2.546.506.079,00	(521.061.993,00)	83,01
5.1	BELANJA OPERASI	3.009.168.072,00	2.488.996.080,00	(520.171.992,00)	82,71
5.1.01	Belanja Pegawai	2.032.455.972,00	1.522.624.419,00	(509.831.553,00)	74,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	976.712.100,00	966.371.661,00	(10.340.439,00)	98,94
5.2	BELANJA MODAL	58.400.000,00	57.509.999,00	(890.001,00)	98,48
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.400.000,00	57.509.999,00	(890.001,00)	98,48
	KECAMATAN WONOSALAM	2.612.858.352,00	2.370.885.839,00	(241.972.513,00)	90,74
5	BELANJA DAERAH	2.612.858.352,00	2.370.885.839,00	(241.972.513,00)	90,74
5.1	BELANJA OPERASI	2.592.802.852,00	2.351.495.839,00	(241.307.013,00)	90,69
5.1.01	Belanja Pegawai	1.575.478.852,00	1.437.246.603,00	(138.232.249,00)	91,23
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.324.000,00	914.249.236,00	(103.074.764,00)	89,87
5.2	BELANJA MODAL	20.055.500,00	19.390.000,00	(665.500,00)	96,68
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.055.500,00	19.390.000,00	(665.500,00)	96,68
	KECAMATAN DEMPET	2.598.098.314,00	2.017.149.893,00	(580.948.421,00)	77,64
5	BELANJA DAERAH	2.598.098.314,00	2.017.149.893,00	(580.948.421,00)	77,64
5.1	BELANJA OPERASI	2.508.929.714,00	1.933.994.343,00	(574.935.371,00)	77,08
5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.323.714,00	1.166.679.855,00	(443.643.859,00)	72,45

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.606.000,00	767.314.488,00	(131.291.512,00)	85,39
5.2	BELANJA MODAL	89.168.600,00	83.155.550,00	(6.013.050,00)	93,26
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.168.600,00	83.155.550,00	(6.013.050,00)	93,26
	KECAMATAN GAJAH	2.915.015.338,00	2.511.000.261,00	(404.015.077,00)	86,14
5	BELANJA DAERAH	2.906.375.338,00	2.505.240.261,00	(401.135.077,00)	86,20
5.1	BELANJA OPERASI	2.845.914.138,00	2.450.049.459,00	(395.864.679,00)	86,09
5.1.01	Belanja Pegawai	1.884.385.838,00	1.545.157.595,00	(339.228.243,00)	82,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	961.528.300,00	904.891.864,00	(56.636.436,00)	94,11
5.2	BELANJA MODAL	60.461.200,00	55.190.802,00	(5.270.398,00)	91,28
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.461.200,00	55.190.802,00	(5.270.398,00)	91,28
	KECAMATAN KARANGANYAR	3.007.710.727,00	2.534.059.121,00	(473.651.606,00)	84,25
5	BELANJA DAERAH	3.007.710.727,00	2.534.059.121,00	(473.651.606,00)	84,25
5.1	BELANJA OPERASI	2.812.041.112,00	2.342.488.121,00	(469.552.991,00)	83,30
5.1.01	Belanja Pegawai	2.025.026.227,00	1.585.322.157,00	(439.704.070,00)	78,29
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.014.885,00	757.165.964,00	(29.848.921,00)	96,21
5.2	BELANJA MODAL	195.669.615,00	191.571.000,00	(4.098.615,00)	97,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.700.000,00	129.845.000,00	(3.855.000,00)	97,12
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.969.615,00	61.726.000,00	(243.615,00)	99,61
	KECAMATAN MIJEN	2.660.237.732,00	2.204.550.276,00	(455.687.456,00)	82,87
5	BELANJA DAERAH	2.660.237.732,00	2.204.550.276,00	(455.687.456,00)	82,87
5.1	BELANJA OPERASI	2.559.026.732,00	2.108.640.286,00	(450.386.446,00)	82,40
5.1.01	Belanja Pegawai	1.639.286.232,00	1.222.118.647,00	(417.167.585,00)	74,55
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.740.500,00	886.521.639,00	(33.218.861,00)	96,39
5.2	BELANJA MODAL	101.211.000,00	95.909.990,00	(5.301.010,00)	94,76
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.211.000,00	95.909.990,00	(5.301.010,00)	94,76
	KECAMATAN DEMAK	12.064.103.269,00	10.262.344.736,00	(1.801.758.533,00)	85,07
5	BELANJA DAERAH	12.064.103.269,00	10.262.344.736,00	(1.801.758.533,00)	85,07
5.1	BELANJA OPERASI	10.921.578.044,00	9.134.204.986,00	(1.787.373.058,00)	83,63
5.1.01	Belanja Pegawai	5.733.633.969,00	4.140.159.174,00	(1.593.474.795,00)	72,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.187.944.075,00	4.994.045.812,00	(193.898.263,00)	96,26
5.2	BELANJA MODAL	1.142.525.225,00	1.128.139.750,00	(14.385.475,00)	98,74
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.525.225,00	326.724.750,00	(11.800.475,00)	96,51
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	804.000.000,00	801.415.000,00	(2.585.000,00)	99,68
	KECAMATAN BONANG	2.964.633.844,00	2.522.306.596,00	(442.327.248,00)	85,08
5	BELANJA DAERAH	2.964.633.844,00	2.522.306.596,00	(442.327.248,00)	85,08
5.1	BELANJA OPERASI	2.868.627.994,00	2.431.839.297,00	(436.788.697,00)	84,77
5.1.01	Belanja Pegawai	1.911.889.344,00	1.520.316.898,00	(391.572.446,00)	79,52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.738.650,00	911.522.399,00	(45.216.251,00)	95,27
5.2	BELANJA MODAL	96.005.850,00	90.467.299,00	(5.538.551,00)	94,23
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.005.850,00	90.467.299,00	(5.538.551,00)	94,23
	KECAMATAN WEDUNG	3.072.666.165,00	2.696.059.909,00	(376.606.256,00)	87,74
5	BELANJA DAERAH	3.072.666.165,00	2.696.059.909,00	(376.606.256,00)	87,74
5.1	BELANJA OPERASI	2.984.554.965,00	2.618.109.909,00	(366.445.056,00)	87,72
5.1.01	Belanja Pegawai	2.050.146.665,00	1.704.788.901,00	(345.357.764,00)	83,15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	934.408.300,00	913.321.008,00	(21.087.292,00)	97,74

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rp	%
5.2	BELANJA MODAL	88.111.200,00	77.950.000,00	(10.161.200,00)	88,47
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.111.200,00	77.950.000,00	(10.161.200,00)	88,47
	KECAMATAN KEBONAGUNG	2.644.487.251,00	2.028.361.824,00	(616.125.427,00)	76,70
5	BELANJA DAERAH	2.644.487.251,00	2.028.361.824,00	(616.125.427,00)	76,70
5.1	BELANJA OPERASI	2.515.827.191,00	1.909.270.774,00	(606.556.417,00)	75,89
5.1.01	Belanja Pegawai	1.668.292.551,00	1.168.106.931,00	(500.185.620,00)	70,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.534.640,00	741.163.843,00	(106.370.797,00)	87,45
5.2	BELANJA MODAL	128.660.060,00	119.091.050,00	(9.569.010,00)	92,56
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.660.060,00	119.091.050,00	(9.569.010,00)	92,56
	KECAMATAN GAJAH	2.915.015.338,00	2.511.000.261,00	(404.015.077,00)	86,14
5	BELANJA DAERAH	8.640.000,00	5.760.000,00	(2.880.000,00)	66,67
5.1	BELANJA OPERASI	8.640.000,00	5.760.000,00	(2.880.000,00)	66,67
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	5.760.000,00	(2.880.000,00)	66,67
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	16.029.962.389,00	15.137.516.412,00	(892.445.977,00)	94,43
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.029.962.389,00	15.137.516.412,00	(892.445.977,00)	94,43
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.029.962.389,00	15.137.516.412,00	(892.445.977,00)	94,43
5	BELANJA DAERAH	16.029.962.389,00	15.137.516.412,00	(892.445.977,00)	94,43
5.1	BELANJA OPERASI	15.778.232.189,00	14.899.120.311,00	(879.111.878,00)	94,43
5.1.01	Belanja Pegawai	3.377.506.289,00	2.904.462.433,00	(473.043.856,00)	85,99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.040.253.900,00	6.939.914.878,00	(100.339.022,00)	98,57
5.1.05	Belanja Hibah	5.360.472.000,00	5.054.743.000,00	(305.729.000,00)	94,30
5.2	BELANJA MODAL	251.730.200,00	238.396.101,00	(13.334.099,00)	94,70
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.230.200,00	227.001.101,00	(12.229.099,00)	94,89
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.500.000,00	11.395.000,00	(1.105.000,00)	91,16
	Jumlah	(171.217.674.971,34)	82.417.050.904,63	253.634.725.875,97	(48,14)



**BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1. Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa;
4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Mandatory spending pada Pemerintah Kabupaten Demak diuraikan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp827.368.600.445,00 dengan realisasi sebesar Rp798.034.710.634,00 Alokasi tersebut merupakan 30,94% dari realisasi APBD sebesar Rp2.578.907.694.065,20;
2. Anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp617.620.362.337,00 dengan realisasi sebesar Rp588.189.236.322,00 Alokasi tersebut merupakan 29,15% dari Realisasi APBD di luar gaji sebesar Rp2.017.567.628.320,20;
3. Belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah dianggarkan sebesar Rp750.601.244.829,34,00 dengan realisasi sebesar Rp717.050.155.002,20. Alokasi tersebut merupakan 32,64% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer sebesar Rp2.197.010.449.949,20;
4. ADD dialokasikan sebesar Rp105.703.760.300,00 dengan realisasi sebesar Rp105.703.760.300,00. Alokasi tersebut merupakan 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1.081.634.694.950,00.

Berikut disajikan tabel komparasi *mandatory Spending*.

No	Uraian	Indikator	2025	2024	2023
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Alokasi Pendidikan	Realisasi	798.034.710.634,00	789.715.492.495,00	709.879.420.964,00
		Realisasi APBD	2.578.907.694.065,20	2.655.133.935.831,00	2.423.260.278.246,00
		%	30,94%	29,74%	29,29%



No	Uraian	Indikator	2025	2024	2023
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
II	Alokasi Kesehatan	Realisasi	588.189.236.322,00	546.959.200.303,00	513.794.944.005,00
		Realisasi APBD diluar Gaji	2.017.567.628.320,20	2.099.306.234.859,00	1.910.896.661.058,00
		%	29,15%	26,05%	26,89%
III	Alokasi Infrastruktur Daerah	Realisasi	717.050.155.002,20	463.415.295.205,00	473.869.301.823,34
		Realisasi APBD diluar Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	2.197.010.449.949,20	2.217.857.961.079,00	2.112.663.628.510,09
		%	32,64%	20,89%	22,43%
IV	ADD	Realisasi	105.703.760.300,00	98.390.401.500,00	94.000.000.000,00
		Realisasi Dana Perimbangan diluar DAK	1.081.634.694.950,00	950.353.854.000,00	942.640.676.941,00
		%	10%	10%	10%
V	PENGAWASAN	Realisasi	17.654.476.281,00	10.556.856.173,00	9.678.690.947,00
		Realisasi APBD	2.578.907.694.065,20	2.655.133.935.831,00	2.423.260.278.246,00
		%	0,68%	0,40%	0,40%

3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 dibukukan sebesar Rp2.661.324.819.563,83 atau 101,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.610.961.447.170,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.843.518.072,59 bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.704.168.337.636,42. Pendapatan daerah Kabupaten Demak terdiri dari:

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 Rp	REALISASI 2025 Rp	%	REALISASI 2024 Rp
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	638.040.856.895,00	734.542.948.186,83	115,12	594.887.868.035,42
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.963.064.205.956,00	1.926.777.382.839,00	98,15	2.102.854.869.355,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.856.384.319,00	4.488.538,00	0,05	6.425.600.246,00
	JUMLAH	2.610.961.447.170,00	2.661.324.819.563,83	101,93	2.704.168.337.636,42



3.2.2. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi anggaran belanja daerah dan transfer Kabupaten Demak Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp2.578.907.694.065,20 atau mencapai 92,69% dari anggaran belanja sebesar Rp2.782.179.122.141,34. Realisasi belanja dan transfer tersebut terdiri dari :

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 Rp	REALISASI 2025 Rp	%	REALISASI 2024 Rp
05.01	BELANJA OPERASI	2.097.774.650.558,34	1.975.548.173.052,20	94,17	1.938.674.244.470,00
05.02	BELANJA MODAL	239.177.959.437,00	221.122.666.897,00	92,45	279.183.716.609,00
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	1.541.000.000,00	339.610.000,00	22,04	-
05.04	BELANJA TRANSFER	443.685.512.146,00	381.897.244.116,00	86,07	437.275.974.752,00
	JUMLAH	2.782.179.122.141,34	2.578.907.694.065,20	92,69	2.655.133.935.831,00

3.2.3. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan bersih Pemerintah Kabupaten Demak pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp171.217.674.971,34 dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp171.256.472.096,34.

URAIAN	URAIAN	ANGGARAN 2025 Rp	REALISASI 2025 Rp	%	REALISASI 2024 Rp
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	171.217.674.971,34	171.256.472.096,34	100,02	124.183.273.165,92
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	171.217.674.971,34	171.256.472.096,34	100,02	122.183.273.165,92

3.3. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

3.3.1. Pendapatan Daerah

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan Tahun 2025 khususnya pendapatan daerah Kabupaten Demak bila dilihat dari realisasi pendapatan daerah maka secara umum target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan melampaui sedikit diatas dari target dengan pencapaian sebesar 101,93%. Pendapatan Asli Daerah tercapai sebesar 115,12%, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 98,15%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,05%.

3.3.2. Belanja Daerah

Penyerapan belanja dan transfer daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebesar 92,69%, hampir semua kegiatan telah dilaksanakan, meskipun beberapa kegiatan dilaksanakan di akhir tahun. Belanja Operasi tercapai sebesar 94,17%, Belanja Modal 92,45%, Belanja Tak Terduga 22,04%, dan Belanja Transfer 86,07%.



3.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada dasarnya tidak mengalami banyak kendala. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Demak untuk mendukung tersedianya anggaran masih mengandalkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari anggaran SiLPA tahun yang lalu.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sebagai entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Demak, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan semua SKPD dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa : *“Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah”*. Di Kabupaten Demak entitas yang menyusun laporan keuangan SKPD terdiri dari SKPD, RSUD Sunan Kalijaga, RSUD Sultan Fatah, dan 27 Puskesmas yang merupakan unit kerja pada Dinas Kesehatan mengelola anggaran sendiri dan menyajikan laporan keuangan SKPD.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok adalah meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2. Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan

4.2.1. Asumsi Dasar Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

4.2.2. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.



4.2.3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak, Basis Akuntansi pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut :

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).



3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan :

- harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah Kabupaten Demak. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3. Pengukuran

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.



Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal transaksi yang diterima dan atau dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang; dan
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD)S, seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.



4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset Lancar, antara lain terdiri dari :

a. **Kas dan setara kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas dinyatakan dalam rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. **Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan



perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya

d. **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

e. **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset non lancar, antara lain terdiri dari :

a. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

b. **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu



aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah:

- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.



Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

c. **Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif (properti yang digunakan sendiri); atau
- 2) Dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas.

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

d. **Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

- 1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 3) Aset Tidak Berwujud;



- 4) Aset Lain-lain.

2. Pengakuan

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

b. Investasi Jangka Pendek

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

c. Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ; dan
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) jumlah piutang dapat diukur.
- 3) Dalam hal perhitungan piutang BPJS Kesehatan baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang diakui berdasarkan klaim dari RSUD/ Puskesmas, dan pendapatan juga diakui berdasarkan klaim dari RSUD/ Puskesmas.
- 4) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai



dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

- 5) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 6) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 7) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 8) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 9) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 10) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 11) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan (TP) /Tuntutan Ganti Rugi (TGR), harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

d. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban

e. Persediaan

Persediaan diakui:

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.



Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

f. Investasi Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

g. Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Konstruksi dalam Pengerjaan diakui jika:

- 1) Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

h. Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- 4) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi



i. Aset Lainnya

- 1) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP).
- 2) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- 4) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 5) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3. Pengukuran

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal

b. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Piutang

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:



- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; dan
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
 - Penjualan sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - Kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - Pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 - Dalam hal pemberian pelayanan kepada pasien dengan penjaminan, karena piutang baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang pasien dengan penjaminan diakui saat hasil verifikasi dari pihak penjamin.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
 - Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, disajikan sebagai berikut :
- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan



ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya

- 5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi Lancar; Kurang Lancar; Diragukan dan Macet.
- 7) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
 - 0,5 % dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
 - 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - 100 % dari Piutang dengan kualitas macet.

d. Persediaan

- 1) Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan/harga pokok produksi/nilai wajar.
- 2) Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dalam hal penyajian persediaan tanaman dan hewan ternak / ikan, persediaan disajikan sebesar harga pokok produksi yang meliputi biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.
 - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Dalam hal persediaan diperoleh dengan nilai nol (tidak bernilai) Pengguna Anggaran memberikan nilai sebesar harga pasar / wajar pada persediaan tersebut dan saat penggunaan persediaan dibebankan sebesar harga pasar / wajar yang telah ditentukan.
- 3) Penilaian Persediaan menggunakan metode FIFO.
- 4) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

e. Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- 1) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%.
- 2) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai



investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%.

- 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

f. Aset Tetap

Kebijakan penyajian aset tetap terdiri dari :

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Pengeluaran atau pengadaan baru untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap barang-barang yang bernilai dibawah batasan kapitalisasi, dicatat sebagai barang ekstrakomptabel, tidak dicatat sebagai aset tetap dan atas biaya perolehannya dibebankan sebagai beban barang dan jasa.

Terhadap barang ekstrakomptabel tidak dilakukan penyusutan.

Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- 2) Perhitungan nilai penyusutan dilakukan secara bulanan.
- 3) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Jika terdapat koreksi aset tetap karena aset tetap belum tercatat, maka dilakukan koreksi penambahan aset tetap dan dilakukan koreksi atas akumulasi penyusutan aset tetap tersebut, dimana akumulasi penyusutan diperhitungkan sejak tahun perolehan.

Jika terjadi koreksi aset tetap karena terdapat pencatatan ganda atau yang lainnya, maka dilakukan koreksi aset tetap dan dilakukan koreksi akumulasi aset tetap tersebut.

Apabila dilakukan renovasi / *overhaul* terhadap aset tetap, maka masa manfaat aset tetap tersebut ditambah sehingga sisa masa manfaat aset tetap tersebut sebesar maksimal seperti dalam kondisi baru.



g. Aset lainnya

- Tagihan Penjualan Angsuran berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan nilai nominal dari SKTJM atau SKP2K
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian
- Aset Tidak Berwujud dapat diakui dan diukur dengan nilai minimal sebesar Rp20.000.000,00. Masa manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten. Sedangkan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari : Utang PFK, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan, terdiri dari : Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, dan Utang Jangka Panjang

2. Pengakuan

- **Utang PFK** diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- **Pendapatan diterima dimuka** diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
- **Utang Beban** diakui pada saat :



- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar
 - b. Terdapat klaim pihak ketiga
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar
- **Utang jangka pendek lainnya** diakui pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
3. Pengukuran
- **Utang PFK** sebesar kewajiban yang sudah dipotong oleh BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BLUD, Bendahara BOS namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
 - **Pendapatan diterima dimuka** disajikan sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Pada akhir periode, perhitungan penyesuaian dilakukan secara bulanan
 - **Utang beban** yang disajikan yaitu sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca
 - Pengukuran atas **utang jangka pendek lainnya** yaitu sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

2. Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

3. Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Demak telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam :

1. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN****1. PENDAPATAN**

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun 2025 sebagai berikut.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN %
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	638.040.856.895,00	734.542.948.186,83	115,12	594.887.868.035,42	23,48
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.963.064.205.956,00	1.926.777.382.839,00	98,15	2.102.854.869.355,00	(8,37)
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.856.384.319,00	4.488.538,00	0,05	6.425.600.246,00	(99,93)
	JUMLAH	2.610.961.447.170,00	2.661.324.819.563,83	101,93	2.704.168.337.636,42	(1,58)

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Rp2.661.324.819.563,83 merupakan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, terdiri dari PAD dianggarkan sebesar Rp638.040.856.895,00 terealisasi sebesar Rp734.542.948.186,83 atau sebesar 115,12%, Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.963.064.205.956,00 dan terealisasi sebesar Rp1.926.777.382.839,00 atau sebesar 98,15% dan Lain-lain Pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp9.856.384.319,00 terealisasi sebesar Rp4.488.538,00 atau sebesar 0,05%. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 dapat tercapai sebesar 101,93% dan berkurang sebesar Rp42.843.518.072,59 atau mengalami penurunan sebesar 1,58% dari realisasi pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp2.704.168.337.636,42

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi PAD untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang meliputi pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN %
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	287.837.738.497,00	340.767.901.524,00	118,39	223.506.943.362,00	52,46
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	307.438.169.398,00	329.598.514.265,83	107,21	40.980.185.098,00	704,29
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.959.699.000,00	38.477.679.571,00	113,30	32.847.401.892,00	17,14
04.01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	8.805.250.000,00	25.698.852.826,00	291,86	297.553.337.683,42	(91,36)
	Jumlah	638.040.856.895,00	734.542.948.186,83	115,12	594.887.868.035,42	23,48

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PAD dianggarkan sebesar Rp638.040.856.895,00 dan terealisasi sebesar Rp734.542.948.186,83 atau 115,12%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar Rp594.887.868.035,42 maka realisasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp139.655.080.151,41 atau 23,48%. Adapun rincian untuk masing-masing sumber PAD tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan nomenklatur (kode rekening) dalam penerimaan pajak maupun retribusi daerah. Sehingga, atas rekening-rekening pendapatan pajak dan retribusi yang berubah, dilakukan pula penyesuaian akun atas rekening pendapatan pajak dan retribusi. Adapun rincian pendapatan pajak daerah sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.525.000.000,00	2.283.802.681,00	90,45	2.164.903.552,00	5,49
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.786.857.900,00	111,47	2.476.062.000,00	12,55
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	-	-	6.254.400,00	(100,00)
4.1.01.15.01	PBBP2	72.000.000.000,00	72.127.968.486,00	100,18	70.026.819.628,00	3,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	47.439.915.960,00	62.980.447.528,00	132,76	63.157.972.154,00	(0,28)
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5.700.000.000,00	7.150.914.529,00	125,45	6.147.105.730,00	16,33
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	75.000.000.000,00	77.000.474.445,00	102,67	77.088.255.211,00	(0,11)
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	444.795.000,00	637.695.045,00	143,37	445.698.819,00	43,08
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	2.000.000.000,00	1.684.001.204,00	84,20	1.302.453.268,00	29,29
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	330.000.000,00	389.711.706,00	118,09	334.904.600,00	16,36
4.1.01.20.01	Opsen PKB	49.398.027.537,00	66.918.159.500,00	100,00	356.514.000,00	100,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	30.500.000.000,00	46.807.868.500,00	100,00	-	-
	Jumlah	287.837.738.497,00	340.767.901.524,00	118,39	223.506.943.362,00	52,46

Pajak Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp287.837.738.497,00 dan terealisasi sebesar Rp340.767.901.524,00 atau 118,39%, bila dibanding dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp223.506.943.362,00 maka bertambah sebesar Rp117.260.958.162,00 atau mengalami kenaikan sebesar 52,46%. Pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah.

Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pada Tahun 2025, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Demak tidak memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya. Berdasarkan



Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mranggen Tahun 2024-2044 tidak terdapat Kawasan tambang, sehingga tidak dilakukan pemungutan pajak tersebut.

Selain itu, pada tahun 2025 diberlakukan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang pada tahun sebelumnya dicatat dengan pada bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Dasar hukum pendapatan retribusi daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2024, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Akun ini menggambarkan realisasi pendapatan retribusi Daerah untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.

NO REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	281.878.179.918,00	299.459.518.332,83	106,24	211.947.534,00	141.189,46
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	215.000.000,00	316.915.000,00	147,40	253.220.000,00	25,15
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	650.000.000,00	688.300.000,00	105,89	596.800.000,00	15,33
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.620.539.480,00	5.289.247.700,00	94,11	4.653.624.824,00	-
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000,00	25.450.000,00	101,80	22.800.000,00	11,62
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.263.750.000,00	1.405.707.867,00	111,23	10.817.716.806,00	(87,01)
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	-	-	-	100.000,00	(100,00)
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	40.000.000,00	117.150.000,00	292,88	80.575.000,00	-
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	32.500.000,00	34.860.000,00	107,26	31.115.000,00	12,04
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000.000,00	608.150.000,00	101,36	721.215.000,00	(15,68)
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	44.000.000,00	49.400.000,00	112,27	33.400.000,00	47,90
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	3.092.500.000,00	2.925.250.000,00	94,59	2.816.530.000,00	3,86
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	19.200.000,00	19.680.000,00	102,50	19.885.000,00	(1,03)
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8.657.500.000,00	9.602.374.500,00	110,91	-	100,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	6.167.406.654,00	176,21	20.007.514.000,00	(69,17)
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.800.000.000,00	2.889.104.212,00	160,51	713.741.934,00	304,78
	Jumlah	307.438.169.398,00	329.598.514.265,83	107,21	40.980.185.098,00	704,29

Retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp307.438.169.398,00 terealisasi sebesar Rp329.598.514.265,83 atau 107,21%, realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar Rp40.980.185.098,00 maka realisasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp288.618.329.168 atau 704,29%.

Berikut rincian Pendapatan Retribusi Daerah di SKPD :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS KESEHATAN	299.459.518.332,83	211.947.534,00	299.248.567.798,83
	JUMLAH	299.459.518.332,83	211.947.534,00	299.248.567.798,83

Jika di bandingkan dengan tahun 2024, Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan tersebut karena perubahan nomenklatur pendapatan BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas, yang pada Tahun 2024 di catat dalam pendapatan Lain-Lain PAD, sedangkan pada Tahun 2025 di catat pada pendapatan Retribusi.

Realisasi pendapatan pelayanan kesehatan tahun 2025 masih termasuk pendapatan kerjasama, pendapatan jasa perbankan dan pendapatan hibah tidak terikat serta pendapatan kapitasi FKTP sebesar Rp61.327.929.051,00 yang seharusnya dianggarkan di lain-lain PAD yang sah.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	316.915.000,00	253.220.000,00	63.695.000,00
	JUMLAH	316.915.000,00	253.220.000,00	63.695.000,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan belum termasuk didalamnya biaya pengangkutan sampah sebesar Rp173.750.000,00 yang digunakan langsung untuk operasional petugas pengangkutan sampah.

3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	688.300.000,00	96.800.000,00	91.500.000,00
	JUMLAH	688.300.000,00	596.800.000,00	91.500.000,00

4) Retribusi Pelayanan Pasar

No	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	
		2025	2024		
		(Rp)	(Rp)		
1	DINAS PERDAGANGAN. KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.289.247.700,00	4.653.624.824,00	635.850.876,00	
	JUMLAH	5.289.247.700,00	4.653.624.824,00	635.850.876,00	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Berikut Rincian Pasar:

NO	PASAR	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	
1	PASAR BINTORO	1.188.455.800,00	1.008.733.400,00	179.722.400,00
2	PASAR WONOSALAM	135.622.250,00	142.148.823,00	(6.526.573,00)
3	PASAR GEBANG	119.548.500,00	120.007.750,00	(459.250,00)
4	PASAR WEDUNG	77.961.000,00	89.257.000,00	(11.296.000,00)
5	PASAR BUYARAN	668.919.000,00	672.338.000,00	(3.419.000,00)
6	PASAR HEWAN BANJARSARI	14.574.000,00	15.106.000,00	(532.000,00)
7	PASAR SAYUNG	754.687.400,00	622.757.000,00	131.930.400,00
8	PASAR SRIWULAN	40.649.000,00	37.420.000,00	3.229.000,00
9	PASAR MRANGGEN	502.659.200,00	530.096.300,00	(27.437.100,00)
10	PASAR HEWAN/SEPEDA MRANGGEN	14.035.000,00	17.855.500,00	(3.820.500,00)
11	PASAR GADING	42.288.200,00	43.504.000,00	(1.215.800,00)
12	PASAR BRAMBANG	374.384.000,00	103.105.000,00	271.279.000,00
13	PASAR GABLOK	56.747.500,00	59.864.000,00	(3.116.500,00)
14	PASAR GUNTUR	40.720.000,00	36.410.000,00	4.310.000,00
15	PASAR KARANGANYAR	164.886.750,00	82.313.351,00	82.573.399,00
16	PASAR GAJAH	497.955.000,00	524.688.600,00	(26.733.600,00)
17	PASAR WONOPOLO	407.850.000,00	384.813.000,00	23.037.000,00
18	PASAR JEBOR	187.305.100,00	163.207.100,00	24.098.000,00
	JUMLAH	5.289.247.700,00	4.653.624.824,00	635.622.876,00

5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.450.000,00	22.800.000,00	2.650.000,00
	JUMLAH	25.450.000,00	22.800.000,00	2.650.000,00

6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.500.000,00	30.950.000,00	550.000,00
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	56.560.000,00	97.925.000,00	(41.365.000,00)
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	73.750.000,00	-	73.750.000,00
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	720.000.000,00	740.000.000,00	(20.000.000,00)
6	DINAS PARIWISATA	481.097.867,00	423.083.365,00	58.014.502,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	9.465.158.441,00	(9.465.158.441,00)
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	42.800.000,00	60.600.000,00	(17.800.000,00)
	JUMLAH	1.405.707.867,00	10.817.716.806,00	(9.412.008.939,00)

7) Retribusi Terminal

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	-	100.000,00	(100.000,00)
	JUMLAH	-	100.000,00	(100.000,00)

Pendapatan tersebut sudah tidak termasuk kategori yang dikenakan pajak/retribusi maka pada tahun 2025 sudah tidak dikenakan penarikan.

8) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PARIWISATA	117.150.000,00	80.575.000,00	36.575.000,00
	JUMLAH	117.150.000,00	80.575.000,00	36.575.000,00

9) Retribusi Rumah Potong Hewan

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	34.860.000,00	31.115.000,00	3.745.000,00
	JUMLAH	34.860.000,00	31.115.000,00	3.745.000,00

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	608.150.000,00	721.215.000,00	(113.065.000)
	JUMLAH	608.150.000,00	721.215.000,00	(113.065.000)

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan untuk menarik retribusi Wisata yang secara kepemilikannya bukan milik Pemerintah Daerah.



11) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	49.400.000,00	33.400.000,00	16.000.000,00
	JUMLAH	49.400.000,00	33.400.000,00	16.000.000,00

12) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	2.925.250.000,00	2.816.530.000,00	108.720.000,00
	JUMLAH	2.925.250.000,00	2.816.530.000,00	108.720.000,00

Berdasarkan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada tahun 2025 terdapat penyesuaian numenkatur retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan, yang pada tahun 2024 dicatat pada retribusi tempat khusus parkir.

13) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.680.000,00	-	19.885.000,00
	JUMLAH	19.680.000,00	-	19.885.000,00

14) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	9.602.374.500,00	-	9.602.374.500,00
	JUMLAH	9.602.374.500,00	-	9.602.374.500,00

Pada Tahun 2024, retribusi ini dicatat pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan, sehingga terjadi perbedaan yang signifikan antara pendapatan tahun 2024 dan Tahun 2025 atas kedua pendapatan tersebut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

15) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.167.406.654,00	-	
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	20.007.514.000,00	(20.007.514.000,00)
	JUMLAH	6.167.406.654,00	20.007.514.000,00	(13.840.107.346,00)

16) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.889.104.212,00	713.741.934,00	2.175.362.278,00
	JUMLAH	2.889.104.212,00	713.741.934,00	2.175.362.278,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Dasar hukum pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 1978, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1997, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999.

Akun ini menggambarkan realisasi pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak (PDAM)	2.544.934.000	2.544.934.530,00	100,00	1.932.413.526,00	31,70
2	Perseroda Demak Sarana Sehat (Apotek Sari Husada)	550.372.000	550.372.611	100,00	462.849.626,00	18,91
3	PD. BPR BKK Demak	3.278.662.000	3.278.662.052	100,00	3.602.978.463,00	(9,00)
4	PT. LKM Demak Sejahtera (LKM BKPD)	1.262.018.000	1.262.018.892	100,00	1.212.914.547,00	4,05
5	PT. Bank Jateng	24.764.849.000,00	29.282.825.181,00	118,24	24.327.120.446,00	20,37
6	PT. JAMKRIDA	364.902.000	364.902.386	100,00	309.906.270,00	17,75
7	PT. Demak Aneka Wira Usaha	433.212.000	433.212.923	100,00	284.084.632,00	52,49
8	BKK Jateng	760.750.000	760.750.996	100,00	715.134.382,00	100,00
	JUMLAH	33.959.699.000,00	38.477.679.571,00	113,30	32.847.401.892,00	17,14

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp33.959.699.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp38.477.679.571,00 atau terealisasi sebesar 113,30% dari target yang ditentukan. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp32.847.401.892,00 maka realisasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp5.630.277.679 atau naik sebesar 17,14%

d. Lain-lain PAD yang Sah

Akun ini menggambarkan realisasi lain-lain PAD yang sah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut.

NO REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	729.776.320,00	145,96	574.425.900,00	27,04
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	305.250.000,00	346.513.450,00	113,52	306.996.775,00	100,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.876.844.242,00	187,68	1.116.946.217,00	68,03
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	9.501.573.714,00	190,03	3.618.657.574,00	162,57
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000,00	1.323.161.990,00	66,16	4.367.510.043,00	(69,70)
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	3.267.643,00	100,00	25.477.201,00	(87,17)
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	1.237.756.970,00	100,00	1.035.397.843,00	19,54
4.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	10.645.861,00	100,00	1.333.434,00	698,38
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	10.669.312.636,00	100,00	931.352.015,00	1.045,57
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	-	-	-	285.575.240.681,42	(100,00)
	JUMLAH	8.805.250.000,00	25.698.852.826,00	291,86	297.553.337.683,42	(91,36)

Lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.805.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.698.852.826,00 atau 291,86%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar Rp297.553.337.683,42 berkurang sebesar Rp271.854.484.857,42 atau 91,36%. Terjadi penurunan yang signifikan disebabkan pendapatan BLUD tahun 2024 dicatat di lain-lain PAD Yang Sah dan di tahun 2025 dicatat di Pendapatan Retribusi Daerah.

Berikut rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per SKPD.

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

NO	SKPD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/
			(Rp)	(Rp)	BERKURANG (Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	500.000.000,00	729.776.320,00	574.425.900,00	155.350.420,00
	JUMLAH	500.000.000,00	729.776.320,00	574.425.900,00	155.350.420,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

NO	SKPD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	27.500.000,00	27.500.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00
2	DINAS PARIWISATA	-	3.463.450,00	12.200.000,00	(8.736.550,00)
3	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	257.000.000,00	294.800.000,00	249.196.775,00	45.603.225,00
4	KECAMATAN DEMAK	20.750.000,00	20.750.000,00	20.600.000,00	150.000,00
	JUMLAH	305.250.000,00	346.513.450,00	306.996.775,00	39.516.675,00

3) Penerimaan Jasa Giro

NO	SKPD	ANGGARAN 20244 (Rp)	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.000.000.000,00	1.876.844.242,000	1.116.946.217,000	759.898.025,000
	JUMLAH	1.000.000.000,000	1.876.844.242,000	1.116.946.217,000	759.898.025,000

4) Pendapatan Bunga Deposito

NO	SKPD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	5.000.000.000,00	9.501.573.714,00	3.618.657.574,00	5.882.916.140,00
	JUMLAH	5.000.000.000,00	9.501.573.714,00	3.618.657.574,00	5.882.916.140,00

5) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

NO	SKPD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.000.000.000,00	1.323.161.990,00	4.367.510.043,00	(3.044.348.053,00)
	JUMLAH	2.000.000.000,00	1.323.161.990,00	4.367.510.043,00	(3.044.348.053,00)

Pendapatan Tuntutan Kerugian Daerah (TGR) tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.323.161.990,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.367.510.043,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI
1	Penyetoran Kelebihan Pembayaran Hasil Temuan Inspektorat Daerah	22.622.500,00
2	Penyetoran Kelebihan Pembayaran Hasil Temuan BPK RI	1.297.376.400,00
3	Pengembalian Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan Guru SD Tahun 2024 DINDIKBUD	376.000,00
4	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 SETDA	620.090,00
5	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kegiatan pelaksanaan Reses Masa Sidang I Tahun 2024 SETWAN	600.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	REALISASI
6	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 BAPPERIDA	675.000,00
7	Denda keterlambatan pekerjaan pengadaan kaos penyelenggaraan FORKAB	75.000,00
8	Kekurangan pembayaran pajak Jasa Boga	517.000,00
9	Pengembalian Dana Hibah Belanja BBM Tahun 2024	300.000,00
	Jumlah	1.323.161.990,00

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

NO	SKPD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	3.267.643,00	25.477.201,00	(22.209.558,00)
	JUMLAH	-	3.267.643,00	25.477.201,00	(22.209.558,00)

7) Pendapatan Denda Pajak Daerah

NO	SKPD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	1.237.824.970,00	1.035.397.843,00	202.427.127,00
	JUMLAH	-	1.237.824.970,00	1.035.397.843,00	202.427.127,00

8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

NO	SKPD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	111.000,00	-	111.000,00
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	330.194,00	(330.194,00)
3	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	10.306.861,00	1.003.240,00	9.303.621,00
	JUMLAH	-	10.417.861,00	1.333.434,00	9.084.427,00

9) Pendapatan Dari Pengembalian

NO	SKPD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	10.669.312.636,00	931.352.015,00	9.737.960.621,00
	JUMLAH	-	10.669.312.636,00	931.352.015,00	9.737.960.621,00

Pendapatan dari pengembalian tahun 2025 terealisasi sebesar 10.669.312.636,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp931.352.015,00 dengan rincian sebagai berikut .

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	400.707.807,00	690.199.567,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.856.384.319,00	-
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	750.000,00	58.380,00
4.1.04.15.39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	-	175.137,00
4.1.04.15.84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	411.470.510,00	-
	JUMLAH	10.669.312.636,00	690.433.084,00

Pada Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terdapat realisasi pendapatan sebesar Rp9.856.384.319,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai
1	Pengembalian Hibah Kepada HIMPAUDI Tahun Anggaran 2023	600.000,00
2	Pengembalian Kelebihan Belanja Hibah Berdasarkan Koreksi Internal Inspektorat Daerah Kab. Demak atas Hibah Taun 2023 kepada Karang Taruna Kab. Demak pada Bangkesbangpol (Setoran I)	30.000.000,00
3	Pengembalian Kelebihan Belanja Hibah Berdasarkan Koreksi Internal Inspektorat Daerah Kab. Demak atas Hibah Taun 2023 kepada Karang Taruna Kab. Demak pada Bangkesbangpol (Lunas)	52.740.481,00
4	Pengembalian Sisa Anggaran Hibah KPU Kab. Demak Tahun 2024	8.745.011.642,00
5	Pengembalian Sisa Anggaran Hibah Bawaslu Kab. Demak Tahun 2024	1.028.032.196,00
	Jumlah	9.856.384.319,00

(2) Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebagai berikut :

NO REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.474.822.169.508,00	1.509.639.702.893,00	102,36	1.567.338.134.973,00	(3,68)
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	282.893.766.000,00	221.984.381.524,00	78,47	285.105.666.000,00	(22,14)
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	141.000.270.448,00	131.270.431.705,00	93,10	204.204.249.782,00	(35,72)
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	64.348.000.000,00	63.882.866.717,00	99,28	46.206.818.600,00	38,25
	JUMLAH	1.963.064.205.956,00	1.926.777.382.839,00	98,15	2.102.854.869.355,00	(8,37)

Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.963.064.205.956,00 dan realisasinya mencapai Rp1.926.777.382.839,00 atau 98,15%. Perolehan Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp176.077.486.516,00 atau 8,37% dibanding dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.102.854.869.355,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pendapatan dari Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan untuk periode Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut.

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN %
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	78.138.367.000,00	77.881.846.400,00	99,67	18.604.005.000,00	318,63
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.165.184.000,00	1.227.350.000,00	105,34	46.058.346.000,00	(97,34)
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	965.639.231.550,00	1.002.525.498.550,00	103,82	961.884.931.000,00	4,23
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	429.879.386.958,00	428.005.007.943,00	99,56	540.790.852.973,00	(20,86)
	JUMLAH	1.474.822.169.508,00	1.509.639.702.893,00	102,36	1.567.338.134.973,00	(3,68)

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.474.822.169.508,00 dan terealisasi sebesar Rp1.509.639.702.893,00 atau 102,36%. mengalami penurunan sebesar Rp57.698.432.080,00 atau (3,68)% bila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.567.338.134.973,00. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terdiri dari.

1) Bagi Hasil Pajak

Akun ini menggambarkan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.

NO REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
4.2.1.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.209.148.000,00	2.024.180.200,00	91,63	2.177.994.000,00	(7,06)
4.2.1.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	18.728.248.000,00	16.387.906.600,00	87,50	15.585.654.000,00	5,15
4.2.1.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	892.576.600,00	100,00	840.357.000,00	6,21
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	57.200.971.000,00	58.577.183.000,00	102,41	-	100
	JUMLAH	78.138.367.000,00	77.881.846.400,00	99,67	18.604.005.000,00	318,63

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp78.138.367.000,00 terealisasi sebesar Rp77.881.846.400,00 atau 99,67%. Mengalami peningkatan sebesar Rp59.277.841.400,00 atau 318,63% bila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.604.005.000,00. Dana Bagi Hasil CHT pada tahun 2024 masuk bagi hasil Sumber Daya Alam sedangkan tahun 2025 sesuai dengan SIPD tahun 2025 masuk dalam Bagi Hasil Pajak.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.

NO REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
4.2.1.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	-	44.422.380.000,00	(100,00)
4.2.1.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	54.094.000,00	64.785.000,00	119,76	50.578.000,00	28,09
4.2.1.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	43.186.000,00	100,00	81.907.000,00	(47,27)
4.2.1.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.885.000,00	18.174.000,00	183,85	35.619.000,00	(48,98)
4.2.1.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	-	100,00	2.000,00	(100,00)
4.2.1.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	123.660.000,00	123.660.000,00	100,00	208.934.000,00	(40,81)
4.2.1.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	977.545.000,00	977.545.000,00	100,00	1.258.926.000,00	(22,35)
	JUMLAH	1.165.184.000,00	1.227.350.000,00	105,34	46.058.346.000,00	(97,34)

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp1.165.184.000,00 terealisasi sebesar Rp1.227.350.000,00 atau 105,34%. Berkurang sebesar Rp44.830.996.000,00 atau 97,34% bila dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp46.058.346.000,00.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas DAU untuk periode Tahun 2025. DAU terealisasi sebesar Rp1.002.525.498.550,00 dari anggaran sebesar Rp965.639.231.550,00. Mengalami peningkatan sebesar 14,91% atau Rp 40.640.567.550,00 jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp961.884.931.000,00. Realisasi DAU melebihi dari anggaran yang dianggarkan karena adanya DAU tambahan untuk TPG. Pada tahun 2025 DAU di Pemerintah Kabupaten Demak yaitu:

a) DAU tambahan sebesar Rp36.886.267.000,00 digunakan untuk membayar TPG THR dan TPG Gaji 13 bagi guru di pemerintah Kabupaten Demak.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan DAU tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
4.2.01.01.02.0001	DAU	894.490.832.350,00	931.377.099.350,00	104,12	885.691.503.000,00	5,16
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	15.007.469.000,00	15.007.469.000,00	100,00	15.599.520.000,00	(3,80)
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	33.739.561.000,00	33.739.561.000,00	100,00	34.014.890.000,00	(0,81)
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.201.369.200,00	21.201.369.200,00	100,00	21.178.783.000,00	0,11
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	4.200.235.000,00	(100)
	JUMLAH	965.639.231.550,00	1.002.525.498.550,00	103,82	961.884.931.000,00	14,91

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas DAK untuk periode Tahun 2025. DAK terbagi atas 2 jenis sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus FISIK	32.349.425.000,00	29.870.990.180,00	92,34	166.945.979.977,00	(82,11)
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus Non FISIK	397.529.961.958,00	398.134.017.763,00	100,15	373.844.872.996,00	6,50
	JUMLAH	429.879.386.958,00	428.005.007.943,00	99,56	540.790.852.973,00	(20,86)

a) DAK Fisik

Anggaran pendapatan dari DAK Fisik Tahun 2025 sebesar Rp32.349.425.000,00 terealisasi sebesar Rp29.870.990.180,00 atau 92,34% maka mengalami Penurunan sebesar Rp137.074.989.797 atau 82,11% jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp166.945.979.977,00.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	899.922.000,00	-	-	250.242.000,00	(100,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	831.711.000,00	-	-	8.704.712.267,00	(100,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	228.000.000,00	203.600.000,00	89,30	5.878.692.880,00	(96,54)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	-	-	737.890.000,00	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	683.300.000,00	667.667.950,00	97,71	2.496.454.000,00	(73,26)
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	-	11.259.000.000,00	(100,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	106.644.547.000,00	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	-	-	-	-
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	7.691.191.650,00	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	-	-	-	-
17	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.006.492.000,00	6.797.137.750,00	97,01	7.453.263.000,00	(8,80)
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	-	-	-	-	-
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Kesiapan Sistem Kesehatan	22.700.000.000,00	22.202.584.480,00	97,81	15.661.755.580,00	41,76
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	168.231.600,00	(100,00)
JUMLAH		32.349.425.000,00	29.870.990.180,00	92,34	166.945.979.977,00	(82,11)

b) DAK Non Fisik

Anggaran pendapatan dari DAK Non Fisik Tahun 2025 sebesar Rp397.529.961.958,00 terealisasi sebesar Rp398.134.017.763,00 atau 100,15% maka bertambah sebesar Rp24.289.144.767 atau 6,50% jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp373.844.872.996,00.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	125.040.438.000,00	124.832.808.005,00	99,83	124.016.338.818,00	0,66
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.303.250.000,00	3.303.250.000,00	100,00	3.220.000.000,00	2,59
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	198.784.437.000,00	199.808.848.300,00	100,52	166.938.287.000,00	19,69
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	447.250.000,00	283.500.000,00	63,39	-	100,00
5	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	428.274.700,00	428.274.700,00	100,00	560.778.000,00	(23,63)
6	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	497.239.000,00	497.239.000,00	100,00	604.133.000,00	(17,69)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11.569.961.418,00	11.569.961.418,00	100,00	10.563.125.635,00	9,53
8	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	-	581.807.000,00	(100,00)
9	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	396.720.000,00	396.720.000,00	100,00	604.879.600,00	(34,41)
10	DAK Non Fisik-PK2UMK	-	-	-	413.198.725,00	100,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	23.506.572.000,00	23.472.884.000,00	99,86	23.653.410.000,00	100,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	390.000.000,00	375.000.000,00	96,15	450.000.000,00	100,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	6.109.090.000,00	6.108.802.500,00	100,00	6.486.670.000,00	100,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	225.000.000,00	100,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.401.596.763,00	7.401.596.763,00	100,00	10.361.300.411,00	100,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.975.133.077,00	18.975.133.077,00	100,00	25.165.944.807,00	100,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
17	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	-	100,00
	JUMLAH	397.529.961.958,00	398.134.017.763,00	100,15	373.844.872.996,00	6,50

Dak Non Fisik-TPG PNSD yang realisasinya melebihi 100% yaitu 100,52% disebabkan di pada bulan Desember terdapat penambahan alokasi sesuai dengan KMK baru Nomor 360 tahun 2025 tapi tidak dilakukan pergeseran penyesuaian anggaran karena sudah tidak memungkinkan waktunya.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Akun ini menggambarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk periode Tahun 2025 yang merupakan Dana Penyesuaian.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
4.2.01.05.01	Dana Desa - LRA	262.023.039.000,00	201.113.654.524,00	76,75	265.035.415.000,00	(24,12)
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	20.870.727.000,00	20.870.727.000,00	100,00	20.070.251.000,00	3,99
	JUMLAH	282.893.766.000,00	221.984.381.524,00	78,47	285.105.666.000,00	(22,14)

Anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk periode Tahun 2025 sebesar Rp282.893.766.000,00 yang terdiri dari Dana Desa di anggarakan sebesar Rp262.023.039.000,00 dan anggaran Insentif Fiskal Rp20.870.727.000,00 yang terealisasi sebesar Rp221.984.381.524,00 atau 78,47%. Maka berkurang sebesar Rp63.121.284.476,00 atau 22,14% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp285.105.666.000,00.

a) Dana Desa

Dana desa dianggarakan sebesar Rp262.023.039.000,00 yang terealisasi sebesar Rp201.113.654.524,00 atau 76,75%. Maka mengalami penurunan sebesar Rp63.921.760.476,00 atau 24,12% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp265.035.415.000,00. Penyebab realisasi Dana Desa tidak 100% berdasarkan PMK Nomor 108 Tahun 2025 bagi desa yang pada bulan September belum mengajukan pencairan, maka tidak dapat terealisasikan.

b) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal periode Tahun 2025 dibagi menjadi 2 jenis yaitu Reguler atau Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya dan Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang terealisasi sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.887.109.000,00	14.887.109.000,00	100,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	5.983.618.000,00	5.983.618.000,00	100,00
JUMLAH	20.870.727.000,00	20.870.727.000,00	100,00

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Provinsi untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN %
4.2.2.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.629.257.668,00	4.629.276.781,00	100,00	44.660.678.584,00	(89,63)
4.2.2.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.390.062.945,00	3.390.023.807,00	100,00	31.191.751.411,00	(89,13)
4.2.2.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	64.218.173.200,00	56.096.898.009,00	87,35	62.685.590.331,00	(10,51)
4.2.2.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	234.979.635,00	210.464.181,00	89,57	122.245.608,00	72,17
4.2.2.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	68.527.797.000,00	66.943.768.927,00	97,69	65.543.983.848,00	2,14
	JUMLAH	141.000.270.448,00	131.270.431.705,00	93,10	204.204.249.782,00	(35,72)

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah dianggarkan sebesar Rp141.000.270.448,00 realisasinya sebesar Rp131.270.431.705,00 atau 93,10% maka mengalami penurunan sebesar Rp72.933.818.077,00 atau 35,72% bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp204.204.249.782,00. Pendapatan dari Transfer Pemerintah Provinsi ini besarnya sangat tergantung pada kondisi/realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

d. Bantuan Keuangan

Akun ini menggambarkan transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN %
4.2.2.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	64.348.000.000,00	63.882.866.717,00	99,28	46.206.818.600,00	38,25
	JUMLAH	64.348.000.000,00	63.882.866.717,00	99,28	46.206.818.600,00	38,25

Pendapatan transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp64.348.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp63.882.866.717,00 atau sebesar 99,28%. Maka realisasi tahun 2025



mengalami peningkatan sebesar Rp17.676.048.117,00 atau 38,25% bila dibandingkan Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp46.206.818.600,00.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Akun ini menggambarkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut.

NO REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
04.03.01	Pendapatan Hibah					
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	5.610.000.000,00	(100,00)
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	4.488.538,00	100,00	98.106.446,00	(95,42)
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	9.856.384.319,00	-	-	717.493.800,00	(100,00)
	JUMLAH	9.856.384.319,00	4.488.538,00	0,05	6.425.600.246,00	(99,93)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.856.384.319,00 dengan realisasi sebesar Rp4.488.538,00 atau sebesar 0,05%, maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.421.111.708 atau 99,93% bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.425.600.246,00.

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.488.538,00 atau sebesar 100,00%, maka realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp93.617.908,00 atau 95,42% bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp98.106.446,00.

Berikut rincian Pendapatan Hibah - Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Pengembalian PPH 21 TPP P3K Bulan Februari 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Demak (dobel bayar)	3.316.809,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga (Double Bayar Ret IMB An. Arif Prasetyo - DINPUTARU)	268.200,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga (DIKPORA uji coba qiris)	3,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga (kelebihan bayar IMB DINPUTARU)	7.500,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga (DIKPORA uji coba qiris)	2,00
6	Penyetoran Dana Salah Transfer Tahun 2025 di Kecamatan Mranggen (SPAN SP2D 25999133021499900000)	896.024,00
	JUMLAH	4.488.538,00

**b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp 9.856.384.319,00 namun demikian realisasinya dicatat pada Lain-lain PAD Yang Sah - Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp9.856.384.319,00.

2. BELANJA DAERAH

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah untuk periode Tahun 2025 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN %
05.01	BELANJA OPERASI	2.097.774.650.558,34	1.975.548.173.052,20	94,17	1.938.674.244.470,00	1,90
05.02	BELANJA MODAL	239.177.959.437,00	221.122.666.897,00	92,45	279.183.716.609,00	(20,80)
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	1.541.000.000,00	339.610.000,00	22,04	-	-
	Jumlah	2.338.493.609.995,34	2.197.010.449.949,20	93,95	2.217.857.961.079,00	(0,94)

Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.338.493.609.995,34 dan terealisasi sebesar Rp2.197.010.449.949,20 atau sebesar 93,95%. Belanja Daerah Tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp20.847.511.129,80 atau sebesar 0,94% bila dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.217.857.961.079,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran dan realisasi Tahun 2025 sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN %
05.01.01	Belanja Pegawai	1.114.958.187.286,00	1.037.230.057.560,00	93,03	1.009.311.372.825,00	2,77
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	886.989.966.272,34	848.323.852.961,20	95,64	783.547.087.306,00	8,27
05.01.05	Belanja Hibah	82.965.510.000,00	78.198.840.531,00	94,25	131.867.184.339,00	(40,70)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	12.860.987.000,00	11.795.422.000,00	91,71	13.948.600.000,00	(15,44)
	Jumlah	2.097.774.650.558,34	1.975.548.173.052,20	94,17	1.938.674.244.470,00	1,90

Tahun 2025 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.097.774.650.558,34 dan terealisasi sebesar Rp1.975.548.173.052,20 atau 94,17%, maka mengalami peningkatan sebesar Rp36.873.928.582,20 atau 1,90% bila dibanding realisasi



Tahun 2024 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.938.674.244.470,00. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebesar Rp1.037.230.057.560,00 mengalami peningkatan sebesar Rp27.918.684.735,00 atau 2,77% bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.009.311.372.825,00. Adapun realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 terdiri dari.

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN %
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	600.290.751.207,00	561.340.065.745,00	93,51	555.827.700.972,00	0,99
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	373.943.818.350,00	342.176.367.148,00	91,50	100.372.753.247,00	240,91
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	186.854.727.694,00	(100,00)
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.787.903.411,00	36.383.962.948,00	98,90	31.213.425.384,00	16,57
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.715.413.032,00	1.133.469.436,00	66,08	1.333.219.368,00	(14,98)
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.300.322.700,00	1.249.296.000,00	96,08	1.034.288.000,00	20,79
5.1.1.99	Belanja Pegawai BLUD	100.919.978.586,00	94.946.896.283,00	94,08	132.675.258.160,00	(28,44)
	Jumlah	1.114.958.187.286,00	1.037.230.057.560,00	93,03	1.009.311.372.825,00	2,77

Pada tahun 2024 terdapat anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sedangkan pada tahun 2025 terdapat perubahan numenklatur rekening tersebut masuk dalam Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

Adapun realisasi Belanja pegawai secara rinci pada SKPD sebagai berikut:

1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	354.503.370.528,00	362.561.620.183,00	(8.058.249.655,00)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	103.570.462.613,00	99.874.448.398,00	3.696.014.215,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.264.229.753,00	9.257.321.600,00	6.908.153,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.730.919.861,00	2.190.389.552,00	540.530.309,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.013.981.498,00	3.582.025.793,00	431.955.705,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.321.462.268,00	1.656.144.718,00	665.317.550,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.299.084.422,00	1.976.805.002,00	322.279.420,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.915.870.689,00	2.420.165.420,00	495.705.269,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.091.181.486,00	5.432.076.478,00	659.105.008,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.411.710.541,00	2.317.346.065,00	94.364.476,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (RP)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.639.443.892,00	2.670.215.535,00	(30.771.643,00)
12	DINAS PERHUBUNGAN	2.573.118.453,00	2.107.850.725,00	465.267.728,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.676.380.226,00	2.303.050.073,00	373.330.153,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.333.624.086,00	1.910.783.663,00	422.840.423,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.775.999.683,00	1.580.316.214,00	195.683.469,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.076.503.087,00	1.864.982.769,00	211.520.318,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.856.878.656,00	1.709.961.373,00	146.917.283,00
18	DINAS PARIWISATA	2.134.425.046,00	1.842.106.681,00	292.318.365,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.280.629.884,00	7.988.156.544,00	292.473.340,00
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.122.354.820,00	3.755.265.939,00	367.088.881,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	8.828.635.352,00	8.161.606.235,00	667.029.117,00
22	SEKRETARIAT DPRD	2.331.803.277,00	1.933.804.626,00	397.998.651,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	3.921.399.317,00	3.235.081.262,00	686.318.055,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	2.786.358.346,00	2.412.693.634,00	373.664.712,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.777.916.222,00	3.511.814.616,00	266.101.606,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.122.640.502,00	2.682.595.981,00	440.044.521,00
27	KECAMATAN DEMAK	2.486.175.639,00	2.290.678.111,00	195.497.528,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	849.629.754,00	753.661.609,00	95.968.145,00
29	KECAMATAN DEMPET	711.966.730,00	686.876.291,00	25.090.439,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	878.306.606,00	815.656.732,00	62.649.874,00
31	KECAMATAN MIJEN	721.172.650,00	765.810.768,00	(44.638.118,00)
32	KECAMATAN GAJAH	958.261.598,00	882.969.913,00	75.291.685,00
33	KECAMATAN BONANG	967.436.461,00	875.624.131,00	91.812.330,00
34	KECAMATAN WEDUNG	1.081.718.237,00	927.185.947,00	154.532.290,00
35	KECAMATAN SAYUNG	1.242.931.885,00	1.327.699.849,00	(84.767.964,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	952.234.160,00	717.143.249,00	235.090.911,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	709.763.442,00	722.292.219,00	(12.528.777,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	1.017.011.588,00	1.039.751.422,00	(22.739.834,00)
39	KECAMATAN KARANGAWEN	1.098.661.718,00	1.166.824.461,00	(68.162.743,00)
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	695.466.422,00	636.892.500,00	58.573.922,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.608.944.347,00	1.280.004.691,00	328.939.656,00
	JUMLAH	561.340.065.745,00	555.827.700.972,00	5.512.364.773,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	233.330.320.285,00	183.835.929.090,00	49.494.391.195,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	27.662.808.067,00	28.203.494.998,00	(540.686.931,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.407.903.629,00	5.457.895.680,00	(49.992.051,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.885.635.801,00	1.645.499.500,00	240.136.301,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.537.910.250,00	2.276.837.840,00	261.072.410,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.674.096.594,00	1.374.840.000,00	299.256.594,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.696.768.316,00	1.551.874.712,00	144.893.604,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.280.314.622,00	1.926.936.946,00	353.377.676,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.555.202.049,00	3.138.154.570,00	417.047.479,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.652.536.099,00	1.637.131.944,00	15.404.155,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.018.580.459,00	1.882.698.875,00	135.881.584,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	1.778.182.066,00	1.584.013.680,00	194.168.386,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.991.430.743,00	1.734.194.272,00	257.236.471,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.767.557.006,00	1.547.431.200,00	220.125.806,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.320.461.950,00	1.362.280.180,00	(41.818.230,00)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.496.255.634,00	1.388.830.480,00	107.425.154,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.511.477.603,00	1.467.700.000,00	43.777.603,00
18	DINAS PARIWISATA	1.576.497.315,00	1.473.140.000,00	103.357.315,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5.862.577.971,00	5.662.990.649,00	199.587.322,00
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.691.901.476,00	2.534.971.720,00	156.929.756,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	7.177.190.261,00	7.257.864.450,00	(80.674.189,00)
22	SEKRETARIAT DPRD	1.745.051.738,00	1.533.542.000,00	211.509.738,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	3.815.460.607,00	3.632.249.889,00	183.210.718,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	2.132.550.486,00	1.917.180.000,00	215.370.486,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	10.794.998.088,00	8.898.967.146,00	1.896.030.942,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.348.361.902,00	2.154.183.989,00	194.177.913,00
27	KECAMATAN DEMAK	1.653.983.535,00	1.569.985.640,00	83.997.895,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	672.994.665,00	672.888.200,00	106.465,00
29	KECAMATAN DEMPET	454.713.125,00	444.329.456,00	10.383.669,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	558.939.997,00	572.468.000,00	(13.528.003,00)
31	KECAMATAN MIJEN	500.945.997,00	501.676.400,00	(730.403,00)
32	KECAMATAN GAJAH	586.895.997,00	598.660.000,00	(11.764.003,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
33	KECAMATAN BONANG	552.880.437,00	526.533.840,00	26.346.597,00
34	KECAMATAN WEDUNG	623.070.664,00	590.220.000,00	32.850.664,00
35	KECAMATAN SAYUNG	668.538.620,00	736.095.680,00	(67.557.060,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	633.087.997,00	533.550.557,00	99.537.440,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	442.053.197,00	462.103.520,00	(20.050.323,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	652.641.308,00	622.042.870,00	30.598.438,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	695.431.997,00	757.760.000,00	(62.328.003,00)
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	472.640.509,00	434.370.780,00	38.269.729,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.295.518.086,00	1.123.962.188,00	171.555.898,00
	JUMLAH	342.176.367.148,00	287.227.480.941,00	54.948.886.207,00

Pada tahun 2024 terdapat realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp186.854.727.694,00 sedangkan pada tahun 2025 terdapat perubahan numenklatur rekening tersebut masuk dalam Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sehingga realisasi tahun 2024 untuk rekening Belanja Tambahan Penghasilan ASN menjadi Rp287.227.480.941,00.

3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan Rp36.787.903.411,00 di Sekretariat DPRD dan terealisasi Rp36.383.962.948,00.

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	SEKRETARIAT DPRD	36.383.962.948,00	31.213.425.384,00	5.170.537.564,00
	JUMLAH	36.383.962.948,00	31.213.425.384,00	5.170.537.564,00

4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan Rp1.715.413.032,00 terealisasi Rp1.133.469.436,00, yang terdiri dari gaji dan tunjangan, insentif pajak dan retribusi KDH/WKDH.

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	SEKRETARIAT DAERAH	232.987.839,00	173.461.770,00	59.526.069,00
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	900.481.597,00	1.159.757.598,00	(259.276.001,00)
	JUMLAH	1.133.469.436,00	1.333.219.368,00	(199.749.932,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	SEKRETARIAT DAERAH	901.800.000,00	717.000.000,00	184.800.000,00
2	SEKRETARIAT DPRD	347.496.000,00	317.288.000,00	30.208.000,00
	JUMLAH	1.249.296.000,00	1.034.288.000,00	215.008.000,00

6) Belanja Pegawai BLUD

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (RP)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	13.916.562.520,00	31.681.702.648,00	(17.765.140.128,00)
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	36.302.030.476,00	58.226.013.560,00	(21.923.983.084,00)
3	PUSKESMAS DEMAK I	919.189.360,00	888.052.615,00	31.136.745,00
4	PUSKESMAS DEMAK II	1.193.464.862,00	1.203.764.347,00	(10.299.485,00)
5	PUSKESMAS DEMAK III	979.738.599,00	993.170.750,00	(13.432.151,00)
6	PUSKESMAS BONANG I	2.786.993.072,00	2.668.274.803,00	118.718.269,00
7	PUSKESMAS BONANG II	2.085.371.264,00	1.726.778.352,00	358.592.912,00
8	PUSKESMAS WEDUNG I	1.971.497.036,00	1.921.485.842,00	50.011.194,00
9	PUSKESMAS WEDUNG II	1.619.277.820,00	1.609.364.093,00	9.913.727,00
10	PUSKESMAS MIJEN I	1.382.182.008,00	1.198.507.140,00	183.674.868,00
11	PUSKESMAS MIJEN II	1.037.058.569,00	982.380.019,00	54.678.550,00
12	PUSKESMAS KARANGANYAR I	1.676.589.647,00	1.608.497.865,00	68.091.782,00
13	PUSKESMAS KARANGANYAR II	1.455.440.510,00	1.428.951.367,00	26.489.143,00
14	PUSKESMAS GAJAH I	1.648.976.735,00	1.729.881.298,00	(80.904.563,00)
15	PUSKESMAS GAJAH II	1.119.040.256,00	966.192.827,00	152.847.429,00
16	PUSKESMAS SAYUNG I	1.812.923.490,00	1.723.034.848,00	89.888.642,00
17	PUSKESMAS SAYUNG II	1.560.561.734,00	1.272.977.434,00	287.584.300,00
18	PUSKESMAS KARANGAWEN I	1.981.149.937,00	1.840.570.104,00	140.579.833,00
19	PUSKESMAS KARANGAWEN II	2.180.947.645,00	2.342.335.900,00	(161.388.255,00)
20	PUSKESMAS DEMPET	2.388.294.642,00	2.326.757.020,00	61.537.622,00
21	PUSKESMAS GUNTUR I	2.389.931.244,00	2.424.576.730,00	(34.645.486,00)
22	PUSKESMAS GUNTUR II	1.806.143.150,00	1.781.674.175,00	24.468.975,00
23	PUSKESMAS MRANGGEN I	1.384.021.339,00	1.236.175.963,00	147.845.376,00
24	PUSKESMAS MRANGGEN II	1.272.608.676,00	1.352.112.964,00	(79.504.288,00)
25	PUSKESMAS MRANGGEN III	1.565.822.264,00	1.517.499.185,00	48.323.079,00
26	PUSKESMAS WONOSALAM I	1.528.905.639,00	1.518.023.965,00	10.881.674,00
27	PUSKESMAS WONOSALAM II	1.550.737.004,00	1.562.121.635,00	(11.384.631,00)
28	PUSKESMAS KARANGTENGAH	1.967.260.421,00	1.616.058.772,00	351.201.649,00
29	PUSKESMAS KEBONAGUNG	1.464.176.364,00	1.328.321.939,00	135.854.425,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
	JUMLAH	94.946.896.283,00	132.675.258.160,00	(37.728.361.877,00)

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp848.323.852.961,20 atau 95,64% dari anggaran sebesar Rp886.989.966.272,34 dimana dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp64.776.765.655,20 atau 8,27% bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp783.547.087.306,00.

Adapun realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2025 terdiri dari :

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN %
5.1.02.01	Belanja Barang	230.751.065.354,17	214.192.184.175,00	92,82	210.614.086.298,00	1,70
5.1.02.02	Belanja Jasa	228.776.005.611,13	215.853.990.038,00	94,35	208.962.633.775,00	3,30
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	52.348.596.893,00	50.689.293.535,00	96,83	51.696.644.257,00	(1,95)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	47.459.154.717,70	44.480.241.482,00	93,72	58.555.993.474,00	(24,04)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.763.369.200,00	31.348.987.000,00	95,68	28.244.048.500,00	10,99
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	88.127.176.921,00	87.646.241.794,00	99,45	88.654.296.280,00	(1,14)
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.401.044.000,00	17.334.735.830,00	99,62	20.317.140.909,00	100,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	189.363.553.575,34	186.778.179.107,20	98,63	116.502.243.813,00	60,32
	Jumlah	886.989.966.272,34	848.323.852.961,20	95,64	783.547.087.306,00	8,27

Adapun realisasi secara rinci pada SKPD sebagai berikut.

1) Belanja Barang

Belanja barang merupakan belanja barang habis pakai, dimana terdapat perbedaan nomenklatur kode rekening dan belanja pada Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya.

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.615.819.283,00	4.476.934.845,00	138.884.438,00
2	DINAS KESEHATAN	14.400.642.702,00	18.543.053.363,00	(4.142.410.661,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	41.430.253.565,00	35.208.973.532,00	6.221.280.033,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	63.193.217.927,00	60.563.325.780,00	2.629.892.147,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
	PERMUKIMAN			
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.384.042.321,00	1.317.958.432,00	66.083.889,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.278.929.753,00	884.702.070,00	394.227.683,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.002.156.406,00	2.073.143.130,00	(70.986.724,00)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.148.176.310,00	1.483.273.482,00	664.902.828,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.205.723.029,00	4.627.843.300,00	577.879.729,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.143.114.510,00	1.666.560.450,00	476.554.060,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK	4.705.334.125,00	6.179.762.417,00	(1.474.428.292,00)
12	DINAS PERHUBUNGAN	1.024.395.087,00	1.426.999.733,00	(402.604.646,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	860.747.548,00	717.740.565,00	143.006.983,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	464.165.892,00	640.591.400,00	(176.425.508,00)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.081.350.398,00	6.071.315.435,00	(1.989.965.037,00)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	774.240.012,00	367.515.800,00	406.724.212,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.156.406.119,00	3.237.581.182,00	918.824.937,00
18	DINAS PARIWISATA	1.176.329.150,00	1.111.511.755,00	64.817.395,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	29.798.146.466,00	34.953.591.305,00	(5.155.444.839,00)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.768.257.625,00	1.839.154.165,00	(70.896.540,00)
21	SEKRETARIAT DAERAH	8.603.172.606,00	6.478.856.647,00	2.124.315.959,00
22	SEKRETARIAT DPRD	3.590.931.511,00	3.189.272.424,00	401.659.087,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	1.359.522.687,00	656.917.080,00	702.605.607,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.442.379.762,00	1.380.400.914,00	61.978.848,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.579.666.510,00	3.506.333.493,00	73.333.017,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.169.469.717,00	917.425.907,00	252.043.810,00
27	KECAMATAN DEMAK	1.657.594.405,00	1.465.418.275,00	192.176.130,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	436.378.675,00	300.842.280,00	135.536.395,00
29	KECAMATAN DEMPET	238.238.550,00	229.208.700,00	9.029.850,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	294.313.170,00	269.879.986,00	24.433.184,00
31	KECAMATAN MIJEN	347.410.000,00	331.349.600,00	16.060.400,00
32	KECAMATAN GAJAH	350.189.100,00	225.401.400,00	124.787.700,00
33	KECAMATAN BONANG	288.914.140,00	322.068.036,00	(33.153.896,00)
34	KECAMATAN WEDUNG	402.502.310,00	337.106.800,00	65.395.510,00
35	KECAMATAN SAYUNG	315.405.775,00	272.220.617,00	43.185.158,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	277.513.575,00	297.758.500,00	(20.244.925,00)
37	KECAMATAN MRANGGEN	409.637.925,00	292.343.248,00	117.294.677,00
38	KECAMATAN GUNTUR	336.011.700,00	262.655.600,00	73.356.100,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	318.598.181,00	266.021.540,00	52.576.641,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	335.456.898,00	282.605.960,00	52.850.938,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.827.428.750,00	1.938.467.150,00	(111.038.400,00)
	JUMLAH	214.192.184.175,00	210.614.086.298,00	3.578.097.877,00

2) Belanja Jasa

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		2025	2024	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17.572.352.233,00	19.362.612.102,00	(1.790.259.869,00)
2	DINAS KESEHATAN	73.181.054.148,00	72.150.109.961,00	1.030.944.187,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.621.844.368,00	11.099.514.564,00	1.522.329.804,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.290.258.829,00	2.178.271.688,00	111.987.141,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.228.403.493,00	3.269.250.826,00	(40.847.333,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.007.685.688,00	843.693.868,00	163.991.820,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.250.640.266,00	3.661.289.740,00	589.350.526,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	3.693.208.366,00	1.221.623.657,00	2.471.584.709,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.171.136.730,00	6.312.659.502,00	(141.522.772,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.008.226.096,00	2.032.467.264,00	(24.241.168,00)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK	9.387.118.155,00	9.372.906.299,00	14.211.856,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	23.676.933.250,00	24.533.784.422,00	(856.851.172,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.113.834.382,00	4.390.123.216,00	(276.288.834,00)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	604.365.537,00	766.315.188,00	(161.949.651,00)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.071.561.348,00	2.315.194.101,00	(243.632.753,00)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.044.310.872,00	962.473.860,00	81.837.012,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	840.866.777,00	664.549.218,00	176.317.559,00
18	DINAS PARIWISATA	1.993.595.294,00	2.086.021.490,00	(92.426.196,00)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3.026.005.721,00	2.745.707.251,00	280.298.470,00
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.096.763.890,00	6.080.506.018,00	16.257.872,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	9.318.131.060,00	9.718.687.665,00	(400.556.605,00)
22	SEKRETARIAT DPRD	4.710.700.836,00	4.321.125.268,00	389.575.568,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	3.056.227.798,00	1.482.740.266,00	1.573.487.532,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.353.604.909,00	4.836.493.538,00	(482.888.629,00)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	4.475.744.036,00	4.291.980.511,00	183.763.525,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.860.802.254,00	1.447.650.357,00	413.151.897,00
27	KECAMATAN DEMAK	1.515.831.986,00	1.286.802.747,00	229.029.239,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(RP)
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	262.913.486,00	210.521.850,00	52.391.636,00
29	KECAMATAN DEMPET	241.048.938,00	246.043.594,00	(4.994.656,00)
30	KECAMATAN WONOSALAM	333.038.749,00	272.123.672,00	60.915.077,00
31	KECAMATAN MIJEN	332.629.439,00	332.807.770,00	(178.331,00)
32	KECAMATAN GAJAH	352.117.764,00	313.165.587,00	38.952.177,00
33	KECAMATAN BONANG	305.738.360,00	263.378.583,00	42.359.777,00
34	KECAMATAN WEDUNG	270.667.040,00	268.321.066,00	2.345.974,00
35	KECAMATAN SAYUNG	253.500.881,00	304.174.674,00	(50.673.793,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	316.550.290,00	250.389.841,00	66.160.449,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	390.001.894,00	319.126.604,00	70.875.290,00
38	KECAMATAN GUNTUR	306.519.765,00	250.038.250,00	56.481.515,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	253.344.001,00	240.871.926,00	12.472.075,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	242.816.064,00	198.229.918,00	44.586.146,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.821.895.045,00	2.058.885.853,00	1.763.009.192,00
	JUMLAH	215.853.990.038,00	208.962.633.775,00	6.891.356.263,00

3) Belanja Pemeliharaan

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(RP)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.914.201.838,00	20.914.846.400,00	15.110.669.700,00
2	DINAS KESEHATAN	762.190.827,00	502.424.100,00	107.219.178,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.058.769.642,00	18.395.929.380,00	10.553.683.758,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	311.554.478,00	393.634.058,00	84.320.058,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	451.333.443,00	224.525.628,00	(63.945.900,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	293.621.024,00	319.168.006,00	(2.968.914,00)
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	701.864.150,00	296.869.000,00	48.149.621,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	372.265.700,00	155.470.000,00	(2.020.278.802,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.803.662.536,00	1.750.274.371,00	1.563.439.095,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	325.584.542,00	141.436.902,00	(286.373.631,00)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK	429.322.906,00	427.177.937,00	(6.660.963,00)
12	DINAS PERHUBUNGAN	575.649.543,00	384.573.527,00	283.567.527,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	130.060.016,00	270.384.108,00	19.974.173,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	253.122.330,00	676.736.707,00	513.257.582,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	819.897.681,00	488.428.389,00	427.172.628,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	78.606.019,00	45.328.888,00	(40.371.048,00)
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	481.349.490,00	279.006.097,00	(50.004.504,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(RP)
18	DINAS PARIWISATA	284.296.609,00	207.255.000,00	34.417.000,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	186.942.780,00	257.842.412,00	171.052.078,00
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.431.044.080,00	632.292.478,00	(168.284.313,00)
21	SEKRETARIAT DAERAH	1.497.734.691,00	1.543.398.334,00	341.452.149,00
22	SEKRETARIAT DPRD	855.150.610,00	1.059.109.156,00	(77.800.473,00)
23	INSPEKTORAT DAERAH	509.285.731,00	193.629.016,00	110.828.366,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	383.374.322,00	658.201.944,00	(191.707.214,00)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.063.054.444,00	620.738.084,00	514.833.828,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	106.379.316,00	110.555.184,00	(90.112.784,00)
27	KECAMATAN DEMAK	524.380.874,00	173.729.631,00	13.488.731,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	97.779.500,00	54.240.500,00	28.357.799,00
29	KECAMATAN DEMPET	144.437.000,00	8.560.000,00	(23.245.432,00)
30	KECAMATAN WONOSALAM	118.227.317,00	24.162.500,00	(3.503.499,00)
31	KECAMATAN MIJEN	47.478.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)
32	KECAMATAN GAJAH	43.285.000,00	24.620.000,00	(40.330.000,00)
33	KECAMATAN BONANG	141.314.899,00	51.326.082,00	(12.093.119,00)
34	KECAMATAN WEDUNG	137.186.658,00	60.829.002,00	55.029.002,00
35	KECAMATAN SAYUNG	125.823.242,00	62.480.683,00	37.716.182,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	22.222.413,00	137.646.687,00	126.396.687,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	49.369.959,00	28.033.624,00	10.291.627,00
38	KECAMATAN GUNTUR	35.288.794,00	26.179.864,00	(10.875.996,00)
39	KECAMATAN KARANGAWEN	42.836.250,00	25.575.320,00	(6.862.569,00)
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	13.525.881,00	15.951.871,00	(21.142.629,00)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	65.819.000,00	43.073.387,00	17.494.337,00
	JUMLAH	50.689.293.535,00	51.696.644.257,00	27.055.249.316,00

4) Belanja Perjalanan Dinas

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(RP)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.279.828.951,00	1.391.577.232,00	(111.748.281,00)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	3.120.338.222,00	5.271.536.668,00	(2.151.198.446,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.045.948.684,00	1.222.100.789,00	(176.152.105,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	747.039.189,00	891.795.139,00	(144.755.950,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.362.045.236,00	1.543.324.684,00	(181.279.448,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	763.914.988,00	962.023.137,00	(198.108.149,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(RP)
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	507.628.141,00	753.426.451,00	(245.798.310,00)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	459.598.761,00	552.575.930,00	(92.977.169,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	524.277.235,00	713.190.153,00	(188.912.918,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	417.408.094,00	404.221.782,00	13.186.312,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.112.117.680,00	3.695.452.194,00	416.665.486,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	459.873.578,00	455.333.024,00	4.540.554,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	301.055.659,00	468.174.992,00	(167.119.333,00)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	227.145.421,00	571.930.552,00	(344.785.131,00)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	479.433.418,00	630.844.440,00	(151.411.022,00)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	326.359.039,00	464.702.580,00	(138.343.541,00)
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	342.299.986,00	446.079.009,00	(103.779.023,00)
18	DINAS PARIWISATA	277.251.500,00	323.869.750,00	(46.618.250,00)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	398.657.644,00	807.666.772,00	(409.009.128,00)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	359.417.360,00	660.912.546,00	(301.495.186,00)
21	SEKRETARIAT DAERAH	3.714.336.517,00	3.420.711.776,00	293.624.741,00
22	SEKRETARIAT DPRD	15.445.701.007,00	24.567.382.452,00	(9.121.681.445,00)
23	INSPEKTORAT DAERAH	2.426.033.491,00	1.127.768.660,00	1.298.264.831,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1.230.736.826,00	1.742.467.153,00	(511.730.327,00)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	908.718.790,00	1.126.795.287,00	(218.076.497,00)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	459.881.869,00	719.267.481,00	(259.385.612,00)
27	KECAMATAN DEMAK	1.144.613.547,00	1.105.225.720,00	39.387.827,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	96.800.000,00	219.473.992,00	(122.673.992,00)
29	KECAMATAN DEMPET	75.965.000,00	132.285.000,00	(56.320.000,00)
30	KECAMATAN WONOSALAM	61.795.000,00	145.266.100,00	(83.471.100,00)
31	KECAMATAN MIJEN	84.004.200,00	115.215.000,00	(31.210.800,00)
32	KECAMATAN GAJAH	100.310.000,00	170.180.000,00	(69.870.000,00)
33	KECAMATAN BONANG	118.805.000,00	177.272.937,00	(58.467.937,00)
34	KECAMATAN WEDUNG	87.965.000,00	177.400.000,00	(89.435.000,00)
35	KECAMATAN SAYUNG	86.255.000,00	150.145.000,00	(63.890.000,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	132.379.686,00	204.765.000,00	(72.385.314,00)
37	KECAMATAN MRANGGEN	65.227.500,00	155.600.000,00	(90.372.500,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	66.010.000,00	134.810.000,00	(68.800.000,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(RP)
39	KECAMATAN KARANGAWEN	92.802.180,00	147.215.730,00	(54.413.550,00)
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	62.115.000,00	156.309.500,00	(94.194.500,00)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	508.147.083,00	429.698.862,00	78.448.221,00
	JUMLAH	44.480.241.482,00	58.555.993.474,00	(14.075.751.992,00)

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(RP)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	310.850.000,00	379.430.000,00	(68.580.000,00)
2	DINAS KESEHATAN	1.566.000.000,00	2.110.500.000,00	(544.500.000,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	85.000.000,00	106.750.000,00	(21.750.000,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.500.000,00	18.750.000,00	(6.250.000,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	58.000.000,00	-	58.000.000,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	63.750.000,00	25.625.000,00	38.125.000,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.400.600.000,00	13.575.450.000,00	(1.174.850.000,00)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	667.725.000,00	282.250.000,00	385.475.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	121.000.000,00	238.000.000,00	(117.000.000,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	53.750.000,00	16.500.000,00	37.250.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK	6.889.762.000,00	4.426.670.000,00	2.463.092.000,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	1.582.675.000,00	35.725.000,00	1.546.950.000,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.000.000,00	-	24.000.000,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.250.000,00	75.000.000,00	(68.750.000,00)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	232.450.000,00	385.665.000,00	(153.215.000,00)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	63.250.000,00	2.500.000,00	60.750.000,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.000.000,00	47.000.000,00	(8.000.000,00)
18	DINAS PARIWISATA	90.500.000,00	75.375.000,00	15.125.000,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	399.125.000,00	740.875.000,00	(341.750.000,00)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	273.500.000,00	404.875.000,00	(131.375.000,00)
21	SEKRETARIAT DAERAH	1.322.500.000,00	1.181.875.000,00	140.625.000,00
22	SEKRETARIAT DPRD	48.500.000,00	4.250.000,00	44.250.000,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	216.875.000,00	6.000.000,00	210.875.000,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	272.500.000,00	282.125.000,00	(9.625.000,00)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.780.675.000,00	2.214.858.500,00	565.816.500,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	30.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00
27	KECAMATAN DEMAK	151.625.000,00	261.000.000,00	(109.375.000,00)
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	72.500.000,00	36.750.000,00	35.750.000,00
29	KECAMATAN DEMPET	67.625.000,00	63.750.000,00	3.875.000,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	106.875.000,00	47.500.000,00	59.375.000,00
31	KECAMATAN MIJEN	75.000.000,00	36.500.000,00	38.500.000,00
32	KECAMATAN GAJAH	64.750.000,00	67.500.000,00	(2.750.000,00)
33	KECAMATAN BONANG	56.750.000,00	55.500.000,00	1.250.000,00
34	KECAMATAN WEDUNG	15.000.000,00	8.750.000,00	6.250.000,00
35	KECAMATAN SAYUNG	38.000.000,00	73.000.000,00	(35.000.000,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	8.500.000,00	27.625.000,00	(19.125.000,00)
37	KECAMATAN MRANGGEN	79.625.000,00	65.625.000,00	14.000.000,00
38	KECAMATAN GUNTUR	128.125.000,00	83.750.000,00	44.375.000,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	70.000.000,00	55.375.000,00	14.625.000,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	87.250.000,00	8.750.000,00	78.500.000,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	716.625.000,00	698.625.000,00	18.000.000,00
	JUMLAH	31.348.987.000,00	28.244.048.500,00	3.104.938.500,00

6) Belanja Barang dan Jasa BOSP

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	87.646.241.794,00	88.654.296.280,00	(1.008.054.486,00)
	JUMLAH	87.646.241.794,00	88.654.296.280,00	(1.008.054.486,00)

7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	%
		2025	2024	
		(Rp)	(Rp)	
1	PUSKESMAS DEMAK I	630.337.000,00	726.465.000,00	96,95
2	PUSKESMAS DEMAK II	620.797.000,00	666.418.000,00	91,13
3	PUSKESMAS DEMAK III	632.736.000,00	745.033.000,00	99,46
4	PUSKESMAS BONANG I	625.803.000,00	736.250.000,00	99,87
5	PUSKESMAS BONANG II	644.261.000,00	930.262.735,00	97,28
6	PUSKESMAS WEDUNG I	653.168.000,00	929.093.764,00	96,05
7	PUSKESMAS WEDUNG II	637.655.000,00	750.461.000,00	99,9
8	PUSKESMAS MIJEN I	642.816.500,00	760.474.000,00	99,87
9	PUSKESMAS MIJEN II	624.849.000,00	738.798.000,00	99,73

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	%
		2025	2024	
		(Rp)	(Rp)	
10	PUSKESMAS KARANGANYAR I	618.964.000,00	758.054.000,00	99,71
11	PUSKESMAS KARANGANYAR II	623.202.000,00	196.560.000,00	100
12	PUSKESMAS GAJAH I	635.592.000,00	744.770.000,00	99,48
13	PUSKESMAS GAJAH II	623.578.000,00	734.190.000,00	100
14	PUSKESMAS SAYUNG I	660.455.000,00	763.922.000,00	97,24
15	PUSKESMAS SAYUNG II	634.324.000,00	747.743.000,00	99,98
16	PUSKESMAS KARANGAWEN I	663.886.000,00	924.681.305,00	93,64
17	PUSKESMAS KARANGAWEN II	647.812.000,00	762.041.000,00	99,88
18	PUSKESMAS DEMPET	656.191.000,00	772.503.000,00	99,98
19	PUSKESMAS GUNTUR I	644.838.000,00	757.667.000,00	99,75
20	PUSKESMAS GUNTUR II	630.400.000,00	740.054.000,00	99,32
21	PUSKESMAS MRANGGEN I	665.151.000,00	787.063.000,00	99,97
22	PUSKESMAS MRANGGEN II	650.890.000,00	619.577.000,00	92,29
23	PUSKESMAS MRANGGEN III	658.284.000,00	931.221.105,00	95,24
24	PUSKESMAS WONOSALAM I	657.449.000,00	781.322.000,00	99,98
25	PUSKESMAS WONOSALAM II	636.244.000,00	749.511.000,00	99,96
26	PUSKESMAS KARANGTENGAH	658.512.330,00	790.648.000,00	99,99
27	PUSKESMAS KEBONAGUNG	656.541.000,00	772.358.000,00	99,89
	JUMLAH	17.334.735.830,00	20.317.140.909,00	98,26

8) Belanja Barang dan Jasa BLUD

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		2025	2024	(RP)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	97.922.537.687,00	63.972.960.329,00	33.949.577.358,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	68.703.313.728,20	35.660.063.182,00	33.043.250.546,20
3	PUSKESMAS DEMAK I	325.236.436,00	252.071.129,00	73.165.307,00
4	PUSKESMAS DEMAK II	256.215.797,00	271.515.601,00	(15.299.804,00)
5	PUSKESMAS DEMAK III	284.893.117,00	260.374.632,00	24.518.485,00
6	PUSKESMAS BONANG I	1.599.109.880,00	1.043.417.676,00	555.692.204,00
7	PUSKESMAS BONANG II	680.397.351,00	681.162.540,00	(765.189,00)
8	PUSKESMAS WEDUNG I	1.101.608.924,00	663.520.099,00	438.088.825,00
9	PUSKESMAS WEDUNG II	869.429.504,00	674.937.984,00	194.491.520,00
10	PUSKESMAS MIJEN I	747.092.308,00	831.006.428,00	(83.914.120,00)
11	PUSKESMAS MIJEN II	330.765.561,00	285.088.196,00	45.677.365,00
12	PUSKESMAS KARANGANYAR I	602.848.049,00	496.328.489,00	106.519.560,00
13	PUSKESMAS KARANGANYAR II	717.140.668,00	509.062.807,00	208.077.861,00
14	PUSKESMAS GAJAH I	912.049.894,00	628.532.078,00	283.517.816,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI	REALISASI	BERTAMBAH/
		2025	2024	(BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(RP)
15	PUSKESMAS GAJAH II	575.304.770,00	544.802.495,00	30.502.275,00
16	PUSKESMAS SAYUNG I	544.640.773,00	406.457.819,00	138.182.954,00
17	PUSKESMAS SAYUNG II	703.612.920,00	544.463.954,00	159.148.966,00
18	PUSKESMAS KARANGAWEN I	921.639.656,00	1.125.742.847,00	(204.103.191,00)
19	PUSKESMAS KARANGAWEN II	769.082.764,00	732.881.686,00	36.201.078,00
20	PUSKESMAS DEMPET	1.022.082.711,00	924.252.839,00	97.829.872,00
21	PUSKESMAS GUNTUR I	1.247.342.920,00	1.421.414.477,00	(174.071.557,00)
22	PUSKESMAS GUNTUR II	491.952.052,00	405.272.639,00	86.679.413,00
23	PUSKESMAS MRANGGEN I	639.605.566,00	712.615.436,00	(73.009.870,00)
24	PUSKESMAS MRANGGEN II	416.602.198,00	409.171.612,00	7.430.586,00
25	PUSKESMAS MRANGGEN III	885.467.844,00	721.175.716,00	164.292.128,00
26	PUSKESMAS WONOSALAM I	744.069.628,00	410.289.169,00	333.780.459,00
27	PUSKESMAS WONOSALAM II	1.085.175.101,00	523.923.977,00	561.251.124,00
28	PUSKESMAS KARANGTENGAH	706.820.483,00	679.640.264,00	27.180.219,00
29	PUSKESMAS KEBONAGUNG	972.140.817,00	710.097.713,00	262.043.104,00
	JUMLAH	186.778.179.107,20	116.502.243.813	70.275.935.294

5. Belanja Hibah

Belanja Hibah untuk Tahun 2025 dianggarkan Rp82.965.510.000,00 dan direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp78.198.840.531,00 atau sebesar 94,25 %.

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.652.838.000,00	54.930.774.806,00	92,08	115.430.041.468,00	(52,41)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.686.472.000,00	2.686.472.000,00	100,00	1.593.910.700,00	68,55
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	20.626.200.000,00	20.581.593.725,00	99,78	14.843.232.171,00	38,66
	Jumlah	82.965.510.000,00	78.198.840.531,00	94,25	131.867.184.339,00	(40,70)

Pada tahun 2025 realisasi Belanja Hibah Sebesar Rp78.198.840.531,00 terdiri dari Belanja hibah kepada Pemerintah pusat, Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Belanja Hibah Dana BOSP bila di dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp131.867.184.339,00 maka berkurang Rp53.668.343.808,00 atau 41,39%, Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Belanja Hibah terdiri dari hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan merupakan hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi dan kelompok masyarakat.

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.485.692.950,00	45.498.963.350,00	(13.013.270.400,00)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.004.297.700,00	12.849.000.000,00	(4.844.702.300,00)
3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.032.513.156,00	3.841.940.718,00	190.572.438,00
5	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	265.000.000,00	50.000.000,00	215.000.000,00
6	DINAS PARIWISATA	200.000.000,00	-	200.000.000,00
7	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.050.000.000,00	300.000.000,00	750.000.000,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	6.525.000.000,00	11.775.000.000,00	(5.250.000.000,00)
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.368.271.000,00	41.075.137.400,00	(38.706.866.400,00)
	JUMLAH	54.930.774.806,00	115.430.041.468,00	(60.499.266.662,00)

- 2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

NO	SKPD	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.686.472.000,00	1.593.910.700,00	1.092.561.300,00
	JUMLAH	2.686.472.000,00	1.593.910.700,00	1.092.561.300,00

Berikut rincian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2025.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	BANTUAN PER SUARA (Rp)	BESARAN BANTUAN DENGAN PEMBULATAN (Rp)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	162.788	4.000,00	651.152.000,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	168.701	4.000,00	674.804.000,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (P-GERINDRA)	97.250	4.000,00	389.000.000,00
4.	Partai Golongan Karya (P-GOLKAR)	98.373	4.000,00	393.492.000,00
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	49.297	4.000,00	197.188.000,00
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	36.539	4.000,00	146.156.000,00
7.	Partai Demokrat (P-DEMOKRAT)	43.582	4.000,00	174.328.000,00
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	15.088	4.000,00	60.352.000,00
	JUMLAH	671.618	-	2.686.472.000,00



3) Belanja Hibah Dana BOSP

Akun ini menggambarkan Belanja Hibah Dana BOSP yang di anggarakan di Sekolah Swasta Kabupaten Demak untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOSP - Sekolah Dasar	5.756.850.000,00	5.747.033.312,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP - Sekolah Menengah Pertama	8.972.400.000,00	8.937.897.913,00
3	Belanja Hibah Dana BOSP - Sekolah Nonformal /Kesetaraan	5.896.950.000,00	5.896.662.500,00
	TOTAL	20.626.200.000,00	20.581.593.725,00

6. Belanja Bantuan Sosial

Akun ini menggambarkan Belanja Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut.

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.176.000.000,00	3.322.800.000,00	79,57	3.463.600.000,00	(4,07)
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	6.440.000.000,00	6.425.000.000,00	99,77	8.990.000.000,00	(28,53)
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.495.000.000,00	1.495.000.000,00	100,00	495.000.000,00	202,02
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, keagamaan dan Bidang Lainnya)	749.987.000,00	552.622.000,00	73,68	1.000.000.000,00	(44,74)
	Jumlah	12.860.987.000,00	11.795.422.000,00	91,71	13.948.600.000,00	(15,44)

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp12.860.987.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.795.422.000,00 atau 91,71%, maka realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.153.178.000,00 atau 15,44% bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 dimana realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp13.948.600.000,00.

Berikut Rincian penggunaan Belanja Bantuan Sosial.

NO	SKPD	REALISASI (Rp)	URAIAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.122.800.000,00	Bantuan Sosial Untuk Siswa Miskin Daerah (Basimda) sesuai SK Bupati Demak Nomor 900/309 Tahun 2025
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.000.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk Pembangunan Rumah Baru Bagi Korban Bencana sesuai SK Bupati Nomor 900/293 Tahun 2025

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI (Rp)	URAIAN
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.425.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai SK Bupati Nomor 900/46, 900/142, 900/231, 900/263, 900/326, 900/327 dan 900/337 Tahun 2025
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	552.622.000,00	Bantuan Sosial Untuk Lembaga esejahteraaanSsial Anak (LKSA) sesuai SK Bupati Demak nomor 900/244 tahun 2025
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.295.000.000,00	Bantuan Sosial untuk Kelompok Masyarakat Keserasian Sosial sesuai SK Bupati Nomor 465/171 dan 465/321 Tahun 2025
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200.000.000,00	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kelompok Usaha bersama sesuai SK Bupati Nomor 900/170 dan 465/317 Tahun 2025
7	SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000,00	Bantuan Sosial kepada Hafidz/Hafidzoh 30 Juz sesuai SK Bupati Demak Nomor 900/71 Tahun 2025
	JUMLAH	11.795.422.000,00	

Berikut realisasi belanja bantuan sosial pada masing-masing SKPD.

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.122.800.000,00	3.251.600.000,00	(128.800.000,00)
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.425.000.000,00	8.990.000.000,00	(2.565.000.000,00)
3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.047.622.000,00	1.507.000.000,00	540.622.000,00
4	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	200.000.000,00	(200.000.000,00)
5	SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000,00	-	200.000.000,00
	JUMLAH	11.795.422.000,00	13.948.600.000,00	(2.153.178.000,00)

b. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Demak meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan anggaran dan realisasi Tahun 2025 sebagai berikut.

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	1.650.000.000,00	(100,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.180.705.927,00	79.211.657.041,00	87,84	75.084.342.345,00	5,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.825.637.409,00	42.369.633.602,00	90,48	46.410.432.388,00	(8,71)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.271.142.307,00	87.752.972.060,00	97,21	148.336.825.951,00	(40,84)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.799.473.794,00	11.724.364.194,00	99,36	7.543.183.725,00	55,43

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	101.000.000,00	64.040.000,00	63,41	158.932.200,00	100,00
	Jumlah	239.177.959.437,00	221.122.666.897,00	92,45	279.183.716.609,00	(20,80)

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp239.177.959.437,00 dan terealisasi sebesar Rp221.122.666.897,00 atau sebesar 92,45%. Maka Belanja modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.061.049.712,00 atau 20,80% bila dibanding realisasi Tahun 2024 dimana realisasi Belanja Modal sebesar Rp279.183.716.609,00.

1. Belanja Modal Tanah

Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 tidak menganggarkan Belanja Tanah, sedangkan pada Tahun 2024 mencatatkan realisasi sebesar Rp1.650.000.000,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang meliputi :

NO REK	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
		(Rp)	(Rp)	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.447.226.000,00	4.308.925.499,00	96,89
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.958.008.495,00	6.789.549.292,00	97,58
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	54.400.000,00	18.010.201,00	33,11
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	60.600.000,00	51.743.999,00	85,39
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.261.614.600,00	5.568.818.701,00	88,94
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.131.672.200,00	1.970.732.107,00	92,45
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.499.852.000,00	14.052.158.667,00	96,91
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	807.644.000,00	767.191.400,00	94,99
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.815.200.520,00	7.557.238.398,00	85,73
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	10.017.120.000,00	9.881.851.109,00	98,65
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000,00	195.999.999,00	98,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	14.206.917.105,00	14.137.379.605,00	99,51
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	21.720.451.007,00	13.912.058.064,00	64,05
	Jumlah	90.180.705.927,00	79.211.657.041,00	87,84

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp90.180.705.927,00 realisasinya mencapai Rp79.211.657.041,00 atau 87,84%. Mengalami peningkatan sebesar Rp4.127.314.696,00 atau sebesar 5,50% bila dibanding realisasi Tahun 2024 dimana realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.084.342.345,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Adapun secara rinci belanja peralatan mesin masing-masing SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17.045.188.388,00	20.782.155.787,00	(3.736.967.399,00)
2	DINAS KESEHATAN	33.292.895.731,00	38.547.026.058,00	(5.254.130.327,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.080.608.652,00	939.850.000,00	140.758.652,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	513.687.061,00	339.440.000,00	174.247.061,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	338.081.202,00	138.075.000,00	200.006.202,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	360.190.803,00	129.115.000,00	231.075.803,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	969.338.252,00	404.530.000,00	564.808.252,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	177.606.003,00	59.325.000,00	118.281.003,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.413.724.694,00	844.650.000,00	569.074.694,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	604.699.998,00	187.850.000,00	416.849.998,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK	450.251.500,00	2.648.540.000,00	(2.198.288.500,00)
12	DINAS PERHUBUNGAN	10.020.168.909,00	1.966.429.000,00	8.053.739.909,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.060.158.590,00	655.865.000,00	404.293.590,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	835.490.000,00	(835.490.000,00)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	440.255.499,00	80.650.000,00	359.605.499,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	386.167.895,00	794.330.000,00	(408.162.105,00)
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	52.400.000,00	512.865.000,00	(460.465.000,00)
18	DINAS PARIWISATA	245.657.801,00	498.635.000,00	(252.977.199,00)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	219.605.250,00	456.585.000,00	(236.979.750,00)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.099.087.800,00	104.764.000,00	994.323.800,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	3.199.985.911,00	710.255.000,00	2.489.730.911,00
22	SEKRETARIAT DPRD	376.100.002,00	1.373.750.000,00	(997.649.998,00)
23	INSPEKTORAT DAERAH	2.349.671.650,00	222.470.000,00	2.127.201.650,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	471.561.657,00	309.400.000,00	162.161.657,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.254.460.253,00	667.509.000,00	586.951.253,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	64.418.600,00	123.017.500,00	(58.598.900,00)
27	KECAMATAN DEMAK	326.724.750,00	48.690.000,00	278.034.750,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	57.509.999,00	12.000.000,00	45.509.999,00
29	KECAMATAN DEMPET	83.155.550,00	34.150.000,00	49.005.550,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	19.390.000,00	36.200.000,00	(16.810.000,00)
31	KECAMATAN MIJEN	95.909.990,00	-	95.909.990,00
32	KECAMATAN GAJAH	55.190.802,00	17.700.000,00	37.490.802,00
33	KECAMATAN BONANG	90.467.299,00	-	90.467.299,00
34	KECAMATAN WEDUNG	77.950.000,00	-	77.950.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
35	KECAMATAN SAYUNG	164.283.099,00	23.600.000,00	140.683.099,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	129.845.000,00	291.670.000,00	(161.825.000,00)
37	KECAMATAN MRANGGEN	67.182.750,00	42.435.000,00	24.747.750,00
38	KECAMATAN GUNTUR	68.278.300,00	59.540.000,00	8.738.300,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	143.705.250,00	42.220.000,00	101.485.250,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	119.091.050,00	77.566.000,00	41.525.050,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	227.001.101,00	66.000.000,00	161.001.101,00
	JUMLAH	79.211.657.041,00	75.084.342.345,00	4.127.314.696,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Akum ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, yang meliputi gedung tempat kerja, bangunan menara, bangunan tugu titik kontrol/pasti dan gedung dan bangunan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

NO REK	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
		(Rp)	(Rp)	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.758.175.400,00	34.650.660.850,00	94,27
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	-	-	-
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.059.469.615,00	1.053.104.000,00	99,40
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.007.992.394,00	6.665.868.752,00	74,00
	Jumlah	46.825.637.409,00	42.369.633.602,00	90,48

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp46.825.637.409,00 dan terealisasi sebesar Rp42.369.633.602,00 atau 90,48% Mengalami penurunan sebesar Rp4.040.798.786,00 atau sebesar 8,71% dibanding realisasi belanja gedung dan bangunan Tahun 2024 dimana realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.410.432.388,00

Adapun secara rinci Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.392.382.800,00	18.336.401.952,00	(13.944.019.152,00)
2	DINAS KESEHATAN	16.943.273.752,00	9.605.484.124,00	7.337.789.628,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.487.293.000,00	4.542.196.825,00	6.945.096.175,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	99.632.000,00	129.192.000,00	(29.560.000,00)
5	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	459.989.000,00	(459.989.000,00)
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	213.501.900,00	545.572.300,00	(332.070.400,00)
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	219.691.000,00	(219.691.000,00)
9	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.555.767.150,00	604.440.387,00	1.951.326.763,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
10	DINAS PARIWISATA	74.273.000,00	-	74.273.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	169.179.800,00	(169.179.800,00)
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.541.784.000,00	11.798.285.000,00	(5.256.501.000,00)
13	KECAMATAN KARANGANYAR	61.726.000,00	-	61.726.000,00
	JUMLAH	42.369.633.602,00	46.410.432.388,00	(4.040.798.786,00)

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang meliputi Jalan, Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, Jaringan, dan Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

NO REK	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
		(Rp)	(Rp)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	82.136.142.307,00	79.902.932.700,00	97,28
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.080.000.000,00	1.076.279.000,00	99,66
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.425.000.000,00	4.360.540.000,00	98,54
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	985.000.000,00	984.015.000,00	99,90
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.645.000.000,00	1.429.205.360,00	86,88
	Jumlah	90.271.142.307,00	87.752.972.060,00	97,21

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp90.271.142.307,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp87.752.972.060,00 atau 97,21%, mengalami penurunan sebesar Rp60.583.853.891 atau 40,84% bila dibandingkan Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp148.336.825.951,00 Adapun realisasi belanja Jalan Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD sebagai berikut.

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS KESEHATAN DAERAH	1.429.205.360,00	1.006.479.751,00	422.725.609,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	79.655.029.700,00	139.671.715.200,00	(60.016.685.500,00)
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.883.307.000,00	6.722.432.000,00	(1.839.125.000,00)
4	DINAS PERHUBUNGAN	984.015.000,00	-	984.015.000,00
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	99.320.000,00	(99.320.000,00)
7	KECAMATAN DEMAK	801.415.000,00	836.879.000,00	(35.464.000,00)
	JUMLAH	87.752.972.060,00	148.336.825.951,00	(60.583.853.891,00)

**5. Belanja Aset Tetap Lainnya**

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO REK	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN %
		(Rp)	(Rp)			
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	315.255.000,00	310.987.250,00	98,65	142.358.000,00	118,45
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	200.000.000,00	199.895.000,00	99,95	199.902.500,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	11.284.218.794,00	11.213.481.944,00	99,37	7.200.923.225,00	55,72
	JUMLAH	11.799.473.794,00	11.724.364.194,00	99,36	7.543.183.725,00	55,43

Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp11.799.473.794,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp11.724.364.194,00 atau sebesar 99,36%. Mengalami peningkatan sebesar Rp4.181.180.469 atau sebesar 55,43% bila dibanding realisasi Tahun 2024 dimana realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.543.183.725,00. Adapun secara rinci realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada setiap SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.495.781.944,00	7.404.325.725,00	4.091.456.219,00
2	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	12.300.000,00	(12.300.000,00)
3	DINAS PERHUBUNGAN	12.404.250,00	-	12.404.250,00
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	180.906.000,00	126.558.000,00	54.348.000,00
5	SEKRETARIAT DAERAH	11.977.000,00	-	11.977.000,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	11.900.000,00	-	11.900.000,00
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.395.000,00	-	11.395.000,00
	JUMLAH	11.724.364.194,00	7.543.183.725,00	4.181.180.469,00

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Aset Tetap Lainnya - Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp315.255.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp310.987.250,00 atau sebesar 98,65%, mengalami peningkatan sebesar Rp168.629.250,00 bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp142.358.000,00.

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	2025	2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	82.405.000,00	3.500.000,00	78.905.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	12.300.000,00	(12.300.000,00)
2	DINAS PERHUBUNGAN	12.404.250,00	-	12.404.250,00
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	180.906.000,00	126.558.000,00	54.348.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	11.977.000,00	-	11.977.000,00
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	11.900.000,00	-	11.900.000,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.395.000,00	-	11.395.000,00
	JUMLAH	310.987.250,00	142.358.000,00	168.629.250,00

b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp199.895.000,00 atau sebesar 99,95%, mengalami penurunan sebesar Rp7.500,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 Rp199.902.500,00.

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga pada SKPD adalah sebagai berikut.

NO	SKPD	2025	2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	199.895.000,00	199.902.500,00	(7.500,00)
	JUMLAH	199.895.000,00	199.902.500,00	(7.500,00)

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP dianggarkan sebesar Rp11.284.218.794,00 dan terealisasi sebesar Rp11.213.481.944,00 atau sebesar 99,37%, mengalami kenaikan sebesar Rp4.012.558.719,00 bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.200.923.225,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP pada SKPD adalah sebagai berikut.

NO	SKPD	2025	2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.213.481.944,00	7.200.923.225,00	4.012.558.719,00
	JUMLAH	11.213.481.944,00	7.200.923.225,00	4.012.558.719,00

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Anggaran

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dan realisasi Belanja Aset Lainnya pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO REK	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
		(Rp)	(Rp)	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	101.000.000,00	64.040.000,00	63,41
	JUMLAH	101.000.000,00	64.040.000,00	63,41

Belanja Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp101.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp64.040.000,00 atau sebesar 63,41%, mengalami penurunan sebesar Rp94.892.200,00 bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp158.932.200,00.

Secara rinci realisasi Belanja Aset Lainnya pada setiap SKPD adalah sebagai berikut.

NO	SKPD	REALISASI 2025	REALISASI 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS KESEHATAN DAERAH	14.850.000,00	-	14.850.000,00
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	34.432.200,00	(34.432.200,00)
3	SEKRETARIAT DAERAH	24.420.000,00	-	24.420.000,00
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	24.770.000,00	124.500.000,00	(99.730.000,00)
	JUMLAH	64.040.000,00	158.932.200,00	(94.892.200,00)

7. Belanja Tak terduga

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO REK	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
		(Rp)	(Rp)	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.541.000.000,00	339.610.000,00	22,04
	JUMLAH	1.541.000.000,00	339.610.000,00	22,04

Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 menganggarkan Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.541.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp339.610.000,00 atau sebesar 22,04%. Sedangkan Tahun 2024 tidak ada realisasi. Adapun rincian Belanja Tak terduga adalah sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NAMA SKPD	NILAI	URAIAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	37.000.000,00	Pengembalian penerimaan pajak BPHTB tahun 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	302.610.000,00	Pengembalian dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan pendidikan (BOP) kesetaraan reguler hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi dan Pengembalian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) KB ADILA karena tidak ada proses/kegiatan belajar mengajar (tutup).

3. TRANSFER

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Transfer untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.863.712.846,00	26.714.829.292,00	99,45	22.880.158.252,00	16,76
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	22.415.694.336,00	22.359.694.336,00	99,75	19.431.583.635,00	15,07
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.448.018.510,00	4.355.134.956,00	97,91	3.448.574.617,00	26,29
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	416.821.799.300,00	355.182.414.824,00	85,21	414.395.816.500,00	(14,29)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	416.821.799.300,00	355.182.414.824,00	85,21	414.395.816.500,00	(14,29)
	Jumlah	443.685.512.146,00	381.897.244.116,00	86,07	437.275.974.752,00	(12,66)

Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Provinsi dan Pemerintahan Desa dan Transfer Bantuan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp443.685.512.146,00 dan realisasi sebesar Rp381.897.244.116,00 atau sebesar 86,07%. Maka belanja transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp55.378.730.636,00 atau 12,66% bila di bandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp437.275.974.752,00.

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp22.415.694.336,00 terealisasi sebesar Rp22.359.694.336,00 atau sebesar 99,75% dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp4.448.018.510,00 terealisasi sebesar Rp4.355.134.956,00 atau sebesar 97,91%.

Berikut Rincian Transfer bagi Hasil Pendapatan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Kecamatan / Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Jumlah
I.	<u>KECAMATAN MRANGGEN</u>	1.774.882.824,00	394.026.954,00	2.168.909.778,00
1	BANYUMENENG	72.946.690,00	22.220.819,00	95.167.509,00
2	SUMBEREJO	86.164.070,00	23.876.046,00	110.040.116,00
3	KEBON BATUR	93.553.682,00	29.788.329,00	123.342.011,00
4	KANGKUNG	78.929.279,00	21.459.548,00	100.388.827,00
5	KALITENGAH	84.739.153,00	17.007.558,00	101.746.711,00
6	KEMBANGARUM	114.536.209,00	22.119.623,00	136.655.832,00
7	MRANGGEN	90.374.684,00	24.907.336,00	115.282.020,00
8	BATURSARI	217.623.701,00	45.104.465,00	262.728.166,00
9	BANDUNGREJO	107.755.709,00	18.774.979,00	126.530.688,00
10	BRUMBUNG	71.621.298,00	16.494.783,00	88.116.081,00
11	NGEMPLAK	94.105.434,00	14.956.819,00	109.062.253,00
12	TAMANSARI	96.469.713,00	15.501.835,00	111.971.548,00
13	KARANGSONO	71.386.003,00	17.368.050,00	88.754.053,00
14	CANDISARI	105.157.754,00	17.008.474,00	122.166.228,00
15	TEGALARUM	82.641.194,00	18.054.419,00	100.695.613,00
16	WARU	76.395.723,00	15.908.209,00	92.303.932,00
17	MENUR	79.957.320,00	16.689.629,00	96.646.949,00
18	JAMUS	73.453.128,00	16.043.677,00	89.496.805,00
19	WRINGINJAJAR	77.072.080,00	20.742.356,00	97.814.436,00
II.	<u>KECAMATAN KARANGAWEN</u>	1.095.332.597,00	253.103.695,00	1.348.436.292,00
1	JRAGUNG	89.451.864,00	26.647.236,00	116.099.100,00
2	WONOSEKAR	67.938.545,00	25.985.765,00	93.924.310,00
3	MARGOHAYU	84.993.821,00	16.909.881,00	101.903.702,00
4	TLOGOREJO	75.888.554,00	22.711.563,00	98.600.117,00
5	TELUK	92.155.543,00	17.448.169,00	109.603.712,00
6	REJOSARI	83.466.886,00	25.922.935,00	109.389.821,00
7	KARANGAWEN	121.113.062,00	19.476.339,00	140.589.401,00
8	KURIPAN	105.369.943,00	16.845.383,00	122.215.326,00
9	BUMIREJO	72.295.930,00	17.742.192,00	90.038.122,00
10	BRAMBANG	111.799.487,00	23.434.435,00	135.233.922,00
11	SIDOREJO	87.859.929,00	20.735.052,00	108.594.981,00
12	PUNDENARUM	102.999.033,00	19.244.745,00	122.243.778,00
III.	<u>KECAMATAN GUNTUR</u>	1.856.983.715,00	321.269.291,00	2.178.253.006,00
1	BANJAREJO	86.657.278,00	14.548.418,00	101.205.696,00
2	WONOREJO	92.775.424,00	16.556.367,00	109.331.791,00
3	PAMONGAN	91.222.085,00	15.312.500,00	106.534.585,00
4	TLOGOWERU	92.058.560,00	14.548.683,00	106.607.243,00
5	BOGOSARI	103.940.702,00	20.272.344,00	124.213.046,00
6	SUKOREJO	88.081.034,00	14.527.918,00	102.608.952,00
7	SARIREJO	85.164.395,00	14.573.908,00	99.738.303,00
8	SIDOKUMPUL	89.884.743,00	16.182.585,00	106.067.328,00
9	GAJI	91.570.340,00	15.968.525,00	107.538.865,00
10	BLERONG	104.765.625,00	19.256.751,00	124.022.376,00
11	KRANDON	84.581.879,00	13.551.556,00	98.133.435,00
12	TANGKIS	84.346.156,00	13.921.921,00	98.268.077,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Kecamatan / Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Jumlah
13	TEMUROS	107.127.351,00	21.948.183,00	129.075.534,00
14	GUNTUR	95.790.374,00	17.301.945,00	113.092.319,00
15	TRIMULYO	97.227.321,00	16.823.139,00	114.050.460,00
16	TLOGOREJO	88.045.583,00	13.574.711,00	101.620.294,00
17	BUMIHARJO	98.677.421,00	15.891.246,00	114.568.667,00
18	BAKALREJO	101.451.167,00	18.057.875,00	119.509.042,00
19	TURITEMPEL	86.348.217,00	14.363.165,00	100.711.382,00
20	SIDOHARJO	87.268.060,00	14.087.551,00	101.355.611,00
IV.	<u>KECAMATAN SAYUNG</u>	2.110.990.575,00	349.678.573,00	2.460.669.148,00
1	JETAKSARI	64.502.450,00	16.176.225,00	80.678.675,00
2	DOMBO	62.352.278,00	14.581.109,00	76.933.387,00
3	BULUSARI	67.911.624,00	16.501.190,00	84.412.814,00
4	PRAMPELAN	67.288.306,00	15.588.405,00	82.876.711,00
5	KARANGASEM	63.099.892,00	15.510.984,00	78.610.876,00
6	KALISARI	69.157.422,00	23.687.694,00	92.845.116,00
7	SAYUNG	258.022.114,00	21.562.198,00	279.584.312,00
8	TAMBAKROTO	65.391.832,00	15.614.794,00	81.006.626,00
9	PILANGSARI	64.040.963,00	15.009.370,00	79.050.333,00
10	LOIRENG	127.085.851,00	15.075.495,00	142.161.346,00
11	GEMULAK	61.963.916,00	16.904.287,00	78.868.203,00
12	SIDOGEMAH	516.758.934,00	18.448.242,00	535.207.176,00
13	PURWOSARI	116.643.148,00	17.824.838,00	134.467.986,00
14	SRIWULAN	105.613.018,00	21.652.700,00	127.265.718,00
15	BEDONO	79.933.198,00	17.638.748,00	97.571.946,00
16	TIMBULSLOKO	79.204.665,00	15.992.962,00	95.197.627,00
17	TUGU	61.666.813,00	18.910.938,00	80.577.751,00
18	SIDOREJO	64.489.502,00	19.087.430,00	83.576.932,00
19	BANJARSARI	60.519.978,00	17.984.497,00	78.504.475,00
20	SURODADI	55.344.671,00	15.926.467,00	71.271.138,00
V.	<u>KECAMATAN KARANGTENGAH</u>	1.595.025.735,00	270.074.950,00	1.865.100.685,00
1	SAMPANG	79.294.965,00	16.057.533,00	95.352.498,00
2	KLITIH	75.083.760,00	16.195.781,00	91.279.541,00
3	PIDODO	94.122.600,00	16.085.186,00	110.207.786,00
4	DONOREJO	78.807.089,00	19.952.035,00	98.759.124,00
5	GROGOL	69.589.521,00	15.262.466,00	84.851.987,00
6	PLOSO	85.687.006,00	13.937.580,00	99.624.586,00
7	PULOSARI	88.710.910,00	15.127.376,00	103.838.286,00
8	KARANGSARI	96.752.879,00	16.557.070,00	113.309.949,00
9	KARANGTOWO	69.062.317,00	14.279.654,00	83.341.971,00
10	DUKUN	113.440.471,00	16.459.513,00	129.899.984,00
11	KEDUNGUTER	64.484.394,00	14.687.831,00	79.172.225,00
12	BATU	257.568.856,00	17.805.189,00	275.374.045,00
13	WONOKERTO	165.808.114,00	15.023.389,00	180.831.503,00
14	WONOWOSO	70.181.222,00	16.503.824,00	86.685.046,00
15	REJOSARI	64.114.494,00	14.634.667,00	78.749.161,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Kecamatan / Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Jumlah
16	WONOAGUNG	64.016.440,00	15.890.018,00	79.906.458,00
17	TAMBAKBULUSAN	58.300.697,00	15.615.838,00	73.916.535,00
VI.	<u>KECAMATAN BONANG</u>	1.619.001.357,00	365.366.807,00	1.984.368.164,00
1	KARANGREJO	69.769.438,00	19.134.077,00	88.903.515,00
2	KEMBANGAN	83.020.772,00	15.078.738,00	98.099.510,00
3	SUMBEREJO	76.002.169,00	21.534.312,00	97.536.481,00
4	SUKODONO	67.531.395,00	15.056.658,00	82.588.053,00
5	JATIMULYO	70.430.915,00	15.089.267,00	85.520.182,00
6	KRAJANBOGO	90.643.940,00	15.481.720,00	106.125.660,00
7	TLOGOBOYO	71.276.298,00	16.916.906,00	88.193.204,00
8	GEBANGARUM	84.606.231,00	15.245.427,00	99.851.658,00
9	GEBANG	65.468.011,00	17.261.284,00	82.729.295,00
10	MARGOLINDUK	77.207.657,00	13.770.699,00	90.978.356,00
11	MORODEMAK	57.441.200,00	18.154.489,00	75.595.689,00
12	PURWOREJO	60.602.322,00	22.982.780,00	83.585.102,00
13	TRIDONOREJO	68.714.571,00	19.771.955,00	88.486.526,00
14	JATIROGO	90.993.335,00	16.182.075,00	107.175.410,00
15	BONANGREJO	100.123.740,00	15.980.164,00	116.103.904,00
16	PONCOHARJO	79.953.911,00	19.169.507,00	99.123.418,00
17	WONOSARI	70.407.813,00	16.603.209,00	87.011.022,00
18	JALI	90.764.238,00	16.625.337,00	107.389.575,00
19	WEDING	111.550.013,00	21.133.142,00	132.683.155,00
20	SERANGAN	66.905.088,00	15.931.369,00	82.836.457,00
21	BETAHWALANG	65.588.300,00	18.263.692,00	83.851.992,00
VII.	<u>KECAMATAN DEMAK</u>	1.305.669.042,00	224.842.069,00	1.530.511.111,00
1	KALIKONDANG	93.408.225,00	18.674.556,00	112.082.781,00
2	DONOROJO	74.431.605,00	15.301.355,00	89.732.960,00
3	KATONSARI	97.180.838,00	18.355.887,00	115.536.725,00
4	CABEAN	89.982.550,00	19.332.262,00	109.314.812,00
5	BANGO	104.221.649,00	18.439.360,00	122.661.009,00
6	BOLO	103.599.816,00	15.446.803,00	119.046.619,00
7	SEDO	96.113.720,00	15.843.620,00	111.957.340,00
8	MULYOREJO	119.710.519,00	16.577.124,00	136.287.643,00
9	KEDONDONG	107.590.644,00	16.621.525,00	124.212.169,00
10	RAJI	96.261.732,00	17.134.630,00	113.396.362,00
11	TURIREJO	106.512.300,00	21.838.436,00	128.350.736,00
12	TEMPURAN	98.399.563,00	14.889.781,00	113.289.344,00
13	KARANGMLATI	118.255.881,00	16.386.730,00	134.642.611,00
VIII.	<u>KECAMATAN WONOSALAM</u>	2.075.835.074,00	328.919.155,00	2.404.754.229,00
1	DORENG	81.794.689,00	14.280.638,00	96.075.327,00
2	TLOGODOWO	87.942.244,00	12.152.543,00	100.094.787,00
3	KALIANYAR	84.988.880,00	15.786.820,00	100.775.700,00
4	BUNDERAN	99.482.298,00	13.184.507,00	112.666.805,00
5	GETAS	90.562.149,00	17.492.240,00	108.054.389,00
6	KERANGKULON	99.495.535,00	16.390.085,00	115.885.620,00
7	KARANGROWO	119.297.988,00	14.771.115,00	134.069.103,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Kecamatan / Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Jumlah
8	LEMPUYANG	71.410.757,00	12.818.271,00	84.229.028,00
9	TLOGOREJO	82.224.820,00	15.170.145,00	97.394.965,00
10	PILANGREJO	88.755.219,00	17.195.359,00	105.950.578,00
11	MOJODEMAK	93.999.578,00	16.691.733,00	110.691.311,00
12	SIDOMULYO	93.604.721,00	16.813.794,00	110.418.515,00
13	KENDALDOYONG	76.619.199,00	14.938.233,00	91.557.432,00
14	WONOSALAM	86.876.986,00	16.528.560,00	103.405.546,00
15	KARANGREJO	113.588.805,00	16.344.699,00	129.933.504,00
16	JOGOLOYO	143.503.841,00	17.881.960,00	161.385.801,00
17	BOTOREJO	110.529.019,00	17.338.935,00	127.867.954,00
18	MRANAK	107.411.872,00	15.054.880,00	122.466.752,00
19	MRISEN	83.736.464,00	14.663.626,00	98.400.090,00
20	KUNCIR	103.213.472,00	16.883.307,00	120.096.779,00
21	TRENGGULI	156.796.538,00	16.537.705,00	173.334.243,00
IX.	<u>KECAMATAN DEMPET</u>	1.526.127.404,00	255.990.647,00	1.782.118.051,00
1	MERAK	101.342.217,00	17.053.928,00	118.396.145,00
2	KARANGREJO	91.357.875,00	14.539.667,00	105.897.542,00
3	BOTOSENGON	74.157.648,00	13.675.973,00	87.833.621,00
4	BALEROMO	95.710.887,00	15.734.323,00	111.445.210,00
5	JERUKGULUNG	91.487.752,00	14.471.579,00	105.959.331,00
6	KUNIR	107.568.868,00	17.725.863,00	125.294.731,00
7	BRAKAS	103.051.485,00	14.792.904,00	117.844.389,00
8	BALEREJO	95.649.276,00	17.469.720,00	113.118.996,00
9	SIDOMULYO	122.530.267,00	18.038.883,00	140.569.150,00
10	GEMPOLDENOK	76.780.847,00	13.115.905,00	89.896.752,00
11	KEBONSARI	79.874.567,00	13.995.186,00	93.869.753,00
12	KEDUNGORI	93.163.325,00	15.402.890,00	108.566.215,00
13	DEMPET	87.076.315,00	19.391.238,00	106.467.553,00
14	KUWU	102.801.868,00	14.807.875,00	117.609.743,00
15	KRAMAT	96.882.652,00	17.382.899,00	114.265.551,00
16	HARJOWINANGUN	106.691.555,00	18.391.814,00	125.083.369,00
X.	<u>KECAMATAN KEBONAGUNG</u>	1.355.778.109,00	207.260.387,00	1.563.038.496,00
1	PILANGWETAN	86.002.879,00	13.396.804,00	99.399.683,00
2	KEBONAGUNG	107.390.602,00	17.272.527,00	124.663.129,00
3	MIJEN	100.980.082,00	15.620.354,00	116.600.436,00
4	KLAMPOKLOR	84.966.330,00	12.509.659,00	97.475.989,00
5	MANGUNANLOR	89.501.183,00	13.096.985,00	102.598.168,00
6	WERDOYO	110.890.791,00	16.858.309,00	127.749.100,00
7	MANGUNREJO	114.102.530,00	17.164.305,00	131.266.835,00
8	BABAT	93.445.178,00	14.200.648,00	107.645.826,00
9	MEGONTEN	101.623.272,00	15.690.295,00	117.313.567,00
10	TLOGOSIH	100.998.428,00	15.365.248,00	116.363.676,00
11	PRIGI	88.153.906,00	13.314.453,00	101.468.359,00
12	SARIMULYO	95.971.609,00	14.964.040,00	110.935.649,00
13	SOLOWIRE	89.458.789,00	13.890.532,00	103.349.321,00
14	SOKOKIDUL	92.292.530,00	13.916.228,00	106.208.758,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Kecamatan / Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Jumlah
XI.	<u>KECAMATAN GAJAH</u>	1.746.077.758,00	260.668.019,00	2.006.745.777,00
1	JATISONO	88.520.839,00	14.839.565,00	103.360.404,00
2	SURODADI	90.662.184,00	13.080.846,00	103.743.030,00
3	WILALUNG	88.164.772,00	14.647.936,00	102.812.708,00
4	TANJUNGAN	89.835.012,00	14.564.472,00	104.399.484,00
5	SAMBIROTO	85.194.046,00	12.961.325,00	98.155.371,00
6	GEDANGALAS	100.837.578,00	14.867.755,00	115.705.333,00
7	KEDONDONG	113.119.756,00	18.035.747,00	131.155.503,00
8	BANJARSARI	108.979.709,00	16.247.784,00	125.227.493,00
9	TAMBIREJO	92.690.145,00	13.562.371,00	106.252.516,00
10	MLATIHARJO	97.330.558,00	15.059.035,00	112.389.593,00
11	MEDINI	94.515.694,00	14.202.515,00	108.718.209,00
12	SAMBUNG	90.580.210,00	14.048.659,00	104.628.869,00
13	MLEKANG	100.749.766,00	14.648.707,00	115.398.473,00
14	SARI	109.231.354,00	16.074.379,00	125.305.733,00
15	BOYOLALI	86.147.155,00	12.575.112,00	98.722.267,00
16	GAJAH	126.882.703,00	15.070.771,00	141.953.474,00
17	TLOGOPANDOGAN	92.917.146,00	13.425.284,00	106.342.430,00
18	MOJOSIMO	89.719.131,00	12.755.756,00	102.474.887,00
XII.	<u>KECAMATAN KARANGANYAR</u>	1.163.526.230,00	286.559.926,00	1.450.086.156,00
1	JATIREJO	68.751.802,00	16.208.498,00	84.960.300,00
2	NGALURAN	79.758.796,00	22.870.494,00	102.629.290,00
3	WONOKETINGAL	56.627.870,00	19.568.794,00	76.196.664,00
4	CANGKRING REMBANG	55.695.407,00	14.718.435,00	70.413.842,00
5	CANGKRING	60.601.623,00	17.441.465,00	78.043.088,00
6	TUWANG	63.496.035,00	14.428.100,00	77.924.135,00
7	UNDAAN KIDUL	58.817.919,00	14.274.590,00	73.092.509,00
8	UNDAAN LOR	58.513.611,00	13.510.899,00	72.024.510,00
9	KETANJUNG	70.764.502,00	15.901.025,00	86.665.527,00
10	NGEMPLIK WETAN	63.148.853,00	13.644.242,00	76.793.095,00
11	WONOREJO	93.742.668,00	18.081.635,00	111.824.303,00
12	KARANGANYAR	97.163.841,00	17.620.353,00	114.784.194,00
13	KEDUNGGWARU KIDUL	68.462.219,00	19.202.738,00	87.664.957,00
14	KEDUNGGWARU LOR	73.083.997,00	19.967.239,00	93.051.236,00
15	BANDUNGREJO	63.052.334,00	15.265.538,00	78.317.872,00
16	TUGULOR	72.124.278,00	16.581.826,00	88.706.104,00
17	KOTAKAN	59.720.475,00	17.274.055,00	76.994.530,00
XIII.	<u>KECAMATAN MIJEN</u>	1.429.510.754,00	238.356.087,00	1.667.866.841,00
1	BANTENGMATI	84.751.345,00	15.660.072,00	100.411.417,00
2	MLATEN	102.998.278,00	19.844.258,00	122.842.536,00
3	NGELOWETAN	74.013.315,00	14.705.633,00	88.718.948,00
4	GENENG	117.398.351,00	15.488.440,00	132.886.791,00
5	BAKUNG	87.200.159,00	14.764.322,00	101.964.481,00
6	BERMI	87.044.924,00	12.759.967,00	99.804.891,00
7	TANGGUL	93.134.557,00	13.748.588,00	106.883.145,00
8	NGELOKULON	103.771.886,00	14.636.410,00	118.408.296,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Kecamatan / Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Jumlah
9	PASIR	115.904.583,00	24.137.417,00	140.042.000,00
10	REJOSARI	90.955.524,00	17.143.668,00	108.099.192,00
11	NGEGOT	65.204.361,00	13.359.677,00	78.564.038,00
12	JLEPER	97.789.622,00	19.261.488,00	117.051.110,00
13	PECUK	94.771.562,00	14.136.484,00	108.908.046,00
14	MIJEN	133.275.438,00	16.434.729,00	149.710.167,00
15	GEMPOLSONGO	81.296.849,00	12.274.934,00	93.571.783,00
XIV.	<u>KECAMATAN WEDUNG</u>	1.695.953.162,00	341.901.950,00	2.037.855.112,00
1	WEDUNG	67.839.790,00	25.713.288,00	93.553.078,00
2	NGAWEN	86.901.449,00	13.843.626,00	100.745.075,00
3	RUWIT	92.461.776,00	16.502.414,00	108.964.190,00
4	KENDUREN	103.994.796,00	22.118.588,00	126.113.384,00
5	BUKO	104.045.734,00	18.781.033,00	122.826.767,00
6	MANDUNG	78.926.977,00	12.396.660,00	91.323.637,00
7	BERAHAN KULON	92.026.828,00	17.090.608,00	109.117.436,00
8	BERAHAN WETAN	74.215.088,00	22.879.821,00	97.094.909,00
9	BUNGO	82.395.849,00	21.331.930,00	103.727.779,00
10	TEMPEL	82.743.375,00	13.979.758,00	96.723.133,00
11	JETAK	85.478.680,00	16.166.934,00	101.645.614,00
12	JUNGSEMI	87.657.639,00	14.399.633,00	102.057.272,00
13	JUNGPASIR	90.826.777,00	16.632.875,00	107.459.652,00
14	MUTIH WETAN	94.079.108,00	15.119.869,00	109.198.977,00
15	MUTIH KULON	90.997.266,00	17.199.299,00	108.196.565,00
16	TEDUNAN	80.844.756,00	14.801.981,00	95.646.737,00
17	KENDALASEM	80.990.208,00	13.904.962,00	94.895.170,00
18	KEDUNG KARANG	79.137.115,00	13.875.246,00	93.012.361,00
19	KEDUNG MUTIH	82.087.045,00	15.998.402,00	98.085.447,00
20	BABALAN	58.302.906,00	19.165.023,00	77.467.929,00
XV.	<u>Masjid Agung Demak</u>	9.000.000,00	-	9.000.000,00
XVI.	<u>BAGI HASIL PASAR</u>	-	257.116.446,00	257.116.446,00
	PEMDES BANGO	-	59.736.974,00	59.736.974,00
	PEMDES WONOSALAM	-	88.816.004,00	88.816.004,00
	PEMDES GUNTUR	-	19.198.200,00	19.198.200,00
	PEMDES WEDUNG	-	35.953.000,00	35.953.000,00
	PEMDES GEBANG	-	53.412.268,00	53.412.268,00
	Jumlah Total	22.359.694.336,00	4.355.134.956,00	26.714.829.292,00

b. Tranfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dianggarkan sebesar Rp49.095.000.000,00 terealisasi sebesar Rp48.365.000.000,00 atau 98,51%, Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp105.703.760.300 terealisasi sebesar Rp 105.703.760.300 atau 100,00%, Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar Rp 262.023.039.000 dan terealisasi sebesar Rp 201.113.654.524 atau 76,75%.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Berikut rincian Transfer bantuan Keuangan:

1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	6
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	49.095.000.000,00	48.365.000.000,00	730.000.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	49.095.000.000,00	48.365.000.000,00	730.000.000,00
I.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak	41.195.000.000,00	40.715.000.000,00	480.000.000,00
1	Bantuan Keuangan Khusus Betonisasi Desa Taman Sari RW 03 Dukuh Jetis	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus Betonisasi Jalan Penghubung Desa Sambung Menuju Desa Mlekang (Desa Sambung Gajah)	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
3	Bantuan Keuangan Khusus Betonisasi Jalan Sabuk Desa Kuripan RW 04 Kec Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4	Bantuan Keuangan Khusus Betonisasi Jalan Utama Dusun Karangawen RW 12 Desa Karangawen Kecamatan Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) RT4, RW4 Desa Tegal Arum Kec.Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Talut RT.1 RW4, Desa Tegal Arum, Kec. Mranggen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
7	Bantuan Keuangan Khusus Pavingisasi Jl Prigi 2 RT 04 RW 06 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
8	Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Jalan Menuju TPA Candisari Desa Candisari Kec. Mranggen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
10	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Beton Cor Jalan Desa Candisari RT 02 RW 05 Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
11	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Beton Cor Jalan Desa Candisari RT 03 RW 05 Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
12	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Desa Kembangarum RT 03 RW 05 Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
13	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Gang Fatihus Sudur Ds. Jungpasir Kec. Wedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
14	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Desa Banjarsari Kec. Gajah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
15	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Desa Mlatiharjo Kec. Gajah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
16	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Desa Mlekang Kec. Gajah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
17	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Desa Sari Kec. Gajah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
18	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Bogokali RT 01 RW 07 Desa Bogosari Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
19	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Gobang RT 01, 04 RW 03 Desa Trimulyo Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
20	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Kandang Walang RW 02 Desa Trimulyo Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
21	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Karangtengah RT 02 RW 03 Desa Pilangsari Kec. Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
22	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Kauman 2 RT 02 RW 04 Desa Pilangsari Kec. Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
23	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Perbalan RT 04 RW 04 Desa Pilangsari Kec. Sayung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
24	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Pilang I RT 01 RW 05 Desa Pilangsari Kec. Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
25	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Rejosari1 RT 01 RW 02 Desa Pilangsari Kec. Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
26	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Sindon RT 02 RW 06 Desa Trimulyo Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
27	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Sukosari RT 01 RW 01 Desa Pilangsari Kec. Sayung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
28	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Tebasan RT 05 RW 03 Desa Bogosari Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
29	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Tebasan RT 06 RW 03 Desa Bogosari Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
30	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Kampung di RW 03 Desa Batu Kec. Karangtengah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
31	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Kampung RW 01 Desa Bonangrejo Kec. Bonang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
32	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan Makam RT 04 RW 04 Desa Tamansari Kec. Mranggen Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
33	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT 011 RW 02 Desa Pamongan Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
34	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT 014 RW 02 Desa Pamongan Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
35	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT 01 RW 03 Desa Guntur Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
36	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT 01 RW 07 Dukuh Kadilangon Desa Kebonbatur Kec. Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
37	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT 02 RW 03 Desa Sarirejo Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
38	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT 08 RW 01 Desa Sukorejo Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
39	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT 08 RW 03 Desa Sukorejo Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
40	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT 09 RW 02 Desa Pamongan Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
41	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT 09 RW 03 Desa Sukorejo Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
42	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RT 10 RW 02 Desa Pamongan Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
43	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RW 02 Desa Sarirejo Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
44	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RW 02 Dukuh Kuripan Desa Sidorejo Kec. Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
45	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RW 03 Desa Sarirejo Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
46	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RW 03 Dukuh Bugangan Desa Sidorejo Kec. Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
47	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Betonisasi Jalan RW 04 Dukuh Solowire Desa Trimulyo Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
48	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Drainase Desa Ngemplak RW 01 Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
49	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Drainase Desa Tamansari RT 01 RW 01 Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
50	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Drainase Desa Waru RT 01 RW 04 Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
51	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Drainase RW.01 Desa Ngemplak Kec. Mranggen Kab. Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
52	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Drainase RW 02 Desa Ngemplak Mranggen Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
53	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Betonisasi Jalan Dukuh Daleman RW 04 Desa Batusari Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
54	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Drainase Desa Mojosimo Kec. Gajah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
55	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Drainase Dukuh Sukolilo RT 02 RW 01 Desa Pilangsari Kec. Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
57	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Jembatan Desa Gajah Kec. Gajah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
58	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Peningkatan Jalan Perum Wiku 2 Desa Katonsari Kec. Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
59	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Saluran Di RT 01 RW 03 Desa Brambang Kec. Karangawen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
60	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Saluran RT 01 RW 01 Desa Kedunguter Kec. Karangtengah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
61	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud Duku Kandang Lor RT 03 RW 05 Desa Trimulyo Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
62	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud Jalan Dempet Menuju Bokopay RW 03 Desa Tugu Kec. Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
63	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud Jalan Duku Kandang RT 03 R 02 Desa Trimulyo Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
64	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 03 Desa Tugu Ke Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
65	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud Jalan RT 04 RW 03 Desa Tugu Ke Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
66	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud Jalan RW 03 Desa Wonorejo Kec Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
67	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud RT 01 RW 03 Desa Wonowoso Kec Karangtengah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
68	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud RT 09 RW 03 Desa Guntur Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
69	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud RW 03 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
70	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud Saluran RT 10 RW 03 Desa Sukorejo Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
71	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Penerangan Jalan Ds. Kendalasesem Kec. Wedung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
72	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peninggian Jalan Ganem Menuju Sampit RW 06 Desa Tugu Kec. Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
73	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peninggian Jalan Gang T 50 RT 01 RW 01 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
74	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peninggian Jalan RW 01 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
75	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peninggian Jalan RW 02 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
77	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peninggian Jalan RW 03 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
78	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peninggian Jalan RW 03 Desa Purwosari Kec. Sayung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
81	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan Desa Bandungrejo RT 04 RW 02 Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
82	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan Desa Kalitengah RT 06 RW 03 Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
84	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan Desa Tempuran Kec. Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
85	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan Gang 2 RT 03 RW 02 Duku Jogo Ds Gemulak Kec. Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
86	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan Lingkar RT 4, RT 5 RW 5 Duku Gribigan Desa Wedung Kec Wedung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
87	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan Penghubung Purwosari-Sidoge RW 01 Desa Purwosari Kec. Sayung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
88	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan Penghubung RW 01 - RW 02 Desa Purwosari Kec. Sayung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
89	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan RT 01 RW 01 Desa Batu Kec. Karangtengah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
90	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan RT 04 RW 01 Desa Turitempel Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
91	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan RT 04 RW 03 Duku Karang Malan Desa Gemulak Kec. Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
92	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan RT 05 RW 01 Desa Purwosari Kec. Sayung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
93	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan RT	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
	06 RW 01 Desa Turitempel Kec. Guntur			
94	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan RW 01 Desa Wonorejo Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
95	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan RW 02 Desa Guntur Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
96	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan RW 03 Desa Guntur Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
97	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan RW 04 Desa Purwosari Kec. Sayung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
98	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Jalan RW 05 Menuju RW 06 Desa Batu Ke Karangtengah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
99	BKK Betonisasi Ds. Muthi Kulon Wedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
100	BKK Betonisasi Desa Botorejo Dukuh Dukuh Kec Wonosalam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
101	BKK Betonisasi Desa Mangunrejo RT 05 RW 06 Kec Kebonagung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
102	BKK Betonisasi Dk. Siklenting Ds. Wedung Kec. Wedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
103	BKK Betonisasi Ds. Jungpasir Wedung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
104	BKK Betonisasi Dukuh Mantren Ds. Muthi Kulon Kec. Wedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
105	BKK Betonisasi Dukuh Weru Desa Werdoyo Kec Kebonagung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
106	BKK Betonisasi Jalan Brang Kidul RT 04 RW 02 Desa Dempet Kec Dempet Kab Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
109	BKK Betonisasi Jalan Desa Pilangrejo Wonosalam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
111	BKK Betonisasi Jalan Desa Tridonorejo RW.03	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
112	BKK. Betonisasi Jalan Dk. Brawah RT. 03 RW. 01 Ds. Tamansari, Kec. Mranggen Demak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
113	BKK Betonisasi Jalan Dk. Nggojoyo Ds. Wedung Kec. Wedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
114	BKK Betonisasi Jalan Ds Kerangkulon Wonosalam	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
115	BKK Betonisasi Jalan Dukuh Babat Desa Babat Kec. Kebonagung Kab. Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
116	BKK Betonisasi Jalan Dukuh Suketan Desa Babat Kec. Kebonagung Kab. Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
117	BKK Betonisasi Jalan Dukuh Wonokerto RT.03 RW.03 Desa Wonokerto Kecamatan Karangtengah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
118	BKK. Betonisasi Jalan Gebangsari 1 RT.03 RW.32 Ds. Batusari Kec. Mranggen Demak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
120	BKK Betonisasi Jalan RT 01 RW 03 Desa Brambang Kec Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
121	BKK. Betonisasi Jalan RT.01 RW.04 Desa Tamansari Kec. Mranggen, Demak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
123	BKK Betonisasi Jalan RT. 04 RW. 03 Dk Undaan Lor 2 Desa Undaan Lor Kec Karanganyar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
124	BKK Betonisasi Jalan RW 01 Desa Wringinjajar Kec Mranggen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
125	BKK Betonisasi Jalan RW01 Dukuh Turus Desa Bumirejo Kec. Karangawen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
126	BKK Betonisasi Jalan RW 03 Desa Botorejo Kec Wonosalam Kab Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
127	BKK Betonisasi Jalan RW 03 Desa Brumbung Kec. Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
130	BKK Betonisasi Jalan RW 09 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
131	BKK Betonisasi Jalan RW 3 Desa Bogosari Kec Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
132	BKK Betonisasi Jalan Sabuk Desa Dukuh Noreh RT 03 RW 06 Desa Wonosekar Kec. Karangawen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
133	BKK Betonisasi Jalan Sabuk Desa Karangsono Kec. Mranggen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
134	BKK Betonisasi Jalan Singopadu Desa Sidorejo Kec. Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
135	BKK Betonisasi Jalan Sunan Gunung Jati Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
136	BKK Betonisasi Jalan Tegowanu Desa Sidorejo Kec. Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
137	BKK Betonisasi Kp. Kongsu Desa Babalan Kec. Wedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
138	BKK Betonisasi RW 01 Dukuh Balong Desa Margohayu Kec. Karangawen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
139	BKK Betonisasi RW 04 Desa Babalan Kec Wedung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
140	BKK Betonisasi RW 05 Kepada Desa Mutih Kulon Wedung	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
141	BKK Betonisasi RW 06 Desa Gaji Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
142	BKK Desa Bumirejo Dukuh Turus RW01. Kec. Karangawen Kab Demak Untuk Talud Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
143	BKK Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Untuk Pembangunan Talud Lanjutan Jalan Antar Desa Dari Dukuh Curug Ke Desa Teluk	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
144	BKK Desa Mranggen RW 04 Kec Mranggen Kab Demak Untuk Pembuatan Drainase Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
145	BKK Drainase Dukuh Perbalan Desa Temuroso Kecamatan Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
146	BKK Drainase Dukuh Weru RT.06 RW.01 Desa Tlogoweru Kecamatan Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
147	BKK Drainase RW.03 Desa Candisari Kec. Mranggen Kab. Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
148	BKK Drainase RW 2 Desa Banjarejo Kec Guntur Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
151	BKK Jembatan RT. 01 RW. 01 Desa Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
152	BKK Kepada Desa Sumberejo Kec. Bonang Untuk Betonisasi Jalan RW 05 Dukuh Pangkalan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
153	BKK Pavingisasi Jalan Kerangkulon Kecamatan Wonosalam	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
155	BKK Pembangunan Drainase Dukuh Gabus Desa Banjarejo Kec Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
156	BKK Pembangunan Drainase Dukuh Menco RT.06 RW.08 Desa Berahan Wetan Kec. Wedung	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
158	BKK Pembangunan Drainase RW 03 Desa Menur Kec. Mranggen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
159	BKK Pembangunan Drainase RW 04 Desa Bulusari Kec Sayung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
161	BKK Pembangunan Jembatan Penghubung RW 02 Desa Sidomulyo Kec Wonosalam Kab Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
162	BKK Pembangunan Jembatan RW 03 Desa Bogosari Kec Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
163	BKK Pembangunan Jembatan RW 05 Desa Mlaten Kec Mijen Kab Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
164	BKK Pembangunan Saluran Drainase Desa Banjarejo Kec Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
170	BKK Pembangunan Talud Dk. Singopadu Desa Sidorejo Kec. Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
171	BKK Pembangunan Talud Dk. Tegowanu Desa Sidorejo Kec. Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
173	BKK Pembangunan Talud Dukuh Muteran Desa Kedungori Kecamatan Dempet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
174	BKK Pembangunan Talud Jalan RW 04 Desa Tegalarum Kec. Mranggen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
175	BKK Pembangunan Talud Jalan Sabuk Desa RW. 05 Dk Norowito Desa Ketanjung Kec Karanganyar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
176	BKK Pembangunan Talud Jetis Desa Sidorejo Kec. Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
177	BKK Pembangunan Talud RW 04 Desa Pulosari Kec Karangtengah Kab Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
178	BKK Pembangunan Talud RW 04 Desa Pulosari Kek Karangtengah Kab Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
181	BKK Pembangunan Talud RW 2 Desa Mutih Wetan Kec Wedung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
182	BKK Pembangunan Talud Sabuk Desa Dukuh Noreh RT 02 RW 03 Desa Wonosekar Kec. Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
183	BKK Pembangunan Talud Sungai RW 01 Desa Tempuran Kecamatan Demak Kabupaten Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
184	BKK Pembangunan Talud Desa Babalan Wedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
186	BKK Penataan Lingkungan RW 02 Desa Gaji, Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
187	BKK Penataan Lingkungan RW 06 Desa Gaji, Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
188	BKK Peninggian Jalan Ds. Babalan Wedung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
190	BKK Peningkatan Jalan Dalam Desa RT 05 RW 02 Desa Tugu Lor Kec. Karanganyar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
191	BKK Peningkatan Jalan Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
192	BKK Peningkatan Jalan Desa Banjarejo Kec Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
193	BKK Peningkatan Jalan Desa Dombo Kecamatan Sayung Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
194	BKK Peningkatan Jalan Desa Jetaksari Kecamatan Sayung Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
195	BKK Peningkatan Jalan Desa Kalisari RW 4 Kecamatan Sayung Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
196	BKK Peningkatan Jalan Desa Karangasem RW 1 Kecamatan Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
198	BKK Peningkatan Jalan Desa Karangasem RW 5 Kecamatan Sayung Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
199	BKK Peningkatan Jalan Desa Ngemplak RT.07 RW.01 Kec. Mranggen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
200	BKK Peningkatan Jalan Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
201	BKK Peningkatan Jalan Ds. Jungpasir Wedung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
202	BKK Peningkatan Jalan Dukuh Lengkong Desa Sayung Kec Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
203	BKK Peningkatan Jalan Penceng - Gedung Pamer (Lanjutan) Desa Mranggen Kec. Mranggen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
204	BKK Peningkatan Jalan RT.01 RW.01 Desa Bandunrejo Kec. Mranggen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
205	BKK Peningkatan Jalan RT 01 RW 01 Desa Wringinjajar Kec. Mranggen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
206	BKK Peningkatan Jalan RT 03 RW 13 Dukuh Sumengko Desa Kuripan Kec. Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
207	BKK Peningkatan Jalan RT.04 RW.03 Desa Bandunrejo Kec. Mranggen Kab. Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
208	BKK Peningkatan Jalan RT 06/RW 03 Desa Karangsari - Karangtengah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
209	BKK Peningkatan Jalan RT 14 / RW 04 Desa Kembangan Kec. Bonang Kab.Demak	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
210	BKK Peningkatan Jalan RT 1 RW 1 Desa Karangasem Sayung Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
211	BKK Peningkatan Jalan RT 3 RW 4 Desa Kalisari Kec Sayung Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
212	BKK Peningkatan Jalan RT 4 RW 1 Desa Sriwulan Sayung Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
214	BKK Peningkatan Jalan RT 5 RW 4 Desa Kalisari Kecamatan Sayung Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
215	BKK Peningkatan Jalan RT 6 RW 3 Desa Karang Asem Kec. Sayung Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
216	BKK Peningkatan Jalan RT 9 RW 1 Desa Sriwulan Sayung Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
218	BKK Peningkatan Jalan RW 01 Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
219	BKK Peningkatan Jalan RW 01 Dukuh Karangawang Desa Sidokumpul Kec Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
220	BKK Peningkatan Jalan RW.02 Desa Bandunrejo Kec. Mranggen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
221	BKK Peningkatan Jalan RW.03 Desa Kramat Kec.Dempet Kab.Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
222	BKK Peningkatan Jalan RW 05 Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
223	BKK Peningkatan Jalan RW 06 Desa Ngelowetan Kec Mijen Kab Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
224	BKK Peningkatan Jalan RW 1 Desa Banjarejo Kec Guntur Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
225	BKK Peningkatan Jalan RW 2 Desa Karang Asem Kec. Sayung Kab. Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
226	BKK Peningkatan Jalan RW 4 Desa Donorejo Kec Karangtengah Demak	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
227	BKK Peningkatan Jalan RW 4 Desa Karang Asem Kec. Sayung Kab. Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
228	BKK Peningkatan Lapangan Desa Jetaksari Sayung Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
229	BKK Saluran U Dit RW 03 Desa Gaji Kec Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
230	BKK Saluran U Dit RW 06 Desa Gaji Kec Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
231	BKK Talud Desa Bunderan RT 5 RW 2 Kec Wonosalam	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
232	BKK Talud Desa Kuwu Kec. Dempet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
233	BKK Talud Desa Kuwu Menuju Desa Getas Kec Dempet	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
234	BKK Talud Dukuh Brangkal Desa Sidomulyo Kec. Wonosalam Kab. Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
235	BKK Talud RT. 01 RW. 02 Dk Boto Desa Mranak Kec. Wonosalam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
236	BKK Talud RW 02 Dukuh Balong Desa Margohayu Kec. Karangawen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
238	BKK Talud Saluran RT 06/03 Desa Karang Sari - Karangtengah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
239	BKK Untuk Betonisasi Jalan Kp. An-Nur Ds. Kendalasesem Wedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
240	BKK Untuk Betonisasi Jalan Antar Desa Gajah - Desa Boyolali Desa Gajah Kec. Gajah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
241	BKK Untuk Betonisasi Jalan Desa Sarimulyo Kecamatan Kebonagung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
242	BKK Untuk Betonisasi Jalan Dukuh Tanjung Kamal RT 05 Dan 06 RW 03 Desa Mle kang Ke Gajah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
243	BKK Untuk Betonisasi Jalan RT 01 RW 11 Desa Brambang Kec Karangawen Kab Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
244	BKK Untuk Betonisasi Jalan RT 02 RW 03 Desa Pundenarum Kec Karangawen Kab Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
245	BKK Untuk Betonisasi Jalan RT 03 RW 01 Desa Kotakan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
246	BKK Untuk Betonisasi Jalan RT 05 & 06 RW 03 Desa Mle kang Kec. Gajah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
247	BKK Untuk Betonisasi Jalan RT 2 RW 2 Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
248	BKK Untuk Betonisasi Jalan RW 03 (Jalan Perintis) Desa Tugulor Kec. Karanganyar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
249	BKK Untuk Drainase Desa Temuroso RT 05 RW 03 Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
250	BKK Untuk Drainase Desa Temuroso RT 2 RW 4 Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
251	BKK Untuk Drainase RT 03 RW 06 Desa Berahan Wetan Kec Wedung	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
252	BKK Untuk Drainase RT 05 RW 01 Dukuh Weru Desa Tlogoweru Guntur Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
253	BKK Untuk Pembangunan Drainase Jalan RT 2 RW.3 Ds. Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
255	BKK Untuk Pembangunan Saluran Got Atau Penataan Lingkungan RT 03 RW 03 Desa Sampang Kec. Karangtengah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
257	BKK Untuk Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 11 Desa Brambang Kec Karangawen Kab Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
258	BKK Untuk Pembangunan Talud RW 02 Ds. Muth Wetan Wedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
259	BKK Untuk Peningkatan Betonisasi Jalan RW 02 Dukuh Pritan Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
260	BKK Untuk Peningkatan Betonisasi Jalan RW 06 Dukuh	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
	Solonjari Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur			
261	BKK Untuk Peningkatan Jalan Desa Sarimulyo Dk.Ngayon RW 01 Kec.Kebonagung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
262	BKK Untuk Peningkatan Jalan RW 02 Desa Sidokumpul Kec.Guntur Kab.Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
263	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Betonisasi Jalan Rw 03 Desa Pilangrejo Kec. Wonosalam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
264	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Betonisasi Jalan Rw 08 Desa Karangawen Kec. Karangawen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
265	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI DESA KENDALDOYONG RW 03 KEC. WONOSALAM	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
266	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Betonisasi Jalan Rt 04 Rw 05 Desa Waru Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
267	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Betonisasi Jalan Rw 03 Desa Waru Kecamatan Mranggen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
268	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Betonisasi Jalan Rw 05 Desa Waru Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
269	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Betonisasi Jalan Rw 06 Desa Waru Kecamatan Mranggen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
270	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Betonisasi Jalan Rw 07 Desa Waru Kecamatan Mranggen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
271	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Betonisasi Jalan Rw 08 Desa Waru Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
272	Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan Betonisasi Jalan RW 06 Desa Mojo Kec. Wonosalam Kab. Demak	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
273	Bantuan Keuangan Khusus untuk peningkatan jalan Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
274	BKK Betonisasi Desa Menur RW 03 Kec. Mranggen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
275	BKK Betonisasi jalan antar RW 01 ke RW 02 Desa Jatirejo Kec. Karanganyar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
276	(BKK) Betonisasi jalan Desa Candisari RT 02 RW 07 Kec. Mranggen	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
277	BKK Betonisasi Jalan Dukuh Jetis RT. 01 - 03 Rw.02 Desa Tamansari Kec. Mranggen	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
278	BKK Betonisasi jalan Dukuh Katong Kulon RW 14 Desa Pundenarum Kec. Karangawen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
279	BKK Betonisasi Jalan Dukuh Sukorejo RT.02 RW.04 Desa Tamansari Kec. Mranggen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
280	BKK betonisasi jalan Dukuh Weru RT 02 RW 01 Desa Tlogoweru Kec Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
281	BKK Betonisasi jalan Gang 4 RT 03 RW 02 Desa Geneng Kec. Mijen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
282	BKK betonisasi jalan RT 04 dan 05 RW 03 Desa Banjarsari Kec. Gajah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
283	BKK Betonisasi Jalan RW 02 Dukuh Gabus Desa Bakalrejo Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
284	BKK Betonisasi Jalan Rw 08 Desa Kunir Kec. Dempet	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
285	BKK Betonisasi Jalan RW 2 Desa Getas Kec. Wonosalam	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
286	BKK betonisasi jln rt 2 rw 2 desa tanggul kec mijen kab demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
287	BKK Betonisasi RT 5/6 Dukuh Mroso Desa Temuroso Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
288	BKK Betonisasi RW 4 Desa Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
289	BKK Drainase RT 07 RW 24 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
290	BKK Pembangunan Jalan RW 4 Dukuh Pulo Desa Bakalrejo Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
291	BKK Pembangunan Jembatan Dk. Perbalan Rw 04 Ds. Temuroso Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
292	BKK Pembangunan Talud Dk. Perbalan Rw 04 Ds. Temuroso Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
293	BKK Pembangunan Talud Dusun Pasaan Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
294	BKK Pembangunan talud jalan RT 06 RW 01 Desa Kramat Kec. Dempet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
295	BKK Pembangunan Talud RT 04 RW 04 Desa Tegalurum Kec. Mranggen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
296	BKK Pembangunan Talud rt 1 Desa Tambirejo Kec. Gajah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
297	BKK Pembangunan talud RW 03 Desa Kedunguter Kec. Karangtengah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
298	BKK pembangunan talud RT 03 RW 01 Dukuh Karang Geneng Desa Timbul Sloko Kec. Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
299	BKK Peninggian jalan dan Betonisasi jalan pelita Desa kedungwaru lor Kec. Karanganyar Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
300	BKK Peninggian Jalan Rt 03 Rw 03 Desa Kendaldoyong Wonosalam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
301	BKK Peningkatan jalan Desa Botorjo RW 02 Kec. Wonosalam	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
302	BKK Peningkatan jalan Desa Dombo RW.04 Kec. Sayung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
303	BKK Peningkatan Jalan Desa Ruwit Kec Wedung	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
304	BKK Peningkatan Jalan Dukuh Bakalan RW.01 Desa Bakalrejo Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
305	BKK Peningkatan jalan (padas) RT 2/4 Dukuh Baru Surodadi Kec. Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
306	BKK Peningkatan jalan (padas) RT 5/5 Dukuh Sampit Sidorejo Kec. Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
307	BKK Peningkatan Jalan Rt 03 Rw 01 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
308	BKK Peningkatan Jalan Rt 2 Rw 3 Desa Dombo Kecamatan Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
309	BKK Peningkatan Jalan Rt 5 Rw 4 Desa Kalisari - Sayung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
310	BKK Peningkatan Jalan RW.01 Desa Dombo Kec. Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
311	BKK Peningkatan Jalan Rw 01 Desa Sambung Kec. Gajah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
312	BKK Peningkatan Jalan Rw 1 Desa Sidogemah Kecamatan Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
313	BKK peningkatkan jalan RW 4 Desa Dombo Kecamatan Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
314	BKK Peningkatan Jalan Rw 5 Desa Sidogemah Kecamatan Sayung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
315	BKK Talud RT 7 RW 4 Desa Tlogorejo Kec. Wonosalam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
316	BKK Untuk Pembangunan Betonisasi Jl Rw 2 Dukuh Gabus Desa Bakalrejo Kec. Guntur	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00
317	BKK untuk Pembangunan talud RW 01 Desa Sarimulyo Kec. Kebonagung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
318	BKK Betonisasi Jalan RT 02 RW 07 Desa Kunir Kec. Dempet	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
319	BKK Pembangunan Saluran Drainase RW 05 DukuhTlogogedong Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
320	BKK Betonisasi jalan Rw. 01 Desa Tamansari kecamatan Mranggen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
321	BKK Betonisasi jalan Rw.03 Desa Tamansari kecamatan Mranggen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
322	BKK Pembangunan Talud RW 3 Desa Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
323	BKK Betonisasi jalan menuju TPA RW 2 Desa Candisari kec.Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
324	BKK Talud Jalan RT 01 RW 11 Desa Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
325	BKK Betonisasi Jalan RW 01 Desa Kedondong Kec.Demak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
x				
II.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00
1	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kios Pasar Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
2	BKK Pembangunan Kios Pasar Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
3	BKK Pembangunan Los Pasar Desa Buko Kec.Wedung	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
x				
III.	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak	2.455.000.000,00	2.455.000.000,00	0,00
1	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani Dukuh Gatak Desa Tlogoweru Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani Dukuh Turi Desa Turitempel Kec. Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
3	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Jitrit Bronjong Desa Mojosimon Kec. Gajah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
4	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani RW 03 Desa Pamongan Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5	BKK Betonisasi Jut Blok Cendak Keltan Margo Mulyo Desa Weding Kecamatan Bonang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6	BKK Betonisasi Jut Blok Ngrowo Keltan Mugo Maju Desa Weding Kec Bonang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
9	BKK Pembangunan Jalan Usaha Tani (Jut) Blok Padet Desa Berahan Wetan Kec.Wedung Kab.Demak	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
10	BKK Pembangunan Jitrit Desa Banjarsari Kec. Gajah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
11	BKK Pembangunan Jut Desa Jatirejo Kec. Karanganyar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
12	BKK Pembangunan Jut Dukuh Perbalan Desa Temuroso Kec Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
16	BKK Pembangunan Talud Sawah Blok Lurahana Desa Wonosari Kec. Bonang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
17	BKK Pembangunan Talud Sawah Cangkring Lor Desa Wonosari Kec. Bonang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
20	BKK Untuk Drainase Saluran Pertanian Dukuh Soka Desa Brambang Kec Karangawen Kab Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
21	BKK Untuk Pembangunan Jut Sawah Blok Carikan Desa Kedungori Kec. Dempet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
22	BKK Untuk Pembangunan Talud Jalan Pertanian Gang Bilo 1 Dukuh Bilo Lor Desa Pundenarum Kec Karangawen Kab Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
23	BKK Betonisasi Jalan Usaha Tani Ds. Tlogoweru Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
24	BKK Pembangunan jalan usaha tani (JUT) Blok Keto'an Desa Berahan Kulon Kec.Wedung Kab.Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
25	BKK untuk pengurangan jalan usaha tani sawah Bengkok Kyai Masjid Dukuh Wonorenggo Desa Cangkring Rembang Kec. Karanganyar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
x				
IV.	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Demak	4.190.000.000,00	3.990.000.000,00	200.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Sarana Prasarana Lapangan Olahraga Sepakbola Desa Brumbung Kec. Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3	Bantuan Keuangan Khusus Penataan Lingkungan Lapangan Sepak Bola Desa Kalianyar Kec. Wonosalam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4	Bantuan Keuangan Khusus Penataan Lingkungan Lapangan Sepak Bola Dukuh Demung Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Gedung Badminton Krajan RT 06 RW 02 Desa Kangkung Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Joging Trak Lapangan Sepakbola Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
7	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Gedung Olahraga Desa Kangkung Kec Mranggen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
8	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Gedung Olahraga Desa Sidokumpul Kec Guntur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
9	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Gedung Olah Raga Lanjutan Desa Sukorejo Kec. Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
10	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peninggian Lapangan RW 02 Desa Tugu Kec. Sayung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
11	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Fasilitas Lapangan Olahraga Lanjutan Desa Batu Kec. Karangtengah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
12	BKK Drainase Lapangan RW.06 Desa Candisari Kec. Mranggen Kab. Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
13	BKK Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga Desa Sumberejo Kec Mranggen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
14	BKK Lanjutan Pembangunan Lapangan Voly RW 01 Dukuh Karanggawang Desa Sidokumpul Kec Guntur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
15	BKK Pembangunan Dinding Tembok Lapangan Sepak Bola Dukuh Demung Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
16	BKK Pembangunan Gedung Olahraga Desa Kuwu Kec Dempet	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
17	BKK Pembangunan Jogging Track Lapangan Sepak Bola Dukuh Demung Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam (Lanjutan)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
18	BKK Pembangunan Talud Lapangan Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
19	BKK Penataan Lapangan Sepak Bola Desa Wonosari Kec. Bonang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
20	BKK Pengurukan Lapangan Olahraga RW 01 Desa Piliangrejo Kec Wonosalam	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
22	BKK Untuk Pembangunan Talud Lapangan Desa Boyolali Kec. Gajah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
24	BKK Untuk Pengurukan Lapangan Sepakbola Desa Gedang Alas Kec.Gajah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
25	BKK Desa Mranak Kec Wonosalam Untuk Pengurukan Lapangan Sepak Bola	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
26	BKK Pembangunan Talud Lapangan Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
27	BKK Pengurukan Lapangan Desa Boyolali Kec. Gajah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
28	BKK Peningkatan Lapangan Sepak Bola Desa Pidodo Kec. Karangtengah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
29	BKK Peningkatan lapangan RT 04 RW 02 Desa Mutih Wetan Kec Wedung	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
30	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penataan Lapangan Olahraga Dukuh Pragi Desa Guntur Kec. Guntur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
x				
v.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
1	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Gedung Balai Rakyat Desa Teluk Kec Karangawen Kab Demak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Gedung Balai Pertemuan Desa Jamus Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Renovasi Gedung Pertemuan Desa Bandungrejo RT 02 RW 02 Kecamatan Mranggen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5	BKK Kepada Desa Surodadi Kec. Gajah Untuk Pembuatan Sumur Artetis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7	Lanjutan BKK Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Karangrejo Kec. Dempet Kab. Demak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
10	BKK Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Tanggul Kec. Mijen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
x				
VI.	Dinas Perhubungan Kabupaten Demak	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1	BKK Pengadaan dan pemasangan lampu jalan Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp105.703.760.300 terealisasi sebesar Rp105.703.760.300 atau sebesar 100%.

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Bantuan Keuangan untuk Bantuan Alokasi Dana Desa		105.703.760.300	105.703.760.300	-
1	BANYUMENENG	MRANGGEN	484.990.000	484.990.000	-
2	KEBONBATUR	MRANGGEN	537.345.000	537.345.000	-
3	SUMBEREJO	MRANGGEN	430.634.000	430.634.000	-
4	KALITENGAH	MRANGGEN	398.778.000	398.778.000	-
5	KANGKUNG	MRANGGEN	448.136.000	448.136.000	-
6	MRANGGEN	MRANGGEN	342.176.000	342.176.000	-
7	BATURSARI	MRANGGEN	650.455.000	650.455.000	-
8	BANDUNGREJO	MRANGGEN	413.755.000	413.755.000	-
9	BRUMBUNG	MRANGGEN	311.105.000	311.105.000	-
10	KEMBANGARUM	MRANGGEN	465.294.000	465.294.000	-
11	KARANGSONO	MRANGGEN	494.096.000	494.096.000	-
12	TAMANSARI	MRANGGEN	392.756.000	392.756.000	-
13	NGEMPLAK	MRANGGEN	306.821.000	306.821.000	-
14	MENUR	MRANGGEN	447.688.000	447.688.000	-
15	JAMUS	MRANGGEN	528.216.000	528.216.000	-
16	WRINGINJAJAR	MRANGGEN	437.705.000	437.705.000	-
17	WARU	MRANGGEN	404.860.000	404.860.000	-
18	TEGALARUM	MRANGGEN	450.995.000	450.995.000	-
19	CANDISARI	MRANGGEN	448.925.000	448.925.000	-
20	JRAGUNG	KARANGAWEN	769.664.000	769.664.000	-
21	WONOSEKAR	KARANGAWEN	665.493.000	665.493.000	-
22	MARGOHAYU	KARANGAWEN	469.460.000	469.460.000	-
23	TELUK	KARANGAWEN	461.776.000	461.776.000	-
24	TLOGOREJO	KARANGAWEN	504.444.000	504.444.000	-
25	REJOSARI	KARANGAWEN	794.871.300	794.871.300	-
26	KARANGAWEN	KARANGAWEN	605.175.000	605.175.000	-
27	KURIPAN	KARANGAWEN	505.690.000	505.690.000	-
28	BUMIREJO	KARANGAWEN	525.065.000	525.065.000	-
29	BRAMBANG	KARANGAWEN	668.055.000	668.055.000	-
30	SIDOREJO	KARANGAWEN	637.388.000	637.388.000	-
31	PUNDENARUM	KARANGAWEN	448.608.000	448.608.000	-
32	BLERONG	GUNTUR	531.847.000	531.847.000	-
33	BANJAREJO	GUNTUR	394.112.000	394.112.000	-
34	WONOREJO	GUNTUR	434.246.000	434.246.000	-
35	SARIREJO	GUNTUR	351.572.000	351.572.000	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
36	PAMONGAN	GUNTUR	415.658.000	415.658.000	-
37	TLOGOWERU	GUNTUR	415.207.000	415.207.000	-
38	BOGOSARI	GUNTUR	563.917.000	563.917.000	-
39	SUKOREJO	GUNTUR	343.247.000	343.247.000	-
40	SIDOKUMPUL	GUNTUR	438.393.000	438.393.000	-
41	GAJI	GUNTUR	351.665.000	351.665.000	-
42	KRANDON	GUNTUR	318.929.000	318.929.000	-
43	TANGKIS	GUNTUR	343.520.000	343.520.000	-
44	TEMUROSO	GUNTUR	554.538.000	554.538.000	-
45	BAKALREJO	GUNTUR	515.498.000	515.498.000	-
46	GUNTUR	GUNTUR	504.722.000	504.722.000	-
47	BUMIHARJO	GUNTUR	483.459.000	483.459.000	-
48	TLOGOREJO	GUNTUR	387.088.000	387.088.000	-
49	TRIMULYO	GUNTUR	467.400.000	467.400.000	-
50	SIDOHARJO	GUNTUR	424.071.000	424.071.000	-
51	TURITEMPEL	GUNTUR	394.587.000	394.587.000	-
52	BULUSARI	SAYUNG	460.995.000	460.995.000	-
53	DOMBO	SAYUNG	355.296.000	355.296.000	-
54	JETAKSARI	SAYUNG	444.753.000	444.753.000	-
55	KALISARI	SAYUNG	573.463.000	573.463.000	-
56	KARANGASEM	SAYUNG	390.066.000	390.066.000	-
57	PRAMPELAN	SAYUNG	414.271.000	414.271.000	-
58	PILANGSARI	SAYUNG	387.469.000	387.469.000	-
59	TAMBAKROTO	SAYUNG	442.537.000	442.537.000	-
60	LOIRENG	SAYUNG	458.623.000	458.623.000	-
61	SAYUNG	SAYUNG	573.526.000	573.526.000	-
62	SRIWULAN	SAYUNG	402.508.000	402.508.000	-
63	BEDONO	SAYUNG	587.309.000	587.309.000	-
64	PURWOSARI	SAYUNG	458.116.000	458.116.000	-
65	SIDOGEMAH	SAYUNG	567.808.000	567.808.000	-
66	GEMULAK	SAYUNG	566.201.000	566.201.000	-
67	TIMBUL SLOKO	SAYUNG	471.371.000	471.371.000	-
68	SURODADI	SAYUNG	453.833.000	453.833.000	-
69	TUGU	SAYUNG	493.910.000	493.910.000	-
70	SIDOREJO	SAYUNG	631.479.000	631.479.000	-
71	BANJARSARI	SAYUNG	568.294.000	568.294.000	-
72	PLOSO	KARANGTENGAH	351.640.000	351.640.000	-
73	GROGOL	KARANGTENGAH	427.118.000	427.118.000	-
74	PULOSARI	KARANGTENGAH	315.142.000	315.142.000	-
75	DONOREJO	KARANGTENGAH	534.019.000	534.019.000	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
76	PIDODO	KARANGTENGAH	415.268.000	415.268.000	-
77	KLITIH	KARANGTENGAH	338.041.000	338.041.000	-
78	SAMPANG	KARANGTENGAH	518.069.000	518.069.000	-
79	KEDUNGUTER	KARANGTENGAH	397.441.000	397.441.000	-
80	DUKUN	KARANGTENGAH	318.285.000	318.285.000	-
81	KARANGSARI	KARANGTENGAH	389.017.000	389.017.000	-
82	KARANGTOWO	KARANGTENGAH	379.269.000	379.269.000	-
83	WONOWOSO	KARANGTENGAH	463.155.000	463.155.000	-
84	WONOKERTO	KARANGTENGAH	358.751.000	358.751.000	-
85	BATU	KARANGTENGAH	536.784.000	536.784.000	-
86	REJOSARI	KARANGTENGAH	431.762.000	431.762.000	-
87	WONOAGUNG	KARANGTENGAH	482.758.000	482.758.000	-
88	TAMBAKBULUSAN	KARANGTENGAH	396.274.000	396.274.000	-
89	DORENG	WONOSALAM	370.439.000	370.439.000	-
90	KALIANYAR	WONOSALAM	368.477.000	368.477.000	-
91	TLOGODOWO	WONOSALAM	274.874.000	274.874.000	-
92	KARANGROWO	WONOSALAM	435.952.000	435.952.000	-
93	LEMPUYANG	WONOSALAM	359.800.000	359.800.000	-
94	KENDALDOYONG	WONOSALAM	424.291.000	424.291.000	-
95	WONOSALAM	WONOSALAM	308.869.000	308.869.000	-
96	KARANGREJO	WONOSALAM	391.623.000	391.623.000	-
97	JOGOLOYO	WONOSALAM	367.892.000	367.892.000	-
98	BOTOREJO	WONOSALAM	413.125.000	413.125.000	-
99	SIDOMULYO	WONOSALAM	395.074.000	395.074.000	-
100	PILANGREJO	WONOSALAM	481.046.000	481.046.000	-
101	TLOGOREJO	WONOSALAM	452.957.000	452.957.000	-
102	KERANGKULON	WONOSALAM	474.485.000	474.485.000	-
103	BUNDERAN	WONOSALAM	303.832.000	303.832.000	-
104	GETAS	WONOSALAM	417.889.000	417.889.000	-
105	MOJODEMAK	WONOSALAM	391.441.000	391.441.000	-
106	KUNCIR	WONOSALAM	448.383.000	448.383.000	-
107	TRENGGULI	WONOSALAM	376.874.000	376.874.000	-
108	MRISEN	WONOSALAM	397.291.000	397.291.000	-
109	MRANAK	WONOSALAM	426.533.000	426.533.000	-
110	MERAK	DEMPET	465.581.000	465.581.000	-
111	KARANGREJO	DEMPET	430.799.000	430.799.000	-
112	SIDOMULYO	DEMPET	523.503.000	523.503.000	-
113	BOTOSENGON	DEMPET	342.014.000	342.014.000	-
114	JERUKGULUNG	DEMPET	385.107.000	385.107.000	-
115	KUNIR	DEMPET	582.168.000	582.168.000	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
116	BRAKAS	DEMPET	426.959.000	426.959.000	-
117	BALEREJO	DEMPET	537.906.000	537.906.000	-
118	BALEROMO	DEMPET	442.590.000	442.590.000	-
119	KEDUNGORI	DEMPET	420.144.000	420.144.000	-
120	KUWU	DEMPET	397.590.000	397.590.000	-
121	KEBONSARI	DEMPET	392.282.000	392.282.000	-
122	GEMPOLDENOK	DEMPET	357.990.000	357.990.000	-
123	HARJOWINANGUN	DEMPET	627.185.000	627.185.000	-
124	KRAMAT	DEMPET	560.608.000	560.608.000	-
125	DEMPET	DEMPET	455.121.000	455.121.000	-
126	SURODADI	GAJAH	334.080.000	334.080.000	-
127	JATISONO	GAJAH	346.507.000	346.507.000	-
128	KEDONDONG	GAJAH	441.248.000	441.248.000	-
129	GEDANGALAS	GAJAH	392.894.000	392.894.000	-
130	SAMBIROTO	GAJAH	361.118.000	361.118.000	-
131	TANJUNGYAR	GAJAH	369.661.000	369.661.000	-
132	WILALUNG	GAJAH	342.385.000	342.385.000	-
133	MEDINI	GAJAH	367.069.000	367.069.000	-
134	MLATIHARJO	GAJAH	448.377.000	448.377.000	-
135	TAMBIREJO	GAJAH	388.097.000	388.097.000	-
136	BANJARSARI	GAJAH	411.778.000	411.778.000	-
137	BOYOLALI	GAJAH	300.157.000	300.157.000	-
138	GAJAH	GAJAH	373.315.000	373.315.000	-
139	SARI	GAJAH	481.013.000	481.013.000	-
140	MLEKANG	GAJAH	443.454.000	443.454.000	-
141	SAMBUNG	GAJAH	387.637.000	387.637.000	-
142	MOJOSIMO	GAJAH	310.618.000	310.618.000	-
143	TLOGOPANDOGAN	GAJAH	387.746.000	387.746.000	-
144	JATIREJO	KARANGANYAR	423.490.000	423.490.000	-
145	NGALURAN	KARANGANYAR	462.827.000	462.827.000	-
146	WONOKETINGAL	KARANGANYAR	501.922.000	501.922.000	-
147	CANGKRING REMBANG	KARANGANYAR	436.503.000	436.503.000	-
148	CANGKRING	KARANGANYAR	445.730.000	445.730.000	-
149	TUWANG	KARANGANYAR	486.508.000	486.508.000	-
150	UNDAAN KIDUL	KARANGANYAR	385.217.000	385.217.000	-
151	UNDAAN LOR	KARANGANYAR	359.095.000	359.095.000	-
152	KETANJUNG	KARANGANYAR	443.405.000	443.405.000	-
153	NGEMPLIK WETAN	KARANGANYAR	360.648.000	360.648.000	-
154	WONOREJO	KARANGANYAR	495.178.000	495.178.000	-
155	KARANGANYAR	KARANGANYAR	475.399.000	475.399.000	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
156	KEDUNGWARU KIDUL	KARANGANYAR	398.485.000	398.485.000	-
157	KEDUNGWARU LOR	KARANGANYAR	489.195.000	489.195.000	-
158	BANDUNGREJO	KARANGANYAR	388.241.000	388.241.000	-
159	TUGU LOR	KARANGANYAR	360.394.000	360.394.000	-
160	KOTAKAN	KARANGANYAR	404.598.000	404.598.000	-
161	GENENG	MIJEN	324.968.000	324.968.000	-
162	NGELOWETAN	MIJEN	351.713.000	351.713.000	-
163	MLATEN	MIJEN	343.885.000	343.885.000	-
164	BANTENGMATI	MIJEN	507.093.000	507.093.000	-
165	NGELOKULON	MIJEN	418.654.000	418.654.000	-
166	PASIR	MIJEN	525.351.000	525.351.000	-
167	REJOSARI	MIJEN	454.484.000	454.484.000	-
168	NGEGOT	MIJEN	363.094.000	363.094.000	-
169	JLEPER	MIJEN	502.963.000	502.963.000	-
170	PECUK	MIJEN	405.090.000	405.090.000	-
171	TANGGUL	MIJEN	365.974.000	365.974.000	-
172	BAKUNG	MIJEN	392.409.000	392.409.000	-
173	BERMI	MIJEN	303.963.000	303.963.000	-
174	MIJEN	MIJEN	412.336.000	412.336.000	-
175	GEMPOLSONGO	MIJEN	325.176.000	325.176.000	-
176	BOLO	DEMAK	400.343.000	400.343.000	-
177	BANGO	DEMAK	492.426.000	492.426.000	-
178	KEDONDONG	DEMAK	399.503.000	399.503.000	-
179	SEDO	DEMAK	400.567.000	400.567.000	-
180	MULYOREJO	DEMAK	464.995.000	464.995.000	-
181	TURIREJO	DEMAK	536.538.000	536.538.000	-
182	RAJI	DEMAK	473.629.000	473.629.000	-
183	CABEAN	DEMAK	393.498.000	393.498.000	-
184	TEMPURAN	DEMAK	395.260.000	395.260.000	-
185	KARANGMLATI	DEMAK	483.970.000	483.970.000	-
186	KATONSARI	DEMAK	382.410.000	382.410.000	-
187	KALIKONDANG	DEMAK	444.520.000	444.520.000	-
188	DONOROJO	DEMAK	425.837.000	425.837.000	-
189	JATIMULYO	BONANG	492.915.000	492.915.000	-
190	KRAJANBOGO	BONANG	557.919.000	557.919.000	-
191	SUKODONO	BONANG	422.649.000	422.649.000	-
192	SUMBEREJO	BONANG	713.807.000	713.807.000	-
193	KEMBANGAN	BONANG	465.925.000	465.925.000	-
194	KARANGREJO	BONANG	589.509.000	589.509.000	-
195	GEBANGARUM	BONANG	470.344.000	470.344.000	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
196	GEBANG	BONANG	461.911.000	461.911.000	-
197	MARGOLINDUK	BONANG	277.734.000	277.734.000	-
198	MORODEMAK	BONANG	348.542.000	348.542.000	-
199	PURWOREJO	BONANG	407.092.000	407.092.000	-
200	BETAHWALANG	BONANG	412.514.000	412.514.000	-
201	SERANGAN	BONANG	377.685.000	377.685.000	-
202	TRIDONOREJO	BONANG	467.738.000	467.738.000	-
203	TLOGOBOYO	BONANG	452.040.000	452.040.000	-
204	JATIROGO	BONANG	452.746.000	452.746.000	-
205	BONANGREJO	BONANG	419.686.000	419.686.000	-
206	PONCOHARJO	BONANG	602.492.000	602.492.000	-
207	WONOSARI	BONANG	425.712.000	425.712.000	-
208	JALI	BONANG	425.002.000	425.002.000	-
209	WEDING	BONANG	647.990.000	647.990.000	-
210	WEDUNG	WEDUNG	469.829.000	469.829.000	-
211	NGAWEN	WEDUNG	323.025.000	323.025.000	-
212	RUWIT	WEDUNG	455.859.000	455.859.000	-
213	KENDUREN	WEDUNG	416.683.000	416.683.000	-
214	BUKO	WEDUNG	415.443.000	415.443.000	-
215	MANDDUNG	WEDUNG	333.864.000	333.864.000	-
216	BERAHAN KULON	WEDUNG	316.069.000	316.069.000	-
217	BERAHAN WETAN	WEDUNG	501.086.000	501.086.000	-
218	BUNGO	WEDUNG	430.805.000	430.805.000	-
219	TEMPEL	WEDUNG	344.808.000	344.808.000	-
220	JETAK	WEDUNG	327.220.000	327.220.000	-
221	JUNGSEMI	WEDUNG	416.763.000	416.763.000	-
222	JUNGPASIR	WEDUNG	398.763.000	398.763.000	-
223	MUTIH WETAN	WEDUNG	334.042.000	334.042.000	-
224	BABALAN	WEDUNG	395.054.000	395.054.000	-
225	MUTIH KULON	WEDUNG	457.843.000	457.843.000	-
226	TEDUNAN	WEDUNG	423.541.000	423.541.000	-
227	KENDALASEM	WEDUNG	334.204.000	334.204.000	-
228	KEDUNG MUTIH	WEDUNG	371.301.000	371.301.000	-
229	KEDUNG KARANG	WEDUNG	342.842.000	342.842.000	-
230	PILANGWETAN	KEBONAGUNG	327.182.000	327.182.000	-
231	KEBONAGUNG	KEBONAGUNG	523.934.000	523.934.000	-
232	KLAMPOK LOR	KEBONAGUNG	327.212.000	327.212.000	-
233	MIJEN	KEBONAGUNG	417.237.000	417.237.000	-
234	WERDOYO	KEBONAGUNG	415.692.000	415.692.000	-
235	MANGUNREJO	KEBONAGUNG	522.624.000	522.624.000	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
236	BABAT	KEBONAGUNG	415.824.000	415.824.000	-
237	MANGUNAN LOR	KEBONAGUNG	379.291.000	379.291.000	-
238	TLOGOSIH	KEBONAGUNG	423.277.000	423.277.000	-
239	PRIGI	KEBONAGUNG	337.535.000	337.535.000	-
240	SARIMULYO	KEBONAGUNG	393.775.000	393.775.000	-
241	SOLOWIRE	KEBONAGUNG	361.798.000	361.798.000	-
242	SOKOKIDUL	KEBONAGUNG	358.393.000	358.393.000	-
243	MEGONTEN	KEBONAGUNG	436.942.000	436.942.000	-

3. Dana Desa (DD)

Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar Rp262.023.039.000 terealisasi sebesar Rp201.113.654.524 atau sebesar 76,75%.

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Dana Desa		262.023.039.000	201.113.654.524	60.909.384.476
1	BANYUMENENG	MRANGGEN	1.264.639.000	1.134.277.600	130.361.400
2	KEBONBATUR	MRANGGEN	1.761.735.000	1.379.335.800	382.399.200
3	SUMBEREJO	MRANGGEN	1.323.322.000	1.192.327.600	130.994.400
4	KALITENGAH	MRANGGEN	1.062.355.000	956.878.000	105.477.000
5	KANGKUNG	MRANGGEN	1.303.297.000	932.833.000	370.464.000
6	MRANGGEN	MRANGGEN	1.716.945.000	1.432.362.200	284.582.800
7	BATURSARI	MRANGGEN	2.330.652.000	1.706.113.200	624.538.800
8	BANDUNGREJO	MRANGGEN	1.038.268.000	741.448.000	296.820.000
9	BRUMBUNG	MRANGGEN	1.074.490.000	862.722.700	211.767.300
10	KEMBANGARUM	MRANGGEN	1.535.682.000	1.535.682.000	-
11	KARANGSONO	MRANGGEN	1.152.853.000	796.654.000	356.199.000
12	TAMANSARI	MRANGGEN	968.108.000	923.768.000	44.340.000
13	NGEMPLAK	MRANGGEN	957.794.000	709.152.080	248.641.920
14	MENUR	MRANGGEN	964.598.000	678.576.800	286.021.200
15	JAMUS	MRANGGEN	965.654.000	762.556.400	203.097.600
16	WRINGINJAJAR	MRANGGEN	1.300.312.000	895.906.000	404.406.000
17	WARU	MRANGGEN	1.240.988.000	955.706.216	285.281.784
18	TEGALARUM	MRANGGEN	1.164.991.000	879.643.000	285.348.000
19	CANDISARI	MRANGGEN	1.108.948.000	814.566.400	294.381.600
20	JRAGUNG	KARANGAWEN	1.580.673.000	1.304.554.200	276.118.800
21	WONOSEKAR	KARANGAWEN	1.245.784.000	878.884.000	366.900.000
22	MARGOHAYU	KARANGAWEN	1.073.785.000	784.469.200	289.315.800
23	TELUK	KARANGAWEN	1.032.388.000	831.695.200	200.692.800
24	TLOGOREJO	KARANGAWEN	1.377.528.000	1.131.768.000	245.760.000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
25	REJOSARI	KARANGAWEN	1.620.915.000	1.263.468.000	357.447.000
26	KARANGAWEN	KARANGAWEN	1.194.952.000	975.184.000	219.768.000
27	KURIPAN	KARANGAWEN	987.610.000	692.230.000	295.380.000
28	BUMIREJO	KARANGAWEN	1.409.530.000	964.432.000	445.098.000
29	BRAMBANG	KARANGAWEN	1.246.314.000	1.246.314.000	-
30	SIDOREJO	KARANGAWEN	1.244.581.000	874.152.400	370.428.600
31	PUNDENARUM	KARANGAWEN	1.172.257.000	848.275.000	323.982.000
32	BLERONG	GUNTUR	1.329.826.000	842.252.410	487.573.590
33	BANJAREJO	GUNTUR	989.132.000	690.368.480	298.763.520
34	WONOREJO	GUNTUR	1.157.764.000	777.824.248	379.939.752
35	SARIREJO	GUNTUR	984.284.000	691.484.000	292.800.000
36	PAMONGAN	GUNTUR	926.249.000	640.596.800	285.652.200
37	TLOGOWERU	GUNTUR	817.800.000	530.640.000	287.160.000
38	BOGOSARI	GUNTUR	1.251.802.000	920.752.000	331.050.000
39	SUKOREJO	GUNTUR	1.300.163.000	1.198.329.800	101.833.200
40	SIDOKUMPUL	GUNTUR	1.368.568.000	1.045.288.000	323.280.000
41	GAJI	GUNTUR	992.309.000	740.849.000	251.460.000
42	KRANDON	GUNTUR	884.259.000	806.614.800	77.644.200
43	TANGKIS	GUNTUR	885.176.000	589.796.000	295.380.000
44	TEMUROSO	GUNTUR	1.359.520.000	1.067.596.000	291.924.000
45	BAKALREJO	GUNTUR	1.124.902.000	784.219.600	340.682.400
46	GUNTUR	GUNTUR	1.117.690.000	820.570.000	297.120.000
47	BUMIHARJO	GUNTUR	977.051.000	592.480.100	384.570.900
48	TLOGOREJO	GUNTUR	816.183.000	668.892.000	147.291.000
49	TRIMULYO	GUNTUR	1.036.634.000	676.691.300	359.942.700
50	SIDOHARJO	GUNTUR	1.000.620.000	711.810.000	288.810.000
51	TURITEMPEL	GUNTUR	944.468.000	705.577.520	238.890.480
52	BULUSARI	SAYUNG	1.103.617.000	1.103.617.000	-
53	DOMBO	SAYUNG	982.112.000	634.838.000	347.274.000
54	JETAKSARI	SAYUNG	1.089.922.000	1.089.922.000	-
55	KALISARI	SAYUNG	1.401.507.000	1.020.490.800	381.016.200
56	KARANGASEM	SAYUNG	952.235.000	727.170.200	225.064.800
57	PRAMPELAN	SAYUNG	1.107.878.000	746.547.800	361.330.200
58	PILANGSARI	SAYUNG	1.036.430.000	679.073.600	357.356.400
59	TAMBAKROTO	SAYUNG	980.816.000	748.772.000	232.044.000
60	LOIRENG	SAYUNG	962.138.000	962.138.000	-
61	SAYUNG	SAYUNG	1.282.489.000	1.282.489.000	-
62	SRIWULAN	SAYUNG	1.261.603.000	789.512.800	472.090.200
63	BEDONO	SAYUNG	1.032.806.000	748.510.400	284.295.600
64	PURWOSARI	SAYUNG	1.138.879.000	715.622.800	423.256.200

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
65	SIDOGEMAH	SAYUNG	1.180.759.000	1.180.759.000	-
66	GEMULAK	SAYUNG	1.042.355.000	1.042.355.000	-
67	TIMBULSLOKO	SAYUNG	1.125.930.000	722.137.200	403.792.800
68	SURODADI	SAYUNG	950.208.000	615.914.400	334.293.600
69	TUGU	SAYUNG	1.441.642.000	1.095.696.040	345.945.960
70	SIDOREJO	SAYUNG	1.259.108.000	898.740.200	360.367.800
71	BANJARSARI	SAYUNG	1.295.199.000	1.295.199.000	-
72	PLOSO	KARANGTENGAH	838.623.000	615.063.000	223.560.000
73	GROGOL	KARANGTENGAH	993.584.000	646.073.600	347.510.400
74	PULOSARI	KARANGTENGAH	939.005.000	644.342.000	294.663.000
75	DONOREJO	KARANGTENGAH	1.219.897.000	880.850.440	339.046.560
76	PIDODO	KARANGTENGAH	1.286.927.000	974.488.400	312.438.600
77	KLITIH	KARANGTENGAH	975.665.000	816.611.030	159.053.970
78	SAMPANG	KARANGTENGAH	976.601.000	825.916.400	150.684.600
79	KEDUNGUTER	KARANGTENGAH	1.041.059.000	807.822.500	233.236.500
80	DUKUN	KARANGTENGAH	1.029.802.000	872.902.000	156.900.000
81	KARANGSARI	KARANGTENGAH	1.052.599.000	833.209.480	219.389.520
82	KARANGTOWO	KARANGTENGAH	915.875.000	678.635.000	237.240.000
83	WONOWOSO	KARANGTENGAH	1.084.531.000	948.339.400	136.191.600
84	WONOKERTO	KARANGTENGAH	919.631.000	859.384.400	60.246.600
85	BATU	KARANGTENGAH	959.054.000	772.891.028	186.162.972
86	REJOSARI	KARANGTENGAH	906.257.000	678.674.000	227.583.000
87	WONOAGUNG	KARANGTENGAH	1.097.024.000	851.465.600	245.558.400
88	TAMBAKBULUSAN	KARANGTENGAH	829.416.000	641.552.400	187.863.600
89	DORENG	WONOSALAM	866.151.000	682.659.000	183.492.000
90	KALIANYAR	WONOSALAM	1.045.268.000	799.876.400	245.391.600
91	TLOGODOWO	WONOSALAM	701.033.000	506.572.700	194.460.300
92	KARANGROWO	WONOSALAM	814.683.000	594.996.000	219.687.000
93	LEMPUYANG	WONOSALAM	822.648.000	592.861.200	229.786.800
94	KENDALDOYONG	WONOSALAM	980.462.000	717.464.990	262.997.010
95	WONOSALAM	WONOSALAM	1.009.159.000	842.287.400	166.871.600
96	KARANGREJO	WONOSALAM	1.003.525.000	788.139.400	215.385.600
97	JOGOLOYO	WONOSALAM	1.012.621.000	815.264.600	197.356.400
98	BOTOREJO	WONOSALAM	1.104.253.000	837.129.100	267.123.900
99	SIDOMULYO	WONOSALAM	1.112.098.000	770.627.200	341.470.800
100	PILANGREJO	WONOSALAM	1.080.739.000	822.463.000	258.276.000
101	TLOGOREJO	WONOSALAM	992.132.000	802.063.200	190.068.800
102	KERANGKULON	WONOSALAM	1.012.349.000	853.439.600	158.909.400
103	BUNDERAN	WONOSALAM	814.590.000	623.910.000	190.680.000
104	GETAS	WONOSALAM	1.113.556.000	732.238.000	381.318.000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
105	MOJODEMAK	WONOSALAM	1.063.006.000	744.613.600	318.392.400
106	KUNCIR	WONOSALAM	951.833.000	845.033.000	106.800.000
107	TRENGGULI	WONOSALAM	913.496.000	650.262.848	263.233.152
108	MRISEN	WONOSALAM	934.661.000	641.932.400	292.728.600
109	MRANAK	WONOSALAM	885.254.000	688.001.600	197.252.400
110	MERAK	DEMPET	955.403.000	548.505.746	406.897.254
111	KARANGREJO	DEMPET	789.399.000	477.337.080	312.061.920
112	SIDOMULYO	DEMPET	1.097.065.000	758.671.000	338.394.000
113	BOTOSENONG	DEMPET	782.217.000	615.167.560	167.049.440
114	JERUKGULUNG	DEMPET	801.849.000	536.261.718	265.587.282
115	KUNIR	DEMPET	1.019.567.000	751.295.800	268.271.200
116	BRAKAS	DEMPET	1.059.032.000	679.343.000	379.689.000
117	BALEREJO	DEMPET	1.136.135.000	716.370.200	419.764.800
118	BALEROMO	DEMPET	953.708.000	673.935.200	279.772.800
119	KEDUNGORI	DEMPET	934.721.000	665.316.920	269.404.080
120	KUWU	DEMPET	916.922.000	708.309.800	208.612.200
121	KEBONSARI	DEMPET	821.193.000	657.949.200	163.243.800
122	GEMPOLDENOK	DEMPET	776.349.000	548.720.718	227.628.282
123	HARJOWINANGUN	DEMPET	1.041.547.000	774.513.800	267.033.200
124	KRAMAT	DEMPET	960.323.000	706.548.200	253.774.800
125	DEMPET	DEMPET	1.557.856.000	1.244.805.600	313.050.400
126	SURODADI	GAJAH	835.923.000	734.414.400	101.508.600
127	JATISONO	GAJAH	1.188.554.000	1.188.554.000	-
128	KEDONDONG	GAJAH	1.117.489.000	745.662.100	371.826.900
129	GEDANGALAS	GAJAH	922.661.000	634.361.000	288.300.000
130	SAMBIROTO	GAJAH	782.274.000	533.531.100	248.742.900
131	TANJUNGANYAR	GAJAH	982.304.000	789.239.900	193.064.100
132	WILALUNG	GAJAH	872.615.000	711.189.560	161.425.440
133	MEDINI	GAJAH	838.161.000	679.341.000	158.820.000
134	MLATIHARJO	GAJAH	824.676.000	752.782.980	71.893.020
135	TAMBIREJO	GAJAH	849.156.000	552.244.200	296.911.800
136	BANJARSARI	GAJAH	1.211.567.000	973.201.400	238.365.600
137	BOYOLALI	GAJAH	1.019.142.000	825.599.700	193.542.300
138	GAJAH	GAJAH	845.684.000	825.202.720	20.481.280
139	SARI	GAJAH	965.747.000	708.326.600	257.420.400
140	MLEKANG	GAJAH	872.964.000	528.609.600	344.354.400
141	SAMBUNG	GAJAH	822.021.000	822.021.000	-
142	MOJOSIMO	GAJAH	828.420.000	598.140.000	230.280.000
143	TLOGOPANDOGAN	GAJAH	803.316.000	760.716.000	42.600.000
144	JATIREJO	KARANGANYAR	1.049.180.000	721.253.600	327.926.400



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
145	NGALURAN	KARANGANYAR	1.221.217.000	705.566.800	515.650.200
146	WONOKETINGAL	KARANGANYAR	1.386.184.000	1.152.056.992	234.127.008
147	CANGKRINGREMBANG	KARANGANYAR	1.080.324.000	805.570.400	274.753.600
148	CANGKRING	KARANGANYAR	1.020.802.000	793.702.376	227.099.624
149	TUWANG	KARANGANYAR	909.947.000	799.265.000	110.682.000
150	UNDAAN KIDUL	KARANGANYAR	803.883.000	534.255.000	269.628.000
151	UNDAAN LOR	KARANGANYAR	817.878.000	678.590.000	139.288.000
152	KETANJUNG	KARANGANYAR	950.165.000	614.486.000	335.679.000
153	NGEMPLIKWETAN	KARANGANYAR	826.806.000	540.782.400	286.023.600
154	WONOREJO	KARANGANYAR	1.118.188.000	881.555.200	236.632.800
155	KARANGANYAR	KARANGANYAR	1.035.040.000	779.144.000	255.896.000
156	KEDUNGGWARU KIDUL	KARANGANYAR	1.475.557.000	1.148.272.452	327.284.548
157	KEDUNGGWARU LOR	KARANGANYAR	1.451.995.000	1.143.624.200	308.370.800
158	BANDUNGREJO	KARANGANYAR	952.100.000	749.270.000	202.830.000
159	TUGU LOR	KARANGANYAR	1.254.386.000	1.079.573.368	174.812.632
160	KOTAKAN	KARANGANYAR	1.019.408.000	683.523.200	335.884.800
161	GENENG	MIJEN	957.437.000	718.854.800	238.582.200
162	NGELOWETAN	MIJEN	1.208.285.000	947.117.000	261.168.000
163	MLATEN	MIJEN	1.213.708.000	840.340.000	373.368.000
164	BANTENGMATI	MIJEN	1.034.600.000	845.169.200	189.430.800
165	NGELOKULON	MIJEN	888.272.000	748.937.600	139.334.400
166	PASIR	MIJEN	1.192.210.000	953.671.600	238.538.400
167	REJOSARI	MIJEN	978.179.000	886.377.200	91.801.800
168	NGEGOT	MIJEN	891.753.000	699.477.000	192.276.000
169	JLEPER	MIJEN	1.072.138.000	977.212.000	94.926.000
170	PECUK	MIJEN	846.579.000	661.179.000	185.400.000
171	TANGGUL	MIJEN	856.704.000	765.201.600	91.502.400
172	BAKUNG	MIJEN	1.182.446.000	948.160.400	234.285.600
173	BERMI	MIJEN	813.087.000	715.858.800	97.228.200
174	MIJEN	MIJEN	1.177.487.000	949.607.000	227.880.000
175	GEMPOLSONGO	MIJEN	855.234.000	584.487.600	270.746.400
176	BOLO	DEMAK	900.629.000	653.861.600	246.767.400
177	BANGO	DEMAK	1.114.048.000	929.008.000	185.040.000
178	KEDONDONG	DEMAK	1.067.419.000	706.189.600	361.229.400
179	SEDO	DEMAK	880.022.000	654.482.000	225.540.000
180	MULYOREJO	DEMAK	997.580.000	783.200.000	214.380.000
181	TURIREJO	DEMAK	1.351.135.000	1.013.374.000	337.761.000
182	RAJI	DEMAK	1.034.327.000	785.327.000	249.000.000
183	CABEAN	DEMAK	1.128.433.000	823.593.400	304.839.600
184	TEMPURAN	DEMAK	927.755.000	683.702.300	244.052.700

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
185	KARANGMLATI	DEMAK	956.465.000	702.482.000	253.983.000
186	KATONSARI	DEMAK	1.029.961.000	866.803.000	163.158.000
187	KALIKONDANG	DEMAK	1.061.992.000	814.792.000	247.200.000
188	DONOROJO	DEMAK	1.047.764.000	861.645.800	186.118.200
189	JATIMULYO	BONANG	913.112.000	657.455.000	255.657.000
190	KRAJANBOGO	BONANG	1.073.675.000	740.924.780	332.750.220
191	SUKODONO	BONANG	979.238.000	694.497.200	284.740.800
192	SUMBEREJO	BONANG	1.264.432.000	857.927.200	406.504.800
193	KEMBANGAN	BONANG	982.067.000	699.341.000	282.726.000
194	KARANGREJO	BONANG	1.167.997.000	878.675.200	289.321.800
195	GEBANGARUM	BONANG	1.027.352.000	735.872.840	291.479.160
196	GEBANG	BONANG	1.259.056.000	827.349.520	431.706.480
197	MARGOLINDUK	BONANG	1.149.785.000	759.905.000	389.880.000
198	MORODEMAK	BONANG	1.545.424.000	964.853.800	580.570.200
199	PURWOREJO	BONANG	1.614.475.000	1.026.790.000	587.685.000
200	BETAHWALANG	BONANG	1.157.281.000	866.521.000	290.760.000
201	SERANGAN	BONANG	951.560.000	690.625.400	260.934.600
202	TRIDONOREJO	BONANG	1.241.326.000	950.370.400	290.955.600
203	TLOGOBOYO	BONANG	1.248.500.000	955.959.800	292.540.200
204	JATIROGO	BONANG	950.216.000	643.901.900	306.314.100
205	REJO	BONANG	965.894.000	888.216.260	77.677.740
206	PONCOHARJO	BONANG	1.091.056.000	726.264.400	364.791.600
207	WONOSARI	BONANG	962.258.000	840.042.200	122.215.800
208	JALI	BONANG	1.284.161.000	964.727.600	319.433.400
209	WEDING	BONANG	1.293.652.000	834.239.800	459.412.200
210	WEDUNG	WEDUNG	1.548.981.000	960.572.400	588.408.600
211	NGAWEN	WEDUNG	1.053.534.000	895.220.800	158.313.200
212	RUWIT	WEDUNG	991.385.000	751.166.600	240.218.400
213	KENDUREN	WEDUNG	1.450.483.000	1.270.757.800	179.725.200
214	BUKO	WEDUNG	1.322.107.000	1.027.032.200	295.074.800
215	MANDUNG	WEDUNG	831.174.000	638.391.000	192.783.000
216	BERAHAN KULON	WEDUNG	877.629.000	525.840.000	351.789.000
217	BERAHAN WETAN	WEDUNG	1.645.177.000	1.221.602.400	423.574.600
218	BUNGO	WEDUNG	1.521.100.000	1.307.860.000	213.240.000
219	TEMPEL	WEDUNG	896.754.000	661.419.000	235.335.000
220	JETAK	WEDUNG	1.344.956.000	994.988.800	349.967.200
221	JUNGSEMI	WEDUNG	1.136.211.000	920.787.000	215.424.000
222	JUNGPASIR	WEDUNG	1.176.260.000	766.181.900	410.078.100
223	MUTHWETAN	WEDUNG	862.509.000	660.140.400	202.368.600
224	BABALAN	WEDUNG	1.472.854.000	967.564.900	505.289.100

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
225	MUTIHKULON	WEDUNG	1.097.918.000	861.698.000	236.220.000
226	TEDUNAN	WEDUNG	1.002.353.000	750.064.760	252.288.240
227	KENDALASEM	WEDUNG	827.478.000	621.106.200	206.371.800
228	KEDUNG MUTIH	WEDUNG	1.248.584.000	1.065.954.500	182.629.500
229	KEDUNG KARANG	WEDUNG	1.022.747.000	722.963.720	299.783.280
230	PILANGWETAN	KEBONAGUNG	1.049.925.000	1.005.618.300	44.306.700
231	KEBONAGUNG	KEBONAGUNG	1.261.873.000	1.117.075.000	144.798.000
232	KLAMPOK LOR	KEBONAGUNG	1.053.039.000	846.042.800	206.996.200
233	MIJEN	KEBONAGUNG	1.204.919.000	987.511.400	217.407.600
234	WERDOYO	KEBONAGUNG	1.190.276.000	972.155.360	218.120.640
235	MANGUNREJO	KEBONAGUNG	927.599.000	753.553.288	174.045.712
236	BABAT	KEBONAGUNG	1.095.933.000	989.259.180	106.673.820
237	MANGUNANLOR	KEBONAGUNG	1.059.252.000	895.740.976	163.511.024
238	TLOGOSIH	KEBONAGUNG	1.255.961.000	1.118.280.600	137.680.400
239	PRIGI	KEBONAGUNG	1.078.728.000	842.420.800	236.307.200
240	SARIMULYO	KEBONAGUNG	920.408.000	702.517.440	217.890.560
241	SOLOWIRE	KEBONAGUNG	889.674.000	694.407.200	195.266.800
242	SOKOKIDUL	KEBONAGUNG	822.816.000	486.428.400	336.387.600
243	MEGONTEN	KEBONAGUNG	922.208.000	761.951.600	160.256.400

4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN %
7:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	171.217.674.971,34	171.256.472.096,34	100,02	124.183.273.165,92	37,91
7:01:01	Penggunaan SilPA	171.217.674.971,34	171.217.674.971,34	100,00	124.164.026.490,92	37,90
7:01:05	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	38.797.125,00	100,00	19.246.675,00	101,58
7:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	2.000.000.000,00	(100,00)
7:02:02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	2.000.000.000,00	(100,00)
7:02:03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	171.217.674.971,34	171.256.472.096,34	100,02	122.183.273.165,92	40,16

**a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp171.217.674.971,34 dan terealisasi sebesar Rp171.256.472.096,34 atau 100,02%. Mengalami peningkatan senilai Rp47.073.198.930 atau 37,91% bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp124.183.273.165,92 dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggunaan SILPA

Akun ini menggambarkan SiLPA tahun sebelumnya untuk periode Tahun 2025, SiLPA tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp253.657.353.000,97 dan realisasinya sebesar Rp253.657.353.000,97 mengalami pengurangan sebesar Rp82.439.678.029,63 bila dibanding realisasi Tahun 2024 dimana realisasi SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp171.217.674.971,34.

2) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Tahun 2025 tidak dianggarkan. Namun, terdapat realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp 38.797.125,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.550.450 jika dibandingkan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp19.246.675,00. Penerimaan tersebut merupakan pembayaran dana bergulir UMKM yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2025 tidak di anggarakan.

5. SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN 2025

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

NO	PERHITUNGAN APBD	2025			2024
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.610.961.447.170,00	2.661.324.819.563,83	101,93	2.704.168.337.636,42
2	BELANJA DAERAH	2.338.493.609.995,34	2.197.010.449.949,20	93,95	2.217.857.961.079,00
3	TRANSFER	443.685.512.146,00	381.897.244.116,00	86,07	437.275.974.752,00
4	SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN	- 171.217.674.971,34	82.417.125.498,63	(48,14)	49.034.401.805,42
5	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	171.217.674.971,34	171.256.472.096,34	100,02	124.183.273.165,92
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	(100,00)	2.000.000.000,00
7	PEMBIAYAAN NETTO	171.217.674.971,34	171.256.472.096,34	100,02	122.183.273.165,92
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)	-	253.673.597.594,97		171.217.674.971,34

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp253.673.597.594,97 mengalami kenaikan sebesar Rp82.455.922.623,63 dari SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp171.217.674.971,34, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

SILPA 2025		253.673.597.594,97
SILPA TERIKAT		
1	DAK NON FISIK	10.459.049.889,00
2	DAK FISIK	189.139.500,00
3	DAU SG	740.592.179,00
4	INSENTIF FISKAL	413.528.124,00
5	DBHCHT	3.116.822.335,00
6	DAU TPG	38.373.993.300,00
7	Sisa BanGub (Dinkes)	76.053.000,00
8	Pengembalian BOSP dan TPG	441.988.287,00
9	BLUD	36.417.719.910,97
10	BOSP	270.733.434,00
11	BOK PUSKESMAS	84.481.852,00
	JUMLAH	90.584.101.810,97
SILPA TIDAK TERIKAT		163.089.495.784,00

**5.2. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH****1. Saldo anggaran lebih awal**

Adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA Tahun sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan, Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2025 sebesar Rp171.217.674.971,34 atau bertambah 37,90% yaitu sebesar Rp47.053.648.480,42 dari Tahun 2024 sebesar Rp124.164.026.490,92.

2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan

Akun ini merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Tahun 2025 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp171.217.674.971,34 atau naik sebesar 37,90% yaitu sebesar Rp47.053.648.480,42 dari Tahun 2024 sebesar Rp124.164.026.490,92.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA

Akun ini menggambarkan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp253.673.597.594,97 atau mengalami kenaikan sebesar Rp82.455.922.623,63 atau 48,16% dari Tahun 2024 sebesar Rp171.217.674.971,34.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya.

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Akun ini merupakan akumulasi neto dari sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan setelah ditutup, ditambah atau dikurangi dengan penyesuaian koreksi pembukuan. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 sebesar Rp253.673.597.594,97 atau mengalami kenaikan sebesar Rp82.455.922.623,63 atau 48,15% dari Tahun 2024 sebesar Rp171.217.674.971,34.

**5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Neraca Pemerintah Kabupaten Demak terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2025. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh yang bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Untuk posisi keuangan per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Demak secara umum sebagai berikut:

- Jumlah Aset sebesar Rp5.852.792.945.408,79 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp369.809.619.149,13 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp383.788.751.391,74 nilai buku Aset Tetap sebesar Rp4.797.471.353.228,01 nilai buku Aset lainnya sebesar Rp21.095.890.008,23, serta nilai buku Properti Investasi sebesar Rp280.627.331.631,68 sedangkan jumlah Aset Tahun 2024 sebesar Rp5.851.956.608.490,31.
- Jumlah Kewajiban sebesar Rp80.880.762.565,30 yaitu berupa Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp44.631.313.318,42.
- Total Ekuitas sebesar Rp5.771.912.182.843,49 sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp5.807.325.295.171,89.

Berikut diuraikan rincian dan penjelasan pos-pos Neraca.

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Untuk posisi Aset per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	TREN
ASET	5.852.792.945.408,79	5.851.956.608.490,31	100,01%
JUMLAH	5.852.792.945.408,79	5.851.956.608.490,31	100,01%

Total Aset Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.852.792.945.408,79 atau turun sebesar Rp836.336.918,48 atau dengan nilai tren sebesar 100,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.851.956.608.490,31.

Jumlah tersebut terdiri atas.

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	TREN
ASET LANCAR	369.809.619.149,13	283.531.680.298,05	130,43%
INVESTASI JANGKA PANJANG	383.788.751.391,74	379.725.078.099,72	101,07%
ASET TETAP	4.797.471.353.228,01	4.862.866.514.859,43	98,66%

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	TREN
ASET LAINNYA	21.095.890.008,23	45.748.683.040,43	46,11%
PROPERTI INVESTASI	280.627.331.631,68	280.084.652.192,68	100,19%
JUMLAH	5.852.792.945.408,79	5.851.956.608.490,31	100,01%

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Demak yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD RSUD/Puskesmas, dan Kas di Bendahara BOSP, Kas di BOK Puskesmas, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp369.809.619.149,13 naik sebesar Rp86.277.938.851,08 atau dengan nilai tren sebesar 130,43% bila dibanding dengan Tahun 2024 sebesar Rp283.531.680.298,05 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Kas di Kas Daerah	216.898.926.252,00	128.691.915.934,00	88.207.010.318,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.736.146,00	8.148.534,00	(6.412.388,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
4	Kas di BLUD	36.417.719.910,97	41.040.045.644,34	(4.622.325.733,37)
5	Kas di Bendahara BOSP	270.733.434,00	163.825.936,00	106.907.498,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	84.481.852,00	1.313.738.923,00	(1.229.257.071,00)
7	Setara Kas	-	-	-
8	Piutang Pajak Daerah	53.374.602.981,00	51.798.598.825,00	1.576.004.156,00
	<i>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</i>	<i>(14.561.480.234,69)</i>	<i>(16.902.823.277,12)</i>	<i>2.341.343.042,43</i>
9	Piutang Retribusi	35.391.587.925,00	5.424.302.615,00	29.967.285.310,00
	<i>Penyisihan Piutang Retribusi Daerah</i>	<i>(8.292.241.790,65)</i>	<i>(4.458.370.073,47)</i>	<i>(3.833.871.717,18)</i>
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.697.472.321,05	41.330.083.758,55	(30.632.611.437,50)
	<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>	<i>(10.625.772.607,59)</i>	<i>(15.934.100.617,48)</i>	<i>5.308.328.009,89</i>
11	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	15.126.827.536,00	13.356.424.448,00	1.770.403.088,00
	<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah</i>	<i>(75.634.137,67)</i>	<i>(66.782.122,25)</i>	<i>(8.852.015,42)</i>
12	Beban Dibayar Dimuka	176.778.525,42	92.193.804,18	84.584.721,24
13	Persediaan	34.923.881.036,29	37.674.477.966,30	(2.750.596.930,01)
	JUMLAH	369.809.619.149,13	283.531.680.298,05	86.277.938.851,08

a.1. Kas dan Setara Kas

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri atas akun kas di kas daerah, kas di Bendahara Penerimaan, kas di BLUD, kas di bendahara BOS dan Kas dana BOK Puskesmas. Masing-masing akun digambarkan dengan rincian sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	216.898.926.252,00	128.691.915.934,00	88.207.010.318,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.736.146,00	8.148.534,00	(6.412.388,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
4	Kas di BLUD	36.417.719.910,97	41.040.045.644,34	(4.622.325.733,37)
5	Kas di Bendahara BOS	270.733.434,00	163.825.936,00	106.907.498,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	84.481.852,00	1.313.738.923,00	(1.229.257.071,00)
JUMLAH		253.673.597.594,97	171.217.674.971,34	82.455.922.623,63

Saldo Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp253.673.597.594,97. Saldo Kas naik sebesar Rp82.455.922.623,63 atau sebesar 48,16% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.217.674.971,34.

Sedangkan rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024, dapat disajikan sebagai berikut.

(1). Kas di Kas Daerah

Saldo rekening giro per 31 Desember 2025 sebesar Rp216.898.926.252,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp128.691.915.934,00. Saldo Kas di Kas Daerah 2025 berada di rekening giro Bank Jateng dan Bank BRI, karena sesuai Pasal 131 ayat (2) PP 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Demak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Daerah di PT Bank Jateng Cabang Demak adalah sebagai berikut.

NO	REKENING	PER 31/12/2025	PER 31/12/2024
		(Rp)	(Rp)
1	BANK JATENG CABANG DEMAK		
	1-031-00311-8	216.898.926.252,00	128.691.915.934,00
JUMLAH		216.898.926.252,00	128.691.915.934,00

Kas sebesar Rp216.898.926.252,00 terdapat kas dari dana terikat sebesar Rp53.811.166.614,00 dan silpa tidak terikat sebesar Rp163.087.759.638,00. Secara terinci sisa kas tersebut sebagai berikut:

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
		(Rp)
1	SILPA TERIKAT	53.811.166.614,00
	DAK NON FISIK	10.459.049.889,00
	DAK FISIK	189.139.500,00
	DAU SG	740.592.179,00
	INSENTIF FISKAL	413.528.124,00



NO	SUMBER DANA	JUMLAH
		(Rp)
	DBHCHT	3.116.822.335,00
	DAU TPG	38.373.993.300,00
	Sisa BanGub (Dinkes)	76.053.000,00
	Pengembalian BOSP	441.988.287,00
2	SILPA TIDAK TERIKAT	163.087.759.638,00
	JUMLAH	216.898.926.252,00

(2). Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang diterima di tahun 2025 namun belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo kas di bendahara penerimaan 2025 sebesar Rp1.736.146,00. Dengan Rincian Dinas Kesehatan unit Laboratorium Kesehatan sebesar Rp1.735.000,00 dan BPKPAD sebesar Rp1.146,00 sedangkan ditahun 2024 sebesar Rp8.148.534,00 yang seluruhnya merupakan saldo Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis di Dinas Kesehatan unit Laboratorium Kesehatan yang belum disetor ke Kas Daerah.

(3). Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Rekening Bank Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

(4). Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.417.719.910,97 dan saldo BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.040.045.644,34. Kas di BLUD terdiri dari Kas BLUD di Rumah Sakit Sunan Kalijaga, RSUD Sultan Fatah per 31 Desember 2025 dan kas BLUD di Puskesmas. Adapun Saldo BLUD tersebut sebagaimana dalam tabel berikut ini.

NO	UNIT BLUD	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA/	SALDO AKHIR
		Rp	Rp	PENGELUARAN	Rp
				Rp	
1	RSUD SUNAN KALIJAGA	16.223.309.153,35	145.145.517.929,00	147.877.750.712,00	13.491.076.370,35
2	RSUD SULTAN FATAH	16.252.578.451,99	83.162.104.046,83	85.756.141.616,20	13.658.540.882,62
3	PUSKESMAS DEMAK I	114.609.161,00	1.412.040.947,00	1.360.724.862,00	165.925.246,00
4	PUSKESMAS DEMAK II	95.470.605,00	1.640.011.620,00	1.526.280.659,00	209.201.566,00
5	PUSKESMAS DEMAK III	44.152.751,00	1.363.593.042,00	1.301.556.716,00	106.189.077,00
6	PUSKESMAS BONANG I	558.627.394,00	4.673.584.371,00	4.859.524.703,00	372.687.062,00
7	PUSKESMAS BONANG II	420.304.301,00	3.026.203.909,00	2.995.741.395,00	450.766.815,00
8	PUSKESMAS WEDUNG I	659.252.817,00	3.553.139.531,00	3.485.552.709,00	726.839.639,00
9	PUSKESMAS WEDUNG II	327.831.542,00	2.813.862.430,00	2.767.245.574,00	374.448.398,00
10	PUSKESMAS MIJEN I	422.454.958,00	2.582.362.321,00	2.361.636.542,00	643.180.737,00



NO	UNIT BLUD	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA/	SALDO AKHIR
		Rp	Rp	PENGELUARAN	Rp
				Rp	
11	PUSKESMAS MIJEN II	130.033.910,00	1.537.616.755,00	1.490.764.131,00	176.886.534,00
12	PUSKESMAS KARANGANYAR I	198.989.643,00	2.510.193.678,00	2.405.537.696,00	303.645.625,00
13	PUSKESMAS KARANGANYAR II	459.997.139,00	2.589.688.734,00	2.308.293.178,00	741.392.695,00
14	PUSKESMAS GAJAH I	211.033.654,00	2.793.350.842,00	2.759.481.415,00	244.903.081,00
15	PUSKESMAS GAJAH II	161.211.818,00	2.000.391.891,00	1.790.506.826,00	371.096.883,00
16	PUSKESMAS SAYUNG I	291.887.355,00	2.472.128.548,00	2.449.789.263,00	314.226.640,00
17	PUSKESMAS SAYUNG II	372.180.483,00	2.572.373.261,00	2.449.818.446,00	494.735.298,00
18	PUSKESMAS KARANGAWEN I	270.328.821,00	3.212.778.968,00	3.107.686.794,00	375.420.995,00
19	PUSKESMAS KARANGAWEN II	194.385.003,00	3.020.637.764,00	3.054.821.408,00	160.201.359,00
20	PUSKESMAS DEMPET	452.145.118,00	3.666.093.209,00	3.659.864.946,00	458.373.381,00
21	PUSKESMAS GUNTUR I	172.195.029,00	4.000.181.826,00	4.049.238.164,00	123.138.691,00
22	PUSKESMAS GUNTUR II	155.117.689,00	2.407.731.037,00	2.386.725.250,00	176.123.476,00
23	PUSKESMAS MRANGGEN I	88.468.413,00	2.205.282.808,00	2.150.371.016,00	143.380.205,00
24	PUSKESMAS MRANGGEN II	105.486.138,00	1.846.024.901,00	1.809.840.660,00	141.670.379,00
25	PUSKESMAS MRANGGEN III	327.140.478,00	2.567.695.718,00	2.560.740.107,00	334.096.089,00
26	PUSKESMAS WONOSALAM I	557.419.206,00	2.209.480.868,00	2.503.920.935,00	262.979.139,00
27	PUSKESMAS WONOSALAM II	638.204.198,00	2.572.288.315,00	2.977.417.289,00	233.075.224,00
28	PUSKESMAS KARANGTENGAH	453.923.203,00	2.808.986.063,00	2.763.657.904,00	499.251.362,00
29	PUSKESMAS KEBONAGUNG	681.307.212,00	2.760.383.500,00	2.777.423.650,00	664.267.062,00
	JUMLAH	41.040.045.644,34	299.125.728.832,83	303.748.054.566,20	36.417.719.910,97

(5). Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2025 Sebesar Rp270.733.434,00 yang tersebar di 471 SD Negeri dan 38 SMP Negeri di Kabupaten Demak, sedangkan Tahun 2024 Kas di Bendahara BOS sebesar Rp163.825.936,00. Adapun rekap atas kas di Bendahara BOS pada SD dan SMP sebagaimana dalam tabel berikut ini dengan rincian data seluruh SD dan SMP terlampir di dalam lampiran.

NO	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/
		(Rp)	(Rp)	PENURUNAN
				(Rp)
1	Saldo Kas SKB	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Kas di Bendahara BOS SD	150.503.759,00	96.372.784,00	54.130.975,00
3	Kas di Bendahara BOS SMP	110.229.675,00	67.453.152,00	42.776.523,00
	JUMLAH	270.733.434,00	163.825.936,00	106.907.498,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(6). Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp84.481.852,00 dan saldo BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.313.738.923,00. Kas Dana BOK Puskesmas terdiri dari Kas tersebar di 27 Puskesmas. Adapun Saldo Kas Dana BOK Puskesmas tersebut sebagaimana dalam tabel berikut ini.

No	Puskesmas	Anggaran	Penerimaan	Belanja	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PUSKESMAS DEMAK I	67.833.118,00	667.412.882,00	734.131.000,00	1.115.000,00
2	PUSKESMAS DEMAK II	119.628.749,00	605.185.251,00	724.472.000,00	342.000,00
3	PUSKESMAS DEMAK III	46.842.122,00	689.661.878,00	736.504.000,00	0,00
4	PUSKESMAS BONANG I	33.251.772,00	697.400.228,00	730.214.886,00	437.114,00
5	PUSKESMAS BONANG II	26.016.265,00	728.167.735,00	752.143.000,00	2.041.000,00
6	PUSKESMAS WEDUNG I	38.236.236,00	724.662.764,00	761.932.994,00	966.006,00
7	PUSKESMAS WEDUNG II	41.283.085,00	703.211.915,00	744.151.000,00	344.000,00
8	PUSKESMAS MIJEN I	53.583.328,00	701.085.672,00	750.733.836,00	3.935.164,00
9	PUSKESMAS MIJEN II	42.718.752,00	691.508.248,00	726.333.320,00	7.893.680,00
10	PUSKESMAS KARANGANYAR I	57.692.827,00	689.168.173,00	724.310.000,00	22.551.000,00
11	PUSKESMAS KARANGANYAR II	40.767.805,00	686.460.195,00	726.457.670,00	770.330,00
12	PUSKESMAS GAJAH I	50.097.691,00	696.185.309,00	741.732.000,00	4.551.000,00
13	PUSKESMAS GAJAH II	36.547.196,00	691.117.804,00	724.388.563,00	3.276.437,00
14	PUSKESMAS SAYUNG I	68.639.166,00	701.054.834,00	769.397.000,00	297.000,00
15	PUSKESMAS SAYUNG II	36.875.099,00	704.388.901,00	740.358.000,00	906.000,00
16	PUSKESMAS KARANGAWEN I	62.823.695,00	711.375.305,00	771.775.256,00	2.423.744,00
17	PUSKESMAS KARANGAWEN II	36.472.916,00	719.659.084,00	755.964.094,00	167.906,00
18	PUSKESMAS DEMPET	30.635.909,00	735.139.091,00	765.611.057,00	163.943,00
19	PUSKESMAS GUNTUR I	38.625.877,00	714.214.123,00	752.528.000,00	312.000,00
20	PUSKESMAS GUNTUR II	42.485.074,00	696.001.926,00	736.037.000,00	2.450.000,00
21	PUSKESMAS MRANGGEN I	46.042.168,00	729.150.832,00	769.663.717,00	5.529.283,00
22	PUSKESMAS MRANGGEN II	99.730.210,00	662.403.790,00	758.800.504,00	3.333.496,00
23	PUSKESMAS MRANGGEN III	46.510.895,00	720.214.105,00	764.200.036,00	2.524.964,00
24	PUSKESMAS WONOSALAM I	40.961.266,00	725.418.734,00	765.652.886,00	727.114,00
25	PUSKESMAS WONOSALAM II	40.891.927,00	710.346.073,00	742.558.000,00	8.680.000,00
26	PUSKESMAS KARANGTENGAH	23.183.564,00	753.579.436,00	768.181.329,00	8.581.671,00
27	PUSKESMAS KEBONAGUNG	45.362.211,00	720.958.789,00	766.159.000,00	162.000,00
	TOTAL	1.313.738.923,00	18.975.133.077,00	20.204.390.148,00	84.481.852,00

(7). Kas/Setara Kas

Setara kas pemerintah daerah Kabupaten Demak pada tahun 2025 maupun tahun 2024 sebesar Rp0,00.

**a.2. Piutang dan Penyisihan**

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima kasnya maupun tagihan lain. Saldo Piutang Netto Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2025 sebesar Rp81.470.078.374,93 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp74.547.333.556,23.

Dengan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

NO	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	Piutang Pajak	53.374.602.981,00	51.798.598.825,00	1.576.004.156,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(14.561.480.234,69)	(16.902.823.277,12)	2.341.343.042,43
	Piutang Pajak Netto	38.813.122.746,31	34.895.775.547,88	3.917.347.198,43
2	Piutang Retribusi	35.391.587.925,00	5.424.302.615,00	30.186.411.731,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(8.292.241.790,65)	(4.458.370.073,47)	(3.866.660.179,20)
	Piutang Retribusi Netto	27.099.346.134,35	965.932.541,53	26.319.751.551,80
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.697.472.321,05	41.330.083.758,55	(30.135.854.590,50)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(10.625.772.607,59)	(15.934.100.617,48)	5.059.949.586,39
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	71.699.713,46	25.395.983.141,07	(25.075.905.004,11)
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	15.126.827.536,00	13.356.424.448,00	1.770.403.088,00
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(75.634.137,67)	(66.782.122,25)	(8.852.015,42)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	15.051.193.398,33	13.289.642.325,75	1.761.551.072,58
	JUMLAH	81.035.361.992,45	74.547.333.556,23	6.488.028.436,22

Rincian saldo masing-masing objek piutang daerah tersebut, dapat disajikan sebagai berikut.

(1) Piutang Pajak**a) Piutang Pajak Bruto**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan mempertimbangkan bahwa pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang dijamin dengan Undang-undang dan tidak didasarkan pada penyerahan suatu prestasi kepada pembayar pajak, maka sesuai SAP, piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul.

Piutang Pajak timbul dari adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan yang menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Demak yang sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 yang dikelola BPKPAD terdiri dari:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.757.152,00	687.256.565,00	(677.499.413,00)
2	Piutang Pajak Reklame	175.404.282,00	171.636.568,00	3.767.714,00
3	Piutang PBJT-Tenaga Listrik	7.152.782.405,00	6.705.661.189,00	447.121.216,00
4	Piutang PBJT-Jasa Parkir	4.005.750,00	531.308.550,00	(527.302.800,00)
5	Piutang Pajak Air Tanah	130.103.650,00	73.968.050,00	56.135.600,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	45.902.549.742,00	43.255.449.565,00	2.647.100.177,00
7	Piutang BPHTB	-	373.318.338,00	(373.318.338,00)
	JUMLAH	53.374.602.981,00	51.798.598.825,00	1.576.004.156,00

Piutang Pajak Tahun 2025 sebesar Rp53.374.602.981,00. Sedangkan piutang Pajak Tahun 2024 sebesar Rp51.798.598.825,00. Adapun perhitungan penambahan dan pengurangan piutang dalam tahun 2025 dalam tabel sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Piutang 2024	Penambahan Piutang	Pembayaran Piutang	Koreksi	Penghapusan	Piutang 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	687.256.565,00	-	24.348.281,00	(653.151.132,00)	-	9.757.152,00
3	Pajak Reklame	171.636.568,00	52.309.250,00	48.541.536,00	-	-	175.404.282,00
5	Piutang PBJT-Tenaga Listrik	6.705.661.189,00	7.152.782.405,00	6.705.661.189,00	-	-	7.152.782.405,00
7	Piutang PBJT-Jasa Parkir	531.308.550,00	-	527.302.800,00	-	-	4.005.750,00
8	Pajak Air Tanah	73.968.050,00	97.422.300,00	41.286.700,00	-	-	130.103.650,00
9	PBB-P2	43.255.449.565,00	15.343.232.041,00	5.926.375.120,00	-	6.769.756.744,00	45.902.549.742,00
10	BPHTB	373.318.338,00	-	373.318.338,00	-	-	-
		51.798.598.825,00	22.645.745.996,00	13.646.833.964,00	(653.151.132,00)	6.769.756.744,00	53.374.602.981,00

b) Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak ditetapkan:

- 0,5 % dari Piutang yang memiliki kualitas lancar, dalam kurun waktu 1 tahun;
- 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar, dalam kurun waktu 1 - 2 tahun;
- 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan, dalam kurun waktu 2 – 5 tahun dan;
- 100 % dari Piutang dengan kualitas macet, diatas 5 tahun.

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengusahakan keterbayaran piutang, pemerintah mengerahkan tenaga untuk melakukan penagihan secara rutin. Sedangkan, untuk piutang dengan kategori macet, pemerintah akan mengusahakan untuk melakukan penghapusan buku piutang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

• Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman

No	TAHUN	Piutang 2025	%	Penyisihan Piutang	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		Rp		Rp		
1	2017	7.274.600,00	100%	7.274.600,00	-	Macet
2	2024	2.482.552,00	10%	248.255,20	2.234.296,80	Kur Lancar
JUMLAH		9.757.152,00		7.522.855,20	2.234.296,80	

• Penyisihan Piutang Pajak Reklame

No	TAHUN	Piutang 2025	%	Penyisihan Piutang	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		Rp		Rp		
1	2016	112.500,00	100%	112.500,00	0,00	Macet
2	2017	1.331.250,00	100%	1.331.250,00	0,00	Macet
3	2018	70.980.000,00	100%	70.980.000,00	0,00	Macet
4	2019	1.933.250,00	100%	1.933.250,00	0,00	Macet
5	2020	4.592.875,00	100%	4.592.875,00	0,00	Macet
6	2021	1.187.500,00	50%	593.750,00	593.750,00	Diragukan
7	2022	1.432.500,00	50%	716.250,00	716.250,00	Diragukan
8	2023	13.432.500,00	50%	6.716.250,00	6.716.250,00	Diragukan
9	2024	28.092.657,00	10%	2.809.265,70	25.283.391,30	Kur Lancar
10	2025	52.309.250,00	0,5%	261.546,25	52.047.703,75	Lancar
JUMLAH		175.404.282,00		90.046.936,95	85.357.345,05	

• Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan Piutang	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		Rp		Rp		
1	2025	7.152.782.405,00	0,5%	35.763.912,03	7.117.018.492,97	Lancar
JUMLAH		7.152.782.405,00		35.763.912,03	7.117.018.492,97	

• Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan Piutang	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		Rp		Rp		
1	2017	4.005.750,00	100%	4.005.750,00	0,00	Macet
JUMLAH		4.005.750,00		4.005.750,00	0,00	

• Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

No	TAHUN	Piutang 2025	%	Penyisihan Piutang	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		Rp		Rp		
1	2016	653.000,00	100%	653.000,00	0,00	Macet
2	2017	1.385.000,00	100%	1.385.000,00	0,00	Macet
3	2018	2.846.000,00	100%	2.846.000,00	0,00	Macet
4	2019	11.319.550,00	100%	11.319.550,00	0,00	Macet
5	2020	9.522.050,00	100%	9.522.050,00	0,00	Macet
6	2021	75.550,00	50%	37.775,00	37.775,00	Diragukan
7	2022	544.500,00	50%	272.250,00	272.250,00	Diragukan
8	2023	234.000,00	50%	117.000,00	117.000,00	Diragukan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	TAHUN	Piutang 2025	%	Penyisihan Piutang	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		Rp		Rp		
9	2024	6.101.700,00	10%	610.170,00	5.491.530,00	Kur Lancar
10	2025	97.422.300,00	0,5%	487.111,50	96.935.188,50	Lancar
JUMLAH		130.103.650,00		27.249.906,50	102.853.743,50	

• Penyisihan Piutang PBB-P2

No	TAHUN	Piutang 2025	%	Penyisihan Piutang	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		Rp		Rp		
1	2017	359.820.576,00	100%	359.820.576,00	0,00	Macet
2	2018	321.435.124,00	100%	321.435.124,00	0,00	Macet
3	2019	218.987.422,00	100%	218.987.422,00	0,00	Macet
4	2020	3.594.983.959,00	100%	3.594.983.959,00	0,00	Macet
5	2021	4.573.513.731,00	50%	2.286.756.865,50	2.286.756.865,50	Diragukan
6	2022	6.601.101.086,00	50%	3.300.550.543,00	3.300.550.543,00	Diragukan
7	2023	6.871.731.610,00	50%	3.435.865.805,00	3.435.865.805,00	Diragukan
8	2024	8.017.744.193,00	10%	801.774.419,30	7.215.969.773,70	Kur Lancar
9	2025	15.343.232.041,00	0,5%	76.716.160,21	15.266.515.880,79	Lancar
JUMLAH		45.902.549.742,00		14.396.890.874,01	31.505.658.867,99	

c) **Piutang Pajak Netto**

Didasarkan pada perhitungan Penyisihan Piutang Pajak yang sudah dijabarkan pada tabel sebelumnya, maka diketahui total Penyisihan Piutang Pajak yaitu sebesar Rp14.561.480.234,69. Adapun perhitungan Penyisihan Piutang di atas dapat diketahui Piutang Pajak Netto/Piutang yang mungkin dapat ditagih/dapat direalisasikan adalah seperti dalam tabel berikut:

No	Uraian	Piutang 2025	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.757.152,00	7.522.855,200	2.234.296,80
2	Piutang Pajak Reklame	175.404.282,00	90.046.936,950	85.357.345,05
3	Piutang PBJT-Tenaga Listrik	7.152.782.405,00	35.763.912,030	7.117.018.492,97
4	Piutang PBJT-Jasa Parkir	4.005.750,00	4.005.750,000	0,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	130.103.650,00	27.249.906,500	102.853.743,50
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	45.902.549.742,00	14.396.890.874,010	31.505.658.867,99
JUMLAH		53.374.602.981,00	14.561.480.234,69	38.813.122.746,31

(2) **Piutang Retribusi**

Retribusi adalah imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.

a) **Piutang Retribusi Bruto**

Piutang Retribusi timbul dari adanya tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp35.391.587.925,00 sedangkan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.424.302.615,00.



Adapun rincian piutang retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari.

NO	URAIAN	PIUTANG	PIUTANG	KENAIKAN/ PENURUNAN
		2025	2024	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.060.000,00	3.060.000,00	-
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.222.500,00	21.222.500,00	-
3	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	-	450.000,00	(450.000,00)
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	4.081.722.883,00	2.760.278.433,00	1.321.444.450,00
5	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.597.252.432,00	2.597.252.432,00	-
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Kios Pujasera)	4.238.400,00	22.039.250,00	(17.800.850,00)
7	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (BPKPAD)	17.537.500,00	20.000.000,00	(2.462.500,00)
8	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan (Dinhub)	41.900.000,00	-	41.900.000,00
9	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	28.624.654.210,00	-	28.624.654.210,00
	JUMLAH	35.391.587.925,00	5.424.302.615,00	29.967.285.310,00

Adapun perhitungan penambahan dan pengurangan piutang kami jelaskan dalam tabel dibawah ini:

No	Jenis Retribusi	Piutang 2024	Penambahan	Pembayaran	Reklas	Piutang 2025
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.060.000,00	-	-	-	3.060.000,00
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.222.500,00	-	-	-	21.222.500,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	450.000,00	-	450.000,00	-	-
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2.760.278.433,00	1.656.426.800,00	334.982.350,00	-	4.081.722.883,00
5	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Dinlutkan)	2.597.252.432,00	-	-	-	2.597.252.432,00
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Kios Pujasera)	22.039.250,00	-	17.800.850,00	-	4.238.400,00
7	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (BPKPAD)	20.000.000,00	17.537.500,00	20.000.000,00	-	17.537.500,00
8	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan (Dinhub)	-	41.900.000,00	-	-	41.900.000,00
9	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	27.012.950.944,00	-	1.611.703.266,00	28.624.654.210,00
	Total Piutang Retribusi	5.424.302.615,00	28.728.815.244,00	373.233.200,00	1.611.703.266,00	35.391.587.925,00

Terdapat perubahan pencatatan pendapatan BLUD tahun 2025 di Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah menjadi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025. Sehingga, untuk pengakuan piutang dan penyisihannya dilakukan penyesuaian sesuai dengan akun pendapatannya.

Adapun rincian atas piutang retribusi sebagai berikut :

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup atas Pelayanan Persampahan pada tahun 2019 senilai Rp3.060.000,00
- Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atas Sewa Menara Telekomunikasi pada tahun 2020 dan 2021 dengan total piutang senilai Rp21.222.500,00



- c. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas sewa ruko pasar dengan rincian piutang retribusi :
- Retribusi Los akumulasi dari tahun 2004 – 2025 senilai Rp 1.279.958.350,00.
 - Retribusi Kios akumulasi dari tahun 2004 – 2025 senilai Rp 2.801.764.533,00.
- Rincian piutang pertahun akan dijelaskan pada bagian penyisihan piutang retribusi
- d. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dimiliki oleh beberapa dinas dengan rincian :
- Dinas Kelautan dan Perikanan atas Pelelangan Perikanan dengan akumulasi piutang dari tahun 2014 – 2023 senilai Rp2.597.252.432,00.
 - Dinas Pariwisata dari Sewa Kios Pujasera atas retribusi tahun 2024 senilai Rp4.238.400,00.
 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas retribusi tahun 2025 senilai Rp17.537.500,00.
- e. Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan dimiliki oleh Dinas Perhubungan atas Pelayanan Parkir pada tahun 2025 senilai Rp41.900.000,00.
- f. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dimiliki oleh Dinas Kesehatan dengan rincian :
- Akumulasi atas piutang 2025 dari RSUD Sultan Fatah dan 27 Puskesmas senilai Rp9.290.235.014,00. Rincian piutang pertahun akan dijelaskan pada bagian penyisihan piutang retribusi.
 - Akumulasi atas piutang 2010 – 2025 dari RSUD Sunan Kalijaga senilai Rp19.598.025.617,00
- Rincian piutang pertahun akan dijelaskan pada bagian penyisihan piutang retribusi

b) Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak ditetapkan:

- 0,5 % dari Piutang yang memiliki kualitas lancar, dalam kurun waktu 1 bulan;
- 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar, dalam kurun waktu 1 - 3 bulan;
- 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan, dalam kurun waktu 3 – 12 bulan dan;
- 100 % dari Piutang dengan kualitas macet, diatas 5 tahun.

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengusahakan keterbayaran piutang, pemerintah mengerahkan tenaga untuk melakukan penagihan secara rutin. Sedangkan, untuk piutang dengan kategori macet, pemerintah akan mengusahakan untuk melakukan penghapusan buku piutang.

Perhitungan rinci atas piutang dan penyisihannya sebagai berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)

No	Tahun	Piutang 2025 Rp	%	Penyisihan Rp	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
1	2019	3.060.000,00	100%	3.060.000	0,00	Macet
JUMLAH		3.060.000,00		3.060.000	0,00	

- Penyisihan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika)

No	Tahun	Piutang 2025 (Rp)	%	Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV) (Rp)	Keterangan
1	2020	8.489.000,00	100%	8.489.000,00	-	Macet
2	2021	12.733.500,00	100%	12.733.500,00	-	Macet
JUMLAH		21.222.500,00		21.222.500,00	-	

- Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (Dindagkop) :

a. Penyisihan Piutang Retribusi Kios (Pasar Grosir untuk Pedagang)

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan	Net Realizable Value	Keterangan
		Rp		Rp	(NRV) (Rp)	
1	2015	124.566.750,00	100%	124.566.750,00	0,00	Macet
2	2016	48.655.200,00	100%	48.655.200,00	0,00	Macet
3	2017	70.211.195,00	100%	70.211.195,00	0,00	Macet
4	2018	101.865.200,00	100%	101.865.200,00	0,00	Macet
5	2019	99.039.250,00	100%	99.039.250,00	0,00	Macet
6	2020	98.771.400,00	100%	98.771.400,00	0,00	Macet
7	2021	116.312.760,00	100%	116.312.760,00	0,00	Macet
8	2022	226.443.650,00	100%	226.443.650,00	0,00	Macet
9	2023	278.489.000,00	100%	278.489.000,00	0,00	Macet
10	2024	590.103.628,00	100%	590.103.628,00	0,00	Macet
11	2025	906.398.500,00	0,5% - 50%	329.032.494,50	577.366.005,50	Lancar - Diragukan
JUMLAH		2.660.856.533,00		2.083.490.527,50	577.366.005,50	

b. Penyisihan Piutang Retribusi Kios (Pasar Grosir untuk Pihak Ketiga)

No	Tahun	Piutang 2025 Rp	%	Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV) (Rp)	Keterangan
1	2004	6.890.800,00	100%	6.890.800,00	-	Macet
2	2005 -2022	134.017.200,00	100%	134.017.200,00	-	Macet
JUMLAH		140.908.000,00		140.908.000,00	-	



c. Penyisihan Piutang Retribusi Los

No	Tahun	Piutang 2025 Rp	%	Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV) (Rp)	Keterangan
1	2024	529.930.050,00	100%	529.930.050,00	0,00	Macet
2	2025	750.028.300,00	0,5% - 50%	267.440.267,50	482.588.032,50	Lancar - Diragukan
	JUMLAH	1.279.958.350,00		797.370.317,50	482.588.032,50	

• Penyisihan Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan (Dinhub)

No	Tahun	Piutang 2025 Rp	%	Penyisihan Rp	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
1	2025	41.900.000,00	0,5%-50%	16.806.000,00	25.094.000,00	Lancar-Diragukan
	JUMLAH	41.900.000,00		16.806.000,00	25.094.000,00	

• Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan :

a. Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Dinlutkan)

No	Tahun	Piutang 2025 Rp	%	Penyisihan Rp	Net Realizable Value (NRV) Rp)	Keterangan
1	2014	333.936.408,00	100%	333.936.408,00	0,00	Macet
2	2015	342.821.724,00	100%	342.821.724,00	0,00	Macet
3	2016	225.568.020,00	100%	225.568.020,00	0,00	Macet
4	2017	49.292.540,00	100%	49.292.540,00	0,00	Macet
5	2018	409.058.100,00	100%	409.058.100,00	0,00	Macet
6	2019	416.956.210,00	100%	416.956.210,00	0,00	Macet
7	2020	145.451.110,00	100%	145.451.110,00	0,00	Macet
8	2021	103.430.400,00	100%	103.430.400,00	0,00	Macet
9	2022	210.074.740,00	100%	210.074.740,00	0,00	Macet
10	2023	360.663.180,00	100%	360.663.180,00	0,00	Macet
	JUMLAH	2.597.252.432,00		2.597.252.432,00	0,00	

b. Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Kios Pujasera - Dinas Pariwisata)

No	Tahun	Piutang 2025 Rp	%	Penyisihan Rp	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
1	2025	4.238.400,00	100%	4.158.400,00	0,00	Macet
	JUMLAH	4.238.400,00		4.238.400,00	0,00	

c. Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (BPKPAD)

No	Tahun	Piutang 2025 Rp	%	Penyisihan Rp	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
1	2025	17.537.500,00	0,5%	87.687,50	17.449.812,50	Lancar
	JUMLAH	17.537.500,00		87.687,50	17.449.812,50	



d. Penyisihan Piutang BLUD

NO	TAHUN	NAMA PUSKESMAS	Piutang 2025 Rp	PENYISIHAN (Rp)	Net Realizable Value (NRV) (Rp)	KETERANGAN
1	2025	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	8.128.625.373,00	211.251.542,91	7.917.373.830,09	Lancar - Diragukan
2	2025	PUSKESMAS DEMAK I	2.180.000,00	10.900,00	2.169.100,00	Lancar - Diragukan
3	2025	PUSKESMAS DEMAK II	7.020.000,00	703.350,00	6.316.650,00	Lancar - Diragukan
4	2025	PUSKESMAS DEMAK III	4.600.000,00	23.000,00	4.577.000,00	Lancar - Diragukan
5	2025	PUSKESMAS BONANG I	72.636.000,00	3.951.930,00	68.684.070,00	Lancar - Diragukan
6	2025	PUSKESMAS BONANG II	44.280.000,00	540.600,00	43.739.400,00	Lancar - Diragukan
7	2025	PUSKESMAS WEDUNG I	79.282.000,00	603.510,00	78.678.490,00	Lancar - Diragukan
8	2025	PUSKESMAS WEDUNG II	71.043.000,00	355.215,00	70.687.785,00	Lancar - Diragukan
9	2025	PUSKESMAS MIJEN I	80.432.000,00	2.478.685,00	77.953.315,00	Lancar - Diragukan
10	2025	PUSKESMAS MIJEN II	15.890.000,00	79.450,00	15.810.550,00	Lancar - Diragukan
11	2025	PUSKESMAS KARANGANYAR I	49.866.000,00	249.330,00	49.616.670,00	Lancar - Diragukan
12	2025	PUSKESMAS KARANGANYAR II	81.362.000,00	1.238.410,00	80.123.590,00	Lancar - Diragukan
13	2025	PUSKESMAS GAJAH I	45.146.000,00	225.730,00	44.920.270,00	Lancar - Diragukan
14	2025	PUSKESMAS GAJAH II	43.450.000,00	489.500,00	42.960.500,00	Lancar - Diragukan
15	2025	PUSKESMAS SAYUNG I	9.243.000,00	449.640,00	8.793.360,00	Lancar - Diragukan
16	2025	PUSKESMAS SAYUNG II	52.980.000,00	652.250,00	52.327.750,00	Lancar - Diragukan
17	2025	PUSKESMAS KARANGAWEN I	71.884.000,00	359.420,00	71.524.580,00	Lancar - Diragukan
18	2025	PUSKESMAS KARANGAWEN II	15.620.427,00	1.429.452,14	14.190.974,86	Lancar - Diragukan
19	2025	PUSKESMAS DEMPET	48.285.000,00	241.425,00	48.043.575,00	Lancar - Diragukan
20	2025	PUSKESMAS GUNTUR I	98.083.914,00	1.583.569,57	96.500.344,43	Lancar - Diragukan
21	2025	PUSKESMAS GUNTUR II	14.760.000,00	73.800,00	14.686.200,00	Lancar - Diragukan
22	2025	PUSKESMAS MRANGGEN I	22.077.000,00	379.710,00	21.697.290,00	Lancar - Diragukan
23	2025	PUSKESMAS MRANGGEN II	5.043.000,00	532.590,00	4.510.410,00	Lancar - Diragukan
24	2025	PUSKESMAS MRANGGEN III	46.502.000,00	420.610,00	46.081.390,00	Lancar - Diragukan
25	2025	PUSKESMAS WONOSALAM I	17.580.000,00	87.900,00	17.492.100,00	Lancar - Diragukan
26	2025	PUSKESMAS WONOSALAM II	61.086.000,00	305.430,00	60.780.570,00	Lancar - Diragukan
27	2025	PUSKESMAS KARANGTENGAH	18.870.000,00	3.282.150,00	15.587.850,00	Lancar - Diragukan
28	2025	PUSKESMAS KEBONAGUNG	66.874.000,00	1.222.895,00	65.651.105,00	Lancar - Diragukan
			9.274.700.714,00	233.221.994,62	9.041.478.719,38	

e. Penyisihan Piutang BLUD RSUD Sunan Kalijaga

No	Tahun	Piutang 2025 Rp	%	Penyisihan Rp	Net Realizable Value (NRV) (Rp)	Keterangan
1	2010	10.316.050,00	100%	10.316.050,00	0,00	Macet
2	2011	30.540.247,00	100%	30.540.247,00	0,00	Macet
3	2012	3.358.393,00	100%	3.358.393,00	0,00	Macet
4	2013	9.907.123,00	100%	9.907.123,00	0,00	Macet
5	2014	36.017.843,00	100%	36.017.843,00	0,00	Macet
6	2015	60.437.350,00	100%	60.437.350,00	0,00	Macet
7	2016	7.082.739,00	100%	7.082.739,00	0,00	Macet
8	2017	31.211.261,00	100%	31.211.261,00	0,00	Macet
9	2018	556.353.398,00	100%	556.353.398,00	0,00	Macet

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Piutang 2025 Rp	%	Penyisihan Rp	Net Realizable Value (NRV) (Rp)	Keterangan
10	2019	25.479.511,00	100%	25.479.511,00	0,00	Macet
11	2020	75.658.176,00	100%	75.658.176,00	0,00	Macet
12	2021	219.596.460,00	100%	219.596.460,00	0,00	Macet
13	2022	456.192.505,00	100%	456.192.505,00	0,00	Macet
14	2023	72.043.959,00	100%	72.043.959,00	0,00	Macet
15	2024	17.508.251,00	100%	17.508.251,00	0,00	Macet
16	2025	17.738.250.230,00	0,5% - 50%	782.880.665,53	16.955.369.564,47	Lancar - Diragukan
JUMLAH		19.598.025.617,00		19.349.953.496,00	16.955.369.564,47	

c) Piutang Retribusi Netto

Didasarkan pada perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi yang sudah dijabarkan pada tabel sebelumnya, maka diketahui total Penyisihan Piutang Retribusi yaitu sebesar Rp8.292.241.790,65. Dari perhitungan Penyisihan Piutang diatas dapat diketahui Piutang Retribusi Netto / Piutang yang mungkin dapat ditagih / dapat direalisasikan adalah seperti dalam tabel berikut.

NO	URAIAN	Piutang 2025 (Rp)	Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV) (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.060.000,00	3.060.000,00	-
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.222.500,00	21.222.500,00	-
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	4.081.722.883,00	3.021.768.845,00	1.059.954.038,00
4	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Dinlutkan)	2.597.252.432,00	2.597.252.432,00	-
5	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Kios Pujasera)	4.238.400,00	4.238.400,00	-
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (BPKPAD)	17.537.500,00	87.687,50	17.449.812,50
7	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan (Dinhub)	41.900.000,00	16.806.000,00	25.094.000,00
8	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	28.624.654.210,00	2.627.805.926,15	25.996.848.283,85
JUMLAH		35.391.587.925,00	8.292.241.790,65	27.099.346.134,35

(3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada Tahun 2025 tidak ada Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

(4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah**a) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Bruto**

Piutang Lainnya timbul dari adanya hak Pemerintah Daerah atas pendapatan selain pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal Neraca belum diterima kasnya. Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.697.472.321,05 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp41.330.083.758,55 dengan rincian sebagai berikut.



NO	URAIAN	PIUTANG 2025 (Rp)	PIUTANG 2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	584.490.000,00	607.929.500,00	(23.439.500,00)
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.820.082.855,00	12.265.080.014,00	(2.444.997.159,00)
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	241.949.466,05	173.000.221,55	68.949.244,50
4	Piutang Pendapatan BLUD	-	28.229.914.023,00	(28.229.914.023,00)
5	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	12.400.000,00	12.400.000,00	-
6	Piutang MCK (Dindagkop)	38.550.000,00	41.760.000,00	(3.210.000,00)
	JUMLAH	10.697.472.321,05	41.330.083.758,55	(30.632.611.437,50)

Perhitungan tambah kurang dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

No	Jenis Retribusi	Piutang 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Penghapusan (Rp)	Subsidi (Rp)	Koreksi (Rp)	Reklas (Rp)	Piutang 2025 (Rp)
1	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	607.929.500,00	-	23.439.500,00	-	-	-	-	584.490.000,00
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	12.265.080.014,00	1.590.279.828,00	357.045.914,00	3.249.511.629,00	428.719.444,00	-	-	9.820.082.855,00
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	173.000.221,55	79.484.105,50	10.534.861,00	-	-	-	-	241.949.466,05
4	Piutang Pendapatan BLUD	28.229.914.023,00	-	26.310.019.187,00	-	-	308.485.072,00	1.611.409.764,00	-
5	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	12.400.000,00	-	-	-	-	-	-	12.400.000,00
6	Piutang MCK (Dindagkop)	41.760.000,00	38.550.000,00	41.760.000,00	-	-	-	-	38.550.000,00
	JUMLAH	41.330.083.758,55	1.708.313.933,50	26.742.799.462,00	3.249.511.629,00	428.719.444,00	308.485.072,00	1.611.409.764,00	10.697.472.321,05

Adapun rincian atas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut :

- 1) Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terdiri :
 - a. Atas Laporan Hasil Audit Nomor 700/007/KH/RHS/2022 tanggal 28 November 2022 atas kasus Kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan Kepada Sekretaris Desa Berstatus Pegawai Sipil (PNS) di Kabupaten demak dengan total tuntutan sebesar Rp332.085.750,00 Hinga tanggal 31 Desember 2025 sudah disetorkan sebesar Rp222.645.750,00 sehingga menyisakan piutang sebesar Rp109.440.000,00 pada piutang tahun 2025.
 - b. Atas Laporan Hasil Audit Nomor 700/001/WIL IV/DAMFAS/2024 tanggal 6 Februari 2024 atas kasus Dugaan Penyimpangan Pendapatan Retribusi Parkir Tahun 2022 yang Dikelola oleh Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Demak dengan total tuntutan sebesar Rp456.300.000,00 dan per 31 Desember 2025 belum disetor, sehingga menyisakan piutang sebesar Rp456.300.000,00.
 - c. Atas Hasil Temuan BPK RI pada tanggal 19 April 2025 dengan Nomor 39.B/LHP/XVIII.SMG/04/2025 terkait "Pelaksanaan Belanja Hibah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum direalisasikan sebesar Rp120.000.000,00 dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp276.749.400.000,00". Atas temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dan tersisa TGR sebesar Rp18.750.000,00 pada Sekretariat Daerah.

Selain piutang TP-TGR tersebut di atas, juga terdapat kewajiban untuk membayar sebesar Rp1.964.385.122,04 atas kasus penyalahgunaan retribusi TPI di Dinas Kelautan berdasarkan kepada hasil inkrah Mahkamah Agung terhadap



- penyalahgunaan retribusi TPI di Dinas Kelautan dengan nomor keputusan 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG pada tanggal 2 November 2021. Hasil inkrah tersebut diputuskan untuk menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp1.964.385.122,04 apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar, maka dipidana selama 2 tahun penjara.
- 2) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang terdiri atas jumlah beberapa jenis piutang berikut :
 - a. Piutang Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2017 senilai Rp3.491.808,00
 - b. Piutang Denda Pajak Reklame akumulasi tahun 2016 – 2025 sejumlah Rp46.872.285,00
 - c. Piutang Denda PBJT-Jasa Parkir tahun 2017 senilai Rp1.922.760,00
 - d. Piutang Denda Pajak Air Tanah akumulasi tahun 2016 – 2025 sejumlah Rp15.990.595,00
 - e. Piutang Denda Pajak PBB akumulasi tahun 2017 – 2024 sejumlah Rp9.751.805.407,00
 - 3) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah terdiri atas beberapa SKPD dengan masing masing piutangnya sebagai berikut :
 - a. Piutang Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dinaungi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika akumulasi tahun 2020 – 2021 sejumlah Rp2.376.920,00
 - b. Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar yang dinaungi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri atas :
 - Piutang Denda Retribusi Kios akumulasi tahun 2018 – 2025 sejumlah Rp176.914.852,01
 - Piutang Denda Retribusi Los akumulasi tahun 2018 – 2025 sejumlah Rp62.657.694,04
 - 4) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp12.400.000,00 merupakan Piutang Bagi Hasil Retribusi Sewa Lahan/Kios yang berada di PPP Morodemak, antara DKP Provinsi dengan DKP Kabupaten Demak. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 36/2010, Nomor 523/045 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kabupaten Demak.

Dalam kesepakatan tersebut pembagian bagi hasil adalah 60% DKP Provinsi dan 40% DKP Kabupaten Demak. Petugas yang berwenang menarik retribusi sewa lahan/kios adalah dari Dinas Perikanan Provinsi, dan di perjanjian tersebut hasil penarikan disetorkan seluruhnya ke kasda Provinsi untuk selanjutnya yang 40% akan disetorkan dari kasda Provinsi ke kasda Kabupaten Demak. Namun dalam pelaksanaannya penyeteroran tersebut tidak mudah, sehingga dilakukan *addendum* perjanjian kerja sama untuk pemungutan mulai tahun 2012 sebagaimana *addendum* perjanjian kerja sama Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak nomor 523/425/2012, 523/121/2012 tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Maret 2012. Dalam perjanjian *addendum* tersebut pendapatan pengelolaan P3PPP Morodemak Kabupaten Demak dibagi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Demak dengan bagian masing – masing:



- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 60% termasuk biaya operasional
- Pemerintah Kabupaten Demak sebesar 40%

Penyetoran bagian langsung dimasukkan kepada kas daerah masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap piutang tersebut sudah dilakukan upaya penagihan baik melalui DKP Provinsi maupun BPKAD Provinsi akan tetapi tidak membuahkan hasil.

- 5) Piutang MCK dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025 senilai Rp38.550.000,00

b) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak ditetapkan:

- 0,5 % dari Piutang yang memiliki kualitas lancar, dalam kurun waktu 1 bulan;
- 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar, dalam kurun waktu 1 - 3 bulan;
- 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan, dalam kurun waktu 3 – 12 bulan dan;
- 100 % dari Piutang dengan kualitas macet, diatas 5 tahun.

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengusahakan keterbayaran piutang, pemerintah mengerahkan tenaga untuk melakukan penagihan secara rutin. Sedangkan, untuk piutang dengan kategori macet, pemerintah akan mengusahakan untuk melakukan penghapusan buku piutang.

Perhitungan rinci atas piutang dan penyisihannya sebagai berikut :

1) Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	
1	2022	109.440.000,00	100%	109.440.000,00	-	Macet
2	2023	456.300.000,00	100%	456.300.000,00	-	Macet
3	2024	18.750.000,00	100%	18.750.000,00	-	Macet
JUMLAH		584.490.000,00		584.490.000,00	-	

2) Penyisihan Piutang Denda Pajak

- Piutang Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman

No	Tahun	Piutang 2025 (Rp)	%	Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NVR) (Rp)	Keterangan
1	2017	3.491.808,00	100%	3.491.808,00	-	Macet
JUMLAH		3.491.808,00		3.491.808,00	-	



- Piutang Denda Pajak Reklame

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	
1	2016	54.000,00	100%	54.000,00	0,00	Macet
2	2017	639.000,00	100%	639.000,00	0,00	Macet
3	2018	34.070.400,00	100%	34.070.400,00	0,00	Macet
4	2019	927.960,00	100%	927.960,00	0,00	Macet
5	2020	2.204.580,00	100%	2.204.580,00	0,00	Macet
6	2021	570.000,00	100%	570.000,00	0,00	Macet
7	2022	543.675,00	100%	543.675,00	0,00	Macet
8	2023	3.706.426,00	100%	3.706.426,00	0,00	Macet
9	2024	3.654.119,00	100%	3.654.119,00	0,00	Macet
10	2025	502.125,00	0,5% - 50%	106.868,89	395.256,11	Lancar - Diragukan
JUMLAH		46.872.285,00		46.477.028,89	395.256,11	

- Piutang Denda PBJT-Jasa Parkir

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	
1	2017	1.922.760,00	100%	1.922.760,00	0,00	Macet
JUMLAH		1.922.760,00		1.922.760,00	0,00	

- Piutang Denda Pajak Air Tanah

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	
1	2016	313.440,00	100%	313.440,00	0,00	Macet
2	2017	664.800,00	100%	664.800,00	0,00	Macet
3	2018	1.366.080,00	100%	1.366.080,00	0,00	Macet
4	2019	5.433.384,00	100%	5.433.384,00	0,00	Macet
5	2020	4.570.584,00	100%	4.570.584,00	0,00	Macet
6	2021	36.264,00	100%	36.264,00	0,00	Macet
7	2022	211.140,00	100%	211.140,00	0,00	Macet
8	2023	56.160,00	100%	56.160,00	0,00	Macet
9	2024	1.040.788,00	100%	1.040.788,00	0,00	Macet
10	2025	2.297.955,00	0,5% - 50%	544.880,80	1.753.074,20	Lancar - Diragukan
JUMLAH		15.990.595,00		14.237.520,80	1.753.074,20	

- Piutang Denda Pajak PBB

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	
1	2017	172.713.884,00	100%	172.713.884,00	0,00	Macet
2	2018	154.288.866,00	100%	154.288.866,00	0,00	Macet
3	2019	105.113.969,00	100%	105.113.969,00	0,00	Macet
4	2020	1.728.062.351,00	100%	1.728.062.351,00	0,00	Macet

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	
5	2021	2.198.002.534,00	100%	2.198.002.534,00	0,00	Macet
6	2022	2.574.456.128,00	100%	2.574.456.128,00	0,00	Macet
7	2023	1.857.006.411,00	100%	1.857.006.411,00	0,00	Macet
8	2024	962.161.264,00	100%	962.161.264,00	0,00	Macet
JUMLAH		9.751.805.407,00		9.751.805.407,00	0,00	

3) Penyisihan Piutang Denda Retribusi

- Piutang Denda Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	Tahun	Piutang 2025 (Rp)	%	Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV) (Rp)	Keterangan
1	2020	1.697.800,00	100%	1.697.800,00	-	Macet
2	2021	679.120,00	100%	679.120,00	-	Macet
JUMLAH		2.376.920,00		2.376.920,00	-	

- Piutang Denda Retribusi Kios

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	
1	2018	11.781.724,00	100%	11.781.724,00	0,00	Macet
2	2019	11.292.344,00	100%	11.292.344,00	0,00	Macet
3	2020	10.186.376,00	100%	10.186.376,00	0,00	Macet
4	2021	15.878.876,00	100%	15.878.876,00	0,00	Macet
5	2022	25.248.862,00	100%	25.248.862,00	0,00	Macet
6	2023	29.051.740,00	100%	29.051.740,00	0,00	Macet
7	2024	29.311.252,01	100%	29.311.252,01	0,00	Macet
8	2025	44.163.678,00	0,5% - 50%	20.930.500,20	23.233.177,80	Lancar - Diragukan
JUMLAH		176.914.852,01		153.681.674,21	23.233.177,80	

- Piutang Denda Retribusi Los

No	Tahun	Piutang 2025	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	
1	2024	27.337.266,54	100%	27.337.266,54	0,00	Macet
2	2025	35.320.427,50	0,5% - 50%	16.629.972,15	18.690.455,35	Lancar - Diragukan
JUMLAH		62.657.694,04		43.967.238,69	18.690.455,35	

4) Penyisihan Piutang Lain-lain yang Sah (Bagi Hasil Perikanan)

No	Tahun	Piutang 2025 (Rp)	%	Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV) (Rp)	Keterangan
1	2011	12.400.000,00	100%	12.400.000,00	-	Macet
JUMLAH		12.400.000,00		12.400.000,00	-	



5) Piutang MCK (Dindagkop)

No	Tahun	Piutang 2025 (Rp)	%	Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (NRV) (Rp)	Keterangan
1	2025	38.550.000,00	0.5% - 50%	10.922.250,00	27.627.750,00	Macet
JUMLAH		38.550.000,00		10.922.250,00	27.627.750,00	

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto

Didasarkan pada perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang sudah dijabarkan pada tabel sebelumnya, maka diketahui total Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yaitu sebesar Rp10.625.772.607,59. Dari perhitungan Penyisihan Piutang diatas dapat diketahui Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto / Piutang yang mungkin dapat ditagih / dapat direalisasikan adalah seperti dalam tabel berikut

NO	Uraian	Piutang 2025 Rp	Penyisihan Rp	Net Realizable Value (NRV)
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	584.490.000,00	584.490.000,00	0,00
2	Piutang Denda Pajak	9.820.082.855,00	9.817.934.524,69	2.148.330,31
3	Piutang Denda Retribusi	241.949.466,05	200.025.832,90	41.923.633,15
4	Piutang BLUD	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
6	Piutang MCK	38.550.000,00	10.922.250,00	27.627.750,00
	JUMLAH	10.697.472.321,05	10.625.772.607,59	71.699.713,46

(5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat timbul dari adanya hak Pemerintah Daerah atas kurang salur Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Pemerintah Pusat. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

(6) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Provinsi

a) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Bruto

Pemerintah Kabupaten Demak Per 31 Desember 2025 mempunyai Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp15.126.827.536,00. Piutang ini dinaungi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah. Sedangkan untuk Tahun 2024 terdapat Piutang Transfer sebesar Rp13.356.424.448,00. Adapun rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut :

NO	URAIAN	Piutang 2025	Piutang 2024	TREN
		Rp	Rp	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.221.275.654,00	4.629.257.668,00	91,19%
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	332.539.289,00	3.390.062.945,00	9,81%
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.525.783.074,00	5.324.449.200,00	197,69%
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	47.229.519,00	12.654.635,00	373,22%
	JUMLAH	15.126.827.536,00	13.356.424.448,00	113,26%

**b) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Netto**

No	URAIAN	Piutang 2025	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.221.275.654,00	0,50%	21.106.378,27	4.200.169.275,73	Lancar
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	332.539.289,00	0,50%	1.662.696,44	330.876.592,56	Lancar
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.525.783.074,00	0,50%	52.628.915,37	10.473.154.158,63	Lancar
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	47.229.519,00	0,50%	236.147,59	46.993.371,41	Lancar
JUMLAH		15.126.827.536,00		75.634.137,67	15.051.193.398,33	

a.3 Beban Dibayar Dimuka

Akun Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran Tahun 2025 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada Tahun 2025 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun berikutnya. Sebagian besar Beban Dibayar Dimuka ini berupa asuransi kendaraan bermotor, pemeliharaan mesin *fotocopy*, sewa server dan sewa tanah. Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp176.778.525,42 sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp92.193.804,18. Adapun Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama SKPD	Bulan Mulai Premi/sewa	Masa Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai Perbulan	Beban Asuransi	Beban Dibayar Dimuka	Keterangan
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Jun-25	12 bulan	5.405.464,00	450.455,33	3.153.187,33	2.252.276,67	Asuransi Mobil
		Okt-25	12 bulan	6.228.000,00	519.000,00	1.557.000,00	4.671.000,00	Asuransi Mobil
		Okt-25	12 bulan	5.665.349,00	472.112,42	1.416.337,25	4.249.011,75	Asuransi Mobil
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Okt-25	12 bulan	6.045.978,00	503.831,50	1.511.494,50	4.534.483,50	Asuransi Mobil
		Okt-25	12 bulan	6.384.000,00	532.000,00	1.596.000,00	4.788.000,00	Asuransi Mobil
3	SEKRETARIAT DAERAH	Jun-25	12 bulan	2.220.000,00	185.000,00	1.295.000,00	925.000,00	Pemeliharaan FC
		Des-25	15 bulan	82.334.250,00	6.861.187,50	5.488.950,00	76.845.300,00	Sewa Server
4	SEKRETARIAT DPRD	Des-25	12 bulan	6.990.100,00	582.508,33	582.508,33	6.407.591,67	Asuransi Mobil
		Des-25	12 bulan	48.811.100,00	4.067.591,67	4.067.591,66	44.743.508,34	Asuransi Mobil
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Jul-25	12 bulan	12.059.350,00	1.004.945,83	6.029.675,00	6.029.675,00	Asuransi Mobil
6	KECAMATAN KARANGAWEN	Feb-25	12 bulan	6.929.200,00	577.433,33	6.351.766,67	577.433,33	Asuransi Mobil
7	KECAMATAN GUNTUR	Mei-25	12 bulan	5.052.524,00	421.043,67	2.526.262,00	2.526.262,00	Asuransi Mobil
		Mei-25	12 bulan	4.277.133,00	356.427,75	2.138.566,50	2.138.566,50	Asuransi Mobil
8	KECAMATAN GAJAH	Nov-25	12 bulan	6.987.600,00	582.300,00	1.164.600,00	5.823.000,00	Asuransi Mobil
		Jun-25	12 bulan	6.981.000,00	581.750,00	4.072.250,00	2.908.750,00	Asuransi Mobil
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Mei-25	12 bulan	4.850.000,00	404.166,67	2.425.000,00	2.425.000,00	Asuransi Mobil
		Mei-25	12 bulan	4.334.000,00	361.166,67	2.167.000,00	2.167.000,00	Asuransi Mobil
10	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Apr-25	12 bulan	4.400.000,00	366.666,67	3.300.000,00	1.100.000,00	Sewa Tanah
		Mei-25	12 bulan	5.000.000,00	416.666,67	3.333.333,33	1.666.666,67	Sewa Tanah
JUMLAH							176.778.525,42	



Adapun beban dibayar dimuka antara Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

NO	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.592.000,000	4.749.449,75
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	6.029.675,000	6.186.600,00
4	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.766.666,667	875.000,00
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.172.288,417	11.566.906,17
6	SEKRETARIAT DAERAH	77.770.300,000	-
7	SEKRETARIAT DPRD	51.151.100,007	51.139.641,67
8	KECAMATAN KEBONAGUNG	-	582.611,67
9	KECAMATAN KARANGAWEN	577.433,330	
10	KECAMATAN GAJAH	8.731.750,000	8.073.570,00
11	KECAMATAN GUNTUR	4.664.828,500	3.224.031,67
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	468.000,00
13	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	9.322.483,500	5.327.993,25
	JUMLAH	176.778.525,42	92.193.804,18

a.4 Persediaan

Persediaan merupakan saldo persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang ada pada Dinas/ Badan/ Sekolah dan Unit Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2025. Penilaian persediaan akhir menggunakan *FIFO*.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.923.881.036,29 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp37.674.477.966,30 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Bahan	11.635.982.957,67	15.950.988.268,99
2	Suku Cadang	212.650.833,00	257.911.186,36
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.923.703.321,20	4.434.047.332,36
4	Obat-obatan	18.239.262.064,14	16.260.051.962,69
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	865.777.509,88	561.567.050,00
6	Natura dan Pakan	39.204.350,40	186.112.165,90
7	Komponen	7.300.000,00	23.800.000,00
	JUMLAH	34.923.881.036,29	37.674.477.966,30

Atas saldo persediaan akhir, akan disajikan perbandingan antar SKPD antara tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut :

1. Bahan

No	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.516.000,00	960.000,00
2	DINAS KESEHATAN	11.372.092.757,67	15.390.369.190,99
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	64.984.000,00	103.914.960,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	14.688.000,00
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	516.000,00
6	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	546.000,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	1.660.000,00	5.122.500,00
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.715.000,00	8.356.750,00
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.702.200,00	7.841.500,00
10	DINAS PARIWISATA	134.500.000,00	134.500.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.232.500,00	277.622.868,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	1.275.500,00	242.500,00
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	5.060.000,00	6.308.000,00
	JUMLAH	11.635.982.957,67	15.950.988.268,99

2. Suku Cadang

No	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	DINAS KESEHATAN	197.863.333,00	243.123.686,36
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14.787.500,00	14.787.500,00
	JUMLAH	212.650.833,00	257.911.186,36

3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

No	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	186.492.419,00	187.945.150,00
2	DINAS KESEHATAN	875.738.141,53	1.012.888.719,91
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.608.250,00	42.228.600,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	326.000,00	181.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.221.500,00	4.550.000,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.550.000,00	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.153.000,00	3.832.500,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.390.500,00	16.381.400,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.972.800,00	20.550.050,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.180.470.487,00	1.507.009.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	193.500,00	192.000,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	649.732.813,57	949.994.410,57
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	101.889.300,00	41.644.900,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	350.000,00	1.125.000,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.844.500,00	3.819.200,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.297.600,00	1.510.000,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.055.500,00	2.012.700,00
18	DINAS PARIWISATA	1.276.000,00	892.000,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3.571.830,00	4.054.341,78
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	31.989.680,10	30.826.080,10
21	SEKRETARIAT DAERAH	83.828.100,00	94.081.050,00
22	SEKRETARIAT DPRD	1.950.400,00	1.607.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
23	INSPEKTORAT DAERAH	1.776.000,00	1.440.300,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.977.800,00	3.071.000,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	680.757.500,00	489.493.280,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	985.900,00	816.000,00
27	KECAMATAN DEMAK	2.518.100,00	1.914.100,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	766.000,00	305.500,00
29	KECAMATAN DEMPET	701.800,00	725.200,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	601.000,00	550.850,00
31	KECAMATAN MIJEN	140.000,00	128.000,00
32	KECAMATAN GAJAH	4.921.000,00	2.192.500,00
33	KECAMATAN BONANG	229.400,00	142.000,00
34	KECAMATAN WEDUNG	688.500,00	31.500,00
35	KECAMATAN SAYUNG	1.978.000,00	1.211.500,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	1.028.000,00	728.000,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	780.600,00	505.000,00
38	KECAMATAN GUNTUR	857.400,00	844.900,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	968.500,00	319.000,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	548.000,00	440.000,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.577.500,00	1.863.600,00
	JUMLAH	3.923.703.321,20	4.434.047.332,36

4. Obat-obatan

No	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	413.000,00	190.000,00
2	DINAS KESEHATAN	17.153.447.936,14	15.368.549.962,69
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.010.767.728,00	786.334.000,00
	JUMLAH	18.239.262.064,14	16.260.051.962,69

5. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

No	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	156.057.760,00	135.151.550,00
2	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	95.786.000,00	80.363.500,00
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.364.000,00	-
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	287.611.500,00	201.647.000,00
5	INSPEKTORAT DAERAH	47.952.000,00	-
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	258.006.249,88	144.405.000,00
	JUMLAH	865.777.509,88	561.567.050,00

Adapun Persediaan untuk Dijual/Diserahkan berupa barang yang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat, bukan untuk digunakan dalam rangka operasional pemerintah. Contoh barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, sebagaimana berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	OPD	Persediaan
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Bahan Masak, Bahan Pangan, Perlengkapan Sandang, Air Mineral
2	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kursi Roda, Bahan Masak, Bahan Pangan, Perlengkapan Sandang, Air Mineral
3	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Bahan Pangan (Beras)
4	INSPEKTORAT DAERAH	Printer, Mesin Scanner QR dan set Meja Running Tex
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Barang yang disiapkan untuk gebyar pajak atas pembayaran pajak

6. Natura dan Pakan

No	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	DINAS KESEHATAN DAERAH	35.604.848,40	63.594.743,90
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.599.502,00	2.753.372,00
3	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	119.764.050,00
	JUMLAH	39.204.350,40	186.112.165,90

7. Komponen

No	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	DINAS PERHUBUNGAN	7.300.000,00	23.800.000,00
	JUMLAH	7.300.000,00	23.800.000,00

Penjelasan rinci atas persediaan akhir per SKPD tertuang dalam lampiran Catatan atas Laporan Keuangan.

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sudah tidak termasuk persediaan kadaluarsa. Adapun persediaan kadaluarsa dan belum diterbitkan SK Penghapusan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENGHAPUSAN	JENIS	NOMINAL (Rp)
1	RSUD SUNAN KALIJAGA	Obat-obatan	90.383.264,00
2	RSUD SULTAN FATAH	Obat-obatan	10.068.179,00
	TOTAL		100.451.443,00

Diluar saldo akhir persediaan, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan penghapusan Obat-obatan pada puskesmas yang sudah mengalami kadaluarsa. Adapun Obat-obatan kadaluarsa yang sudah dihapuskan tidak terkandung pada nilai persediaan akhir puskesmas, berikut disajikan rinciannya:

NO	PENGHAPUSAN	JENIS	NOMINAL (Rp)
1	PUSKESMAS MRANGGEN II	Obat-obatan	21.075.000,00
2	PUSKESMAS KARANGAWEN II	Obat-obatan	4.800.000,00
3	PUSKESMAS GUNTUR II	Obat-obatan	634.500,00
4	PUSKESMAS WONOSALAM I	Obat-obatan	25.987.500,00
5	PUSKESMAS WONOSALAM II	Obat-obatan	12.016.190,00
6	PUSKESMAS DEMPET	Obat-obatan	11.970.200,00
7	PUSKESMAS GAJAH I	Obat-obatan	17.673.729,25



NO	PENGHAPUSAN	JENIS	NOMINAL (Rp)
8	PUSKESMAS GAJAH II	Obat-obatan	16.725.000,00
9	PUSKESMAS KARANGANYAR I	Obat-obatan	8.225.000,00
10	PUSKESMAS MIJEN II	Obat-obatan	12.375.000,00
11	PUSKESMAS DEMAK I	Obat-obatan	2.174.632,00
12	PUSKESMAS KEBONAGUNG	Obat-obatan	17.850.000,00
	TOTAL		151.506.751,25

a.5. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp383.788.751.391,74 naik dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp379.725.078.099,72 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak, yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 Rp0,00.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak, yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan/ atau Peraturan Bupati Demak. Sedangkan cara perhitungan pengakuan ekuitas BUMD sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak terdapat 2 metode sebagai berikut.

a) Perhitungan Metode Ekuitas

Perhitungan ekuitas digunakan jika persentase kepemilikan Saham/Modal lebih dari 20%. Perhitungannya dengan cara persentase kepemilikan tersebut dikalikan dengan ekuitas BUMD. Terdapat 5 BUMD yang perhitungannya dengan metode ekuitas. Adapun perhitungannya sebagai berikut.

Nama BUMD	Ekuitas Pengakuan 2024	Modal Disetor		Persentase Kepemilikan Pemkab	Ekuitas Perusda (Laporan BUMD)	Ekuitas Pengakuan 2025
		Pem Prov/ Pem Pusat/ Pihak Lain	Pemkab			
PD. BPR BKK DEMAK	30.515.398.084,05	14.740.000.000,00	14.700.000.000,00	49,93	55.907.819.886,00	27.914.774.469,08
PERUMDA AIR MINUM	144.384.535.549,00	0,00	132.037.329.528,00	100,00	150.280.985.470,00	150.280.985.470,00
PT. LKM DEMAK SEJAHTERA	31.232.958.212,67	250.000.000,00	28.111.000.000,00	99,12	31.078.801.175,00	30.805.307.724,66
PT. DEMAK SARANA SEHAT	28.179.709.014,00	0,00	26.500.000.000,00	100,00	28.807.839.125,00	28.807.839.125,00
PD. ANEKA WIRA USAHA	22.570.477.240,00	0,00	20.950.000.000,00	100,00	23.137.844.603,00	23.137.844.603,00
JUMLAH	256.883.078.099,72	14.990.000.000,00	222.298.329.528,00		289.213.290.259,00	260.946.751.391,74



b) Perhitungan Metode Biaya

Metode biaya digunakan ketika persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Demak di bawah 20%. Maka perhitungan pengakuan ekuitas didasarkan pada jumlah modal disetor. Adapun BUMD yang perhitungannya dengan metode biaya adalah sebagai berikut.

NO	Nama BUMD	EKUITAS 2024 (Rp)	Modal Disetor 2025 (Rp)	Persentase kepemilikan saham (%)	Ekuitas Pengakuan 2025 (Rp)
1	PD. BPR BKK JATENG	13.700.000.000,00	-	3,85	13.700.000.000,00
2	PT. BANK JATENG	102.499.000.000,00	-	2,33	102.499.000.000,00
3	PT. PRPP JATENG	143.000.000,00	-	0,19	143.000.000,00
4	PT. JAMKRIDA JATENG	6.500.000.000,00	-	4,26	6.500.000.000,00
	JUMLAH	122.842.000.000,00	-		122.842.000.000,00

Total Pengakuan Investasi Permanen adalah sebagai berikut.

NO	Total Pengakuan Ekuitas		
	Jenis Perhitungan	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Perhitungan Ekuitas	260.946.751.391,74	256.883.078.099,72
2	Perhitungan Biaya	122.842.000.000,00	122.842.000.000,00
	Jumlah	383.788.751.391,74	379.725.078.099,72

Nilai investasi permanen Tahun 2025 naik sebesar Rp4.063.673.292,02 dari Tahun 2024 karena adanya penerimaan deviden sebesar Rp38.477.679.571,00 dan karena laba perusahaan yang telah disesuaikan dengan persentase kepemilikan saham (laba pengakuan LO) sebesar Rp41.658.468.443,69.

Masing-masing BUMD tersebut untuk tahun 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini sebagai berikut.

No	Nama BUMD	KAP	Opini	Keterangan
1	PD. BPR BKK Demak	KAP Ida Nurhayati	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Perumda Air Minum	KAP Soekamto Adi Syahril & Rekan	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
3	PT. LKM Demak Sejahtera	KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Perseroda Demak Sarana Sehat	KAP Ida Nurhayati	WDP	Wajar Dengan Pengecualian
5	PT. Demak Aneka Wira Usaha	KAP Ida Nurhayati	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
6	PD. BKK Jateng	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
7	PT. BANK JATENG	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
8	PT. JAMKRIDA JATENG	KAP Heliantono dan Rekan	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

**b. Aset Tetap**

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2025 dan 2024. Perolehan aset tetap Pemerintah Kabupaten Demak berasal dari belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan dan pendapatan hibah aset tetap.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.013.948.792.640,41 dan Rp7.736.332.111.032,64

Adapun rincian aset tetap sebagai berikut.

NO	JENIS ASET	TAHUN 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	1.643.348.018.200,60	1.930.071.350,00	327.280.000,00	1.644.950.809.550,60
2	Peralatan Dan Mesin	998.769.393.492,10	94.669.636.151,86	22.718.926.366,93	1.070.720.103.277,03
3	Gedung Dan Bangunan	1.572.125.561.473,55	154.233.996.326,69	70.712.985.462,33	1.655.646.572.337,91
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	3.422.321.246.729,39	124.344.952.887,16	12.032.228.752,08	3.534.633.970.864,47
5	Aset Tetap Lainnya	87.243.674.117,00	14.964.761.125,00	5.765.097.761,60	96.443.337.480,40
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.524.217.020,00	586.990.240,00	1.557.208.130,00	11.553.999.130,00
	JUMLAH	7.736.332.111.032,64	390.730.408.080,71	113.113.726.472,94	8.013.948.792.640,41

Penambahan aset tetap sebesar Rp390.730.408.080,71 terdiri dari belanja modal, atribusi, hibah, mutasi antar SKPD serta adanya koreksi. Sedangkan pengurangan aset sebesar Rp113.113.726.472,94 dikarenakan adanya penghapusan, mutasi, koreksi, ekstrakomptabel dan aset yang sudah tidak bisa dimanfaatkan dan menunggu proses penghapusan serta aset tetap yang menjadi properti investasi.

Secara rinci penjelasan dari masing- masing jenis aset sebagai berikut.

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Demak. Saldo tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.644.950.809.550,60 bertambah sebesar Rp1.930.071.350,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.643.348.018.200,60.

Saldo aset tetap tanah tersebut diperoleh dengan perhitungan:

Saldo per 31/12/2024	1.643.348.018.200,60
Penambahan	1.930.071.350,00
Hibah Pihak ke-3	1.902.061.350,00
Mutasi Masuk	25.130.000,00
Koreksi Masuk	2.880.000,00
Pengurangan	327.280.000,00
Mutasi Keluar	25.130.000,00
Properti Investasi	302.150.000,00
Saldo per 31/12/2025	1.644.950.809.550,60



Penjelasan terkait dengan Aset tetap tanah berdasarkan jenis asetnya mulai dari saldo 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL	PENAMBAHAN			PENGURANGAN		SALDO AKHIR
			HIBAH PIHAK KE III	MUTASI MASUK	KOREKSI MASUK	MUTASI KELUAR	PROPERTI INVESTASI	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Tanah Persil	132.521.165.296,00	-	25.130.000,00	2.880.000,00	25.130.000,00	302.150.000,00	132.221.895.296,00
2	Tanah Non Persil	4.495.709.288,00	-	-	-	-	-	4.495.709.288,00
3	Lapangan	1.506.331.143.616,60	1.902.061.350,00	-	-	-	-	1.508.233.204.966,60
JUMLAH		1.643.348.018.200,60	1.902.061.350,00	25.130.000,00	2.880.000,00	25.130.000,00	302.150.000,00	1.644.950.809.550,60

- a. Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp1.930.071.350,00 secara terperinci sebagai berikut.
 - 1) Hibah dari pihak ke-3
Hibah dari pihak ke-3 pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.902.061.350,00.
 - 2) Koreksi tambah
Koreksi tambah pada Dinas Kelautan sebesar Rp2.880.000,00 merupakan tanah Hasil Inventarisasi SK Nomor 030/216 Tahun 2025
 - 3) Mutasi Masuk
Mutasi antar SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan memutasikan tanah senilai Rp25.130.000,00 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp327.280.000,00 secara terperinci sebagai berikut:
 - 1) Mutasi Keluar antar SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp25.130.000,00
 - 2) Properti Investasi Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp302.120.000,00

Penjelasan terkait dengan aset tetap tanah per SKPD mulai dari saldo 2024, penambahan, pengurangan dan saldo 2025 dijelaskan dilampiran.

Berikut rincian aset tanah pada masing-masing SKPD.

NO	SKPD	2025	2024	TAMBAH/ KURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	41.483.401.446,00	41.458.271.446,00	25.130.000,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	18.230.034.000,00	18.230.034.000,00	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	986.260.649.075,00	986.260.649.075,00	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	395.715.552.258,60	393.813.490.908,60	1.902.061.350,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.096.000.000,00	6.096.000.000,00	-
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.065.540.000,00	3.065.540.000,00	-
7	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.046.004.000,00	2.046.004.000,00	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	2025	2024	TAMBAH/ KURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.565.612.050,00	17.565.612.050,00	-
9	DINAS PERHUBUNGAN	2.205.188.000,00	2.205.188.000,00	-
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	586.652.000,00	586.652.000,00	-
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	169.344.000,00	169.344.000,00	-
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	930.624.000,00	930.624.000,00	-
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	695.105.000,00	717.355.000,00	(22.250.000,00)
15	DINAS PARIWISATA	415.000.000,00	415.000.000,00	-
16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.909.865.000,00	2.212.015.000,00	(302.150.000,00)
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	124.300.000,00	124.300.000,00	-
18	SEKRETARIAT DAERAH	7.540.478.000,00	7.540.478.000,00	-
19	SEKRETARIAT DPRD	2.570.986.000,00	2.570.986.000,00	-
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	7.413.546.000,00	7.413.546.000,00	-
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	169.695.000,00	169.695.000,00	-
22	KECAMATAN DEMAK	137.794.142.721,00	137.794.142.721,00	-
23	KECAMATAN KARANGTENGAH	760.424.000,00	760.424.000,00	-
24	KECAMATAN DEMPET	740.250.000,00	740.250.000,00	-
25	KECAMATAN MIJEN	410.400.000,00	410.400.000,00	-
26	KECAMATAN GAJAH	824.499.000,00	824.499.000,00	-
27	KECAMATAN BONANG	124.050.000,00	124.050.000,00	-
28	KECAMATAN SAYUNG	1.851.000.000,00	1.851.000.000,00	-
29	KECAMATAN MRANGGEN	806.400.000,00	806.400.000,00	-
30	KECAMATAN KARANGAWEN	272.025.000,00	272.025.000,00	-
31	KECAMATAN KEBONAGUNG	674.043.000,00	674.043.000,00	-
JUMLAH		1.644.950.809.550,60	1.643.348.018.200,60	1.602.791.350,00

(2) Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah Rp1.070.720.103.277,03 bertambah sebesar Rp71.950.709.784,93 dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp998.769.393.492,10.

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut diperoleh dengan perhitungan:

Saldo per 31/12/2024	998.769.393.492,10
Penambahan	94.669.636.151,86
Belanja Modal	79.223.634.041,00
Belanja Barang/Jasa yang Membentuk Aset	197.208.108,00
Hibah APBN	2.618.552.448,62
Hibah Pihak ke-3	366.361.000,00
Mutasi Tambah antar SKPD	7.112.086.118,62

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Koreksi Tambah	
Koreksi Masuk Reklas	1.366.190.515,62
Koreksi Masuk Jumlah	32.000.000,00
Koreksi Masuk Belum Catat	3.753.603.920,00
Pengurangan	22.718.926.366,93
Penghapusan	9.016.493.059,31
Mutasi Keluar SKPD	7.112.086.118,62
Koreksi Kurang	
Koreksi Jumlah	32.000.000,00
Koreksi Keluar BHP	33.753.030,00
Koreksi Keluar Reklas	9.500.000,00
Ekstrakomptabel	6.531.589.159,00
Aset Lainnya	(16.495.000,00)
Saldo per 31/12/2025	1.070.720.103.277,03

Penjelasan terkait dengan aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan jenis asetnya mulai dari saldo 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL			
		KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ALAT BESAR	31.138.580.757,00	-	17.414.051,00	31.121.166.706,00
2	ALAT ANGKUTAN	170.776.474.014,75	44.071.500,00	-	170.732.402.514,75
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	7.748.036.861,77	-	14.096.975,15	7.733.939.886,62
4	ALAT PERTANIAN	3.208.583.225,00	-	23.333.000,00	3.185.250.225,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	253.861.550.791,41	12.185.000,00	35.903.920.526,87	217.945.445.264,54
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	40.554.391.644,93	4.310.000,00	125.276.619,39	40.424.805.025,54
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	284.426.422.277,65	-	267.514.112,02	284.158.908.165,63
8	ALAT LABORATORIUM	31.681.693.662,37	-	366.909.835,00	31.314.783.827,37
9	ALAT PERSENJATAAN	6.169.000,00	-	-	6.169.000,00
10	KOMPUTER	191.158.053.231,65	-	151.966.418,00	191.006.086.813,65
11	ALAT EKSPLORASI	29.226.000,00	-	-	29.226.000,00
12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	99.318.988,00	-	-	99.318.988,00
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	12.607.763.734,00	-	200.000,00	12.607.563.734,00
16	ALAT PERAGA	20.636.000,00	-	-	20.636.000,00
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
18	RAMBU – RAMBU	6.550.419.476,00	-	250.000,00	6.550.169.476,00
19	PERALATAN OLAH RAGA	1.827.141.865,00	-	4.620.000,00	1.822.521.865,00
	JUMLAH	1.035.705.461.529,53	60.566.500,00	36.875.501.537,43	998.769.393.492,10

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin diantaranya berasal dari Belanja Modal, Belanja Non Modal yang membentuk Aset, Mutasi tambah dan Koreksi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	PENAMBAHAN					
		BELANJA MODAL	BELANJA YANG MEMBENTUK ASET	HIBAH		MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
		(Rp)	(Rp)	APBN	PIHAK KE III	(Rp)	(Rp)
1	ALAT BESAR	4.860.890.000,00	-	8.200.000,00	-	-	28.250.000,00
2	ALAT ANGKUTAN	6.806.247.292,00	3.385.500,00	484.297.000,00	-	233.300.000,00	972.568.880,00
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	29.917.001,00	-	16.435.000,00	-	-	-
4	ALAT PERTANIAN	114.796.999,00	-	348.991.000,00	-	-	-
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	17.885.069.983,00	120.150.608,00	1.184.683.448,62	-	112.961.000,00	3.608.669.038,62
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3.127.545.654,00	2.100.000,00	-	-	7.900.000,00	339.770.000,00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	19.048.953.954,00	4.450.000,00	10.800.000,00	-	-	-
8	ALAT LABORATORIUM	2.195.791.568,00	-	3.046.000,00	-	-	233.540.000,00
9	ALAT PERSENJATAAN	23.079.999,00	-	-	-	-	-
10	KOMPUTER	15.123.970.003,00	35.722.000,00	-	-	12.200.000,00	1.835.548.200,00
11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-
12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	95.982.480,00	-	562.100.000,00	-	-	-
16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-
18	RAMBU – RAMBU	9.383.183.609,00	-	-	-	-	-
19	PERALATAN OLAH RAGA	528.205.499,00	31.400.000,00	-	-	-	93.740.000,00
JUMLAH		79.223.634.041,00	197.208.108,00	2.618.552.448,62	366.361.000,00	7.112.086.118,62	5.151.794.435,62

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin diantaranya berasal dari penghapusan, Mutasi Keluar SKPD, Koreksi, Ekstrakomptabel dan Aset Lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	PENGURANGAN			KIB – NERACA	
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ALAT BESAR	48.490.500,00	28.250.000,00	-	4.089.000,00	-
2	ALAT ANGKUTAN	2.569.568.167,00	972.568.880,00	-	-	-
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	7.517.000,00	-	32.000.000,00	115.000,00	-
4	ALAT PERTANIAN	250.000,00	-	-	100.000,00	-
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.750.121.931,00	3.608.669.038,62	29.994.000,00	6.400.507.696,00	(12.185.000,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	JENIS BARANG	PENGURANGAN			KIB - NERACA	
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	408.505.525,00	339.770.000,00	-	24.597.630,00	(4.310.000,00)
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	378.474.240,00	-	-	29.763.200,00	-
8	ALAT LABORATORIUM	360.212.022,00	233.540.000,00	-	16.127.383,00	-
9	ALAT PERSENJATAAN	-	-	80.000,00	-	-
10	KOMPUTER	3.485.353.674,31	1.835.548.200,00	13.179.030,00	23.646.750,00	-
11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-
12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	8.000.000,00	-	-	-	-
16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-
18	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-
19	PERALATAN OLAH RAGA	-	93.740.000,00	-	32.642.500,00	-
JUMLAH		9.016.493.059,31	7.112.086.118,62	75.253.030,00	6.531.589.159,00	(16.495.000,00)

Saldo per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	SALDO AKHIR			
		KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ALAT BESAR	36.869.027.257,00	-	21.503.051,00	36.847.524.206,00
2	ALAT ANGKUTAN	175.874.477.379,75	44.071.500,00	-	175.830.405.879,75
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	7.799.679.542,77	-	14.211.975,15	7.785.467.567,62
4	ALAT PERTANIAN	3.672.121.224,00	-	23.433.000,00	3.648.688.224,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	272.049.470.915,65	-	42.304.428.222,87	229.745.042.692,78
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	43.310.331.773,93	-	149.874.249,39	43.160.457.524,54
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	303.112.151.991,65	-	297.277.312,02	302.814.874.679,63
8	ALAT LABORATORIUM	33.520.319.208,37	-	383.037.218,00	33.137.281.990,37
9	ALAT PERSENJATAAN	29.168.999,00	-	-	29.168.999,00
10	KOMPUTER	202.912.725.030,34	-	175.613.168,00	202.737.111.862,34
11	ALAT EKSPLORASI	29.226.000,00	-	-	29.226.000,00
12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	99.318.988,00	-	-	99.318.988,00
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	16.535.988.214,00	-	200.000,00	16.535.788.214,00
16	ALAT PERAGA	20.636.000,00	-	-	20.636.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	JENIS BARANG	SALDO AKHIR			
		KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
18	RAMBU - RAMBU	15.933.603.085,00	-	250.000,00	15.933.353.085,00
19	PERALATAN OLAH RAGA	2.392.019.864,00	-	37.262.500,00	2.354.757.364,00
JUMLAH		1.114.171.265.473,46	44.071.500,00	43.407.090.696,43	1.070.720.103.277,03

Penjelasan terkait dengan aset tetap peralatan dan mesin per SKPD mulai dari saldo 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan dilampiran.

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut.

NO	SKPD	2025	2024	TAMBAH/ KURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	231.396.545.935,10	220.954.341.788,10	10.442.204.147,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	499.248.938.439,58	468.298.188.177,96	30.950.750.261,62
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.558.645.202,00	16.903.886.750,00	1.654.758.452,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.671.170.844,00	5.389.104.485,00	282.066.359,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.738.722.146,00	13.248.434.944,00	(509.712.798,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30.798.192.812,00	25.796.671.189,00	5.001.521.623,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.408.065.300,32	4.598.548.798,32	809.516.502,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	5.923.662.942,11	5.746.056.939,11	177.606.003,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.307.055.614,00	18.937.745.917,00	1.369.309.697,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.437.733.267,33	12.046.322.269,33	391.410.998,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.959.940.438,83	11.489.568.938,83	470.371.500,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	30.667.123.373,00	20.574.172.334,00	10.092.951.039,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.615.977.544,00	14.116.833.054,00	499.144.490,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.476.357.867,00	7.112.597.867,00	363.760.000,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.107.927.633,32	5.667.672.134,32	440.255.499,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.602.091.165,00	5.236.199.268,00	365.891.897,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.032.307.844,00	5.979.907.844,00	52.400.000,00
18	DINAS PARIWISATA	3.588.260.449,82	3.348.104.648,82	240.155.801,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.278.224.198,83	7.698.798.948,83	579.425.250,00
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.347.892.831,00	10.300.305.031,00	1.047.587.800,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	50.223.332.689,63	47.610.064.378,63	2.613.268.311,00
22	SEKRETARIAT DPRD	16.527.338.428,00	16.253.496.426,00	273.842.002,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	7.687.123.093,83	5.565.292.041,83	2.121.831.052,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	5.664.451.849,00	5.223.490.150,00	440.961.699,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	12.433.343.358,00	12.700.005.263,31	(266.661.905,31)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.251.829.376,66	5.251.961.210,66	(131.834,00)
27	KECAMATAN DEMAK	4.687.746.639,02	4.381.740.389,02	306.006.250,00



NO	SKPD	2025	2024	TAMBAH/ KURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	1.448.150.155,92	1.124.388.600,00	323.761.555,92
29	KECAMATAN DEMPET	1.151.126.232,63	1.083.371.932,63	67.754.300,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	1.354.002.165,18	1.332.292.165,18	21.710.000,00
31	KECAMATAN MIJEN	1.191.822.812,56	1.127.495.312,56	64.327.500,00
32	KECAMATAN GAJAH	1.412.775.880,00	1.327.107.580,00	85.668.300,00
33	KECAMATAN BONANG	1.179.276.792,00	1.103.397.393,00	75.879.399,00
34	KECAMATAN WEDUNG	1.237.212.821,28	1.159.262.821,28	77.950.000,00
35	KECAMATAN SAYUNG	1.270.701.204,00	1.139.399.106,00	131.302.098,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	1.306.689.859,00	1.197.822.859,00	108.867.000,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	1.255.451.250,00	1.192.764.000,00	62.687.250,00
38	KECAMATAN GUNTUR	1.401.612.000,00	1.307.901.700,00	93.710.300,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	1.094.439.097,08	1.044.850.760,38	49.588.336,70
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	1.169.235.430,00	1.102.848.880,00	66.386.550,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.607.606.296,00	3.096.979.196,00	510.627.100,00
JUMLAH		1.070.720.103.277,03	998.769.393.492,10	71.950.709.784,93

(3) Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.655.646.572.337,91 atau bertambah sebesar Rp83.521.010.864,36 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.572.125.561.473,55.

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan tersebut diperoleh dengan perhitungan:

Saldo per 31/12/2024	1.572.125.561.473,55
Penambahan	154.233.996.326,69
Belanja Modal	42.369.633.602,00
Atribusi	1.653.804.763,00
Belanja Barang/Jasa yang Membentuk Aset	15.870.854.993,38
Hibah APBN	59.731.332.965,50
Hibah Pihak Ke III	284.716.500,00
Mutasi Tambah antar SKPD	23.774.264.928,29
Koreksi Tambah	
Koreksi Masuk Reklasifikasi	9.500.000,00
Koreksi Masuk Kapitalisasi	1.446.952.861,20
Koreksi Masuk KDP	1.027.837.130,00
Koreksi Jumlah	8.065.098.583,32
Pengurangan	70.712.985.462,33
Penghapusan	34.310.898.333,81
Mutasi Keluar SKPD	23.774.264.928,29
Koreksi Kurang	
Koreksi Keluar Reklasifikasi	1.866.248.359,71
Koreksi Keluar Kapitalisasi	1.454.577.861,20

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Koreksi Keluar Jumlah	8.193.624.083,32
Ekstrakomptabel	39.647.579,00
Aset Lainnya	(6.073.886.500,00)
Properti Investasi	7.147.610.817,00
Saldo Per 31/12/2025	1.655.646.572.337,91

Penjelasan terkait dengan aset tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan jenis asetnya mulai dari saldo 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31/12/2024 dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL				
		KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	PROPERTI INVESTASI	NERACA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG	1.782.395.142.594,34	7.398.128.300,00	2.933.194.260,01	273.932.228.012,88	1.498.131.592.021,45
2	MONUMEN	6.614.742.475,26	-	480.181.437,08	-	6.134.561.038,18
3	BANGUNAN MENARA	1.906.779.064,00	-	525.200.000,00	222.127.000,00	1.159.452.064,00
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	67.050.108.106,92	-	350.151.757,00	-	66.699.956.349,92
	JUMLAH	1.857.966.772.240,53	7.398.128.300,00	4.288.727.454,09	274.154.355.012,88	1.572.125.561.473,55

Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan antara lain berasal dari Belanja Modal, Atribusi, Belanja Barang/Jasa membentuk aset, Hibah Pihak ke-3, mutasi tambah dan koreksi dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	PENAMBAHAN						KOREKSI
		BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL		HIBAH		MUTASI SKPD TAMBAH	
			ATRIBUSI	BELANJA YANG MEMBENTUK ASET	APBN	PIHAK KE III		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG	38.094.165.177,37	1.562.624.238,00	15.770.457.993,38	59.731.332.965,50	253.999.500,00	22.220.735.469,66	10.549.388.574,52
2	MONUMEN	-	-	-	-	-	265.600.000,00	-
3	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4.275.468.424,63	91.180.525,00	100.397.000,00	-	30.717.000,00	1.287.929.458,63	-
	JUMLAH	42.369.633.602,00	1.653.804.763,00	15.870.854.993,38	59.731.332.965,50	284.716.500,00	23.774.264.928,29	10.549.388.574,52

Selanjutnya pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan berasal dari penghapusan, mutasi keluar, koreksi, ekstrakomptabel dan aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	PENGURANGAN			KIB - NERACA		
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA	PROPERTI INVESTASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG	34.127.723.333,81	22.220.735.469,66	11.514.450.304,23	39.647.579,00	(6.073.886.500,00)	7.147.610.817,00
2	MONUMEN	149.075.000,00	265.600.000,00	-	-	-	-
3	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	JENIS BARANG	PENGURANGAN			KIB - NERACA		
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA	PROPERTI INVESTASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	34.100.000,00	1.287.929.458,63	-	-	-	-
	JUMLAH	34.310.898.333,81	23.774.264.928,29	11.514.450.304,23	118.905.000,00	(6.073.886.500,00)	7.147.610.817,00

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	SALDO AKHIR				
		KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	PROPERTI INVESTASI	NERACA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG	1.862.714.937.405,08	1.324.241.800,00	2.972.841.839,01	281.079.838.829,88	1.577.338.014.936,18
2	MONUMEN	6.465.667.475,26	-	480.181.437,08	-	5.985.486.038,18
3	BANGUNAN MENARA	1.906.779.064,00	-	525.200.000,00	222.127.000,00	1.159.452.064,00
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	71.513.771.056,55	-	350.151.757,00	-	71.163.619.299,55
	JUMLAH	1.942.601.155.000,89	1.324.241.800,00	4.328.375.033,09	281.301.965.829,88	1.655.646.572.337,91

Penjelasan terkait dengan mutasi aset tetap gedung dan bangunan per SKPD mulai dari saldo Tahun 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan dilampiran.

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	SKPD	2025	2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	792.911.192.642,08	743.841.036.364,58	49.070.156.277,50
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	447.010.672.621,46	429.863.708.040,08	17.146.964.581,38
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.368.473.157,00	38.369.363.157,00	1.999.110.000,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.495.980.250,00	3.153.828.250,00	342.152.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	708.344.473,00	549.049.005,00	159.295.468,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.315.190.102,27	4.315.190.102,27	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.097.055.770,00	7.538.222.770,00	558.833.000,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	3.260.377.233,94	3.478.628.882,94	(218.251.649,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	45.470.572.517,00	45.212.946.017,00	257.626.500,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.473.949.800,00	10.321.650.800,00	152.299.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.630.144.646,29	15.761.434.982,10	(131.290.335,81)
12	DINAS PERHUBUNGAN	5.002.718.038,34	5.467.955.234,34	(465.237.196,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.122.597.278,00	2.497.552.079,00	625.045.199,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.019.145.570,00	14.163.745.570,00	(144.600.000,00)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	72.547.411.556,23	69.118.193.406,23	3.429.218.150,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.981.632.010,00	4.981.632.010,00	-
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.596.913.009,00	15.926.413.060,00	(1.329.500.051,00)
18	DINAS PARIWISATA	14.889.453.235,22	14.781.453.301,22	107.999.934,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	2025	2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12.648.401.607,96	13.220.520.383,96	(572.118.776,00)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	25.949.065.723,17	22.370.772.227,17	3.578.293.496,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	26.362.518.388,21	26.148.794.856,21	213.723.532,00
22	SEKRETARIAT DPRD	14.018.147.434,35	13.462.353.634,35	555.793.800,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	10.759.765.228,00	10.579.565.327,00	180.199.901,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	10.094.341.789,00	9.824.764.789,00	269.577.000,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	4.235.184.396,00	4.284.159.743,00	(48.975.347,00)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.523.765.480,00	11.647.900.480,00	(124.135.000,00)
27	KECAMATAN DEMAK	9.680.376.997,93	9.518.702.077,93	161.674.920,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	7.167.793.247,98	902.493.000,00	6.265.300.247,98
29	KECAMATAN DEMPET	971.366.200,00	896.379.800,00	74.986.400,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	891.324.450,00	1.055.633.000,00	(164.308.550,00)
31	KECAMATAN MIJEN	300.015.000,00	300.015.000,00	-
32	KECAMATAN GAJAH	737.024.000,00	737.024.000,00	-
33	KECAMATAN BONANG	1.498.853.756,00	1.429.645.000,00	69.208.756,00
34	KECAMATAN WEDUNG	1.613.904.658,00	1.524.908.000,00	88.996.658,00
35	KECAMATAN SAYUNG	4.960.019.816,17	5.058.425.863,17	(98.406.047,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	906.567.035,00	844.841.035,00	61.726.000,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	490.150.000,00	490.150.000,00	-
38	KECAMATAN GUNTUR	2.913.791.725,00	2.913.791.725,00	-
39	KECAMATAN KARANGAWEN	5.592.785.995,31	4.103.533.000,00	1.489.252.995,31
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	1.429.585.500,00	1.469.185.500,00	(39.600.000,00)
JUMLAH		1.655.646.572.337,91	1.572.125.561.473,55	83.521.010.864,36

(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.534.633.970.864,47 bertambah sebesar Rp112.312.724.135,08 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.422.321.246.729,39.

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31/12/2024	3.422.321.246.729,39
Penambahan	124.344.952.887,16
Belanja Modal	87.752.972.060,00
Atribusi	34.426.940,00
Belanja Barang/Jasa yang Membentuk Aset	5.394.455.457,99
Hibah BPBN	22.330.005.934,00
Hibah Pihak III	635.834.700,00
Mutasi Tambah antar SKPD	6.351.642.082,08

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Koreksi Tambah	
Koreksi Masuk Reklasifikasi	97.989.233,09
Koreksi Masuk Kapitalisasi	1.231.063.480,00
Koreksi Masuk KDP	516.563.000,00
Pengurangan	12.032.228.752,08
Penghapusan	38.326.620.170,00
Mutasi Keluar SKPD	6.351.642.082,08
Koreksi Kurang	
Koreksi Keluar Aplikasi	199.800.000,00
Koreksi Keluar Kapitalisasi	1.097.256.000,00
Koreksi Keluar Jumlah	126.441.700,00
Aset Lainnya	(34.069.531.200,00)
Saldo Per 31/12/2025	3.534.633.970.864,47

Penjelasan terkait dengan mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per jenis barang mulai dari saldo Tahun 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Saldo awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat di sampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL			
		KIB	ASET LAINNYA	PROPERTI INVESTASI	NERACA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	JALAN DAN JEMBATAN	3.221.025.737.883,90	34.069.531.200,00	-	3.186.956.206.683,90
2	BANGUNAN AIR	137.108.987.251,11	3.036.529.800,00	-	134.072.457.451,11
3	INSTALASI	58.212.570.483,63	-	-	58.212.570.483,63
4	JARINGAN	43.080.012.110,75	-	-	43.080.012.110,75
	JUMLAH	3.459.427.307.729,39	37.106.061.000,00	-	3.422.321.246.729,39

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diantaranya berasal dari belanja modal, atribusi, belanja barang/jasa yang membentuk aset dan hibah Pihak ke - 3, Mutasi tambah dan Koreksi dapat di sampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	PENAMBAHAN						MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
		BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL		HIBAH				
			ATRIBUSI	BELANJA YANG MEMBENTUK ASET	APBN	PIHAK KE III			
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	JALAN DAN JEMBATAN	79.902.932.700,00	12.265.000,00	2.878.921.908,99	20.412.357.489,00	532.003.500,00	3.682.206.142,08	1.711.808.233,09	
2	BANGUNAN AIR	3.343.799.000,00	22.161.940,00	2.450.481.000,00	1.917.648.445,00	103.831.200,00	2.667.135.940,00	133.807.480,00	
3	INSTALASI	2.858.418.190,00	-	19.157.923,00	-	-	2.300.000,00	-	
4	JARINGAN	1.647.822.170,00	-	45.894.626,00	-	-	-	-	
	JUMLAH	87.752.972.060,00	34.426.940,00	5.394.455.457,99	22.330.005.934,00	635.834.700,00	6.351.642.082,08	1.845.615.713,09	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat di sampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	PENGURANGAN			KIB - NERACA
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI	ASET LAINNYA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	JALAN DAN JEMBATAN	38.063.141.200,00	3.682.206.142,08	1.223.697.700,00	(34.069.531.200,00)
2	BANGUNAN AIR	260.018.970,00	2.667.135.940,00	-	-
3	INSTALASI	3.460.000,00	2.300.000,00	49.950.000,00	-
4	JARINGAN	-	-	149.850.000,00	-
JUMLAH		38.326.620.170,00	6.351.642.082,08	1.423.497.700,00	(34.069.531.200,00)

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat di sampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	SALDO AKHIR		
		KIB	ASET LAINNYA	NERACA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	JALAN DAN JEMBATAN	3.287.189.187.814,98	-	3.287.189.187.814,98
2	BANGUNAN AIR	144.820.697.346,11	3.036.529.800,00	141.784.167.546,11
3	INSTALASI	61.036.736.596,63	-	61.036.736.596,63
4	JARINGAN	44.623.878.906,75	-	44.623.878.906,75
JUMLAH		3.537.670.500.664,47	3.036.529.800,00	3.534.633.970.864,47

Penjelasan terkait dengan mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD mulai dari saldo Tahun 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan dilampiran.

Adapun saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	SKPD	2025	2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	18.748.223.590,00	17.094.054.115,00	1.654.169.475,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	39.868.255.872,65	38.573.797.963,65	1.294.457.909,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.190.112.148.395,90	3.092.757.776.906,90	97.354.371.489,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	77.011.329.227,00	73.187.546.527,00	3.823.782.700,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.700.841.000,00	1.700.841.000,00	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	778.271.697,73	778.271.697,73	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	164.921.000,00	164.921.000,00	-
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	421.761.500,00	421.761.500,00	-
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35.508.863.116,00	35.508.863.116,00	-
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	570.874.000,00	570.874.000,00	-
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.000.000,00	2.000.000,00	-
12	DINAS PERHUBUNGAN	24.874.145.202,00	23.890.130.202,00	984.015.000,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.567.676.539,00	1.567.676.539,00	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	2025	2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	166.737.220,00	166.737.220,00	-
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.185.299.817,00	1.185.299.817,00	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	70.442.000,00	70.442.000,00	-
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.070.775.769,00	6.070.775.769,00	-
18	DINAS PARIWISATA	1.559.619.130,00	1.559.619.130,00	-
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	432.728.857,00	432.728.857,00	-
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	22.249.922.116,00	22.116.114.636,00	133.807.480,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	3.178.037.650,00	3.178.037.650,00	-
22	SEKRETARIAT DPRD	867.418.500,00	867.418.500,00	-
23	INSPEKTORAT DAERAH	670.107.000,00	670.107.000,00	-
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	777.980.491,00	777.980.491,00	-
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.478.772.555,70	2.984.131.555,70	494.641.000,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	372.997.000,00	372.997.000,00	-
27	KECAMATAN DEMAK	99.889.064.190,57	93.413.574.341,58	6.475.489.848,99
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	362.540.195,10	299.250.000,00	63.290.195,10
29	KECAMATAN DEMPET	200.305.000,00	200.305.000,00	-
30	KECAMATAN WONOSALAM	-	-	-
31	KECAMATAN MIJEN	32.750.000,00	32.750.000,00	-
32	KECAMATAN GAJAH	179.912.000,00	179.912.000,00	-
33	KECAMATAN BONANG	126.501.000,00	126.501.000,00	-
34	KECAMATAN WEDUNG	102.890.000,00	102.890.000,00	-
35	KECAMATAN SAYUNG	56.549.194,83	56.549.194,83	-
36	KECAMATAN KARANGANYAR	202.618.000,00	202.618.000,00	-
37	KECAMATAN MRANGGEN	-	-	-
38	KECAMATAN GUNTUR	291.475.000,00	291.475.000,00	-
39	KECAMATAN KARANGAWEN	84.249.037,99	49.550.000,00	34.699.037,99
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	694.768.000,00	694.768.000,00	-
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200.000,00	200.000,00	-
JUMLAH		3.534.633.970.864,47	3.422.321.246.729,39	112.312.724.135,08

(5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp96.443.337.480,40 bertambah sebesar Rp9.199.663.363,40 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.243.674.117,00.

Saldo Aset Tetap Lainnya tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo per 31/12/2024	87.243.674.117,00
Penambahan	14.964.761.125,00
Belanja Modal	11.776.427.194,00
Belanja Barang / Jasa (Belanja Membentuk Aset)	426.649.700,00
Mutasi Tambah antar SKPD	2.725.662.768,00
Hibah APBN	33.094.082,00
Koreksi Tambah	
Koreksi Reklasifikasi	2.927.381,00
Pengurangan	5.765.097.761,60
Penghapusan	2.929.695.743,60
Mutasi Keluar SKPD	2.725.662.768,00
Koreksi Kurang	
Koreksi Reklasifikasi	45.699.250,00
Koreksi Aset Tak Berwujud	64.040.000,00
Saldo Per 31/12/2025	96.443.337.480,40

Penjelasan terkait dengan mutasi aset tetap lainnya per jenis barang mulai dari saldo Tahun 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Saldo awal aset tetap lainnya dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL	
		KIB	NERACA
		(Rp)	(Rp)
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	82.597.728.005,00	82.597.728.005,00
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	3.186.611.777,00	3.186.611.777,00
3	HEWAN	-	-
4	BIOTA PERAIRAN	-	-
5	TANAMAN	213.992.335,00	213.992.335,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1.245.342.000,00	1.245.342.000,00
	JUMLAH	87.243.674.117,00	87.243.674.117,00

Penambahan aset tetap lainnya dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	PENAMBAHAN				
		MODAL	BELANJA BARANG / JASA (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)	HIBAH	MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
		(Rp)	(Rp)	APBN	(Rp)	(Rp)
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	11.512.492.194,00	28.268.900,00	33.094.082,00	2.705.762.768,00	-
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	263.935.000,00			19.900.000,00	-
3	HEWAN		-		-	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	JENIS BARANG	PENAMBAHAN				
		MODAL	BELANJA BARANG / JASA (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)	HIBAH	MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
		(Rp)	(Rp)	APBN	(Rp)	(Rp)
4	BIOTA PERAIRAN		-		-	-
5	TANAMAN		-		-	2.927.381,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		-		-	-
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI		398.380.800,00		-	-
JUMLAH		11.776.427.194,00	426.649.700,00	33.094.082,00	2.725.662.768,00	2.927.381,00

Pengurangan aset tetap lainnya dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	PENGURANGAN		
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	2.929.695.743,60	2.705.762.768,00	45.699.250,00
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	19.900.000,00	64.040.000,00
3	HEWAN	-	-	-
4	BIOTA PERAIRAN	-	-	-
5	TANAMAN	-	-	-
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-
JUMLAH		2.929.695.743,60	2.725.662.768,00	109.739.250,00

Saldo aset tetap lainnya dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	JENIS BARANG	SALDO AKHIR	
		KIB	NERACA
		(Rp)	(Rp)
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	91.196.188.187,40	91.196.188.187,40
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	3.386.506.777,00	3.386.506.777,00
3	HEWAN	-	-
4	BIOTA PERAIRAN	-	-
5	TANAMAN	216.919.716,00	216.919.716,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1.643.722.800,00	1.643.722.800,00
JUMLAH		96.443.337.480,40	96.443.337.480,40

Penjelasan terkait dengan aset tetap lainnya per SKPD mulai dari saldo Tahun 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan dilampiran.

Adapun Aset Tetap Lainnya secara rinci per SKPD sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	2025	2024	BERTAMBAH / BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	91.249.884.137,40	82.631.010.158,00	8.618.873.979,40
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	114.139.982,00	75.081.900,00	39.058.082,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86.864.360,00	86.864.360,00	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	300.000,00	300.000,00	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.687.500,00	2.687.500,00	-
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	141.050.000,00	141.050.000,00	-
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-
12	DINAS PERHUBUNGAN	79.079.000,00	79.079.000,00	-
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.732.500,00	16.732.500,00	-
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.561.000,00	2.561.000,00	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.159.357.324,00	1.984.415.324,00	174.942.000,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-
18	DINAS PARIWISATA	221.493.675,00	221.493.675,00	-
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.682.443.300,00	1.284.062.500,00	398.380.800,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	277.854.781,00	274.927.400,00	2.927.381,00
22	SEKRETARIAT DPRD	292.768.000,00	292.768.000,00	-
23	INSPEKTORAT DAERAH	9.162.500,00	9.162.500,00	-
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	11.340.900,00	11.340.900,00	-
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	4.950.000,00	19.106.100,00	(14.156.100,00)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	48.452.521,00	68.815.300,00	(20.362.779,00)
27	KECAMATAN DEMAK	18.461.000,00	18.461.000,00	-
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	-	-	-
29	KECAMATAN DEMPET	-	-	-
30	KECAMATAN WONOSALAM	175.000,00	175.000,00	-
31	KECAMATAN MIJEN	-	-	-
32	KECAMATAN GAJAH	3.716.000,00	3.716.000,00	-
33	KECAMATAN BONANG	-	-	-
34	KECAMATAN WEDUNG	-	-	-
35	KECAMATAN SAYUNG	3.716.000,00	3.716.000,00	-
36	KECAMATAN KARANGANYAR	-	-	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	2025	2024	BERTAMBAH / BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
37	KECAMATAN MRANGGEN	3.716.000,00	3.716.000,00	-
38	KECAMATAN GUNTUR	3.716.000,00	3.716.000,00	-
39	KECAMATAN KARANGAWEN	3.716.000,00	3.716.000,00	-
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	-	-	-
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-
JUMLAH		96.443.337.480,40	87.243.674.117,00	9.199.663.363,40

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.553.999.130,00 berkurang sebesar Rp970.217.890,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.524.217.020,00.

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024	12.524.217.020,00
Penambahan	586.990.240,00
Atribusi	79.125.240,00
Belanja Barang/Jasa yang Membentuk Aset	196.832.000,00
Koreksi Reklasifikasi	311.033.000,00
Pengurangan	1.557.208.130,00
Koreksi Keluar KDP	1.544.400.130,00
Ekstrakom	12.808.000,00
Saldo Per 31 Desember 2025	11.553.999.130,00

Adapun mutasi penambahan dan pengurangan KDP dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	ATRIBUSI	BELANJA YANG MEMBENTUK ASET	KOREKSI MASUK	KOREKSI KELUAR	EKSTRA KOMPTABEL	SALDO AKHIR
		(Rp)						(Rp)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	22.165.000,00			-	22.165.000,00		
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.456.456.190,00	79.125.240,00		311.033.000,00	951.513.000,00	12.808.000,00	11.456.456.190,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	766.228.200,00		196.832.000,00	-	-		461.601.000,00
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19.938.930,00				19.938.930,00		-
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	49.324.000,00			-	49.324.000,00		-
6	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	210.104.700,00			-	-		210.104.700,00
JUMLAH		12.524.217.020,00	79.125.240,00	196.832.000,00	311.033.000,00	1.544.400.130,00	12.808.000,00	11.553.999.130,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Berikut rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disampaikan sebagai berikut

NO	NAMA OPD	ATRIBUSI	BELANJA BARANG/JASA YANG MEMBENTUK ASET (RP)	KOREKSI MASUK (RP)	KETERANGAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	79.125.240,00			Konsultan Perencanaan Pembanguna Gedung Kejaksaan Negeri
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			12.808.000,00	Jasa Desain Arsitektur - Pembangunan Pos Pam Gabungan Terminal Wisata Masjid Agung
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			99.572.000,00	Desain Pematusan Banjir Saluran C.71 - Wonorejo Kec. Karanganyar Kab. Demak
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			49.635.000,00	Desain Pematusan Banjir Saluran C.71 - Gajah Kanal Kab. Demak
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			49.754.000,00	Desain D.I. Sukabaru
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			99.264.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan Paket 1 drainase nurcahya
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		98.346.000,00		DED PEMBANGUNAN RTH KEC BONANG
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		98.486.000,00		PENYUSUNAN DOKUMEN DED PEMBANGUNAN RTH KEC WEDUNG
JUMLAH		79.125.240,00	196.832.000,00	311.033.000,00	

Berikut rincian pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disampaikan sebagai berikut

NO	NAMA OPD	KOREKSI KELUAR	KETERANGAN
		(Rp)	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	142.211.000,00	Atribusi Master Plan SDN 25 Bintoro
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	292.739.000,00	Atribusi DED Pembangunan Taman dan Gapura Taman Morosari Sayung
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.936.000,00	DED Jembatan di jalan Lingkar Kota Wedung
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.288.000,00	FS Pembangunan jembatan Tambakbulusan
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.936.000,00	DED Pembangunan Jembatan Tambakbulusan
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	73.450.000,00	Atribusi Pembangunan Jembatan babalan - Wedung Demak (DED)
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	98.024.000,00	DED Jalan lingkar Kota Wedung
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.929.000,00	DED Pembangunan Jembatan Betokan - Singorejo
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.808.000,00	Jasa Desain Arsitektur - Pembangunan Pos Pam Gabungan Terminal Wisata Masjid Agung
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19.938.930,00	DED TENIS LAPANGAN BM 2024
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	55.284.900,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA DI LINGKUNGAN EX RSKW
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	61.197.400,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAMAN DAN GAPURA KADILANGU
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.596.400,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli (konsultasi perencanaan) DED KAWASAN WISATA KADILANGU Th.2021
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.156.400,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli (konsultasi perencanaan) DED TAMAN PATIH WONOSALAM Th.2021

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	KOREKSI KELUAR	KETERANGAN
		(Rp)	
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.625.000,00	Belanja jasa tenaga ahli (DED Taman Blambangan Demak)2021
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	92.599.100,00	Belanja DED Taman Botorejo Kadilangu Demak Th 2021
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	49.324.000,00	PEMBAYARAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP
18	RSUD SUNAN KALIJAGA	22.165.000,00	Perencanaan Doorlop Penyakit Dalam, Gd.Sakura, Gd.Radiologi dan Farmasi
JUMLAH		1.557.208.130,00	

Berikut rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	NAMA OPD	NILAI KDP PER 31 DESEMBER 2025 (Rp)	KETERANGAN	LANJUT/TIDAK	TARGET SELESAI
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.678.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanLingkungan Kantor Kecamatan Wedung Belanja Modal SMT II 2021 (9 buku)	LANJUT	2026
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.790.000,00	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PAVIGISASI HALAMAN KECAMATAN KEBONAGUNG BM SMT I 2021 (9 buku)	LANJUT	2026
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.790.000,00	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAPURA DAN PAGAR KANTOR KECAMATAN DEMPET (9 buku)	LANJUT	2026
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.310.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Gajah Belanja Modal SMT II 2021 (9 buku)	LANJUT	2026
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	488.891.000,00	Pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Karanganyar. Konsultansi Perencanaan Rp. 11770000; Pengawasan Rp. 7750000; ATK Rp. 1772000; Honor Rp. 2200000	LANJUT	2026
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.320.000,00	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN DEMAK BM SMT I 2021 (9 buku)	LANJUT	2026
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.343.000,00	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN SETDA BM SMT I 2021 (9 buku)	LANJUT	2026
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.555.000,00	DED Daerah Irigasi Sukabaru	LANJUT	2026
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.847.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Cangkring Wonorejo Kec Karanganyar BM SMT I 2021 (9 buku)	LANJUT	2026
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	44.227.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Tambakbulusan - Tambakpintu BM SMT I 2021 (9 buku)	LANJUT	2026
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.307.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Serangan ruas Bonang-Ngawen (Belanja Modal SMT I 2020)	LANJUT	2026

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	NILAI KDP PER 31 DESEMBER 2025 (Rp)	KETERANGAN	LANJUT/TIDAK	TARGET SELESAI
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.533.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Trimulyo (Lanjutan) (Belanja Modal SMT I 2020)	LANJUT	2026
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.461.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gorong - gorong Saluran Sekunder Kauman - jl Bhayangkara (Belanja Modal SMT I 2020)	LANJUT	2026
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.170.000,00	Atribusi Pembangunan Jembatan Babalan Wedung Demak (FS)	LANJUT	2026
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.186.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan jembatan Sidorejo-Brambang (Belanja Modal SMT I 2020)	LANJUT	2026
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.480.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Dempet-Mintreng (Belanja Modal SMT I 2020)	LANJUT	2026
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.066.942.200,00	Pembangunan Jembatan Trimulyo Kali Tuntang Kec. Guntur (BELANJA MODAL 2017)	LANJUT	2026
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.094.658.000,00	Pembangunan Jembatan Trimulyo Kali Tuntang Kec. Guntur (Lanjutan)	LANJUT	2026
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.988.913.100,00	Pembangunan Jembatan Trimulyo (Lanjutan). Konsultansi Perencanaan Rp. 44792000; Pengawasan Rp. 29798000; SPPD Rp. 4000000; ATK Rp. 6967100; Penggandaan Rp. 2750000	LANJUT	2026
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.607.010,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Paket 1 drainase nurcahya	LANJUT	2029
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.617.000,00	Jasa Konsultansi Penyusunan e-PAKSI	LANJUT	2029
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.449.390,00	Dokumen studi desain pematusan banjir saluran C70	LANJUT	2029
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	48.483.690,00	Saluran C71 Wonorejo	LANJUT	2029
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.116.390,00	Studi Desain Pematusan Banjir Saluran C.71 - Gajah Kanal Kab. Demak	LANJUT	2029
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.268.410,00	Desain D.I. Sukabaru	LANJUT	2029
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.808.000,00	Jasa Desain Arsitektur - Pembangunan Pos Pam Gabungan Terminal Wisata Masjid Agung	LANJUT	2030
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.572.000,00	DED Penataan Kawasan Tembiring Kabupaten Demak	LANJUT	2030

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	NILAI KDP PER 31 DESEMBER 2025 (Rp)	KETERANGAN	LANJUT/TIDAK	TARGET SELESAI
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.635.000,00	DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Demak	LANJUT	2030
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.754.000,00	Jasa Desain Arsitektur - Review Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Mijen	LANJUT	2030
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	79.125.240,00	Konsultan Perencanaan Pembanguna Gedung Kejaksaan Negeri	LANJUT	2030
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.264.000,00	DED Pembangunan Gedung Perkantoran Dinas Kabupaten Demak	LANJUT	2030
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.994.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli (konsultansi perencanaan) DED TAMAN PUTERI CEMPO DEMAK Th.2021	LANJUT	2026
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.724.000,00	Belanja jasa tenaga ahli (DED Taman Pahlawan Demak) 2021	LANJUT	2026
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	69.051.000,00	DED TPA BERAHAN KULON KEC. WEDUNG	LANJUT	2026
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	98.346.000,00	DED PEMBANGUNAN RTH KEC BONANG	LANJUT	2030
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	98.486.000,00	PENYUSUNAN DOKUMEN DED PEMBANGUNAN RTH KEC WEDUNG	LANJUT	2030
37	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	49.725.000,00	masih dalam bentuk DED	LANJUT	2026
38	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	60.846.000,00	Perencanaan Pemeliharaan, Pembangunan/Revitalisasi Pasar Daerah (jasa konsultansi DED Pasar Hewan Karangtengah)	LANJUT	2026
39	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	99.533.700,00	Jasa Konsultasi DED Rev Pembangunan Pasar Sayung Kec. Sayung	LANJUT	2026
40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.678.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan PenataanLingkungan Kantor Kecamatan Wedung Belanja Modal SMT II 2021 (9 buku)	LANJUT	2026
JUMLAH		11.553.999.130,00			

Adapun rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD dapat disampaikan sebagai berikut.

NO	NAMA SKPD	2025	2024	TAMBAH/ (KURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS KESEHATAN DAERAH	-	22.165.000,00	(22.165.000,00)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.882.293.430,00	11.456.456.190,00	(574.162.760,00)
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	461.601.000,00	766.228.200,00	(304.627.200,00)
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	19.938.930,00	(19.938.930,00)
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	49.324.000,00	(49.324.000,00)



NO	NAMA SKPD	2025	2024	TAMBAH/ (KURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
6	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	210.104.700,00	210.104.700,00	-
JUMLAH		11.553.999.130,00	12.524.217.020,00	(970.217.890,00)

(7) **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.216.477.439.412,40 bertambah sebesar sebesar Rp343.011.843.239,19 dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.873.465.596.173,21.

Pemerintah Kabupaten Demak sejak Tahun 2016 melakukan perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan dengan aplikasi SIMDA BMD dengan perhitungan bulanan.

Penambahan/pengurangan akumulasi penyusutan Tahun 2025 dipengaruhi transaksi beban penyusutan, koreksi aset tetap yang menyebabkan koreksi akumulasi penyusutan, reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain sehingga mengurangi akumulasi penyusutan, dan penghapusan aset tetap yang mempengaruhi pengurangan akumulasi penyusutan yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal 2025	(2.873.465.596.173,21)
Beban penyusutan	(354.802.381.724,50)
Koreksi keluar	1.781.685.930,00
Mutasi keluar	1.640.048.630,00
Koreksi masuk	(56.894.086,00)
Mutasi masuk	(1.640.048.630,00)
Penghapusan aset	10.065.746.641,31
Saldo akhir 2025	(3.216.477.439.412,40)

Secara rinci penjelasan hal-hal yang berpengaruh pada akumulasi penyusutan aset tetap Tahun 2025 disajikan dalam lampiran Catatan atas laporan keuangan.

Adapun akumulasi penyusutan aset tetap Tahun 2025 terdiri dari.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
		(Rp)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(815.585.427.716,44)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(313.643.444.495,71)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.087.248.567.200,25)
JUMLAH		(3.216.477.439.412,40)



Adapun secara rinci akumulasi penyusutan aset tetap per SKPD sebagai berikut.

NO	OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(373.271.755.976,02)	(337.096.750.296,02)	(36.175.005.680,00)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	(448.929.122.213,97)	(396.983.626.187,97)	(51.945.496.026,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(1.968.069.839.774,00)	(1.757.902.125.854,00)	(210.167.713.920,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(32.530.150.537,00)	(25.934.765.806,00)	(6.595.384.731,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(10.039.717.656,00)	(9.739.689.130,00)	(300.028.526,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(25.287.321.253,00)	(16.768.254.392,00)	(8.519.066.861,00)
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(5.184.456.801,32)	(4.698.659.766,32)	(485.797.035,00)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	(6.480.679.676,00)	(6.264.177.649,00)	(216.502.027,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(39.414.240.006,00)	(34.502.317.301,00)	(4.911.922.705,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(13.117.717.030,33)	(12.086.602.613,83)	(1.031.114.416,50)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(11.487.407.360,83)	(10.138.151.970,83)	(1.349.255.390,00)
12	DINAS PERHUBUNGAN	(19.528.303.779,10)	(17.835.295.895,10)	(1.693.007.884,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(13.589.154.872,00)	(12.988.665.149,00)	(600.489.723,00)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(6.413.179.155,00)	(4.947.164.531,00)	(1.466.014.624,00)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	(10.965.734.131,32)	(9.052.148.242,32)	(1.913.585.889,00)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(5.765.220.232,00)	(5.340.707.636,00)	(424.512.596,00)
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(14.075.577.436,00)	(13.824.162.676,00)	(251.414.760,00)
18	DINAS PARIWISATA	(6.555.642.074,82)	(5.950.518.019,82)	(605.124.055,00)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(9.678.169.697,83)	(8.925.793.699,83)	(752.375.998,00)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	(22.131.104.384,00)	(21.854.166.281,00)	(276.938.103,00)
21	SEKRETARIAT DAERAH	(51.059.735.050,32)	(48.776.962.420,32)	(2.282.772.630,00)
22	SEKRETARIAT DPRD	(15.544.973.841,00)	(13.898.299.634,00)	(1.646.674.207,00)
23	INSPEKTORAT DAERAH	(6.696.384.958,83)	(6.292.916.766,83)	(403.468.192,00)
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	(4.318.248.759,00)	(3.502.813.549,00)	(815.435.210,00)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	(11.706.652.806,00)	(12.049.225.094,31)	342.572.288,31
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(7.783.345.567,66)	(7.561.107.157,66)	(222.238.410,00)
27	KECAMATAN DEMAK	(55.811.387.054,02)	(49.248.312.660,02)	(6.563.074.394,00)
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	(1.221.717.577,00)	(1.168.736.751,00)	(52.980.826,00)
29	KECAMATAN DEMPET	(1.334.805.169,63)	(1.240.423.473,63)	(94.381.696,00)
30	KECAMATAN WONOSALAM	(1.262.068.861,18)	(1.156.682.944,18)	(105.385.917,00)
31	KECAMATAN MIJEN	(1.063.880.924,56)	(999.542.029,56)	(64.338.895,00)
32	KECAMATAN GAJAH	(1.449.773.879,00)	(1.339.728.011,00)	(110.045.868,00)
33	KECAMATAN BONANG	(1.502.762.965,00)	(1.411.228.106,00)	(91.534.859,00)
34	KECAMATAN WEDUNG	(1.520.887.935,28)	(1.430.564.359,28)	(90.323.576,00)
35	KECAMATAN SAYUNG	(1.720.194.106,00)	(1.566.202.346,00)	(153.991.760,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	(1.270.272.849,00)	(1.149.767.492,00)	(120.505.357,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
37	KECAMATAN MRANGGEN	(1.329.701.662,00)	(1.245.146.596,00)	(84.555.066,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	(1.597.176.507,00)	(1.433.672.746,00)	(163.503.761,00)
39	KECAMATAN KARANGAWEN	(913.792.894,38)	(887.122.064,38)	(26.670.830,00)
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	(1.813.779.162,00)	(1.673.448.398,00)	(140.330.764,00)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(3.041.402.837,00)	(2.599.950.477,00)	(441.452.360,00)
JUMLAH		(3.216.477.439.412,40)	(2.873.465.596.173,21)	(343.011.843.239,19)

(8) Nilai Buku Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.797.471.353.228,01 berkurang sebesar Rp65.395.161.631,42 dibandingkan posisi Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.862.866.514.859,43.

Adapun rincian nilai buku aset tetap dapat dirinci sebagai berikut.

NO	SKPD	ASET TETAP	AKUMULASI	NILAI BUKU
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.175.789.247.750,58	(373.271.755.976,02)	802.517.491.774,56
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	1.004.472.040.915,69	(448.929.122.213,97)	555.542.918.701,72
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.246.269.073.619,90	(1.968.069.839.774,00)	2.278.199.233.845,90
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	481.894.032.579,60	(32.530.150.537,00)	449.363.882.042,60
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.148.207.619,00	(10.039.717.656,00)	5.108.489.963,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	41.987.654.612,00	(25.287.321.253,00)	16.700.333.359,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.735.582.070,32	(5.184.456.801,32)	11.551.125.269,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	11.654.493.176,05	(6.480.679.676,00)	5.173.813.500,05
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	119.454.754.297,00	(39.414.240.006,00)	80.040.514.291,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23.482.557.067,33	(13.117.717.030,33)	10.364.840.037,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	27.592.085.085,12	(11.487.407.360,83)	16.104.677.724,29
12	DINAS PERHUBUNGAN	62.828.253.613,34	(19.528.303.779,10)	43.299.949.834,24
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.892.903.361,00	(13.589.154.872,00)	6.303.748.489,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	21.848.317.157,00	(6.413.179.155,00)	15.435.138.002,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	85.343.200.006,55	(10.965.734.131,32)	74.377.465.875,23
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.744.146.499,00	(5.765.220.232,00)	7.978.926.267,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.400.101.622,00	(14.075.577.436,00)	13.324.524.186,00
18	DINAS PARIWISATA	20.673.826.490,04	(6.555.642.074,82)	14.118.184.415,22
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	23.269.219.663,79	(9.678.169.697,83)	13.591.049.965,96
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	61.563.728.670,17	(22.131.104.384,00)	39.432.624.286,17
21	SEKRETARIAT DAERAH	87.582.221.508,84	(51.059.735.050,32)	36.522.486.458,52

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	ASET TETAP	AKUMULASI	NILAI BUKU
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
22	SEKRETARIAT DPRD	34.276.658.362,35	(15.544.973.841,00)	18.731.684.521,35
23	INSPEKTORAT DAERAH	19.126.157.821,83	(6.696.384.958,83)	12.429.772.863,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	16.548.115.029,00	(4.318.248.759,00)	12.229.866.270,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	27.565.796.309,70	(11.706.652.806,00)	15.859.143.503,70
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.366.739.377,66	(7.783.345.567,66)	9.583.393.810,00
27	KECAMATAN DEMAK	252.069.791.548,52	(55.811.387.054,02)	196.258.404.494,50
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	9.738.907.599,00	(1.221.717.577,00)	8.517.190.022,00
29	KECAMATAN DEMPET	3.063.047.432,63	(1.334.805.169,63)	1.728.242.263,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	2.245.501.615,18	(1.262.068.861,18)	983.432.754,00
31	KECAMATAN MIJEN	1.934.987.812,56	(1.063.880.924,56)	871.106.888,00
32	KECAMATAN GAJAH	3.157.926.880,00	(1.449.773.879,00)	1.708.153.001,00
33	KECAMATAN BONANG	2.928.681.548,00	(1.502.762.965,00)	1.425.918.583,00
34	KECAMATAN WEDUNG	2.954.007.479,28	(1.520.887.935,28)	1.433.119.544,00
35	KECAMATAN SAYUNG	8.141.986.215,00	(1.720.194.106,00)	6.421.792.109,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	2.415.874.894,00	(1.270.272.849,00)	1.145.602.045,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	2.555.717.250,00	(1.329.701.662,00)	1.226.015.588,00
38	KECAMATAN GUNTUR	4.610.594.725,00	(1.597.176.507,00)	3.013.418.218,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	7.047.215.130,38	(913.792.894,38)	6.133.422.236,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	3.967.631.930,00	(1.813.779.162,00)	2.153.852.768,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.607.806.296,00	(3.041.402.837,00)	566.403.459,00
Jumlah		8.013.948.792.640,41	(3.216.477.439.412,40)	4.797.471.353.228,01

Perbandingan nilai buku Tahun 2025 dengan Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	TAMBAH/(KURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	802.517.491.774,56	768.881.963.575,66	33.635.528.198,90
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	555.542.918.701,72	558.079.348.893,72	(2.536.430.192,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.278.199.233.845,90	2.387.932.870.584,90	(109.733.636.739,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	449.363.882.042,60	449.609.204.364,60	(245.322.322,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.108.489.963,00	5.758.935.819,00	(650.445.856,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.700.333.359,00	20.217.878.597,00	(3.517.545.238,00)
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.551.125.269,00	10.668.572.802,00	882.552.467,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	5.173.813.500,05	5.430.961.173,05	(257.147.673,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	80.040.514.291,00	83.630.127.999,00	(3.589.613.708,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.364.840.037,00	10.852.244.455,50	(487.404.418,50)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.104.677.724,29	17.114.851.950,10	(1.010.174.225,81)
12	DINAS PERHUBUNGAN	43.299.949.834,24	34.381.228.875,24	8.918.720.959,00



NO	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	TAMBAH/(KURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.303.748.489,00	5.780.048.523,00	523.699.966,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.435.138.002,00	16.681.992.626,00	(1.246.854.624,00)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	74.377.465.875,23	72.441.517.045,23	1.935.948.830,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.978.926.267,00	7.911.928.966,00	66.997.301,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.324.524.186,00	14.875.288.997,00	(1.550.764.811,00)
18	DINAS PARIWISATA	14.118.184.415,22	14.375.152.735,22	(256.968.320,00)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13.591.049.965,96	14.638.269.489,96	(1.047.219.524,00)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	39.432.624.286,17	34.551.492.813,17	4.881.131.473,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	36.522.486.458,52	35.975.339.864,52	547.146.594,00
22	SEKRETARIAT DPRD	18.731.684.521,35	19.548.722.926,35	(817.038.405,00)
23	INSPEKTORAT DAERAH	12.429.772.863,00	10.531.210.102,00	1.898.562.761,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	12.229.866.270,00	12.334.762.781,00	(104.896.511,00)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	15.859.143.503,70	15.351.723.567,70	507.419.936,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.583.393.810,00	9.950.261.833,00	(366.868.023,00)
27	KECAMATAN DEMAK	196.258.404.494,50	195.878.307.869,51	380.096.624,99
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	8.517.190.022,00	1.917.818.849,00	6.599.371.173,00
29	KECAMATAN DEMPET	1.728.242.263,00	1.679.883.259,00	48.359.004,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	983.432.754,00	1.231.417.221,00	(247.984.467,00)
31	KECAMATAN MIJEN	871.106.888,00	871.118.283,00	(11.395,00)
32	KECAMATAN GAJAH	1.708.153.001,00	1.732.530.569,00	(24.377.568,00)
33	KECAMATAN BONANG	1.425.918.583,00	1.372.365.287,00	53.553.296,00
34	KECAMATAN WEDUNG	1.433.119.544,00	1.356.496.462,00	76.623.082,00
35	KECAMATAN SAYUNG	6.421.792.109,00	6.542.887.818,00	(121.095.709,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	1.145.602.045,00	1.095.514.402,00	50.087.643,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	1.226.015.588,00	1.247.883.404,00	(21.867.816,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	3.013.418.218,00	3.083.211.679,00	(69.793.461,00)
39	KECAMATAN KARANGAWEN	6.133.422.236,00	4.586.552.696,00	1.546.869.540,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	2.153.852.768,00	2.267.396.982,00	(113.544.214,00)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	566.403.459,00	497.228.719,00	69.174.740,00
JUMLAH		4.797.471.353.228,01	4.862.866.514.859,43	(65.395.161.631,42)

c. Properti Investasi

Sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak, menyebutkan bahwa :

a. Definisi Properti Investasi

- 1) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:



- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif (properti yang digunakan sendiri); atau
 - b) Dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas.
 - 3) Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
 - 4) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - 5) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
 - 6) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

b. Pengakuan Properti Investasi

- 1) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - d) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- 2) Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi.
- 3) Entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut:
 - a) Dapat dijual terpisah, entitas mencatat aset tersebut secara terpisah.
 - b) Tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- 4) Entitas pemerintah menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan property tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian.
- 5) Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan digunakan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi), pengakuan properti investasinya :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a) Tidak diakui sebagai properti investasi dalam laporan keuangan konsolidasi, karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi.
- b) Diakui sebagai properti investasi dalam laporan keuangan individual entitas yang menyewakan.
- 6) Apabila properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka properti investasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas maka aset Pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan properti investasi adalah sebagai berikut:

Uraian Properti Investasi	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Properti Investasi Tanah	48.351.610.707,00	-	48.049.460.707,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	281.301.965.829,88	(49.026.244.905,20)	232.275.720.924,68
JUMLAH	329.653.576.536,88	(47.301.453.061,20)	280.627.331.631,68

1. Properti Investasi Tanah

Properti investasi berupa tanah sebanyak 294 bidang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah; Bagian Umum Sekretariat Daerah; Dinas Pariwisata; Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM; Kelurahan Betokan; Kelurahan Bintoro; Kelurahan Kalicilik; Kelurahan Mangunjiwan; Kelurahan Singorejo dan UPT Balai Benih (Dinas Pertanian), dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp48.351.610.707,00.

Penjelasan terkait dengan Properti Investasi berdasarkan jenis asetnya mulai dari saldo 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

No	NAMA OPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN			SALDO AKHIR
			KOREKSI	MUTASI	PENGHAPUSAN	KOREKSI	
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.224.000.000,00					2.224.000.000,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	324.400.000,00					324.400.000,00
3	DINAS PARIWISATA	2.710.300.000,00					2.710.300.000,00
4	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	14.942.215.000,00					14.942.215.000,00
5	KECAMATAN DEMAK	26.705.145.707,00					26.705.145.707,00
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.143.400.000,00	302.150.000,00				1.445.550.000,00
	TOTAL	48.049.460.707,00	302.150.000,00	-	-	-	48.351.610.707,00

Berikut Rincian Properti Investasi Tanah.

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	620.000.000,00	EX KP2JGG
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tanah Kering Lainnya	1.604.000.000,00	SMA Pembangunan MRANGGEN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA (Rp)	KETERANGAN
3	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Apotik	50.400.000,00	Apotik
4	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	105.600.000,00	Golkar
5	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	100.400.000,00	PDAM
6	SEKRETARIAT DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	68.000.000,00	PDAM
7	DINAS PARIWISATA	Tanah Lapangan Parkir Konblok	1.510.300.000,00	Parkir Puja sera (untuk kios)
8	DINAS PARIWISATA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.200.000.000,00	Tanah Keramaian Grebek Besar Tembiring Ds. Jogoloyo Kec. Wonosalam
9	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	188.125.000,00	Pasar Brambang
10	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	21.264.000,00	Ex Kantor Koperasi
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	161.000.000,00	Tanah Pasar Sepeda Mranggen
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	585.600.000,00	Gedung Garuda Jl. Raya Demak Kudus Kel. Bintoro Kec. Demak
13	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	1.285.000.000,00	Pasar Mranggen
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	71.000.000,00	DPUK Mranggen DS. Bandungrejo Kec. Mranggen
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	312.600.000,00	Tanah Pasar Buyaran
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	121.407.000,00	Pasar Hewan Banjarsari
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.800.000,00	Ex- Dep Kop
18	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	21.744.000,00	Bekas KUD Plongkowati
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	3.103.000.000,00	Pasar Bintoro Dan Joglo No Hp 56
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	1.914.800.000,00	Pasar Sayung Lama
21	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	86.940.000,00	Perluasan Pasar Wonopolo
22	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	305.380.000,00	Pasar Dempet / Pasar Wonopolo
23	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	44.209.765,00	Tanah Pasar Gablok
24	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	5.288.498,00	Tanah Pasar Gablok
25	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	85.501.737,00	Tanah Pasar Gablok
26	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	375.000.000,00	Pasar Karaganyar
27	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	236.400.000,00	Pasar Gading
28	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	120.000.000,00	Pasar Sriwulan
29	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	550.000.000,00	Tanah Pasar Gajah
30	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	3.407.055.000,00	Tanah Pasar Brambang (Terkena Pembangunan Untuk Aset Yang Dimitrakan Seluas 480.32 M2)
31	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	161.000.000,00	Pasar Hewan Mranggen
32	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Bangunan Pasar	441.600.000,00	Pasar Sayung BARU
33	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	1.327.500.000,00	Pasar Bintoro
34	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	45.974.500,00	Untuk Agro Jambu
35	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	27.685.000,00	Untuk Agro Jambu
36	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	70.195.000,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
37	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	70.195.250,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA (Rp)	KETERANGAN
38	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	9.895.550,00	Blok Putat (Hampanan 1)
39	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	75.075.000,00	Blok Putat (Hampanan 6)
40	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	52.545.350,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
41	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	41.827.500,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
42	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	46.689.500,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
43	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	42.900.000,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
44	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	12.176.450,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
45	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	20.100.000,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
46	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	374.969.050,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
47	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	208.243.750,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
48	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	12.799.500,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
49	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	36.200.000,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
50	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	120.329.000,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
51	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	45.960.200,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
52	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	39.615.000,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
53	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	9.520.000,00	Persil 70-71/Blok Cinde (Hampanan 2)
54	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	49.599.550,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
55	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	36.250.000,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
56	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	30.035.000,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
57	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	31.890.000,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
58	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	216.016.500,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
59	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	130.891.700,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 1)
60	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	126.096.373,00	Blok Putat (Hampanan 4)
61	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	268.445.350,00	Blok Kendal Gede (Hampanan 2)
62	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	408.900.674,00	Blok Pagir (Hampanan 1)
63	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	303.872.000,00	Persil 19/Blok Putat (Hampanan 5)
64	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	438.336.000,00	Persil 16/Blok Putat (Hampanan 3)
65	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	231.040.000,00	Persil 24/Blok Putat (Hampanan 7)
66	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	144.000.000,00	Persil 63/Blok Cinde (Hampanan 5)
67	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	687.680.000,00	Persil 16/Blok Putat (Hampanan 8)
68	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	740.352.000,00	Persil 50/Blok Weden (Hampanan 6)
69	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	145.192.000,00	Persil 45/Blok Weden (Hampanan 7)
70	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	238.400.000,00	Persil 67/Blok Cinde (Hampanan 3)
71	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	108.992.000,00	Persil 65/Blok Cinde (Hampanan 4)
72	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	25.725.000,00	Blok Putat (Hampanan 2)
73	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	152.495.200,00	Persil 59/Blok Cinde (Hampanan 1)
74	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	79.375.000,00	Eks Bengkok Carik (Persil 366)
75	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	97.520.000,00	Eks Bengkok Lurah (Persil 276)
76	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	44.960.000,00	Eks Kasrani (Persil 14)
77	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	29.365.000,00	Eks Modin Djaelan (Persil 14)
78	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	53.470.000,00	Eks Bondo Desa (Persil 42 Dan 43) KEBUN BIBIT HORTIKULTURA
79	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	24.400.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 145)
80	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	153.850.000,00	Eks Bayan Chasoena (Persil 17) Penggabungan Nilai/Harga Persil 17 (116.350.000 Dan Persil 14 (37.500.000)
81	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	14.365.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 100)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA (Rp)	KETERANGAN
82	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	69.230.000,00	Eks Modin Zuhri (Persil 65)
83	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	64.630.000,00	Eks Bayan Yusuf (Persil 23)
84	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	35.380.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 86)
85	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	13.830.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 88)
86	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	14.025.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 81)
87	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	25.780.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 84)
88	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	10.665.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 47)
89	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	23.780.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 90)
90	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	11.290.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 51)
91	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	29.000.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 55)
92	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	15.750.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 56)
93	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	13.230.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 59)
94	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	14.365.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 61)
95	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	14.685.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 66)
96	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	13.385.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 67)
97	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	15.180.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 70)
98	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	105.000.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 2)
99	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	56.635.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 9)
100	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	44.500.000,00	Eks Modin Chamdan (Persil 4)
101	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	35.000.000,00	Eks Kamituwo Kusran (Persil 97)
102	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	66.750.000,00	Eks Bayan Slamet (Persil 154)
103	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	38.440.000,00	Eks Bayan Slamet (Persil 155) 7. S: 6°53'16.62", E: 110°38'59.55", 8. S: 6°53'19.93", E: 110°38'58.73, 9. S: 6°53'20.08", E: 110°38'58.81"
104	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	46.050.000,00	Persil 98
105	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	47.100.000,00	Persil 99
106	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	17.190.000,00	Eks Ulu-Ulu Hadi (Persil 96)
107	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	71.000.000,00	Eks Bekel Sul Khan (Persil 102)
108	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	192.500.000,00	Eks Bengkok Carik (Persil 101)
109	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	64.500.000,00	Eks Bayan Purnomo (Persil 115) Penggabungan Luas Dan Harga Persil 115 Luas 4.000 M2 Harga 20.000.000 Dan Persil 115 Luas 4.000 M2 Harga 20.000.000 Dan Persil 115 Luas 4.900 M2 Harga 24.500.000 7. S: 6°53'11.50", T: 110°38'16.14"
110	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	111.060.000,00	Persil 363
111	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	110.750.000,00	Eks Bengkok Carik (Persil 111) 7. S: 6°53'11.92", E: 110°38'6.44", 8. S: 6°53'11.75", E: 110°38'4.25"
112	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	12.540.000,00	Eks Bengkok Carik (Persil 361)
113	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	10.000.000,00	Eks Bayan Yusuf (Persil 362)
114	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	11.330.000,00	Bong/Gang Buntu (Persil 114)
115	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	336.600.000,00	Persil 151
116	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	120.600.000,00	Persil 148
117	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	239.400.000,00	Persil 150
118	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	192.600.000,00	Persil 156
119	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	556.200.000,00	Persil 143
120	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	181.800.000,00	Persil 144

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA (Rp)	KETERANGAN
121	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	374.400.000,00	Persil 147
122	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	26.000.000,00	Persil 38
123	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	26.750.000,00	Eks Bondo Sesa (Persil 291)
124	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	65.155.000,00	Eks Modin Saeri (persil 153)
125	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	24.690.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 140)
126	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	26.250.000,00	Eks Bondo Deso (persil 141)
127	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	12.000.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 40)
128	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	9.220.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 32)
129	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	10.500.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 36)
130	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	7.965.000,00	Eks Modin Chamdan (Persil 39)
131	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	18.125.000,00	Eks Modin Chamdan (Persil 30)
132	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	6.560.000,00	Eks Modin Chamdan (Persil 35)
133	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	3.000.000,00	Eks Modin Chamdan (Persil 37)
134	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	269.640.000,00	Persil 283
135	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	118.800.000,00	Persil 294
136	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	4.845.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 269)
137	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	29.250.000,00	Persil 284
138	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	34.845.000,00	Eks Modin Saeri (Persil 293)
139	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	25.780.000,00	Eks Bondo Desa (Persil 302)
140	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	8.500.000,00	Eks Bondo Desa (Persil 304)
141	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	367.200.000,00	Persil 298
142	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	4.845.000,00	Eks Bondo Desa (Persil 295)
143	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	6.770.000,00	Persil 299
144	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	11.095.000,00	Eks Bondo Desa (Persil 290)
145	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	7.655.000,00	Eks Bondo Desso (Persil 279)
146	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	1.000.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 280)
147	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	30.600.000,00	Persil 297
148	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	10.470.000,00	Eks Bondo Desa (Persil 296)
149	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	125.000.000,00	Persil 78
150	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	186.000.000,00	Persil 79
151	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	41.000.000,00	Persil 93
152	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	35.000.000,00	Persil 6
153	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	35.000.000,00	Persil 1
154	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	113.000.000,00	Persil 3
155	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	98.110.000,00	Persil 73
156	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	61.500.000,00	Eks Modin Djaelan (Persil 64)
157	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	7.850.000,00	Eks Sofwan Edi Sanuri (Persil 6)
158	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	67.655.000,00	Eks Bayan Purnomo (Persil 18)
159	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	17.555.000,00	Eks Bayan Chasoena (Persil 15)
160	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	38.070.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 3)
161	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	75.750.000,00	Eks Modin Sulkan Rois (Persil 75)
162	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	100.250.000,00	Eks Kamituwo Kusran (Persil 26)
163	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	191.000.000,00	Eks Bengkok Lurah (Persil 25)
164	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	457.250.000,00	Eks Bengkok Lurah (Persil 20) 7. S: 6°51'57.35", E: 110°38'2.40", 8. S: 6°52'3.09", E: 110°38'4.48"
165	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	297.000.000,00	Persil 77

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA (Rp)	KETERANGAN
166	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	6.325.000,00	Persil 282
167	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	7.750.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 68)
168	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	256.750.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 53) 7. S: 6°51'28.98", E: 110°39'44.43", 8. S: 6°51'28.17", E: 110°39'43.04"
169	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	30.470.000,00	Eks Bondo Desa (Persil 307)
170	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	8.280.000,00	Eks Bondo Desa (Persil 292)
171	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	7.655.000,00	Eks Bondo Deso (Persil 285)
172	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	22.250.000,00	Eks Pens Janda Chasoena (Persil 33)
173	KECAMATAN DEMAK	Tanah Kampung	126.484.000,00	YUDHAMENGGALA KEL. BINTORO
174	KECAMATAN DEMAK	Tanah Kampung	360.795.000,00	YUDAMENGGALA KEL. BINTORO
175	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	7.040.000,00	Eks Modin Sulkan Rois (Persil 364)
176	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	13.750.000,00	Rowo Celeng/Tempuran (Persil 50)
177	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	105.625.000,00	Eks Bengkok Lurah (Persil 149) 7. S: 6°53'20.24", E: 110°38'59.74", 8. S: 6°53'20.31", E: 110°38'59.89"
178	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	105.500.000,00	Eks Bayan Djoeri (Persil 27)
179	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	100.250.000,00	Eks Bayan Santoso (Persil 74)
180	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	17.750.000,00	Eks Bayan Djoeri (Persil 5)
181	KECAMATAN DEMAK	Tanah Kampung	59.565.000,00	Tanah Depan Makam Mbah Dayun
182	KECAMATAN DEMAK	Tanah Kampung	30.176.000,00	YUDAMENGGALA
183	KECAMATAN DEMAK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	150.000.000,00	SMK
184	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	40.000.000,00	Tanah Pertanian
185	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	150.000.000,00	Tanah Pertanian
186	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	90.000.000,00	Tanah Pertanian
187	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	60.000.000,00	Tanah Pertanian
188	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	60.000.000,00	Tanah Pertanian
189	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	50.000.000,00	Tanah Pertanian
190	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	20.000.000,00	PERTANIAN
191	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	20.000.000,00	PERTANIAN
192	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	50.000.000,00	Tanah Pertanian
193	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	20.000.000,00	Tanah Pertanian
194	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	20.000.000,00	PERTANIAN
195	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	300.000.000,00	Tanah Pertanian
196	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	200.000.000,00	Tanah Pertanian
197	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	20.000.000,00	Tanah Pertanian
198	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	90.000.000,00	Tanah Pertanian
199	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	70.000.000,00	Tanah Pertanian
200	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	5.000.000,00	Tanah Pertanian
201	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	45.000.000,00	Tanah Pertanian
202	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	20.000.000,00	Tanah Pertanian
203	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	40.000.000,00	Tanah Pertanian
204	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	40.000.000,00	Tanah Pertanian
205	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	200.000.000,00	Tanah Pertanian
206	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	100.000.000,00	Tanah Pertanian
207	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	60.000.000,00	Tanah Pertanian

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA (Rp)	KETERANGAN
208	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	120.000.000,00	Tanah Pertanian
209	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	400.000.000,00	Tanah Pertanian
210	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	300.000.000,00	Tanah Pertanian
211	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	400.000.000,00	Tanah Pertanian
212	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	134.272.000,00	PERTANIAN
213	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	19.985.000,00	PERSIL 31 7.S:6°53'14.67"S,E:110°36'50.01"E
214	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	33.310.000,00	PERSIL 5
215	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	9.545.144,00	PERSIL 33
216	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	23.700.984,00	PERSIL 59 7.S:6°53'45.72"S,E:110°37'22.75"E
217	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	55.480.836,00	PERSIL 59 7.S:6°53'45.72"S,E:110°37'22.75"E
218	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	7.165.393,00	PERSIL 33
219	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	26.526.000,00	PERSIL 104
220	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	22.522.000,00	PERSIL S 28
221	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	146.500.000,00	PERSIL 25
222	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	211.500.000,00	PERSIL S 27
223	KECAMATAN DEMAK	Tanah Bangunan Gudang	3.652.596,00	PERSIL 79
224	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	40.091.366,00	PERSIL 38
225	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	6.415.310,00	PERSIL 38
226	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	38.394.227,00	PERSIL 38
227	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	156.000.000,00	PERSIL24
228	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	73.000.000,00	PERSIL 40
229	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	112.324.097,00	PERSIL 38
230	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	5.864.463,00	PERSIL 34
231	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	52.318.180,00	PERSIL 59 7.S:6°53'45.72"S,E:110°37'22.75"E
232	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	80.850.000,00	PERSIL 124 7.S:6°53'10.45"S,E:110°36'54.14"E,8.S:6°53'8.30"S,E:110°36'50.40"E
233	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	17.750.000,00	PERSIL 34
234	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	20.972.500,00	PERSIL 34
235	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	40.550.000,00	PERSIL 33
236	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	213.292.500,00	PERSIL 62 / SUDAH PAPANISASI
237	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	138.250.000,00	PERSIL 67 / SUDAH PAPANISASI
238	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	18.804.500,00	PERSIL 64 / SUDAH PAPANISASI
239	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	378.778.000,00	PERSIL 36 / SUDAH PAPANISASI
240	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	25.168.000,00	PERSIL 100 a /SUDAH PAPANISASI
241	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	154.500.000,00	PERSIL 17 / SUDAH PAPANISASI
242	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	158.375.000,00	PERSIL 100 a / SUDAH PAPANISASI
243	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	145.000.000,00	PERSIL 55
244	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	58.987.500,00	PERSIL 83 / SUDAH PAPANISASI 7.S:6°53'33.06"S,E:110°37'51.02"E
245	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	8.937.500,00	PERSIL 101 / SUDAH PAPANISASI
246	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	410.410.000,00	PERSIL 124 / SUDAH PAPANISASI 7.S:6°53'10.45"S,E:110°36'54.14"E,8.S:6°53'8.30"S,E:110°36'50.40"E
247	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	3.545.600.000,00	Persil 44

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA (Rp)	KETERANGAN
248	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	99.602.040,00	PERSIL 18 / SUDAH PAPANISASI
249	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	82.647.960,00	PERSIL 19 / SUDAH PAPANISASI 7.S:6°52'58.79"S,E:110°36'43.24"E
250	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	302.445.000,00	PERSIL 44
251	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	10.153.000,00	PERSIL 43 / SUDAH PAPANISASI
252	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	64.575.000,00	PERSIL 54 / SUDAH PAPANISASI
253	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	4.932.317,00	PERSIL 71 a 7.S:6°53'9.74"S,E:110°37'32.42"E,8.S:6°53'12.28"S,E:110°37'40.18"E
254	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	10.942.660,00	PERSIL 20 7.S:6°53'30.09"S,E:110°37'10.32"E,8.S:6°53'27.34"S,E:110°37'6.45"E,9.S:6°53'28.70"S,E:110°37'10.98"E
255	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	62.350.500,00	PERSIL 77 7.S:6°53'23.19"S,E:110°37'44.22"E,8.S:6°53'22.49"S,E:110°37'44.61"E,9.S:6°53'20.19"S,E:110°37'40.88"E,10.S:6°53'20.66"S,E:110°37'40.62"E
256	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	37.500.000,00	PERSIL 21
257	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	36.000.000,00	PERSIL 22
258	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	22.750.000,00	PERSIL 23
259	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	83.300.000,00	PERSIL 7
260	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	73.500.000,00	PERSIL 6
261	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	8.057.340,00	PERSIL 20 7.S:6°53'30.09"S,E:110°37'10.32"E,8.S:6°53'27.34"S,E:110°37'6.45"E,9.S:6°53'28.70"S,E:110°37'10.98"E
262	KECAMATAN DEMAK	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	64.800.000,00	PERSIL 97 b 7.S:6°53'9.74"S,E:110°37'32.42"E,8.S:6°53'12.28"S,E:110°37'40.18"E
263	KECAMATAN DEMAK	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	36.000.000,00	PERSIL 106
264	KECAMATAN DEMAK	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	64.800.000,00	PERSIL 71 a
265	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	7.055.000,00	PERSIL 53
266	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	72.750.000,00	PERSIL 83
267	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	57.000.000,00	Blok Batik (Hampanan 8) No H Pakai 04. C.1.P.35.S.II
268	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	72.000.000,00	Blok Manten (Hampanan 1) No H, Pakai 06. NIB. 110912170014. C.Ps.22.S.III
269	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	73.000.000,00	Blok Bantal Kanal (Hampanan 2) C.1.P.15 b.S.III
270	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	75.000.000,00	Blok Balong Tengah (Hampanan 1) Hak Pakai No. 07. NIB. 11.09.12.17.00139. C.1.P.20.S.III
271	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	152.000.000,00	Blok Guron (Hampanan 1) H Pakai No 08. NIB. 1109121700137. C.1.P.31.S.II
272	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	185.000.000,00	Blok Bantal Kanal (Hampanan 1) Hak Pakai No, 09. NIB, 11.09.12.17.00152. P.15 a.S.II
273	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	13.871.000,00	Blok Batik (Hampanan 3) H Pakai No,12. NIB, 11091217.00178. C.1.P.42.S.I
274	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	19.800.000,00	Blok Batik (Hampanan 2) Hak Pakai No.15. NIB, 11.09.12.17.00179. C.1.P.43.S.I



NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA (Rp)	KETERANGAN
275	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	57.000.000,00	Blok Menabur (Hampanan 1) H Pakai No. 10. NIB. 11.09.12.17.00180. C.1. P.1. S.IV
276	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	14.500.000,00	Blok Bantal Kanal (Hampanan 4) H Pakai No, 11.09.12.17.00178. C.1. P.17. S.IV
277	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	29.000.000,00	Blok Batik (Hampanan 9) C.I.P.33.SII (Asli)
278	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	56.500.000,00	Blok Batik (Hampanan 6) C.P.38.S.I
279	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	54.500.000,00	Blok Batik (Hampanan 8) C.11.P.41.S.I
280	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	57.000.000,00	Blok Batik (Hampanan 1) C.P.44.S.I
281	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	18.200.000,00	Blok Balong Tengah (Hampanan 2) C.1.P.19.S.IV
282	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	24.000.000,00	Blok Manten (Hampanan 2) C.P.23.S.II
283	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	17.500.000,00	Blok Batik (Hampanan 7) C.P.37.S.II
284	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	25.000.847,00	Blok Ngoangan (Hampanan 1) Sertifikat, C.I.P.2.S.IV /ASLI
285	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	31.000.000,00	Blok Batik (Hampanan 5) P.39.S.I
286	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	55.000.000,00	Blok Batik (Hampanan 4) C.P.40.S.I
287	KECAMATAN DEMAK	Tanah Sawah Irigasi	150.000.000,00	Blok Bantal Kanal (Hampanan 3) C.P.16.S.III
288	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Usaha	698.910.000,00	PERTANIAN
289	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Usaha	297.750.000,00	PERTANIAN
290	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Usaha	35.240.000,00	PERTANIAN
291	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Usaha	111.500.000,00	PERTANIAN
292	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	25.920.000,00	SK PENILAIAN 030/811 TAHUN 2025 BLOK KENEP
293	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	202.250.000,00	Dari Dinas Pertanian
294	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	99.900.000,00	Dari Dinas Pertanian
295	KECAMATAN DEMAK	Tanah Usaha	158.200.000,00	SK PENILAIAN 030/811 TAHUN 2025 BLOK CINDE
296	KECAMATAN DEMAK	Tanah Kampung	223.725.000,00	SK PENILAIAN NO 030/143 TAHUN 2022
JUMLAH			48.351.610.707,00	

2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Properti investasi berupa gedung dan bangunan sebanyak 189 unit terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Bagian Umum Sekretariat Daerah; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian; Kelurahan Kalicilik; Kelurahan Mangunjiwan; Puskesmas Demak II; Puskesmas Gajah I; Puskesmas Karangawen I; SMPN 1 Gajah; SMPN 1 Wonosalam; SMPN 3 Mranggen; SDN Jleper II Mijen; SDN Jali I Bonang; SDN Tamansari I Mranggen; SDN Cangringreng Karanganyar; SDN Daleman Sayung; SDN Bintoro VIII Demak; SDN Batusari I Mranggen; SDN Kedungwarulor Karanganyar; SDN Jleper I Mijen; SDN Kotakan Karanganyar; SDN Bakung II Mijen; SDN Tegowanu I Karangawen; SDN Pecuk I Mijen; SDN Bintoro II; SDN Bintoro IV;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

SDN Trimulyo; Kecamatan Guntur dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan JUMLAH harga perolehan sebesar Rp281.301.965.829,88.

Penjelasan terkait dengan Properti Investasi berdasarkan jenis asetnya mulai dari saldo 2024, penambahan, pengurangan dan saldo Tahun 2025 dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR
			BELANJA BARANG / JASA (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)	KOREKSI	PENGHAPUSAN	KOREKSI	
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	6.481.427.000,00					6.481.427.000,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	303.934.000,00					303.934.000,00
3	DINAS PARIWISATA	8.386.299.000,00					8.386.299.000,00
4	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	252.511.848.317,80	1.070.195.350,00	5.773.881.500,00	464.500.270,00		258.891.424.897,80
5	KECAMATAN DEMAK	856.800.000,00					856.800.000,00
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.684.800.000,00					1.684.800.000,00
7	DINAS KESEHATAN	158.100.000,00					158.100.000,00
8	PUSKESMAS GAJAH I	44.000.000,00					44.000.000,00
9	PUSKESMAS DEMAK III	91.970.000,00					91.970.000,00
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	848.818.925,00		591.489.987,00			1.440.308.912,00
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.070.799.558,08	52.409.250,00				2.123.208.808,08
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	694.300.000,00					694.300.000,00
13	KECAMATAN GUNTUR	21.258.212,00					21.258.212,00
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		124.135.000,00			124.135.000,00
	TOTAL	274.154.355.012,88	1.122.604.600,00	6.489.506.487,00	464.500.270,00	-	281.301.965.829,88

Berikut rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan.

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA	KETERANGAN
			(Rp)	
1	SEKRETARIAT DAERAH	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	90.150.000,00	Kantor Ex pertanian (Sewa PDAM)
2	SEKRETARIAT DAERAH	BANGUNAN FASILITAS UMUM	99.116.000,00	Belanja Modal Smt 2 2020 (Bagunan Galeri ATM Setda)
3	SEKRETARIAT DAERAH	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	114.668.000,00	EX Rumah Dinas Dokter Gigi PKM Dmk I
4	DINAS KESEHATAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	158.100.000,00	SK PENILAIAN 303/175 TAHUN 2023
5	PUSKESMAS GAJAH I	BANGUNAN KESEHATAN	44.000.000,00	EX RMH Dinas dokter gigi
6	PUSKESMAS DEMAK III	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	91.970.000,00	EX Rumah Dinas Paramedis
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	30.100.000,00	EX KANTOR BALAI PENYULUH SK PENILAIAN 030/84 2024
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	BANGUNAN GUDANG	433.800.000,00	GEDUNG SLAB A SK PENILAIAN 030/84 2024
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	BANGUNAN GUDANG	743.600.000,00	GEDUNG SLAB B BALAI PENYULUH SK PENILAIAN 030/84 2024

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA	KETERANGAN
			(Rp)	
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	BANGUNAN GUDANG	205.800.000,00	EX GEDUNG PENYIMPANAN BALAI PENYULUH SK PENILAIAN 030/84 2024
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	121.600.000,00	LANTAI JEMUR SK PENILAIAN 030/84 2024
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	45.600.000,00	LANTAI JEMUR BALAI PENYULUH SK PENILAIAN 030/84 2024
13	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	53.200.000,00	LANTAI JEMUR BALAI PENYULUH SK PENILAIAN 030/84 2024
14	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	51.100.000,00	LANTAI JEMUR BALAI PENYULUH PENILAIAN 030/84 2024
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	250.693.250,00	Kantor PPI Wedung
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	381.472.558,08	Waserda prodak perikanan
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	1.491.043.000,00	Hibah Gedung Pengasapan Ikan
18	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	445.830.000,00	Gedung Pertemuan (Garuda)
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	6.386.394.221,79	Pasar Jebor
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	6.021.504.767,00	Pasar Wonopolo
21	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	11.900.000,00	gedung kantor pasar hewan mranggen
22	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	189.014.466,28	Penataan PKL Halaman Gedung Garuda (DID)
23	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	204.163.883,72	Penataan PKL Halaman Gedung Bioskop (Shelter PKL)
24	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	4.822.659.938,00	pasar gading
25	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.632.843.000,00	pemb. ps sriwulan
26	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.153.419.000,00	shoroom pamer mranggen
27	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	59.192.967.239,01	GEDUNG PASAR BINTORO, Terdapat kapitalisasi sebesar Rp. 162.415.226 karena salah Penganggaran
28	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	3.676.483.787,00	GEDUNG PASAR JOGLO
29	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.203.862.323,00	NULL
30	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	9.761.752.270,00	Pembangunan pasar wonopolo (TP)
31	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	148.386.000,00	los pasar gablok
32	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	198.110.000,00	los pasar jebor
33	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.278.546.410,00	los pasar wonosalam
34	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	403.050.434,60	los pasar sayung

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA	KETERANGAN
			(Rp)	
35	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.121.775.000,00	Gedung RMU
36	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	632.472.655,00	Kios pasar wonopolo
37	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	625.246.100,00	los kuliner pasar wonopolo
38	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	72.600.552.725,00	Pembangunan Pasar Mranggen
39	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	5.822.761.500,00	Gedung Pasar Bangau (TP)
40	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	126.192.000,00	gedung Sentra UMKM Di kompleks gedung Garuda
41	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	147.922.000,00	Los Ikan Pasar Gebang Kec. Bonang
42	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	154.130.866,00	Pemeliharaan Pasar Gablok Kecamatan Karangawen
43	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	176.972.000,00	Pembangunan Pasar Wonopolo Dempet Kab. Demak
44	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	197.457.000,00	Pekerjaan Pembangunan Los Pasar Wonopolo Kec. Dempet Pembangunan Pasar Dempet
45	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	109.357.338,00	Pembangunan Los Pasar Unggas Belakang Pasar Bintoro
46	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	779.948.847,92	Pasar Induk (Bangunan Loss 4 (Loss D)) ps Brambang
47	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.556.349.452,00	Pembangunan Pasar Gablok Ds. Tlogorejo Kec. Karangawen (DAK)
48	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	115.200.000,00	Bangunan Loss 1 Hewan Mranggen
49	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	34.000.000,00	Bangunan Kios 1
50	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	30.600.000,00	Bangunan Kios 2
51	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	125.000.000,00	bangunan kios 3
52	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	136.800.000,00	bangunan loss 2 (8 unit)
53	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	47.500.000,00	Bangunan Loos 3
54	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	31.800.000,00	Bangunan Kios 1
55	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	39.800.000,00	Bangunan Kios (2) Hewan Banjarsari
56	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	23.900.000,00	Bangunan kios (3)
57	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	16.200.000,00	Bangunan Loss 1 (2 unit) Hewan banjarsari

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA	KETERANGAN
			(Rp)	
58	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	10.800.000,00	Bangunan Loss (2) hewan banjarsari
59	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.720.631.175,75	Pasar Induk (bangunan kios 1+ kantor) ps. kr anyar
60	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	617.000.000,00	Pasar Induk (bangunan kios 2) ps. kr anyar
61	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	5.891.069.305,00	Pasar Induk (bangunan loss) ps. kr anyar
62	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	254.741.919,00	pasar induk (bangunan kios 1 + kantor) ps. wonosalam
63	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	19.800.000,00	Pasar Induk (bangunan kios 2) pasar wonosalam
64	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	13.200.000,00	Pasar Induk (bangunan kios 3) pasar wonosalam
65	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	103.840.484,00	Pasar Induk (bangunan loss) ps wonosalam
66	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	548.244.320,75	Pasar Induk (Bangunan Kios) ps. gebang
67	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	34.850.200,00	Pasar Induk (Bangunan loss 1) ps. gebang
68	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	46.559.000,00	Pasar Induk (Bangunan loss 5) ps. Gebang
69	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	45.497.900,00	Pasar Induk (Bangunan Loss 2) ps. gebang
70	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	37.498.300,00	Pasar Induk (Bangunan loss 3) ps. gebang
71	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	157.565.399,00	Pasar Induk (Bangunan loss 4) ps. gebang
72	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	22.250.600,00	Pasar Induk (Bangunan loss 6) ps. gebang
73	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	319.931.000,00	Kios Depan (Ps. Sriwulan)
74	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.017.430.677,12	GEDUNG PASAR, POS, TPS (KIOS DEPAN, SISI SELATAN) Ps. Buyaran
75	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	14.903.200,00	GEDUNG PASAR, POS, TPS (POS) ps. buyaran
76	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	4.125.264.000,00	GEDUNG PASAR, POS, TPS (LOS I, DEPAN BESAR SISI BARAT) ps. buyaran
77	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.598.660.000,00	GEDUNG PASAR, POS, TPS (LOS II, DEPAN KECIL SISI TIMUR) ps. buyaran
78	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	2.661.623.842,00	GEDUNG PASAR, POS, TPS (LOS III, TENGAH) ps. buyaran
79	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	865.440.000,00	GEDUNG PASAR, POS, TPS (LOS IV, BELAKANG) ps buyaran
80	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	504.840.000,00	GEDUNG PASAR, POS, TPS (KIOS DEPAN SISI BARAT) ps. buyaran

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA	KETERANGAN
			(Rp)	
81	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	420.700.000,00	GEDUNG PASAR, POS, TPS (KIOS DEPAN, SISI BARAT) ps. buyaran
82	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	649.080.000,00	GEDUNG PASAR, POS, TPS (KIOS BELAKANG 1, SISI UTARA) ps. buyaran
83	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	865.440.000,00	GEDUNG PASAR, POS, TPS (KIOS BELAKANG II, SISI UTARA) ps. buyaran
84	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	391.066.579,75	GEDUNG PASAR, POS, TPS (KIOS DEPAN, SISI TIMUR) ps. buyaran
85	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	291.259.200,00	PASAR INDUK (BANGUNAN KIOS) ps. wedung
86	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	35.274.798,00	PASAR INDUK (BANGUNAN KIOS 2) ps. wedung
87	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	877.950.528,00	PASAR INDUK (BANGUNAN LOSS 1) ps wedung
88	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	436.889.700,00	PASAR INDUK (BANGUNAN LOSS 2) ps wedung
89	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	961.237.210,00	GEDUNG PASAR, KANTOR, PAGAR (KIOS PINGGIR DEPAN, SISI BARAT) ps sayung
90	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	92.963.087,00	GEDUNG PASAR, KANTOR, PAGAR (KANTOR UPTD) ps sayung
91	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	936.270.000,00	GEDUNG PASAR, KANTOR, PAGAR (LOS 1 DEPAN SISI UTARA) ps Sayung
92	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.300.375.000,00	GEDUNG PASAR, KANTOR, PAGAR (LOS 2 DEPAN SISI UTARA) ps Sayung
93	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	505.585.800,00	GEDUNG PASAR, KANTOR, PAGAR (LOS 2 DEPAN SISI UTARA) ps Sayung
94	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	156.045.000,00	GEDUNG PASAR, POS, TPS (KIOS PINGGIR, SISI TIMUR) ps Sayung
95	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	19.776.861,20	Pasar Induk (Bangunan Kios + Kantor) ps Brambang
96	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	12.572.282.040,00	Pasar Induk (Bangunan Loss 1 (Loss B dan C)) ps Brambang
97	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	3.870.000,00	pasar Induk (Mushola, MCK, Loss Hewan, Bangunan Loss 3 (Loss E dan F)) ps Brambang
98	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	159.450.773,00	los pasar gajah
99	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	161.839.941,00	gedung kios pasar wonopolo (sarpras wonopolo)
100	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	271.565.000,00	Pembangunan Pasar Wonopolo Dempet Demak
101	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	197.355.000,00	Pembangunan Kios Pasar Wonopolo Kec. Dempet
102	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	215.402.393,00	los pasar jebor
103	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	162.069.512,00	los pasar gablok

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA	KETERANGAN
			(Rp)	
104	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	929.560.000,00	NULL
105	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	146.691.490,00	pemeliharaan pasar sriwulan dan buyaran
106	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	623.200.000,00	Bangunan Kios 1
107	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	590.400.000,00	Bangunan Kios 2 dan MCK
108	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	169.800.000,00	Bangunan Kios 3
109	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	239.064.249,75	Jl. Raya Mranggen, Jagalan, Mranggen, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59567
110	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.687.800.000,00	Bangunan Kios Bintoro Permai & MCK
111	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	993.562.864,00	Revitalisasi Pembangunan Pasar Wonopolo
112	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	5.048.750.590,00	Revitalisasi Pembangunan Pasar Wonopolo (BANGUB)
113	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	415.534.927,16	Revitalisasi Los Buah dan Sarpras Pasar Sayung
114	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.677.204.500,00	Revitalisasi Pasar Sayung Kec. Sayung (DID)
115	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	3.110.700.000,00	Gedung Dan Bangunan Kios Pasar Jebor
116	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	7.291.864.919,00	Gedung Dan Bangunan Kios Pasar Gajah (Induk)
117	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	2.989.900.000,00	Gedung Dan Bangunan Los Pasar Gajah (Induk)
118	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	220.700.000,00	Gedung Dan Bangunan Kantor Pasar Gajah (Induk)
119	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	46.000.000,00	Gedung Dan Bangunan MCK Pasar Gajah (Induk)
120	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.619.500.000,00	Gedung Dan Bangunan Kios Pasar Gajah (Pengembangan)
121	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	165.280.000,00	Gedung Dan Bangunan Kios Pasar Brambang (Kios Swadaya)
122	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	539.697.800,00	Pembangunan Pasar Jebor Lanjutan
123	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	194.921.050,00	Bangunan Gedung Gerai UMKM Desa Candisari Kec. Mranggen
124	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	279.314.000,00	banguna pkl sampangan
125	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	149.363.000,00	PASAR HEWAN GAJAH
126	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	166.519.038,00	Pekerjaan Belanja jasa pemeliharaan Pasar Wonosalam

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA	KETERANGAN
			(Rp)	
127	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	24.000.000,00	Bangunan Transaksi Jual beli Hewan ps hewan mranggen
128	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	100.000.000,00	Dipakai untuk LPG Anwusa
129	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.008.500.000,00	GEDUNG KP2JJG
130	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	554.500.000,00	KIOS C 1 BINTORO (DEPAN PASAR BELAKANG RUKO)
131	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	277.300.000,00	KIOS C 2 BINTORO (DEPAN PASAR SEBELAH UTARA)
132	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	3.766.800.000,00	KIOS BINTORO 2 LANTAI
133	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	140.000.000,00	BANGUNAN KIOS DEPAN GEDUNG GARUDA (SISI BARAT)
134	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	512.200.000,00	EX RUMAH DINAS BELAKANG BPBD (4 RUMAH)
135	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	222.127.000,00	EX JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG DEPAN SMAN 1 DEMAK(RECLAS DARI KIB D)(SK INVENTARISASI 2022)
136	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	483.600.000,00	KOREKSI MASUK 2023 KIOS TEMBIRING BLOK A1
137	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	690.800.000,00	KOREKSI 2023 KIOS TEMBIRING BLOK A2
138	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.421.100.000,00	KOREKSI 2023 KIOS TEMBIRING BLOK B
139	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.579.000.000,00	KOREKSI 2023 KIOS TEMBIRING BLOK C
140	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	710.600.000,00	KOREKSI 2023 KIOS TEMBIRING BLOK D
141	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	595.300.000,00	KOREKSI 2023 BLOK E
142	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	446.500.000,00	KOREKSI 2023 BLOK F
143	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	829.000.000,00	KOREKSI 2023 BLOK G
144	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	759.900.000,00	KOREKSI 2023 KIOS TEMBIRING BLOK H
145	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	329.225.000,00	Bangunan Los Pedagang kaki lima (tembiring) mutasi masuk dari DPUPPE TH 2016
146	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	480.649.000,00	Bangunan Gedung Pasar Tembiring Hibah Kementerian Koperasi dan UKM T.A 2018
147	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	9.275.000,00	Pos Retribusi Notobratan Kadilangu Demak
148	DINAS PARIWISATA	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	51.350.000,00	Bangunan Pos Jaga dan portal dan MCK di Pos Kadilangu .
149	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	694.300.000,00	EX RUMAH DINAS DOKTER (BELAKANG KANTOR BPBD)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA	KETERANGAN
			(Rp)	
150	KECAMATAN GUNTUR	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	21.258.212,00	EX Rumah Dinas Camat berlokasi di Lingkungan Kantor Kecamatan Guntur
151	KECAMATAN DEMAK	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	204.700.000,00	SK PENILAIAN 030/175 TAHUN 2023
152	KECAMATAN DEMAK	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	377.900.000,00	Gedung dan Bangunan SMK (Bangunan Joglo) Kelurahan Kalicilik
153	KECAMATAN DEMAK	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	274.200.000,00	Gedung dan Bangunan SMK (Bangunan Kelas) Kelurahan Kalicilik
154	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	45.333.334,00	Kantin Sekolah UNIT 29
155	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	21.000.000,00	KANTIN SISWA Unit11
156	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	150.000.000,00	Kantin Sekolah 2 UNIT 27
157	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	60.000.000,00	HIBAH SPI BERUPA KANTIN
158	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	2.500.000,00	G.Kantin
159	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	40.000.000,00	EX rumah dinas
160	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	9.000.000,00	GEDUNG 13 -EX Runah Penjaga Sekolah
161	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	48.000.000,00	Kantin SPI 2018. luas 45 M2
162	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	13.000.000,00	Kantin
163	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	10.000.000,00	KOREKSI 2019
164	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	30.000.000,00	EX RUMAH DINAS GURU
165	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	10.000.000,00	EX Rumah Dinas
166	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	hibah pihak 3 kantin 2021
167	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	20.000.000,00	PERUM 3
168	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	20.000.000,00	PERUM 5
169	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	20.000.000,00	PERUM 1
170	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	20.000.000,00	PERUM 2
171	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	11.430.000,00	EX Rumah Dinas Penjaga Sekolah
172	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	60.400.591,00	EX Rumah Kepala Sekolah
173	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	27.155.000,00	Kantin
174	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	21.000.000,00	EX Rumah Dinas Unit 1
175	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	15.000.000,00	EX Rumah Dinas Unit 2
176	DINAS PENDIDIKAN DAN	ASRAMA	25.000.000,00	KOREKSI 2017 (EX rumah dinas)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA	KETERANGAN
			(Rp)	
	KEBUDAYAAN			
177	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	15.000.000,00	EX RUMAH DINAS 2
178	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	40.000.000,00	EX Rumah dinas 2
179	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	40.000.000,00	EX Rumah dinas 1
180	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	25.000.000,00	EX perumahan kepala sekolah
181	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	98.896.800,00	KANTIN SMP N 1 MRANGGEN
182	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	22.500.000,00	hibah komite kantin sekolah 2024
183	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	98.984.200,00	BELANJA APBD 2024 BANGUNAN KANTIN
184	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	124.135.000,00	Berwujud rumah dinas penjaga malam
185	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GUDANG	2.889.441.000,00	gedung SRG
186	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM	BANGUNAN GUDANG	2.884.440.500,00	gudang SRG
187	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	15.000.000,00	KANTIN
188	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	88.283.987,00	KANTIN
189	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	267.825.000,00	KANTIN
JUMLAH			281.301.965.829,88	

Berikut disajikan Properti Investasi Per SKPD sebagai berikut.

NO	SKPD	PROPERTI INVESTASI	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
			(Rp)		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Properti Investasi - Gedung Bangunan	1.440.308.912,00	(453.940.162,00)	986.368.750,00
2	DINAS KESEHATAN	Properti Investasi - Gedung Bangunan	158.100.000,00	(8.168.500,00)	149.931.500,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Properti Investasi - Gedung Bangunan	694.300.000,00	(84.473.167,00)	609.826.833,00
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Properti Investasi - Gedung Bangunan	2.123.208.808,08	(703.958.976,00)	1.419.249.832,08
5	DINAS PARIWISATA	Properti Investasi - Tanah	2.710.300.000,00	-	2.710.300.000,00
6	DINAS PARIWISATA	Properti Investasi - Gedung Bangunan	8.386.299.000,00	(482.897.710,00)	7.903.401.290,00
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Properti Investasi - Tanah	1.445.550.000,00	-	1.445.550.000,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Properti Investasi - Gedung Bangunan	1.684.800.000,00	(61.776.001,00)	1.623.023.999,00
9	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Properti Investasi - Tanah	14.942.215.000,00	-	14.942.215.000,00
10	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Properti Investasi - Gedung Bangunan	258.891.424.897,80	(46.144.935.769,20)	212.746.489.128,60
11	SEKRETARIAT DAERAH	Properti Investasi - Tanah	324.400.000,00	-	324.400.000,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	Properti Investasi - Gedung Bangunan	303.934.000,00	(92.826.273,00)	211.107.727,00



NO	SKPD	PROPERTI INVESTASI	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
			(Rp)		
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Properti Investasi - Tanah	2.224.000.000,00	-	2.224.000.000,00
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Properti Investasi - Gedung Bangunan	6.481.427.000,00	(739.771.791,00)	5.741.655.209,00
15	KECAMATAN DEMAK	Properti Investasi - Tanah	26.705.145.707,00	-	26.705.145.707,00
16	KECAMATAN DEMAK	Properti Investasi - Gedung Bangunan	856.800.000,00	(89.915.000,00)	766.885.000,00
17	KECAMATAN GUNTUR	Properti Investasi - Gedung Bangunan	21.258.212,00	(16.213.156,00)	5.045.056,00
18	PUSKESMAS GAJAH I	Properti Investasi - Gedung Bangunan	44.000.000,00	(44.000.000,00)	-
19	PUSKESMAS DEMAK III	Properti Investasi - Gedung Bangunan	91.970.000,00	(73.576.000,00)	18.394.000,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Properti Investasi - Gedung Bangunan	124.135.000,00	(29.792.400,00)	94.342.600,00
JUMLAH			329.653.576.536,88	(49.026.244.905,20)	280.627.331.631,68

d. Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Demak tidak membentuk Dana Cadangan dalam Tahun 2025 maupun Tahun 2024 baik untuk Belanja Modal, Investasi maupun Belanja lainnya yang memerlukan dana cukup besar, dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

e. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/dikuasai dan/atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana tersebut butir 1 s.d. 6. Nilai buku aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.095.890.008,23 dan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.748.683.040,43.

Secara rinci aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

JENIS ASET LAINNYA	2025	2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	241.570.505,00	245.442.505,20	(3.872.000,20)
Aset Kemitraan dengan pihak Ketiga	3.006.205.302,23	3.006.205.302,23	-
Aset Tidak Berwujud	19.273.743.632,00	17.271.575.857,00	2.002.167.775,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.183.527.761,00)	(5.733.304.718,00)	549.776.957,00
Aset Lain-lain	3.878.791.207,00	44.830.842.832,00	(40.952.051.625,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(120.892.877,00)	(13.872.078.738,00)	13.751.185.861,00
JUMLAH	21.095.890.008,23	45.748.683.040,43	(24.652.793.032,20)

a) Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp241.570.505,00 merupakan Tuntutan Ganti rugi terhadap Bendahara atas nama KEN sebesar Rp241.570.505,00 sedang dalam proses penghapusan, karena yang bersangkutan sudah menjalani hukuman berupa kurungan badan.

**b) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Nilai Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp3.006.205.302,23 yang merupakan aset kemitraan dengan pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa tanah senilai Rp1.840.005.302,23 dan berupa bangunan senilai Rp1.166.200.000,00, yang digunakan untuk Rumah Sub Inti.

c) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.273.743.632,00 dan Rp17.271.575.857,00 berupa *software/aplikasi* dan kajian dengan amortisasi masing-masing sebesar Rp5.183.527.761,00 dan Rp5.733.304.718,00. Nilai buku per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.090.215.871,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.538.271.139,00.

Adapun saldo aset tak berwujud tahun 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

NAMA ASET	SALDO 2025 (Rp)	SALDO 2024 (Rp)
SOFTWARE	7.846.339.381,00	8.407.994.271,00
KAJIAN	11.427.404.251,00	8.863.581.586,00
JUMLAH ASET	19.273.743.632,00	17.271.575.857,00

Adapun mutasi tambah Aset tak berwujud dapat dirinci sebagai berikut:

NO	NAMA ASET	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR (Rp)
			BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA NON MODAL (Rp)	PENGHAPUSAN	KOREKSI KELUAR	
1	SOFTWARE	8.407.994.271,00	263.840.000,00	1.142.807.110,00	1.590.922.320,00	377.379.680,00	7.746.939.381,00
2	KAJIAN	8.863.581.586,00	-	2.678.389.465,00	-	114.566.800,00	11.427.404.251,00
	JUMLAH	17.271.575.857,00	263.840.000,00	3.821.196.575,00	1.590.922.320,00	491.946.480,00	19.273.743.632,00

Penambahan aset kajian tahun perolehan 2025 sebesar Rp2.678.389.465,00 ke dalam kategori Aset Tidak Berwujud (ATB) didasarkan atas pertimbangan bahwa aset tersebut berupa hasil kajian/studi yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Penetapan tersebut dilakukan setelah dilakukan telaah terhadap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada proses pengadaan. Dari hasil telaah tersebut diketahui bahwa kegiatan tersebut menghasilkan dokumen kajian yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, sehingga memenuhi kriteria sebagai Aset Tidak Berwujud. Selain itu, pengklasifikasian aset tersebut juga telah mengacu dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak, yang menyatakan bahwa: Aset Tidak Berwujud berupa kajian/pengembangan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi melalui:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Apa manfaat ekonomi dan/atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- Siapa penerima manfaat ekonomi dan/atau sosial tersebut;
- Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas yang menerima manfaat tersebut; dan
- Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut, hasil kajian dimaksud dinilai memiliki manfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, serta pelaksanaan program pembangunan daerah, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Aset Tidak Berwujud.

Adapun aset tak berwujud dan amortisasinya dapat dirinci sebagai berikut.

NO	NAMA SKPD	TAHUN 2025		TAHUN 2024	
		ASET TIDAK BERWUJUD	(AMORTISASI)	ASET TIDAK BERWUJUD	(AMORTISASI)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	59.626.980,00	-	179.626.980,00	(120.000.000,00)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	3.378.070.746,00	(2.139.599.179,00)	3.389.636.066,00	(2.319.460.708,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.857.029.200,00	(67.095.000,00)	1.091.862.400,00	(37.275.000,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	395.131.000,00	(376.837.817,00)	395.131.000,00	(330.601.701,00)
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	396.976.240,00	(96.701.563,00)	247.650.490,00	(66.115.150,00)
6	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	166.866.600,00	(68.046.667,00)	69.200.000,00	(54.206.667,00)
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.119.796.500,00	-	1.119.796.500,00	-
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	49.500.000,00	(49.500.000,00)	503.499.000,00	(496.074.000,00)
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	99.530.925,00	(43.130.068,00)	99.530.925,00	(23.223.883,00)
10	DINAS PERHUBUNGAN	727.542.500,00	(66.288.675,00)	253.461.800,00	(77.622.775,00)
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	973.767.125,00	(288.245.360,00)	1.036.201.125,00	(314.587.520,00)
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	926.901.400,00	(585.804.000,00)	926.901.400,00	(558.147.900,00)
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	378.837.000,00	(96.244.166,00)	378.837.000,00	(71.429.958,00)
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	99.989.200,00	(99.989.200,00)	171.489.200,00	(171.489.200,00)
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.065.200,00	(12.037.950,00)	34.432.200,00	(4.590.960,00)
16	DINAS PARIWISATA	148.318.000,00	(110.074.066,00)	148.318.000,00	(80.410.466,00)
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	375.128.080,00	(221.161.968,00)	297.730.000,00	(171.246.000,00)
18	SEKRETARIAT DAERAH	269.839.000,00	(185.480.800,00)	249.419.000,00	(143.024.478,00)
19	SEKRETARIAT DPRD	227.255.560,00	(177.986.833,00)	331.647.560,00	(247.692.721,00)
20	INSPEKTORAT DAERAH	99.400.000,00	1.656.666,00	-	-
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	6.129.788.476,00	(49.750.755,00)	5.224.332.061,00	(29.850.453,00)
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.236.806.900,00	(406.094.428,00)	1.030.296.150,00	(389.367.978,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA SKPD	TAHUN 2025		TAHUN 2024	
		ASET TIDAK BERWUJUD	(AMORTISASI)	ASET TIDAK BERWUJUD	(AMORTISASI)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
23	KECAMATAN DEMAK	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	89.577.000,00	(41.802.600,00)	89.577.000,00	(23.887.200,00)
JUMLAH		19.273.743.632,00	(5.183.527.761,00)	17.271.575.857,00	(5.733.304.718,00)

d) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.878.791.207,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.830.842.832,00 dengan akumulasi penyusutan masing-masing Rp120.892.877,00 dan Rp13.872.078.738,00. Nilai buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.757.898.330,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.958.764.094,00.

Saldo aset lain-lain tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo awal 2025	44.830.842.832,00
Penambahan	262.592.200,00
Kurang Volume Pekerjaan	262.592.200,00
Pengurangan	41.214.643.825,00
Pembayaran Dana Bergulir	38.797.125,00
Penghapusan aset	40.159.912.700,00
Penghapusan TDF	1.015.934.000,00
Saldo akhir 2025	3.878.791.207,00

Adapun Saldo aset lain-lain dapat dirinci sebagai berikut.

JENIS ASET LAINNYA	2025	2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Rusak Berat/Usang	3.458.157.207,00	44.188.124.432,00	(40.729.967.225,00)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	420.634.000,00	642.718.400,00	(222.084.400,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(120.892.877,00)	(13.872.078.738,00)	13.751.185.861,00
JUMLAH	3.757.898.330,00	30.958.764.094,00	(27.200.865.764,00)

Aset Lain-lain terdiri dari:

(1) Aset Rusak Berat/Usang

a. Dana Bergulir sebesar Rp377.555.907,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	SKPD	ASET LAIN-LAIN
		(Rp)
1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	38.361.365,00
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.770.101,00
3	SEKRETARIAT DAERAH	314.424.441,00
	Jumlah	377.555.907,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b. Aset Rusak Berat/Usang itu sendiri Sebesar Rp 3.080.601.300,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	SKPD	NAMA ASET	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI	NILAI BUKU
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	SEKRETARIAT DPRD	Sepeda Motor	13.573.500,00	(13.573.500,00)	-
2	DINAS PERHUBUNGAN	Sepeda Motor	20.498.000,00	(20.498.000,00)	-
3	KECAMATAN DEMAK	Sepeda Motor	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Buster Pump	652.815.000,00	(63.921.469,00)	588.893.531,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Saluran lain-lain	1.991.114.000,00	(9.955.570,00)	1.981.158.430,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	196.199.900,00	(1.634.999,00)	194.564.901,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	196.400.900,00	(1.309.339,00)	195.091.561,00
JUMLAH			3.080.601.300,00	(120.892.877,00)	2.959.708.423,00

- (2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp420.634.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak ada kelanjutannya sebesar Rp158.041.800,00 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b. Kurang volume pekerjaan sebesar Rp262.592.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	SKPD	NILAI
		(Rp)
1	PUSKESMAS BONANG I	7.524.000,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	14.240.500,00
3	PUSKESMAS KEBONAGUNG	5.128.000,00
4	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	70.945.000,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	126.441.700,00
6	KECAMATAN KARANGTENGAH	30.688.000,00
7	KECAMATAN KARANGAWEN	7.625.000,00
JUMLAH		262.592.200,00

- (3) Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain sebesar Rp120.892.877,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	SKPD	2025	2024	BERTABAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(76.821.377,00)	(13.811.512.238,00)	13.734.690.861,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	(20.498.000,00)	(20.498.000,00)	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	2025	2024	BERTABAHA/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	SEKRETARIAT DPRD	(13.573.500,00)	(13.573.500,00)	-
4	KECAMATAN DEMAK	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	-
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	(12.185.000,00)	12.185.000,00
6	KECAMATAN KARANGAWEN	-	(4.310.000,00)	4.310.000,00
	JUMLAH	(120.892.877,00)	(13.855.583.738,00)	13.751.185.861,00

Berikut rincian Aset Lain-Lain pada masing-masing SKPD.

NO	SKPD	ASET LAIN-LAIN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS KESEHATAN DAERAH	26.892.500,00	-	26.892.500,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.162.971.500,00	(76.821.377,00)	3.086.150.123,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	20.498.000,00	(20.498.000,00)	-
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.770.101,00	-	24.770.101,00
5	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	267.348.165,00	-	267.348.165,00
6	SEKRETARIAT DAERAH	314.424.441,00	-	314.424.441,00
7	SEKRETARIAT DPRD	13.573.500,00	(13.573.500,00)	-
8	KECAMATAN DEMAK	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-
9	KECAMATAN KARANGAWEN	7.625.000,00	-	7.625.000,00
10	KECAMATAN KARANGTENGAH	30.688.000,00	-	30.688.000,00
	JUMLAH	3.878.791.207,00	(120.892.877,00)	3.757.898.330,00

2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2025 memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp80.880.762.565,30 bertambah sebesar Rp36.249.449.246,88 bila dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.631.313.318,42.

Adapun rincian kewajiban sebagai berikut.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	5.766.809.588,30	5.431.660.649,42
Utang Beban	75.064.834.607,00	39.199.222.781,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	49.118.370,00	429.888,00
JUMLAH	80.880.762.565,30	44.631.313.318,42

1) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa



belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain antara lain pendapatan dari pemanfaatan tanah eks bondo desa, sewa tanah dan pajak reklame yang masanya melewati 31 Desember 2025.

Per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Demak membukukan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.766.809.588,30 diantaranya.

No	SKPD	Uraian	Jumlah
			(Rp)
1	DINAS KESEHATAN DAERAH	Pendapatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga	108.666.000,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	Pendapatan BLUD RSUD Sultan Fatah	7.087.500,00
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	1.693.333,33
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Reklame Umum	413.979.171,64
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.235.383.583,33
		JUMLAH	5.766.809.588,30

2) Utang Beban

Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga. Pemerintah Kabupaten Demak mencatat utang belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.064.834.607,00 dengan rincian sebagai berikut.

UTANG BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	(Rp)	(Rp)
Utang Belanja Pegawai	45.427.453.767,00	13.212.959.249,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	29.619.380.840,00	25.986.263.532,00
Utang Belanja Bagi Hasil	18.000.000,00	-
JUMLAH	75.064.834.607,00	39.199.222.781,00

a. Utang Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.427.453.767,00 dengan rincian sebagai berikut.

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.952.498.098,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	36.536.811.800,00
2.1.06.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.677.842.485,00
2.1.06.01.99	Utang Belanja Pegawai BLUD	260.301.384,00
	JUMLAH	45.427.453.767,00

1. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN merupakan Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp2.868.447.600,00 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



dan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp 84.050.498,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

2. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp36.536.811.800,00 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp5.677.842.485,00 dengan rincian di masing-masing OPD sebagai berikut.

Kode	SKPD	Nilai
1.02.0.00.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	2.833.302.209,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	2.579.831.465,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS MRANGGEN I	90.809.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS KARANGAWEN II	3.539.533,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS WONOSALAM I	11.546.993,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	PUSKESMAS KEBONAGUNG	94.732.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	PUSKESMAS GAJAH II	64.080.085,00
		5.677.842.485,00

4. Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan Utang Belanja Pegawai BLUD pada puskesmas sebesar Rp260.301.384,00 dengan rincian sebagai berikut.

Kode	SKPD	Nilai
1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS BONANG II	80.561.821,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	PUSKESMAS GAJAH I	86.561.413,00
1.02.0.00.0.00.01.0030	PUSKESMAS WEDUNG II	93.178.150,00
		260.301.384,00

- b. Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.619.380.840,00 dengan rincian sebagai berikut.

REKENING	URAIAN	JUMLAH
		(Rp)
2.1.06.02.01.0001	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	299.726.830,00
2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.786.200,00
2.1.06.02.01.0010	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	167.472.471,00
2.1.06.02.01.0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	7.083.668.808,00
2.1.06.02.01.0015	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	67.429.539,00



REKENING	URAIAN	JUMLAH
		(Rp)
2.1.06.02.01.0023	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.881.000,00
2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	123.701.415,00
2.1.06.02.01.0026	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	273.287.000,00
2.1.06.02.01.0029	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.573.750,00
2.1.06.02.01.0030	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	81.462.458,00
2.1.06.02.01.0031	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	23.748.460,00
2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	295.838.471,00
2.1.06.02.01.0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	6.134.828.775,00
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	168.868.700,00
2.1.06.02.01.0054	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh	15.994.600,00
2.1.06.02.01.0056	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.642.502.722,00
2.1.06.02.01.0063	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.470.000,00
2.1.06.02.02.0003	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000,00
2.1.06.02.02.0014	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	17.100.000,00
2.1.06.02.02.0015	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	15.985.000,00
2.1.06.02.02.0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.160.000,00
2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	15.300.000,00
2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	98.187.636,00
2.1.06.02.02.0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	10.592.007,00
2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	711.371.210,00
2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	22.425.000,00
2.1.06.02.02.0034	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak	3.525.000,00
2.1.06.02.02.0038	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tata Rias	9.780.000,00
2.1.06.02.02.0039	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	10.800.000,00
2.1.06.02.02.0042	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.900,00
2.1.06.02.02.0050	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	159.290.550,00
2.1.06.02.02.0051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	42.785.690,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	61.116.528,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	203.047.632,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.141.631.443,00
2.1.06.02.02.0062	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.947.000,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	257.089.416,00
2.1.06.02.02.0066	Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan	25.131.420,00
2.1.06.02.02.0067	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.098.000,00
2.1.06.02.02.0078	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	50.352.458,00
2.1.06.02.02.0239	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.498.500,00
2.1.06.02.02.0943	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	22.200.000,00
2.1.06.02.02.1028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	7.362.258.032,00
2.1.06.02.03.0057	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Electric Generating Set	23.199.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

REKENING	URAIAN	JUMLAH
		(Rp)
2.1.06.02.03.0069	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya	85.160.500,00
2.1.06.02.03.0152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	44.132.130,00
2.1.06.02.03.0156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	356.162.684,00
2.1.06.02.03.0267	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya	112.785.177,00
2.1.06.02.03.0446	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	34.590.000,00
2.1.06.02.03.0577	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan	87.351.130,00
2.1.06.02.03.0712	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dalam	55.500.000,00
2.1.06.02.03.0714	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.840.398,00
2.1.06.02.03.0718	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor Lainnya	23.443.200,00
2.1.06.02.03.0753	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain	49.500.000,00
	JUMLAH	29.619.380.840,00

- c. Utang Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.000.000,00 merupakan bagi hasil pendapatan pelayanan penunjang kepariwisataan di kompleks Masjid Agung Demak.

Secara terperinci SKPD yang membukukan utang beban adalah sebagai berikut.

NO	SKPD	2025	2024	TAMBAH/ KURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	39.825.359.565,00	422.033.929,00	39.403.325.636,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	32.884.701.543,00	36.455.467.878,00	(3.570.766.335,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	35.124.213,00	36.891.316,00	(1.767.103,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.374.141,00	1.463.760,00	(89.619,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.548.472,00	7.071.151,00	477.321,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.130.014,00	11.056.834,00	1.073.180,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	14.343.888,00	13.721.366,00	622.522,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.914.108,00	23.401.328,00	5.512.780,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	28.279.454,00	31.150.109,00	(2.870.655,00)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24.012.455,00	28.435.134,00	(4.422.679,00)
12	DINAS PERHUBUNGAN	1.779.243.492,00	1.805.056.954,00	(25.813.462,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.394.510,00	51.572.675,00	(1.178.165,00)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	26.266.366,00	12.650.739,00	13.615.627,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	21.758.007,00	20.610.032,00	1.147.975,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.871.083,00	10.989.058,00	1.882.025,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.794.096,00	6.826.704,00	6.967.392,00
18	DINAS PARIWISATA	7.380.644,00	8.755.637,00	(1.374.993,00)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	16.573.791,00	10.341.086,00	6.232.705,00



NO	SKPD	2025	2024	TAMBAH/ KURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	16.735.885,00	5.234.860,00	11.501.025,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	86.487.518,00	77.822.493,00	8.665.025,00
22	SEKRETARIAT DPRD	28.667.621,00	27.384.948,00	1.282.673,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	19.769.398,00	19.262.998,00	506.400,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	13.774.968,00	11.141.375,00	2.633.593,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	42.761.850,00	24.242.249,00	18.519.601,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.160.889,00	41.211.201,00	(16.050.312,00)
27	KECAMATAN DEMAK	9.900.357,00	5.616.894,00	4.283.463,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	4.613.274,00	2.238.219,00	2.375.055,00
29	KECAMATAN DEMPET	4.029.277,00	4.240.230,00	(210.953,00)
30	KECAMATAN WONOSALAM	4.238.142,00	4.868.643,00	(630.501,00)
31	KECAMATAN MIJEN	2.980.415,00	3.790.532,00	(810.117,00)
32	KECAMATAN GAJAH	3.463.001,00	3.614.817,00	(151.816,00)
33	KECAMATAN BONANG	847.769,00	771.800,00	75.969,00
34	KECAMATAN WEDUNG	101.400,00	168.270,00	(66.870,00)
35	KECAMATAN SAYUNG	535.580,00	841.612,00	(306.032,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	-	-	-
37	KECAMATAN MRANGGEN	1.871.079,00	2.578.439,00	(707.360,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	1.456.871,00	2.443.413,00	(986.542,00)
39	KECAMATAN KARANGAWEN	4.682.475,00	2.341.705,00	2.340.770,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	2.025.649,00	1.144.486,00	881.163,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	661.347,00	767.907,00	(106.560,00)
JUMLAH		75.064.834.607,00	39.199.222.781,00	35.865.611.826,00

3) Utang Jangka Pendek Lainnya

Pemerintah Kabupaten Demak pada 31 Desember 2025 mencatat Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp49.118.370,00 sedangkan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp429.888,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang merupakan kelebihan pembayaran PBB oleh wajib pajak.

Berikut rincian Utang Jangka Pendek lainnya.

Utang Jangka Pendek Lainnya	TAHUN 2025	TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	49.118.370,00	429.888,00	48.688.482,00
JUMLAH	49.118.370,00	429.888,00	48.688.482,00

**3. EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Demak membukukan Ekuitas sebesar Rp5.771.912.182.843,49 berkurang sebesar Rp35.413.112.328,40 dari Tahun 2024 sebesar Rp5.807.325.295.171,89.

Secara terperinci ekuitas di SKPD sebagai berikut.

NO	NAMA SKPD	EKUITAS 2025	EKUITAS 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	764.197.282.792,56	769.361.549.527,66	(5.164.266.735,10)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	616.111.685.289,28	622.696.684.776,40	(6.584.999.487,12)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.283.152.786.205,90	2.417.980.936.890,90	(134.828.150.685,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	452.388.706.527,83	452.694.807.965,83	(306.101.438,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.108.337.322,00	5.762.022.059,00	(653.684.737,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.776.494.157,00	21.151.207.169,00	(3.374.713.012,00)
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.647.934.255,00	10.742.227.968,00	905.706.287,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	5.259.680.045,05	5.449.160.540,05	(189.480.495,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	81.147.369.483,00	84.747.073.221,00	(3.599.703.738,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.537.395.070,00	12.335.528.346,50	(798.133.276,50)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.159.199.642,71	17.960.816.764,27	(801.617.121,56)
12	DINAS PERHUBUNGAN	42.865.746.980,81	33.730.927.856,81	9.134.819.124,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.055.480.044,00	6.500.538.853,00	554.941.191,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.748.625.702,67	17.035.720.387,00	(1.287.094.684,33)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	74.640.145.202,23	73.116.814.855,23	1.523.330.347,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.968.352.784,00	7.902.449.908,00	65.902.876,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.847.134.475,08	16.342.971.052,08	(1.495.836.577,00)
18	DINAS PARIWISATA	24.898.524.995,22	25.365.538.425,64	(467.013.430,42)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	17.041.209.387,46	18.155.120.155,99	(1.113.910.768,53)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	268.690.168.574,69	263.592.167.859,02	5.098.000.715,67
21	SEKRETARIAT DAERAH	37.533.163.208,52	36.980.926.916,52	552.236.292,00
22	SEKRETARIAT DPRD	18.805.632.127,35	19.658.039.459,02	(852.407.331,67)
23	INSPEKTORAT DAERAH	12.557.474.799,00	10.513.387.404,00	2.044.087.395,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	18.298.106.823,00	17.521.174.014,00	776.932.809,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	674.677.285.216,80	577.203.829.902,37	97.473.455.314,43
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.653.561.421,00	9.909.866.632,00	(256.305.211,00)
27	KECAMATAN DEMAK	223.723.052.944,50	223.363.771.782,51	359.281.161,99
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	8.544.030.748,00	1.915.886.130,00	6.628.144.618,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA SKPD	EKUITAS 2025	EKUITAS 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
29	KECAMATAN DEMPET	1.724.914.786,00	1.676.368.229,00	48.546.557,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	979.795.612,00	1.227.099.428,00	(247.303.816,00)
31	KECAMATAN MIJEN	868.266.473,00	867.455.751,00	810.722,00
32	KECAMATAN GAJAH	1.718.342.750,00	1.739.181.822,00	(20.839.072,00)
33	KECAMATAN BONANG	1.425.300.214,00	1.371.735.487,00	53.564.727,00
34	KECAMATAN WEDUNG	1.433.706.644,00	1.356.359.692,00	77.346.952,00
35	KECAMATAN SAYUNG	6.423.234.529,00	6.543.257.706,00	(120.023.177,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	1.146.630.045,00	1.096.242.402,00	50.387.643,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	1.224.925.109,00	1.245.809.965,00	(20.884.856,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	3.022.528.631,50	3.090.069.107,67	(67.540.476,17)
39	KECAMATAN KARANGAWEN	6.137.910.694,33	4.584.529.991,00	1.553.380.703,33
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	2.152.375.119,00	2.267.275.107,67	(114.899.988,67)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	619.686.012,00	568.763.661,75	50.922.350,25
JUMLAH		5.771.912.182.843,49	5.807.325.295.171,89	(35.413.112.328,40)



5.4 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2025 menyajikan Laporan Operasional yang terdiri dari unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang dikomparasikan dengan laporan operasional Tahun 2024.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Demak selama periode Tahun 2025 terbuku sebesar Rp2.602.673.929.458,89 mengalami peningkatan sebesar Rp67.931.621.968,77 dibanding dengan Tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp2.534.742.307.490,12 terdiri dari.

KODE	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	749.258.166.883,14	621.132.501.301,56	128.125.665.581,58
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.727.434.131.403,00	1.841.164.743.845,00	(113.730.612.442,00)
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	125.981.631.172,75	72.445.062.343,56	53.536.568.829,19
	JUMLAH	2.602.673.929.458,89	2.534.742.307.490,12	67.931.621.968,77

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Demak membukukan Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp749.258.166.883,14 yang meningkat sebesar Rp128.125.665.581,58 dibandingkan Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp621.132.501.301,56 dengan rincian sebagai berikut.

KODE	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
7.1.01	Pendapatan Pajak Daerah - LO	349.709.173.490,95	233.821.740.760,10	115.887.432.730,85
7.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	269.373.634.074,00	41.254.290.415,17	228.119.343.658,83
7.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	41.658.468.443,69	41.092.544.499,32	565.923.944,37
7.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	88.516.890.874,50	304.963.925.626,97	(216.447.034.752,47)
	JUMLAH	749.258.166.883,14	621.132.501.301,56	128.125.665.581,58

Adapun rincian untuk masing-masing sumber PAD tersebut adalah sebagai berikut.

1) Pajak Daerah-LO

Pemerintah Kabupaten Demak mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp349.709.173.490,95 bertambah Rp115.887.432.730,85 dibandingkan dengan pendapatan pajak Tahun 2024 sebesar Rp233.821.740.760,10 yang terdiri dari



Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron, Pajak Air Tanah, PBBP2, BPHTB-Pemindahan Hak, PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sistem penerimaan pendapatan Opsen PKB diterima RKUD setiap hari ketika ada pembayaran PKB yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seluruh *database* PKB dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Pendapatan Opsen PKB-LO dicatat sesuai dengan Pendapatan di LRA. Adapun pencatatan secara rinci Pendapatan Pajak Daerah-LO dijelaskan dibawah ini.

KODE	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
7.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	2.278.618.811,95	2.145.162.885,10	133.455.926,85
7.1.01.12.01	Pajak Air Tanah-LO	2.842.993.500,00	2.471.006.850,00	371.986.650,00
7.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	-	6.254.400,00	(6.254.400,00)
7.1.01.15.01	PBBP2-LO	81.496.136.925,00	77.929.351.838,00	3.566.785.087,00
7.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	62.607.129.190,00	63.531.290.492,00	(924.161.302,00)
7.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	7.126.566.248,00	6.827.087.695,00	299.478.553,00
7.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik-LO	77.447.595.661,00	77.944.713.113,00	(497.117.452,00)
7.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	637.695.045,00	445.698.819,00	191.996.226,00
7.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir-LO	1.156.698.404,00	1.829.756.068,00	(673.057.664,00)
7.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	389.711.706,00	334.904.600,00	54.807.106,00
7.1.01.20.01	Opsen PKB-LO	66.918.159.500,00	356.514.000,00	66.561.645.500,00
7.1.01.21.01	Opsen BBNKB-LO	46.807.868.500,00	-	46.807.868.500,00
	JUMLAH	349.709.173.490,95	233.821.740.760,10	115.887.432.730,85

Perhitungan Pendapatan Pajak LO diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Pendapatan LRA 2025	340.767.901.524,00
Piutang Tahun 2024	(51.798.598.825,00)
Piutang Tahun 2025	53.374.602.981,00
Pendapatan Diterima Dimuka 2024	405.027.588,59
Pendapatan Diterima Dimuka 2025	(413.979.171,64)
Utang Jangka Pendek Lainnya 2024 (kelebihan Pembayaran PBB)	429.888,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 2025 (kelebihan Pembayaran PBB)	(49.118.370,00)
Koreksi piutang Pajak Restoran	653.151.132,00
Penghapusan Piutang PBB	6.769.756.744,00
Pendapatan Pajak LO	349.709.173.490,95

2) Retribusi Daerah-LO

Pemerintah Kabupaten Demak mencatat pendapatan retribusi pada Tahun 2025 sebesar Rp269.373.634.074,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp41.254.290.415, mengalami kenaikan sebesar Rp228.119.343.658,83. Adapun rincian untuk masing-masing sumber retribusi tersebut adalah sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	238.121.688.396,83	211.947.534,00	237.909.740.862,83
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	316.915.000,00	253.220.000,00	63.695.000,00
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	688.300.000,00	596.800.000,00	91.500.000,00
7.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	6.610.692.150,00	5.977.264.202,00	633.427.948,00
7.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	25.450.000,00	22.800.000,00	2.650.000,00
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.387.457.017,00	9.878.884.745,17	(8.491.427.728,17)
7.1.02.02.04	Retribusi Terminal-LO	-	100.000,00	(100.000,00)
7.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	-	2.701.915.000,00	(2.701.915.000,00)
7.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	117.150.000,00	80.575.000,00	36.575.000,00
7.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	34.860.000,00	31.115.000,00	3.745.000,00
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	608.150.000,00	721.215.000,00	(113.065.000,00)
7.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	49.400.000,00	33.400.000,00	16.000.000,00
7.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	2.967.150.000,00	-	2.967.150.000,00
7.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	19.680.000,00	19.885.000,00	(205.000,00)
7.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	9.368.423.977,50	-	9.368.423.977,50
7.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	1.806.666,67	3.913.000,00	(2.106.333,33)
7.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	6.167.406.654,00	20.007.514.000,00	(13.840.107.346,00)
7.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	2.889.104.212,00	713.741.934,00	2.175.362.278,00
	JUMLAH	269.373.634.074,00	41.254.290.415,17	228.119.343.658,83

Perhitungan Pendapatan Retribusi-LO diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

URAIAN	JUMLAH (Rp)
PENDAPATAN LRA 2025	329.598.514.265,83
PIUTANG 2024	(5.424.302.615,00)
PIUTANG 2025	35.391.587.925,00
PENDAPATAN DITRIMA DIMUKA 2024	5.026.633.060,83
PENDAPATAN DITRIMA DIMUKA 2025	(5.352.830.416,66)
KOREKSI PIUTANG	(308.125.072,00)
REKLAS PIUTANG 2024	(28.229.914.023,00)
REKLAS RETRIBUSI DAN KAPITASI JKN	(53.490.802.945,00)
REKLAS RETRIBUSI DAN LAIN2 PAD (BLUD)	(7.837.126.106,00)
PENDAPATAN RETRIBUSI -LO	269.373.634.074,00

Untuk lebih jelasnya analisis perhitungan retribusi per SKPD kami jelaskan sebagai berikut.

NO	SKPD	PENDAPATAN LRA 2025 (Rp)	PIUTANG 2024 (Rp)	PIUTANG 2025 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	334.786.500,00	-	-
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	145.145.517.929,00	-	19.349.953.496,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	83.161.107.046,83	-	8.128.625.373,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	PENDAPATAN LRA	PIUTANG 2024	PIUTANG 2025
		2025		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	PUSKESMAS MRANGGEN I	2.205.282.808,00	-	22.077.000,00
5	PUSKESMAS MRANGGEN II	1.846.024.901,00	-	5.043.000,00
6	PUSKESMAS MRANGGEN III	2.567.695.718,00	-	46.502.000,00
7	PUSKESMAS KARANGAWEN I	3.212.778.968,00	-	71.884.000,00
8	PUSKESMAS KARANGAWEN II	3.020.637.764,00	-	15.620.427,00
9	PUSKESMAS GUNTUR I	4.000.181.826,00	-	98.083.914,00
10	PUSKESMAS GUNTUR II	2.407.731.037,00	-	14.760.000,00
11	PUSKESMAS SAYUNG I	2.472.128.548,00	-	9.243.000,00
12	PUSKESMAS SAYUNG II	2.572.373.261,00	-	52.980.000,00
13	PUSKESMAS KARANGTENGAH	2.808.986.063,00	-	18.870.000,00
14	PUSKESMAS BONANG I	4.673.584.371,00	-	72.636.000,00
15	PUSKESMAS BONANG II	3.026.203.909,00	-	44.280.000,00
16	PUSKESMAS DEMAK I	1.412.040.947,00	-	2.180.000,00
17	PUSKESMAS DEMAK II	1.640.011.620,00	-	7.020.000,00
18	PUSKESMAS DEMAK III	1.363.593.042,00	-	4.600.000,00
19	PUSKESMAS WONOSALAM I	2.209.480.868,00	-	17.580.000,00
20	PUSKESMAS WONOSALAM II	2.572.288.315,00	-	61.086.000,00
21	PUSKESMAS DEMPET	3.666.093.209,00	-	48.285.000,00
22	PUSKESMAS KEBONAGUNG	2.760.383.500,00	-	66.874.000,00
23	PUSKESMAS GAJAH I	2.793.350.842,00	-	45.146.000,00
24	PUSKESMAS GAJAH II	2.000.391.891,00	-	43.450.000,00
25	PUSKESMAS KARANGANYAR I	2.510.193.678,00	-	49.866.000,00
26	PUSKESMAS KARANGANYAR II	2.589.688.734,00	-	81.362.000,00
27	PUSKESMAS MIJEN I	2.582.362.321,00	-	80.432.000,00
28	PUSKESMAS MIJEN II	1.537.616.755,00	-	15.890.000,00
29	PUSKESMAS WEDUNG I	3.553.139.531,00	-	79.282.000,00
30	PUSKESMAS WEDUNG II	2.813.862.430,00	-	71.043.000,00
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.224.356.654,00	-	-
32	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.889.104.212,00	-	-
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	316.915.000,00	(3.060.000,00)	3.060.000,00
34	DINAS PERHUBUNGAN	3.613.550.000,00	-	41.900.000,00
35	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	56.560.000,00	(21.672.500,00)	21.222.500,00
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-
37	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	681.900.000,00	-	-
38	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	789.080.000,00	(2.597.252.432,00)	2.597.252.432,00
39	DINAS PARIWISATA	598.247.867,00	(22.039.250,00)	4.238.400,00
40	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	34.860.000,00	-	-
41	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.289.247.700,00	(2.760.278.433,00)	4.081.722.883,00
42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	9.602.374.500,00	(20.000.000,00)	17.537.500,00
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	42.800.000,00	-	-
	JUMLAH	329.598.514.265,83	(5.424.302.615,00)	35.391.587.925,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Untuk penjelasan Retribusi-LO berikutnya sebagai berikut.

NO	SKPD	PENDAPATAN DITRIMA DIMUKA 2024 (Rp)	PENDAPATAN DITRIMA DIMUKA 2025 (Rp)	KOREKSI PIUTANG (Rp)	REKLAS PIUTANG 2024 (Rp)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	-	-108.666,00-	-308.305.072,00	-18.507.117.443,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	19.237,50-	-7.087,50-	-	-8.532.421.001,00
3	PUSKESMAS MRANGGEN I	-	-	-	-9.009.000,00
4	PUSKESMAS MRANGGEN II	-	-	-	-4.407.000,00
5	PUSKESMAS MRANGGEN III	-	-	-	-37.609.000,00
6	PUSKESMAS KARANGAWEN I	-	-	-	-67.290.000,00
7	PUSKESMAS KARANGAWEN II	-	-	-	-5.315.000,00
8	PUSKESMAS GUNTUR I	-	-	-	-88.535.579,00
9	PUSKESMAS GUNTUR II	-	-	-	-21.520.000,00
10	PUSKESMAS SAYUNG I	-	-	-	-10.680.000,00
11	PUSKESMAS SAYUNG II	-	-	-	-60.665.000,00
12	PUSKESMAS KARANGTENGAH	-	-	-	-19.510.000,00
13	PUSKESMAS BONANG I	-	-	-	-104.086.000,00
14	PUSKESMAS BONANG II	-	-	-	-41.639.000,00
15	PUSKESMAS DEMAK I	-	-	-	-2.180.000,00
16	PUSKESMAS DEMAK II	-	-	-	-7.010.000,00
17	PUSKESMAS DEMAK III	-	-	-	-2.000.000,00
18	PUSKESMAS WONOSALAM I	-	-	-	-14.555.000,00
19	PUSKESMAS WONOSALAM II	-	-	-	-61.544.000,00
20	PUSKESMAS DEMPET	-	-	-	-62.344.000,00
21	PUSKESMAS KEBONAGUNG	-	-	-	-77.590.000,00
22	PUSKESMAS GAJAH I	-	-	-	-74.682.000,00
23	PUSKESMAS GAJAH II	-	-	-	-57.278.000,00
24	PUSKESMAS KARANGANYAR I	-	-	-	-41.814.000,00
25	PUSKESMAS KARANGANYAR II	-	-	-	-66.939.000,00
26	PUSKESMAS MIJEN I	-	-	-	-115.949.000,00
27	PUSKESMAS MIJEN II	-	-	-	-13.430.000,00
28	PUSKESMAS WEDUNG I	-	-	180.000,00	-59.260.000,00
29	PUSKESMAS WEDUNG II	-	-	-	-63.535.000,00
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.500,00-	-1.693.333,33	-	-
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	5.003.895.560,83	-5.235.383.583,33	-	-
	JUMLAH	5.026.633.060,83	-5.352.830.416,66	-308.125.072,00	-28.229.914.023,00

Untuk penjelasan Retribusi-LO berikutnya sebagai berikut:

NO	SKPD	REKLAS RETRIBUSI DAN KAPITASI JKN (Rp)	REKLAS RETRIBUSI DAN LAIN2 PAD (BLUD) (Rp)	RETRIBUSI LO (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	-	-	334.786.500,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	-	(7.178.171.342,00)	138.393.211.568,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REKLAS RETRIBUSI DAN KAPITASI JKN (Rp)	REKLAS RETRIBUSI DAN LAIN2 PAD (BLUD) (Rp)	RETRIBUSI LO (Rp)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	-	(228.385.395,00)	82.541.076.023,83
4	PUSKESMAS MRANGGEN I	(1.891.403.226,00)	(52.265.082,00)	274.682.500,00
5	PUSKESMAS MRANGGEN II	(1.687.694.681,00)	(15.076.220,00)	143.890.000,00
6	PUSKESMAS MRANGGEN III	(1.779.418.958,00)	(4.799.510,00)	792.370.250,00
7	PUSKESMAS KARANGAWEN I	(2.237.767.312,00)	(5.849.426,00)	973.756.230,00
8	PUSKESMAS KARANGAWEN II	(2.837.005.113,00)	(31.339.651,00)	162.598.427,00
9	PUSKESMAS GUNTUR I	(2.808.063.693,00)	(10.122.554,00)	1.191.543.914,00
10	PUSKESMAS GUNTUR II	(2.027.253.852,00)	(7.515.935,00)	366.201.250,00
11	PUSKESMAS SAYUNG I	(2.184.871.922,00)	(17.989.626,00)	267.830.000,00
12	PUSKESMAS SAYUNG II	(1.707.160.009,00)	(12.791.752,00)	844.736.500,00
13	PUSKESMAS KARANGTENGAH	(2.390.515.217,00)	(13.390.846,00)	404.440.000,00
14	PUSKESMAS BONANG I	(3.549.638.941,00)	(9.339.430,00)	1.083.156.000,00
15	PUSKESMAS BONANG II	(2.423.097.149,00)	(5.717.260,00)	600.030.500,00
16	PUSKESMAS DEMAK I	(1.312.074.959,00)	(14.092.988,00)	85.873.000,00
17	PUSKESMAS DEMAK II	(1.442.983.388,00)	(8.680.232,00)	188.358.000,00
18	PUSKESMAS DEMAK III	(1.205.954.591,00)	(3.559.451,00)	156.679.000,00
19	PUSKESMAS WONOSALAM I	(1.963.718.911,00)	(13.775.707,00)	235.011.250,00
20	PUSKESMAS WONOSALAM II	(1.861.500.439,00)	(12.168.976,00)	698.160.900,00
21	PUSKESMAS DEMPET	(2.876.510.167,00)	(14.683.542,00)	760.840.500,00
22	PUSKESMAS KEBONAGUNG	(1.857.782.208,00)	(18.050.542,00)	873.834.750,00
23	PUSKESMAS GAJAH I	(1.817.198.917,00)	(14.836.175,00)	931.779.750,00
24	PUSKESMAS GAJAH II	(1.278.680.643,00)	(7.006.248,00)	700.877.000,00
25	PUSKESMAS KARANGANYAR I	(1.785.445.199,00)	(28.144.479,00)	704.656.000,00
26	PUSKESMAS KARANGANYAR II	(1.641.981.467,00)	(7.306.017,00)	954.824.250,00
27	PUSKESMAS MIJEN I	(1.416.320.828,00)	(59.028.699,00)	1.071.495.794,00
28	PUSKESMAS MIJEN II	(1.321.294.675,00)	(7.103.080,00)	211.679.000,00
29	PUSKESMAS WEDUNG I	(2.323.778.254,00)	(32.109.177,00)	1.217.454.100,00
30	PUSKESMAS WEDUNG II	(1.861.688.226,00)	(3.826.764,00)	955.855.440,00
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	6.224.356.654,00
32	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	-	2.889.104.212,00
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	316.915.000,00
34	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	3.655.450.000,00
35	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	56.110.000,00
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	1.806.666,67
37	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	681.900.000,00
38	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	789.080.000,00
39	DINAS PARIWISATA	-	-	580.447.017,00
40	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	34.860.000,00
41	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	6.610.692.150,00
42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	-	9.368.423.977,50
43	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	42.800.000,00
	JUMLAH	(53.490.802.945,00)	(7.837.126.106,00)	269.373.634.074,00



Berikut rincian Retribusi Daerah-LO per SKPD

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	238.121.688.396,83	211.947.534,00
	JUMLAH	238.121.688.396,83	211.947.534,00

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	316.915.000,00	253.220.000,00
	JUMLAH	316.915.000,00	253.220.000,00

3. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	688.300.000,00	596.800.000,00
	JUMLAH	688.300.000,00	596.800.000,00

4. Retribusi Pelayanan Pasar-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.610.692.150,00	5.977.264.202,00
	JUMLAH	6.610.692.150,00	5.977.264.202,00

5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.450.000,00	22.800.000,00
	JUMLAH	25.450.000,00	22.800.000,00

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.500.000,00	30.950.000,00
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	56.110.000,00	98.375.000,00
3	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	73.750.000,00	-
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	720.000.000,00	710.000.000,00
5	DINAS PARIWISATA	463.297.017,00	443.538.365,00
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	8.535.421.380,17
7	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	42.800.000,00	60.600.000,00
	JUMLAH	1.387.457.017,00	9.878.884.745,17

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7. Retribusi Terminal-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	-	100.000,00
	JUMLAH	-	100.000,00

8. Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	-	2.701.915.000,00
	JUMLAH	-	2.701.915.000,00

9. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PARIWISATA	117.150.000,00	80.575.000,00
	JUMLAH	117.150.000,00	80.575.000,00

10. Retribusi Rumah Potong Hewan-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	34.860.000,00	31.115.000,00
	JUMLAH	34.860.000,00	31.115.000,00

11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	608.150.000,00	721.215.000,00
	JUMLAH	608.150.000,00	721.215.000,00

12. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	49.400.000,00	33.400.000,00
	JUMLAH	49.400.000,00	33.400.000,00

13. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	2.967.150.000,00	-
	JUMLAH	2.967.150.000,00	-

14. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.680.000,00	19.885.000,00
	JUMLAH	19.680.000,00	19.885.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

15. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	9.368.423.977,50	0,00
	JUMLAH	9.368.423.977,50	0,00

16. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.806.666,67	3.913.000,00
	JUMLAH	1.806.666,67	3.913.000,00

17. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	20.007.514.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.167.406.654,00	0,00
	JUMLAH	6.167.406.654,00	20.007.514.000,00

18. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.889.104.212,00	713.741.934,00
	JUMLAH	2.889.104.212,00	713.741.934,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Akun ini menggambarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025 sebesar Rp41.658.468.443,69 naik sebesar Rp565.923.944,37 dibanding dengan Tahun 2024 sebesar Rp41.092.544.499,32 dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA BUMD	LABA PENGAKUAN- LO 2025	LABA PENGAKUAN-LO 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
A	PERHITUNGAN SECARA EKUITAS			
1	PD. BPR. BKK	2.168.947.369,59	5.961.203.730,44	(3.792.256.360,85)
2	Perumda Air Minum	5.764.262.037,00	6.362.336.325,00	(598.074.288,00)
3	PT. LKM DEMAK SEJAHTERA	1.407.590.156,10	2.294.579.804,88	(886.989.648,78)
4	Perseroda Demak Sarana Sehat	564.007.084,00	937.395.760,00	(373.388.676,00)
5	PT. Demak Aneka Wira Usaha	1.345.183.234,00	900.002.163,00	445.181.071,00
	JUMLAH	11.249.989.880,69	16.455.517.783,32	(5.205.527.902,63)
B	PERHITUNGAN SECARA BIAYA			
1	PD. BPR BKK JATENG	760.750.996,00	-	760.750.996,00
2	PT. BANK JATENG	29.282.825.181,00	24.327.120.446,00	4.955.704.735,00
3	PT. JAMKRIDA JATENG	364.902.386,00	309.906.270,00	54.996.116,00
	JUMLAH	30.408.478.563,00	24.637.026.716,00	5.771.451.847,00
	JUMLAH KESELURUHAN	41.658.468.443,69	41.092.544.499,32	565.923.944,37

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak, bahwa tata cara pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO menggunakan metode ekuitas dan biaya.

a. Perhitungan Metode Ekuitas

Cara perhitungan metode ekuitas ini dengan cara memperhitungkan besaran persentase kepemilikan/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Demak. Metode ini digunakan ketika persentase kepemilikan/penyertaan modal kita diatas 20%. Berikut 5 BUMD yang menggunakan perhitungan ekuitas.

NO	Nama BUMD	Ekuitas Pengakuan 2025	Modal Disetor		Persentase Kepemilikan (%)	Laba BUMD (Laporan BUMD)	Laba Pengakuan LO
		(Rp)	Pem Prov/ Pem Pusat	Pemkab		(Rp)	(Rp)
			(Rp)	(Rp)			
1	PD. BPR. BKK	27.914.774.469,08	14.740.000.000,00	14.700.000.000,00	49,93	4.343.976.306,00	2.168.947.369,59
2	Perumda Air Minum	150.280.985.470,00	-	134.504.475.608,00	100,00	5.764.262.037,00	5.764.262.037,00
3	PT. LKM DEMAK SEJAHTERA	30.805.307.724,66	250.000.000,00	28.111.000.000,00	99,12	1.420.086.921,00	1.407.590.156,10
4	Perseroda Demak Sarana Sehat	28.807.839.125,00	-	26.500.000.000,00	100,00	564.007.084,00	564.007.084,00
5	PT. Demak Aneka Wira Usaha	23.137.844.603,00	-	20.950.000.000,00	100,00	1.345.183.234,00	1.345.183.234,00
JUMLAH		260.946.751.391,74	14.990.000.000,00	224.765.475.608,00		13.437.515.582,00	11.249.989.880,69

b. Perhitungan Metode Biaya

Metode ini digunakan ketika persentase kepemilikan/penyertaan modal kita dibawah 20%. Cara perhitungan metode ini adalah pengakuan pembagian deviden/sisa hasil usaha langsung menjadi Pendapatan-LO. Berikut laba pengakuan LO BUMD yang menggunakan perhitungan biaya.

NO	Nama BUMD	SETORAN DEVIDEN (Rp)	LABA PENGAKUAN LO 2024 (Rp)
1	PD. BPR BKK JATENG	760.750.996,00	-
2	PT. BANK JATENG	29.282.825.181,00	24.327.120.446,00
3	PT. JAMKRIDA JATENG	364.902.386,00	309.906.270,00
JUMLAH		30.408.478.563,00	24.637.026.716,00

Perhitungan total Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Total Pengakuan Pendapatan LO	
1	Perhitungan Ekuitas 11.249.989.880,69
2	Perhitungan Biaya 30.408.478.563,00
Jumlah 41.658.468.443,69	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Pemerintah Kabupaten Demak selama Tahun 2025 mencatatkan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp88.516.890.874,50 pada Tahun 2024 sebesar Rp304.963.925.626,97 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka mengalami penurunan sebesar Rp216.447.034.752,47. Untuk Lain-lain PAD yang Sah-LO mengalami penurunan yang signifikan disebabkan Pendapatan BLUD di tahun 2024 ada di rekening Lain-lain PAD yang Sah sedangkan untuk tahun 2025 pindah di rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan. Berikut rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO:

KODE	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	729.776.320,00	574.425.900,00	155.350.420,00
7.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	343.303.450,00	348.756.775,00	(5.453.325,00)
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	1.876.844.242,00	1.116.946.217,00	759.898.025,00
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	9.501.573.714,00	3.618.657.574,00	5.882.916.140,00
7.1.04.08	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.299.722.490,00	4.063.437.543,00	(2.763.715.053,00)
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.267.643,00	25.477.201,00	(22.209.558,00)
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	2.685.566.223,00	2.236.078.310,00	449.487.913,00
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	79.595.105,50	59.079.603,55	20.515.501,95
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	10.669.312.636,00	931.352.015,00	9.737.960.621,00
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	7.837.126.106,00	291.989.714.488,42	(284.152.588.382,42)
7.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	53.490.802.945,00	-	53.490.802.945,00
	JUMLAH	88.516.890.874,50	304.963.925.626,97	(216.447.034.752,47)

Perhitungan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah LO diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH (Rp)
PENDAPATAN LRA 2025	25.698.852.826,00
PIUTANG 2024	(41.330.083.758,55)
PIUTANG 2025	10.697.472.321,05
PENGHAPUSAN PIUTANG	3.249.511.629,00
REKLAS PIUTANG 2024	28.229.914.023,00
SUBSIDI/ KERINGANAN PIUTANG / DENDA	643.294.783,00
REKLAS RETRIBUSI DAN KAPITASI JKN	53.490.802.945,00
REKLAS RETRIBUSI DAN LAIN2 PAD (BLUD)	7.837.126.106,00
LAIN-LAIN PAD YANG SAH -LO	88.516.890.874,50

Untuk lebih jelasnya analisis perhitungan Lain-lain PAD yang Sah-LO per SKPD dijelaskan sebagai berikut.

NO	SKPD	PENDAPATAN LRA 2025 (Rp)	PIUTANG 2024 (Rp)	PIUTANG 2025 (Rp)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD)	-	(18.507.117.443,00)	-
2	RUMAH SAKIT UMUM SULTAN FATAH	-	(8.532.421.001,00)	-
3	PUSKESMAS MRANGGEN I	-	(9.009.000,00)	-
4	PUSKESMAS MRANGGEN II	-	(4.407.000,00)	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	PENDAPATAN LRA 2025 (Rp)	PIUTANG 2024 (Rp)	PIUTANG 2025 (Rp)
5	PUSKESMAS MRANGGEN III	-	(37.609.000,00)	-
6	PUSKESMAS KARANGAWEN I	-	(67.290.000,00)	-
7	PUSKESMAS KARANGAWEN II	-	(5.315.000,00)	-
8	PUSKESMAS GUNTUR I	-	(88.535.579,00)	-
9	PUSKESMAS GUNTUR II	-	(21.520.000,00)	-
10	PUSKESMAS SAYUNG I	-	(10.680.000,00)	-
11	PUSKESMAS SAYUNG II	-	(60.665.000,00)	-
12	PUSKESMAS KARANGTENGAH	-	(19.510.000,00)	-
13	PUSKESMAS BONANG I	-	(104.086.000,00)	-
14	PUSKESMAS BONANG II	-	(41.639.000,00)	-
15	PUSKESMAS DEMAK I	-	(2.180.000,00)	-
16	PUSKESMAS DEMAK II	-	(7.010.000,00)	-
17	PUSKESMAS DEMAK III	-	(2.000.000,00)	-
18	PUSKESMAS WONOSALAM I	-	(14.555.000,00)	-
19	PUSKESMAS WONOSALAM II	-	(61.544.000,00)	-
20	PUSKESMAS DEMPET	-	(62.344.000,00)	-
21	PUSKESMAS KEBONAGUNG	-	(77.590.000,00)	-
22	PUSKESMAS GAJAH I	-	(74.682.000,00)	-
23	PUSKESMAS GAJAH II	-	(57.278.000,00)	-
24	PUSKESMAS KARANGANYAR I	-	(41.814.000,00)	-
25	PUSKESMAS KARANGANYAR II	-	(66.939.000,00)	-
26	PUSKESMAS MIJEN I	-	(115.949.000,00)	-
27	PUSKESMAS MIJEN II	-	(13.430.000,00)	-
28	PUSKESMAS WEDUNG I	-	(59.260.000,00)	-
29	PUSKESMAS WEDUNG II	-	(63.535.000,00)	-
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	111.000,00	-	-
31	DINAS PERHUBUNGAN	-	(456.300.000,00)	456.300.000,00
32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	(2.376.920,00)	2.376.920,00
33	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	27.500.000,00	-	-
34	DINAS PARIWISATA	3.463.450,00	-	-
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	(12.400.000,00)	12.400.000,00
36	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	305.334.861,00	(212.383.301,55)	278.122.546,05
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	25.341.693.515,00	(12.416.709.514,00)	9.948.272.855,00
38	KECAMATAN DEMAK	20.750.000,00	-	-
	JUMLAH	25.698.852.826,00	(41.330.083.758,55)	10.697.472.321,05

Untuk penjelasan Lain-lain PAD yang Sah-LO selanjutnya sebagai berikut.

NO	SKPD	SUBSIDI/ KERINGANAN PIUTANG / DENDA (Rp)	REKLAS PIUTANG 2024 (Rp)	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LO (Rp)
1	PUSKESMAS DEMAK I	-	2.180.000,00	-
2	PUSKESMAS DEMAK II	-	7.010.000,00	-
3	PUSKESMAS DEMAK III	-	2.000.000,00	-
4	PUSKESMAS BONANG I	-	104.086.000,00	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	SUBSIDI/ KERINGANAN PIUTANG / DENDA (Rp)	REKLAS PIUTANG 2024 (Rp)	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LO (Rp)
5	PUSKESMAS BONANG II	-	41.639.000,00	-
6	PUSKESMAS WEDUNG I	-	59.260.000,00	-
7	PUSKESMAS WEDUNG II	-	63.535.000,00	-
8	PUSKESMAS MIJEN I	-	115.949.000,00	-
9	PUSKESMAS MIJEN II	-	13.430.000,00	-
10	PUSKESMAS KARANGANYAR I	-	41.814.000,00	-
11	PUSKESMAS KARANGANYAR II	-	66.939.000,00	-
12	PUSKESMAS GAJAH I	-	74.682.000,00	-
13	PUSKESMAS GAJAH II	-	57.278.000,00	-
14	PUSKESMAS SAYUNG I	-	10.680.000,00	-
15	PUSKESMAS SAYUNG II	-	60.665.000,00	-
16	PUSKESMAS KARANGAWEN I	-	67.290.000,00	-
17	PUSKESMAS KARANGAWEN II	-	5.315.000,00	-
18	PUSKESMAS DEMPET	-	62.344.000,00	-
19	PUSKESMAS GUNTUR I	-	88.535.579,00	-
20	PUSKESMAS GUNTUR II	-	21.520.000,00	-
21	PUSKESMAS MRANGGEN I	-	9.009.000,00	-
22	PUSKESMAS MRANGGEN II	-	4.407.000,00	-
23	PUSKESMAS MRANGGEN III	-	37.609.000,00	-
24	PUSKESMAS WONOSALAM I	-	14.555.000,00	-
25	PUSKESMAS WONOSALAM II	-	61.544.000,00	-
26	PUSKESMAS KARANGTENGAH	-	19.510.000,00	-
27	PUSKESMAS KEBONAGUNG	-	77.590.000,00	-
28	RUMAH SAKIT UMUM SULTAN FATAH	-	8.532.421.001,00	-
29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD)	-	18.507.117.443,00	-
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	111.000,00
31	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	27.500.000,00
32	DINAS PARIWISATA	-	-	3.463.450,00
33	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	371.074.105,50
34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	643.294.783,00	-	17.406.435.796,00
35	KECAMATAN DEMAK	-	-	20.750.000,00
	JUMLAH	643.294.783,00	28.229.914.023,00	17.829.334.351,50

Untuk penjelasan Lain-lain PAD yang Sah-LO selanjutnya sebagai berikut :

NO	SKPD	REKLAS RETRIBUSI DAN KAPITASI JKN (Rp)	REKLAS RETRIBUSI DAN LAIN2 PAD (BLUD) (Rp)	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LO (Rp)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD)	-	7.178.171.342,00	7.178.171.342,00
2	RUMAH SAKIT UMUM SULTAN FATAH	-	228.385.395,00	228.385.395,00
3	PUSKESMAS MRANGGEN I	1.891.403.226,00	52.265.082,00	1.943.668.308,00
4	PUSKESMAS MRANGGEN II	1.687.694.681,00	15.076.220,00	1.702.770.901,00
5	PUSKESMAS MRANGGEN III	1.779.418.958,00	4.799.510,00	1.784.218.468,00
6	PUSKESMAS KARANGAWEN I	2.237.767.312,00	5.849.426,00	2.243.616.738,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	REKLAS	REKLAS	LAIN-LAIN PAD
		RETRIBUSI DAN KAPITASI JKN (Rp)	RETRIBUSI DAN LAIN2 PAD (BLUD) (Rp)	YANG SAH LO (Rp)
7	PUSKESMAS KARANGAWEN II	2.837.005.113,00	31.339.651,00	2.868.344.764,00
8	PUSKESMAS GUNTUR I	2.808.063.693,00	10.122.554,00	2.818.186.247,00
9	PUSKESMAS GUNTUR II	2.027.253.852,00	7.515.935,00	2.034.769.787,00
10	PUSKESMAS SAYUNG I	2.184.871.922,00	17.989.626,00	2.202.861.548,00
11	PUSKESMAS SAYUNG II	1.707.160.009,00	12.791.752,00	1.719.951.761,00
12	PUSKESMAS KARANGTENGAH	2.390.515.217,00	13.390.846,00	2.403.906.063,00
13	PUSKESMAS BONANG I	3.549.638.941,00	9.339.430,00	3.558.978.371,00
14	PUSKESMAS BONANG II	2.423.097.149,00	5.717.260,00	2.428.814.409,00
15	PUSKESMAS DEMAK I	1.312.074.959,00	14.092.988,00	1.326.167.947,00
16	PUSKESMAS DEMAK II	1.442.983.388,00	8.680.232,00	1.451.663.620,00
17	PUSKESMAS DEMAK III	1.205.954.591,00	3.559.451,00	1.209.514.042,00
18	PUSKESMAS WONOSALAM I	1.963.718.911,00	13.775.707,00	1.977.494.618,00
19	PUSKESMAS WONOSALAM II	1.861.500.439,00	12.168.976,00	1.873.669.415,00
20	PUSKESMAS DEMPET	2.876.510.167,00	14.683.542,00	2.891.193.709,00
21	PUSKESMAS KEBONAGUNG	1.857.782.208,00	18.050.542,00	1.875.832.750,00
22	PUSKESMAS GAJAH I	1.817.198.917,00	14.836.175,00	1.832.035.092,00
23	PUSKESMAS GAJAH II	1.278.680.643,00	7.006.248,00	1.285.686.891,00
24	PUSKESMAS KARANGANYAR I	1.785.445.199,00	28.144.479,00	1.813.589.678,00
25	PUSKESMAS KARANGANYAR II	1.641.981.467,00	7.306.017,00	1.649.287.484,00
26	PUSKESMAS MIJEN I	1.416.320.828,00	59.028.699,00	1.475.349.527,00
27	PUSKESMAS MIJEN II	1.321.294.675,00	7.103.080,00	1.328.397.755,00
28	PUSKESMAS WEDUNG I	2.323.778.254,00	32.109.177,00	2.355.887.431,00
29	PUSKESMAS WEDUNG II	1.861.688.226,00	3.826.764,00	1.865.514.990,00
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	111.000,00
31	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	27.500.000,00
32	DINAS PARIWISATA	-	-	3.463.450,00
33	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	371.074.105,50
34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	-	26.766.063.268,00
35	KECAMATAN DEMAK	-	-	20.750.000,00
	JUMLAH	53.490.802.945,00	7.837.126.106,00	88.516.890.874,50

b. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer-LO meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi serta bantuan keuangan dan lain-lain yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal pembukuan pendapatan transfer-LO Pemerintah Kabupaten Demak mencatat sebesar pendapatan yang terealisasi dalam periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp1.727.434.131.403,00 sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Perhitungan Pendapatan Transfer-LO diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

JENIS PENDAPATAN	PENDAPATAN TRANSFER LRA 2025	DANA DESA (Rp)	PIUTANG 2024 (Rp)	PIUTANG 2025 (Rp)	PENDAPATAN TRANSFER LO (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.509.639.702.893,00	-	-	-	1.509.639.702.893,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	221.984.381.524,00	(201.113.654.524,00)	-	-	20.870.727.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	131.270.431.705,00	-	(13.356.424.448,00)	15.126.827.536,00	133.040.834.793,00
Bantuan Keuangan	63.882.866.717,00	-	-	-	63.882.866.717,00
JUMLAH	1.926.777.382.839,00	(201.113.654.524,00)	(13.356.424.448,00)	15.126.827.536,00	1.727.434.131.403,00

Untuk penjelasan Perhitungan Pendapatan Transfer-LO diperoleh selanjutnya sebagai berikut.

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.509.639.702.893,00	1.565.002.519.973,00	(55.362.817.080,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	20.870.727.000,00	20.070.251.000,00	800.476.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	133.040.834.793,00	209.885.154.272,00	(76.844.319.479,00)
Bantuan Keuangan - LO	63.882.866.717,00	46.206.818.600,00	17.676.048.117,00
JUMLAH	1.727.434.131.403,00	1.841.164.743.845,00	(113.730.612.442,00)

Dimana secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	79.109.196.400,00	62.326.736.000,00	16.782.460.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.002.525.498.550,00	961.884.931.000,00	40.640.567.550,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	29.870.990.180,00	166.945.979.977,00	(137.074.989.797,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	398.134.017.763,00	373.844.872.996,00	24.289.144.767,00
JUMLAH	1.509.639.702.893,00	1.565.002.519.973,00	(55.362.817.080,00)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO selama Tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp1.509.639.702.893,00

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya -LO

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
Insentif Fiskal-LO	20.870.727.000,00	20.070.251.000,00	800.476.000,00
JUMLAH	20.870.727.000,00	20.070.251.000,00	800.476.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya -LO selama Tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp20.870.727.000,00.

Untuk Pendapatan Dana Desa sebesar Rp201.113.654.524,00 dikeluarkan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, karena pengelolaan keuangan dana tersebut langsung dikelola rekening desa tidak melalui Pemerintah Daerah.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	133.040.834.793,00	209.885.154.272,000	(76.844.319.479,00)
JUMLAH	133.040.834.793,00	209.885.154.272,00	(76.844.319.479,00)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya-LO merupakan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi selama Tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp131.270.431.705,00 ditambah piutang Tahun 2025 sebesar Rp15.126.827.536,00 dikurangi piutang Tahun 2024 sebesar Rp13.356.424.448,00 sehingga Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya-LO sebesar Rp133.040.834.793,00.

4) Bantuan Keuangan-LO

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi - LO	63.882.866.717,00	46.206.818.600,00	17.676.048.117,00
JUMLAH	63.882.866.717,00	46.206.818.600,00	17.676.048.117,00

Bantuan Keuangan-LO selama Tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp63.882.866.717,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah pihak ketiga dan sumber lain selain pendapatan daerah. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebesar Rp125.981.631.172,75, pada Tahun 2024 sebesar Rp72.445.062.343,56 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka mengalami kenaikan sebesar Rp53.536.568.829,19 rincian sebagai berikut

Perhitungan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

JENIS PENDAPATAN	PENDAPATAN LRA 2025 (Rp)	HIBAH (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG (Rp)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LO (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	4.488.538,00	122.715.702.744,55	-	122.720.191.282,55
Pendapatan Lainnya - LO	-	-	3.261.439.890,20	3.261.439.890,20
JUMLAH	4.488.538,00	122.715.702.744,55	3.261.439.890,20	125.981.631.172,75

Untuk penjelasan Perhitungan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO diperoleh selanjutnya sebagai berikut.

KODE	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
7:03:01	Pendapatan Hibah-LO	122.720.191.282,55	70.159.335.140,21	52.560.856.142,34
7:03:03	Pendapatan Lainnya - LO	3.261.439.890,20	2.285.727.203,35	975.712.686,85
	JUMLAH	125.981.631.172,75	72.445.062.343,56	53.536.568.829,19

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1) Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Demak terdiri dari Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, dan Sumbangan Pihak Ketiga/sejenisnya. Adapun rinciannya sebagai berikut.

KODE	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
7.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	96.985.807.945,72	37.122.390.333,00
7.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	21.134.964.553,83	21.420.835.921,21
7.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	-	384.576.400,00
7.3.1.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	4.599.418.783,00	11.231.532.486,00
	JUMLAH	122.720.191.282,55	70.159.335.140,21

Untuk lebih jelasnya Pendapatan Hibah dan sumbangan pihak ketiga/sejenisnya per SKPD kami jelaskan sebagai berikut.

NO	SKPD	PEND LRA 2025 (Rp)	HIBAH (Rp)	PENDAPATAN HIBAH LO (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	60.305.560.665,50	60.305.560.665,50
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	-	22.451.991.094,43	22.451.991.094,43
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	-	48.825.000,00	48.825.000,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	-	233.300.000,00	233.300.000,00
5	PUSKESMAS MRANGGEN II	-	8.128.428,00	8.128.428,00
6	PUSKESMAS GAJAH II	-	7.902.148,81	7.902.148,81
7	PUSKESMAS KARANGANYAR II	-	8.128.428,00	8.128.428,00
8	PUSKESMAS MIJEN II	-	7.902.148,81	7.902.148,81
9	PUSKESMAS WEDUNG II	-	8.128.428,00	8.128.428,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	20.412.357.489,00	20.412.357.489,00
11	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	3.037.896.050,00	3.037.896.050,00
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.432.061.300,00	1.432.061.300,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	936.744.000,00	936.744.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	1.675.061.778,00	1.675.061.778,00
15	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	8.728.677.592,00	8.728.677.592,00
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	3.252.567.650,00	3.252.567.650,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	-	146.370.544,00	146.370.544,00
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	4.488.538,00	-	4.488.538,00
19	KECAMATAN GAJAH	-	4.600.000,00	4.600.000,00
20	KECAMATAN KARANGANYAR	-	9.500.000,00	9.500.000,00
	JUMLAH	4.488.538,00	122.715.702.744,55	122.720.191.282,55

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Berikut ini disajikan rincian dari Pendapatan Lain-lain yang Sah yang berasal dari Hibah dan sumbangan Pihak ketiga/sejenisnya menurut sumbernya.

NO	SKPD	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO (Rp)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO (Rp)	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	59.921.183.165,50	-	384.377.500,00	60.305.560.665,50
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	960.461.545,60	20.971.472.853,83	520.056.695,00	22.451.991.094,43
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	48.825.000,00	-	-	48.825.000,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	-	-	233.300.000,00	233.300.000,00
5	PUSKESMAS MRANGGEN II	8.128.428,00	-	-	8.128.428,00
6	PUSKESMAS GAJAH II	7.902.148,81	-	-	7.902.148,81
7	PUSKESMAS KARANGANYAR II	8.128.428,00	-	-	8.128.428,00
8	PUSKESMAS MIJEN II	7.902.148,81	-	-	7.902.148,81
9	PUSKESMAS WEDUNG II	8.128.428,00	-	-	8.128.428,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.412.357.489,00	-	-	20.412.357.489,00
11	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	3.037.896.050,00	3.037.896.050,00
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.401.180.600,00	30.880.700,00	-	1.432.061.300,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	936.744.000,00	-	-	936.744.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.655.661.778,00	-	19.400.000,00	1.675.061.778,00
15	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.596.066.592,00	132.611.000,00	-	8.728.677.592,00
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.866.767.650,00	-	385.800.000,00	3.252.567.650,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	146.370.544,00	-	-	146.370.544,00
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	-	4.488.538,00	4.488.538,00
19	KECAMATAN GAJAH	-	-	4.600.000,00	4.600.000,00
20	KECAMATAN KARANGANYAR	-	-	9.500.000,00	9.500.000,00
	JUMLAH	96.985.807.945,72	21.134.964.553,83	4.599.418.783,00	122.720.191.282,55

Berikut ini disajikan rincian dari Pendapatan Lain-lain yang Sah yang berasal dari Hibah menurut bentuknya.

NO	SKPD	Hibah Aset tetap (Rp)	Hibah Persediaan bahan Habis Pake (Rp)	Hibah uang (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	59.599.137.069,50	-	-
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	-	22.451.991.094,43	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	-	48.825.000,00	-
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	233.300.000,00	-	-
5	PUSKESMAS MRANGGEN II	8.128.428,00	-	-
6	PUSKESMAS GAJAH II	7.902.148,81	-	-
7	PUSKESMAS KARANGANYAR II	8.128.428,00	-	-
8	PUSKESMAS MIJEN II	7.902.148,81	-	-
9	PUSKESMAS WEDUNG II	8.128.428,00	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.412.357.489,00	-	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	Hibah Aset tetap (Rp)	Hibah Persediaan bahan Habis Pake (Rp)	Hibah uang (Rp)
11	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.537.896.050,00	-	-
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.046.397.000,00	385.664.300,00	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	936.744.000,00	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.800.000,00	1.655.661.778,00	-
15	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	279.720.000,00	8.448.957.592,00	-
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.866.767.650,00	-	-
17	SEKRETARIAT DAERAH	146.370.544,00	-	-
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	-	4.488.538,00
19	KECAMATAN GAJAH	4.600.000,00	-	-
20	KECAMATAN KARANGANYAR	9.500.000,00	-	-
	JUMLAH	87.194.035.384,12	33.927.843.764,43	4.488.538,00

Untuk penjelasan selanjutnya rincian dari Pendapatan Lain-lain yang Sah yang berasal dari Hibah menurut bentuknya sebagai berikut :

NO	SKPD	Ekstrakomp/BHP (Rp)	CSR BANK JATENG DEMAK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	706.423.596,00	-	60.305.560.665,50
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	-	-	22.451.991.094,43
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	-	-	48.825.000,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	-	-	233.300.000,00
5	PUSKESMAS MRANGGEN II	-	-	8.128.428,00
6	PUSKESMAS GAJAH II	-	-	7.902.148,81
7	PUSKESMAS KARANGANYAR II	-	-	8.128.428,00
8	PUSKESMAS MIJEN II	-	-	7.902.148,81
9	PUSKESMAS WEDUNG II	-	-	8.128.428,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	20.412.357.489,00
11	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	500.000.000,00	3.037.896.050,00
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	1.432.061.300,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	936.744.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.600.000,00	-	1.675.061.778,00
15	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	8.728.677.592,00
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	385.800.000,00	3.252.567.650,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	146.370.544,00
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	-	4.488.538,00
19	KECAMATAN GAJAH	-	-	4.600.000,00
20	KECAMATAN KARANGANYAR	-	-	9.500.000,00
	JUMLAH	708.023.596,00	885.800.000,00	122.720.191.282,55

Adapun untuk Hibah uang BPKPAD sebesar Rp4.488.538,00 adalah sumbangan pihak ketiga yang terdiri dari :

NO	KETERANGAN	SEBESAR (Rp)
1	Pengembalian PPH 21 TPP P3K Bulan Februari 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Demak (dobel bayar)	3.316.809,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga (Double Bayar Ret IMB An. Arif Prasetyo - DINPUTARU)	268.200,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	KETERANGAN	SEBESAR (Rp)
3	Sumbangan Pihak Ketiga (DIKPORA uji coba qiris)	3,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga (kelebihan bayar IMB DINPUTARU)	7.500,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga (DIKPORA uji coba qiris)	2,00
6	Penyetoran Dana Salah Transfer Tahun 2025 di Kecamatan Mranggen (SPAN SP2D 25999133021499900000)	896.024,00
	JUMLAH	4.488.538,00

Berikut ini disajikan rincian jenis barang dan keterangan Hibah SKPD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.065.061.300,00
2	Perlengkapan Kebakaran Hutan	8.200.000,00
3	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	16.320.000,00
4	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	19.271.000,00
5	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	231.027.124,00
6	Alat Kantor Lainnya	14.700.000,00
7	Mebel	235.691.808,00
8	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.200.000,00
9	Meja Rapat Pejabat	1.315.000,00
10	Kursi Kerja Pejabat	2.500.000,00
11	Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00
12	Alat Kedokteran Umum	8.600.000,00
13	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.200.000,00
14	Bangunan Gedung Kantor	5.648.179.565,00
15	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	41.832.718.383,00
16	Bangunan Gedung Perpustakaan	2.546.869.007,00
17	Bangunan Gedung Laboratorium	237.062.462,00
18	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.917.648.445,00
19	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	649.721.332,00
20	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.044.760,00
21	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.355.200,00
22	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.795.200,00
23	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	700.000,00
24	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	569.525,00
25	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	668.000,00
26	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	115.000,00
27	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	1.696.000,00
28	Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.108.579,00
29	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama	650.000,00
30	Alat Laboratorium Pertanian	50.000.000,00
31	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.533.857.387,50
32	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	833.338.088,00
	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.600.000,00
2	Mebel	20.280.000,00
3	Alat Pendingin	14.850.000,00
4	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.931.000,00
5	Alat Kantor Lainnya	6.400.000,00
6	Peralatan Komputer Lainnya	2.600.000,00
7	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	126.999.500,00
8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	127.000.000,00
9	Pagar	30.717.000,00
	JUMLAH	60.305.560.665,50

DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Bahan-Bahan Lainnya	
	PAKET BHP HIV VIRAL LOAD,kapas, multivitamin, stik gula darah,cawan gigi plastik dll	960.461.545,60
	HIBAH PEMERINTAH DAERAH	
1	Obat-Obatan-Obat,vaksin dll	20.971.472.853,33
	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	
1	Bahan-Bahan Lainnya	
	REAGEN HIV 1, DBS KIT dll	520.056.695,00
	JUMLAH	22.451.991.093,93

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Obat-Obatan	48.825.000,00
	JUMLAH	48.825.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	233.300.000,00
	JUMLAH	233.300.000,00

PUSKESMAS MRANGGEN II

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.498.500,00
2	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	6.629.928,00
	JUMLAH	8.128.428,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PUSKESMAS GAJAH II

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.299.999,81
2	Buku Umum	6.602.149,00
	JUMLAH	7.902.148,81

PUSKESMAS KARANGANYAR II

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Buku Umum	6.629.928,00
2	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.498.500,00
	JUMLAH	8.128.428,00

PUSKESMAS MIJEN II

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Buku Umum	6.602.149,00
2	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1.299.999,81
	JUMLAH	7.902.148,81

PUSKESMAS WEDUNG II

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.498.500,00
2	Buku Umum	6.629.928,00
	JUMLAH	8.128.428,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Jalan Kabupaten	20.412.357.489,00
	JUMLAH	20.412.357.489,00

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	
1	Tanah untuk Jalan	1.902.061.350,00
2	Jalan Lainnya	532.003.500,00
3	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	103.831.200,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (material bangunan rumah apung dari BPD)	500.000.000,00
	JUMLAH	3.037.896.050,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (sembako, makanan siap saji)	354.783.600,00
2	Kendaraan Bermotor Khusus	484.297.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
3	Alat Pendukung Pencarian	381.050.000,00
4	Alat SAR Lainnya	181.050.000,00
	HIBAH PEMERINTAH DAERAH	
1	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (sembako, karung plastik, peralatan kesehatan/kebersihan)	30.880.700,00
	JUMLAH	1.432.061.300,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (blangko KTP-e)	936.744.000,00
	JUMLAH	936.744.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Obatan-Obat-Obatan Lainnya (alat kontrasepsi)	1.655.661.778,00
	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	
1	Peralatan Studio Video dan Film	5.500.000,00
2	Peralatan Mini Computer	1.000.000,00
3	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.300.000,00
4	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.200.000,00
5	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	300.000,00
6	Bahan-Bahan Lainnya (kabel TV)	100.000,00
	JUMLAH	1.675.061.778,00

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (vaksin dll)	8.316.346.592,00
2	Alat Pengolahan Lainnya	279.720.000,00
	HIBAH PEMERINTAH DAERAH	
1	Obat-Obatan-Obat (obat pertanian norat, bramkus)	132.611.000,00
	JUMLAH	8.728.677.592,00

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.866.767.650,00
	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	
1	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (kompom, gas, regulator)	385.800.000,00
	JUMLAH	3.252.567.650,00



SEKRETARIAT DAERAH

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	HIBAH PEMERINTAH PUSAT	
1	Bangunan Gedung Kantor	146.370.544,00
	JUMLAH	146.370.544,00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO	KETERANGAN	SEBESAR (Rp)
1	Pengembalian PPH 21 TPP P3K Bulan Februari 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Demak (dobel bayar)	3.316.809,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga (Double Bayar Ret IMB An. Arif Prasetyo - DINPUTARU)	268.200,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga (DIKPORA uji coba qiris)	3,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga (kelebihan bayar IMB DINPUTARU)	7.500,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga (DIKPORA uji coba qiris)	2,00
6	Penyetoran Dana Salah Transfer Tahun 2025 di Kecamatan Mranggen (SPAN SP2D 25999133021499900000)	896.024,00
	JUMLAH	4.488.538,00

Adapun untuk BPKPAD sebesar Rp4.488.538,00 adalah sumbangan pihak ketiga berupa hibah uang

KECAMATAN GAJAH

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.600.000,00
	JUMLAH	4.600.000,00

KECAMATAN KARANGANYAR

NO	JENIS BARANG	SEBESAR (Rp)
	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	
1	Alat Studio Lainnya	900.000,00
2	Peralatan Personal Computer	8.600.000,00
	JUMLAH	9.500.000,00

2) Pendapatan Lainnya -LO

Berikut ini disajikan rincian dari Pendapatan Lainnya-LO berasal dari :

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	-	573.075,00
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	30.000.000,00
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.250,00	-
4	DINAS PARIWISATA	3.339.364,58	7.921,25
5	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	359.404.211,00	9.465.620,00
6	RSUD SULFAT	301.669.314,99	129.267.032,58
7	RSUD SULKA	1.069.171.317,54	-
8	PUSKESMAS DEMAK I	10.900,00	10.900,00
9	PUSKESMAS DEMAK II	35.050,00	9.900,00
10	PUSKESMAS DEMAK III	10.000,00	10.000,00
11	PUSKESMAS BONANG I	520.430,00	2.520.050,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
12	PUSKESMAS BONANG II	208.195,00	245.970,00
13	PUSKESMAS WEDUNG I	295.400,00	3.377.820,00
14	PUSKESMAS WEDUNG II	317.675,00	211.333,00
15	PUSKESMAS MIJEN I	2.182.870,00	266.479,00
16	PUSKESMAS MIJEN II	67.150,00	93.425,00
17	PUSKESMAS KARANGANYAR I	209.070,00	130.660,00
18	PUSKESMAS KARANGANYAR II	334.695,00	4.024.500,00
19	PUSKESMAS GAJAH I	373.410,00	148.900,00
20	PUSKESMAS GAJAH II	286.390,00	87.605,00
21	PUSKESMAS SAYUNG I	53.400,00	6.000,00
22	PUSKESMAS SAYUNG II	303.325,00	101.850,00
23	PUSKESMAS KARANGAWEN I	336.450,00	239.450,00
24	PUSKESMAS KARANGAWEN II	26.575,00	298.753,36
25	PUSKESMAS DEMPET	311.720,00	4.196.585,00
26	PUSKESMAS GUNTUR I	442.677,90	5.596.659,02
27	PUSKESMAS GUNTUR II	107.600,00	963.500,00
28	PUSKESMAS MRANGGEN I	45.045,00	24.360,00
29	PUSKESMAS MRANGGEN II	22.035,00	5.450,00
30	PUSKESMAS MRANGGEN III	188.045,00	135.758,00
31	PUSKESMAS WONOSALAM I	72.775,00	110.900,00
32	PUSKESMAS WONOSALAM II	307.720,00	186.237,00
33	PUSKESMAS KARANGTENGAH	97.550,00	4.000,00
34	PUSKESMAS KEBONAGUNG	387.950,00	176.700,00
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.520.299.329,19	2.093.229.810,14
	JUMLAH	3.261.439.890,20	2.285.727.203,35

Adapun Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp3.261.439.890,20 seluruhnya merupakan pengurangan penyisihan piutang dari piutang yang sudah terbayar. Rincian penyisihan piutang per SKPD kami jelaskan sebagai berikut.

NO	SKPD	PENYISIHAN PIUTANG
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	1.069.171.317,54
2	RSUD SULFAT	301.669.314,99
3	PUSKESMAS DEMAK I	10.900,00
4	PUSKESMAS DEMAK II	35.050,00
5	PUSKESMAS DEMAK III	10.000,00
6	PUSKESMAS BONANG I	520.430,00
7	PUSKESMAS BONANG II	208.195,00
8	PUSKESMAS WEDUNG I	295.400,00
9	PUSKESMAS WEDUNG II	317.675,00
10	PUSKESMAS MIJEN I	2.182.870,00
11	PUSKESMAS MIJEN II	67.150,00
12	PUSKESMAS KARANGANYAR I	209.070,00
13	PUSKESMAS KARANGANYAR II	334.695,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	PENYISIHAN PIUTANG
14	PUSKESMAS GAJAH I	373.410,00
15	PUSKESMAS GAJAH II	286.390,00
16	PUSKESMAS SAYUNG I	53.400,00
17	PUSKESMAS SAYUNG II	303.325,00
18	PUSKESMAS KARANGAWEN I	336.450,00
19	PUSKESMAS KARANGAWEN II	26.575,00
20	PUSKESMAS DEMPET	311.720,00
21	PUSKESMAS GUNTUR I	442.677,90
22	PUSKESMAS GUNTUR II	107.600,00
23	PUSKESMAS MRANGGEN I	45.045,00
24	PUSKESMAS MRANGGEN II	22.035,00
25	PUSKESMAS MRANGGEN III	188.045,00
26	PUSKESMAS WONOSALAM I	72.775,00
27	PUSKESMAS WONOSALAM II	307.720,00
28	PUSKESMAS KARANGTENGAH	97.550,00
29	PUSKESMAS KEBONAGUNG	387.950,00
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.250,00
31	DINAS PARIWISATA	3.339.364,58
32	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	359.404.211,00
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.520.299.329,19
	JUMLAH	3.261.439.890,20



2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Untuk menyusun laporan operasional Pemerintah Kabupaten Demak mengakui beban pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Beban terdiri dari beban operasi dan Beban dari kegiatan non operasional. Beban operasi merupakan beban yang dikeluarkan sebagai akibat kegiatan utama Pemerintah Daerah diantaranya. Berikut disajikan tabel komparasi Beban Tahun 2025 dan Beban Tahun 2024 :

URAIAN	BEBAN 2025 (Rp)	BEBAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
Beban Pegawai	1.069.444.552.078,00	1.009.682.841.231,80	59.761.710.846,20
Beban Persediaan	299.478.746.654,08	256.860.642.295,65	42.618.104.358,43
Beban Jasa	324.817.986.764,96	261.605.117.763,79	63.212.869.001,17
Beban Pemeliharaan	41.720.366.665,62	29.164.978.644,00	12.555.388.021,62
Beban Perjalanan Dinas	57.334.275.603,00	72.815.499.917,00	(15.481.224.314,00)
Beban Subsidi	643.294.783,00	512.699.368,00	130.595.415,00
Beban Hibah	212.512.975.037,12	309.332.921.323,00	(96.819.946.285,88)
Beban Bantuan Sosial	23.621.422.000,00	26.923.430.000,00	(3.302.008.000,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	361.025.816.621,50	362.693.626.519,78	(1.667.809.898,28)
Beban Penyisihan Piutang	9.408.758.123,22	9.031.462.806,78	377.295.316,44
Beban Transfer	180.801.589.592,00	171.939.032.752,00	8.862.556.840,00
JUMLAH	2.580.809.783.922,50	2.510.562.252.621,80	70.247.531.300,70

Beban Non Operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh kegiatan yang bukan kegiatan utama pemerintah daerah sebagai berikut :

URAIAN	BEBAN 2025	BEBAN 2024
	(Rp)	(Rp)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	59.939.349.797,41	26.026.381.431,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	636.183.351,25	354.273.958,58
JUMLAH	60.575.533.148,66	26.380.655.389,58

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Adapun Beban Luar Biasa tahun 2025 dan 2024 disampaikan sebagaimana berikut :

URAIAN	BEBAN 2025	BEBAN 2024
	(Rp)	(Rp)
Beban Luar Biasa	339.610.000,00	-

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pegawai dengan perjanjian kerja yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal/dikapitalisasi menjadi aset tetap. Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama Tahun 2025 yang terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Beban Pegawai BLUD.

KODE REK	URAIAN	BEBAN 2025 (Rp)	BEBAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
8.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	564.292.563.843,00	555.806.527.402,00	8.486.036.441,00
8.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	384.328.361.211,00	287.609.970.212,00	96.718.390.999,00
8.1.1.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	36.383.962.948,00	31.213.425.384,00	5.170.537.564,00
8.1.1.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.133.469.436,00	1.333.219.368,00	(199.749.932,00)
8.1.1.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.249.296.000,00	1.034.288.000,00	215.008.000,00
8.1.1.99	Beban Pegawai BLUD	82.056.898.640,00	132.685.410.865,80	(50.628.512.225,80)
	JUMLAH	1.069.444.552.078,00	1.009.682.841.231,80	59.761.710.846,20

1) Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan dicatat sebesar realisasi gaji dan tunjangan pegawai dengan memperhitungkan utang beban gaji dan tunjangan Tahun 2025 dan utang beban gaji dan tunjangan Tahun 2024. Beban gaji dan tunjangan pegawai Tahun 2025 sebesar Rp564.292.563.843,00. Berikut data penjelasan beban gaji dan tunjangan Tahun 2025.

NO	SKPD	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 2025	UTANG BEBAN 2025	BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	354.503.370.528,00	2.868.447.600,00	357.371.818.128,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	103.570.462.613,00	84.050.498,00	103.654.513.111,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.264.229.753,00	-	9.264.229.753,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.730.919.861,00	-	2.730.919.861,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.013.981.498,00	-	4.013.981.498,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.321.462.268,00	-	2.321.462.268,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.299.084.422,00	-	2.299.084.422,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.915.870.689,00	-	2.915.870.689,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.091.181.486,00	-	6.091.181.486,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.411.710.541,00	-	2.411.710.541,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.639.443.892,00	-	2.639.443.892,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	2.573.118.453,00	-	2.573.118.453,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.676.380.226,00	-	2.676.380.226,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.333.624.086,00	-	2.333.624.086,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.775.999.683,00	-	1.775.999.683,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 2025	UTANG BEBAN 2025	BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.076.503.087,00	-	2.076.503.087,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.856.878.656,00	-	1.856.878.656,00
18	DINAS PARIWISATA	2.134.425.046,00	-	2.134.425.046,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.280.629.884,00	-	8.280.629.884,00
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.122.354.820,00	-	4.122.354.820,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	8.828.635.352,00	-	8.828.635.352,00
22	SEKRETARIAT DPRD	2.331.803.277,00	-	2.331.803.277,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	3.921.399.317,00	-	3.921.399.317,00
24	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	2.786.358.346,00	-	2.786.358.346,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.777.916.222,00	-	3.777.916.222,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.122.640.502,00	-	3.122.640.502,00
27	KECAMATAN DEMAK	2.486.175.639,00	-	2.486.175.639,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	849.629.754,00	-	849.629.754,00
29	KECAMATAN DEMPET	711.966.730,00	-	711.966.730,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	878.306.606,00	-	878.306.606,00
31	KECAMATAN MIJEN	721.172.650,00	-	721.172.650,00
32	KECAMATAN GAJAH	958.261.598,00	-	958.261.598,00
33	KECAMATAN BONANG	967.436.461,00	-	967.436.461,00
34	KECAMATAN WEDUNG	1.081.718.237,00	-	1.081.718.237,00
35	KECAMATAN SAYUNG	1.242.931.885,00	-	1.242.931.885,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	952.234.160,00	-	952.234.160,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	709.763.442,00	-	709.763.442,00
38	KECAMATAN GUNTUR	1.017.011.588,00	-	1.017.011.588,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	1.098.661.718,00	-	1.098.661.718,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	695.466.422,00	-	695.466.422,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.608.944.347,00	-	1.608.944.347,00
	JUMLAH	561.340.065.745,00	2.952.498.098,00	564.292.563.843,00

2) Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban Tambahan Penghasilan tercatat sebesar Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan memperhitungkan utang beban tambahan penghasilan tahun 2025 dan utang beban tambahan penghasilan tahun 2024. Pada tahun 2025, terdapat perubahan nomenklatur atas Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan kodifikasi 8.1.01.03 menjadi Beban Tambahan Penghasilan ASN dengan kodifikasi 8.1.01.02. Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 sebesar Rp384.328.361.211,00 yang terdistribusi pada SKPD sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN 2025	UTANG BEBAN 2025	UTANG BEBAN 2024	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	233.330.320.285,00	36.536.811.800,00	-	269.867.132.085,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	27.662.808.067,00	5.677.842.485,00	(60.340.222,00)	33.280.310.330,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.407.903.629,00	-	-	5.407.903.629,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.885.635.801,00	-	-	1.885.635.801,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.537.910.250,00	-	-	2.537.910.250,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.674.096.594,00	-	-	1.674.096.594,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.696.768.316,00	-	-	1.696.768.316,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.280.314.622,00	-	-	2.280.314.622,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.555.202.049,00	-	-	3.555.202.049,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.652.536.099,00	-	-	1.652.536.099,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.018.580.459,00	-	(2.320.000,00)	2.016.260.459,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	1.778.182.066,00	-	-	1.778.182.066,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.991.430.743,00	-	-	1.991.430.743,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.767.557.006,00	-	-	1.767.557.006,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.320.461.950,00	-	-	1.320.461.950,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.496.255.634,00	-	-	1.496.255.634,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.511.477.603,00	-	-	1.511.477.603,00
18	DINAS PARIWISATA	1.576.497.315,00	-	-	1.576.497.315,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5.862.577.971,00	-	-	5.862.577.971,00
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.691.901.476,00	-	-	2.691.901.476,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	7.177.190.261,00	-	-	7.177.190.261,00
22	SEKRETARIAT DPRD	1.745.051.738,00	-	-	1.745.051.738,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	3.815.460.607,00	-	-	3.815.460.607,00
24	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	2.132.550.486,00	-	-	2.132.550.486,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	10.794.998.088,00	-	-	10.794.998.088,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.348.361.902,00	-	-	2.348.361.902,00
27	KECAMATAN DEMAK	1.653.983.535,00	-	-	1.653.983.535,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	672.994.665,00	-	-	672.994.665,00
29	KECAMATAN DEMPET	454.713.125,00	-	-	454.713.125,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	558.939.997,00	-	-	558.939.997,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN 2025	UTANG BEBAN 2025	UTANG BEBAN 2024	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
31	KECAMATAN MIJEN	500.945.997,00	-	-	500.945.997,00
32	KECAMATAN GAJAH	586.895.997,00	-	-	586.895.997,00
33	KECAMATAN BONANG	552.880.437,00	-	-	552.880.437,00
34	KECAMATAN WEDUNG	623.070.664,00	-	-	623.070.664,00
35	KECAMATAN SAYUNG	668.538.620,00	-	-	668.538.620,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	633.087.997,00	-	-	633.087.997,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	442.053.197,00	-	-	442.053.197,00
38	KECAMATAN GUNTUR	652.641.308,00	-	-	652.641.308,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	695.431.997,00	-	-	695.431.997,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	472.640.509,00	-	-	472.640.509,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.295.518.086,00	-	-	1.295.518.086,00
	JUMLAH	342.176.367.148,00	42.214.654.285,00	(62.660.222,00)	384.328.361.211,00

Adapun rincian atas Beban Tambahan Penghasilan sebagai berikut :

No	Keterangan	Beban Tambahan Penghasilan
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.286.318.772,00
8.1.01.02.02	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	311.269.334,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	61.931.747.897,00
8.1.01.02.06	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	280.799.025.208,00
	Total	384.328.361.211,00

3) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 dikelola oleh Sekretariat DPRD dan terealisasi sama dengan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp36.383.962.948,00.

4) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH juga relatif sama dengan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.133.469.436,00, secara rinci terdapat dalam tabel berikut.

NO	SKPD	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH 2025	BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH 2025
		(Rp)	(Rp)
1	SEKRETARIAT DAERAH	232.987.839,00	232.987.839,00
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	900.481.597,00	900.481.597,00
	JUMLAH	1.133.469.436,00	1.133.469.436,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tercatat sebesar Rp1.249.296.000,00.

NO	SKPD	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH 2025 (Rp)	BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH 2025 (Rp)
1	SEKRETARIAT DAERAH	901.800.000,00	901.800.000,00
2	SEKRETARIAT DPRD	347.496.000,00	347.496.000,00
	JUMLAH	1.249.296.000,00	1.249.296.000,00

6) Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD sebesar Rp82.056.898.640,00 merupakan beban yang berasal dari belanja pegawai yang dananya bersumber dari dana BLUD yang dikelola oleh RSUD Sunan Kalijaga, RSUD Sultan Fatah, dan seluruh Puskesmas di Kabupaten Demak. Dengan rincian sebagai berikut.

NO	SKPD	BELANJA PEGAWAI BLUD 2025 (Rp)	UTANG BEBAN 2025	UTANG BEBAN 2024	BEBAN PEGAWAI BLUD 2025 (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	36.302.030.476,00	-	(6.688.913.239,00)	29.613.117.237,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	13.916.562.520,00	-	(5.408.510.112,00)	8.508.052.408,00
3	PUSKESMAS DEMAK I	919.189.360,00	-	(87.765.245,00)	831.424.115,00
4	PUSKESMAS DEMAK II	1.193.464.862,00	-	-	1.193.464.862,00
5	PUSKESMAS DEMAK III	979.738.599,00	-	-	979.738.599,00
6	PUSKESMAS BONANG I	2.786.993.072,00	-	-	2.786.993.072,00
7	PUSKESMAS BONANG II	2.085.371.264,00	80.561.821,00	(140.966.286,00)	2.024.966.799,00
8	PUSKESMAS WEDUNG I	1.971.497.036,00	-	-	1.971.497.036,00
9	PUSKESMAS WEDUNG II	1.619.277.820,00	93.178.150,00	(77.247.490,00)	1.635.208.480,00
10	PUSKESMAS MIJEN I	1.382.182.008,00	-	(2.891.285,00)	1.379.290.723,00
11	PUSKESMAS MIJEN II	1.037.058.569,00	-	(64.255.364,00)	972.803.205,00
12	PUSKESMAS KARANGANYAR I	1.676.589.647,00	-	-	1.676.589.647,00
13	PUSKESMAS KARANGANYAR II	1.455.440.510,00	-	-	1.455.440.510,00
14	PUSKESMAS GAJAH I	1.648.976.735,00	86.561.413,00	(80.449.353,00)	1.655.088.795,00
15	PUSKESMAS GAJAH II	1.119.040.256,00	-	-	1.119.040.256,00
16	PUSKESMAS SAYUNG I	1.812.923.490,00	-	(104.874.251,00)	1.708.049.239,00
17	PUSKESMAS SAYUNG II	1.560.561.734,00	-	(82.319.182,00)	1.478.242.552,00
18	PUSKESMAS KARANGAWEN I	1.981.149.937,00	-	-	1.981.149.937,00
19	PUSKESMAS KARANGAWEN II	2.180.947.645,00	-	-	2.180.947.645,00
20	PUSKESMAS DEMPET	2.388.294.642,00	-	-	2.388.294.642,00
21	PUSKESMAS GUNTUR I	2.389.931.244,00	-	(9.986.263,00)	2.379.944.981,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	BELANJA PEGAWAI BLUD 2025 (Rp)	UTANG BEBAN 2025	UTANG BEBAN 2024	BEBAN PEGAWAI BLUD 2025 (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
22	PUSKESMAS GUNTUR II	1.806.143.150,00	-	(106.724.014,00)	1.699.419.136,00
23	PUSKESMAS MRANGGEN I	1.384.021.339,00	-	(80.798.195,00)	1.303.223.144,00
24	PUSKESMAS MRANGGEN II	1.272.608.676,00	-	-	1.272.608.676,00
25	PUSKESMAS MRANGGEN III	1.565.822.264,00	-	(94.971.076,00)	1.470.851.188,00
26	PUSKESMAS WONOSALAM I	1.528.905.639,00	-	-	1.528.905.639,00
27	PUSKESMAS WONOSALAM II	1.550.737.004,00	-	-	1.550.737.004,00
28	PUSKESMAS KARANGTENGAH	1.967.260.421,00	-	(119.627.672,00)	1.847.632.749,00
29	PUSKESMAS KEBONAGUNG	1.464.176.364,00	-	-	1.464.176.364,00
	JUMLAH	94.946.896.283,00	260.301.384,00	(13.150.299.027,00)	82.056.898.640,00

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2025 tercatat sebesar Rp299.478.746.654,08 meliputi Beban bahan pakai habis yang terdiri Beban Bahan-Bahan Baku, Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Beban Obat-Obatan, Beban Natura dan Pakan-Natura, Beban Makanan dan Minuman Rapat, Beban Pakaian Dinas dll, yang secara umum dipengaruhi oleh:

Uraian	Beban 2025	Beban 2024
BELANJA BARANG APBD	214.192.184.175,00	210.614.086.298,00
BELANJA BARANG MAPPING BELANJA BLUD / BOSP	161.393.450.538,00	144.198.260.713,00
PERSEDIAAN AWAL	37.674.477.966,30	48.758.854.068,95
PERSEDIAAN AKHIR	(34.923.881.036,29)	(37.674.477.966,30)
MUTASI PERSEDIAAN	-	-
PENDAPATAN HIBAH/ DROPPING	33.927.843.764,43	40.706.515.267,21
BEBAN HIBAH PERSEDIAAN	(112.656.062.506,12)	(161.505.695.109,00)
ASET TETAP JADI BEBAN PERSEDIAAN / BHP	3.319.000,00	51.795.000,00
PENAMBAHAN BEBAN PERSEDIAAN KARENA UTANG/ UTANG BEBAN 2025	16.420.121.199,00	-
PENAMBAHAN BEBAN PERSEDIAAN KARENA UTANG/ UTANG BEBAN 2024	-	19.469.192.705,00
PENGURANGAN BEBAN PERSEDIAAN KARENA PEMBAYARAN UTANG BEBAN 2024	(19.461.067.021,00)	-
PENGURANGAN BEBAN PERSEDIAAN KARENA PEMBAYARAN UTANG BEBAN 2023	-	(8.107.984.438,00)
ATRIBUSI MENJADI ASET TETAP	(4.007.641.673,99)	(5.613.212.084,00)
PENGHAPUSAN PERSEDIAAN	(151.506.751,25)	(238.712.440,58)
KOREKSI PERSEDIAAN	91.965.825,00	490.867.000,00
BEBAN EKSTRAKOMPTABLE	6.975.543.175,00	5.711.153.281,37
BEBAN PERSEDIAAN	299.478.746.654,08	256.860.642.295,65

Penjelasan rinci atas beban persediaan per SKPD tertuang dalam Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

c. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2025 yang secara umum terdiri dari Beban Jasa Pengelolaan BMD, Beban Honorarium, Beban Jasa Tenaga Pendidikan, Beban Jasa Tenaga Ahli, Beban Tagihan Telepon, Air, Listrik, Beban Asuransi, Beban Sewa, Beban Jasa Konsultasi, Beban Kursus Singkat/Pelatihan, Beban Sosialisasi dan lain-lain. sebesar Rp324.817.986.764,96 yang secara umum perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Beban 2025	Beban 2024
BELANJA JASA APBD	215.853.990.038,00	208.962.633.775,00
BELANJA JASA BLUD / BOSP	106.987.372.144,20	57.281.685.179,00
UTANG JASA 2025	12.273.475.422,00	-
UTANG JASA 2024	(5.579.565.510,00)	5.579.565.510,00
UTANG JASA 2023	-	(4.220.053.452,00)
BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2025	(175.853.525,42)	-
BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2024	91.083.804,18	(88.723.804,18)
BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2023	-	166.417.226,97
ATRIBUSI KE ASET TETAP / ATB / KDP	(4.631.518.608,00)	(6.079.496.671,00)
KOREKSI BEBAN	(997.000,00)	3.090.000,00
BEBAN JASA	324.817.986.764,96	261.605.117.763,79

Analisis Beban Jasa secara rinci per SKPD dijelaskan dalam lampiran dalam Catatan atas Laporan Keuangan

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sebesar Rp41.720.366.665,62 secara umum dipengaruhi oleh:

Uraian	Beban 2025	Beban 2024
BELANJA PEMELIHARAAN APBD	50.689.293.535,00	51.696.644.257,00
BELANJA PEMELIHARAAN BOSP / BLUD	9.529.135.028,00	8.852.305.647,00
UTANG BEBAN 2025	922.664.219,00	-
UTANG BEBAN 2024	(905.733.001,00)	902.307.317,00
UTANG BEBAN 2023	-	(25.872.789,00)
BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2025	(925.000,00)	-
BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2024	1.110.000,00	(1.110.000,00)
ATRIBUSI KE ASET TETAP / ATB	(18.188.605.435,38)	(32.272.015.788,00)
ATRIBUSI KE PERSEDIAAN	(341.422.680,00)	-
HAPUS ATB	14.850.000,00	12.720.000,00
BEBAN PEMELIHARAAN	41.720.366.665,62	29.164.978.644,00

Penjelasan Beban Pemeliharaan secara rinci per SKPD dapat dilihat dalam lampiran Catatan atas Laporan Keuangan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp57.334.275.603,00 dapat diuraikan secara rinci. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti belanja rutin, BOS dan BLUD pada SKPD. Perhitungan Beban Perjalanan Dinas dapat ditampilkan sebagai berikut.

Uraian	Beban 2025	Beban 2024
BELANJA PERJALANAN DINAS APBD	44.480.241.482,00	58.555.993.474,00
BELANJA PERJALANAN DINAS BOSP / BLUD	12.880.502.121,00	14.233.738.443,00
UTANG BEBAN 2025	-	-
UTANG BEBAN 2024	(26.468.000,00)	26.468.000,00
UTANG BEBAN 2023	-	(700.000,00)
BEBAN PERJALANAN DINAS	57.334.275.603,00	72.815.499.917,00

Berikut rincian beban perjalanan dinas di SKPD.

No	SKPD	BELANJA PERJALANAN DINAS APBD (Rp)	BELANJA PERJALANAN DINAS BOS/ BLUD (Rp)	UTANG BEBAN 2024 (Rp)	BEBAN PERJALANAN DINAS (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.279.828.951,00	1.671.915.520,00	-	2.951.744.471,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	3.120.338.222,00	11.208.586.601,00	(26.468.000,00)	14.302.456.823,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.045.948.684,00	-	-	1.045.948.684,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	747.039.189,00	-	-	747.039.189,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.362.045.236,00	-	-	1.362.045.236,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	763.914.988,00	-	-	763.914.988,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	507.628.141,00	-	-	507.628.141,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	459.598.761,00	-	-	459.598.761,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	524.277.235,00	-	-	524.277.235,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	417.408.094,00	-	-	417.408.094,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN	4.112.117.680,00	-	-	4.112.117.680,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	459.873.578,00	-	-	459.873.578,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	301.055.659,00	-	-	301.055.659,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	227.145.421,00	-	-	227.145.421,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	479.433.418,00	-	-	479.433.418,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	326.359.039,00	-	-	326.359.039,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	342.299.986,00	-	-	342.299.986,00
18	DINAS PARIWISATA	277.251.500,00	-	-	277.251.500,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	398.657.644,00	-	-	398.657.644,00
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	359.417.360,00	-	-	359.417.360,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	3.714.336.517,00	-	-	3.714.336.517,00
22	SEKRETARIAT DPRD	15.445.701.007,00	-	-	15.445.701.007,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	2.426.033.491,00	-	-	2.426.033.491,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	BELANJA PERJALANAN DINAS APBD (Rp)	BELANJA PERJALANAN DINAS BOS/BLUD (Rp)	UTANG BEBAN 2024 (Rp)	BEBAN PERJALANAN DINAS (Rp)
24	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	1.230.736.826,00	-	-	1.230.736.826,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	908.718.790,00	-	-	908.718.790,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	459.881.869,00	-	-	459.881.869,00
27	KECAMATAN DEMAK	1.144.613.547,00	-	-	1.144.613.547,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	96.800.000,00	-	-	96.800.000,00
29	KECAMATAN DEMPET	75.965.000,00	-	-	75.965.000,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	61.795.000,00	-	-	61.795.000,00
31	KECAMATAN MIJEN	84.004.200,00	-	-	84.004.200,00
32	KECAMATAN GAJAH	100.310.000,00	-	-	100.310.000,00
33	KECAMATAN BONANG	118.805.000,00	-	-	118.805.000,00
34	KECAMATAN WEDUNG	87.965.000,00	-	-	87.965.000,00
35	KECAMATAN SAYUNG	86.255.000,00	-	-	86.255.000,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	132.379.686,00	-	-	132.379.686,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	65.227.500,00	-	-	65.227.500,00
38	KECAMATAN GUNTUR	66.010.000,00	-	-	66.010.000,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	92.802.180,00	-	-	92.802.180,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	62.115.000,00	-	-	62.115.000,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	508.147.083,00	-	-	508.147.083,00
	JUMLAH	44.480.241.482,00	12.880.502.121,00	(26.468.000,00)	57.334.275.603,00

f. Beban Subsidi

Pada tahun 2025, pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Demak memberikan Subsidi guna meringankan beban dalam pembayaran pajak dan sekaligus memberikan stimulasi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berupa pembebasan denda piutang pajak sebesar Rp643.294.783,00 dengan dasar SK Bupati Nomor 971.1/106 Tahun 2025 tentang Pembebasan Denda Administrasi Massal Mulai Tahun Pajak 2013 sampai dengan Tahun Pajak 2024. Sedangkan pada tahun 2024 Beban Subsidi daerah diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi dalam penanganan banjir di Kecamatan Karanganyar sebesar Rp512.699.368,00.

KODE REK	SKPD	BEBAN 2025	BEBAN 2024
4.04.01.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	643.294.783,00	512.699.368,00
	JUMLAH	643.294.783,00	512.699.368,00

g. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan hibah Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pemerintah Kabupaten Demak mencatat Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp212.512.975.037,12. Perhitungan Beban Hibah dapat ditampilkan sebagai berikut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Beban 2025	Beban 2024
BELANJA HIBAH	78.198.840.531,00	131.867.184.339,00
BELANJA HIBAH BOSP	497.500.000,00	-
BEBAN HADIAH DAN PENGHARGAAN MENJADI HIBAH UANG	5.170.940.000,00	2.490.420.000,00
BEBAN JASA MASYARAKAT/PIHAK 3 MENJADI HIBAH JASA	13.165.912.000,00	12.784.798.500,00
BEBAN BARANG MENJADI HIBAH BARANG	103.319.929.836,12	153.153.421.114,00
PENDAPATAN HIBAH MENJADI HIBAH BARANG	12.159.852.670,00	9.037.097.370,00
BEBAN HIBAH	212.512.975.037,12	309.332.921.323,00

Penjelasan atas faktor yang mempengaruhi Beban Hibah secara rinci per SKPD dapat dilihat dalam lampiran Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan bantuan sosial Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial juga dicatat sebesar Rp23.621.422.000,00.

No.	SKPD	BELANJA BANTUAN SOSIAL (Rp)	BEBAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN (Rp)	BEBAN BANTUAN SOSIAL (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.122.800.000,00	-	3.122.800.000,00
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.425.000.000,00	-	6.425.000.000,00
3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.047.622.000,00	11.799.600.000,00	13.847.222.000,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	26.400.000,00	26.400.000,00
5	SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000,00	-	200.000.000,00
	JUMLAH	11.795.422.000,00	11.826.000.000,00	23.621.422.000,00

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Demak menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dalam menghitung beban penyusutan. Perhitungan Beban Penyusutan dilakukan dengan Aplikasi SIMDA BMD dengan alokasi bulanan. Adapun Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp361.025.816.621,50 yang secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH 2025	JUMLAH 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	96.138.125.616,50	101.503.052.571,12	(5.364.926.954,62)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.859.167.599,00	28.567.272.235,00	1.291.895.364,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	228.805.088.509,00	226.536.267.412,00	2.268.821.097,00
8.1.08.09	Beban Penyusutan Properti Investasi	5.182.289.534,00	4.914.070.690,00	268.218.844,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.041.145.363,00	1.172.963.611,66	(131.818.248,66)
	JUMLAH	361.025.816.621,50	362.693.626.519,78	(1.667.809.898,28)

Sistem penyusutan yang diterapkan dalam akuntansi pemerintah daerah sebagaimana berikut :

No.	URAIAN	METODE	TAHUN PENYUSUTAN
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin Penyusutan Kendaraan Bermotor	Metode garis lurus	5 tahun 7 tahun
2	Penyusutan Gedung dan Bangunan	Metode garis lurus	20 tahun
3	Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Metode garis lurus	10 tahun
4	Penyusutan Properti Investasi	Metode garis lurus	Disamakan perlakuannya dengan aset tetapnya
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Metode garis lurus	5 tahun

Beban penyusutan pada masing-masing OPD dan masing-masing uraian, dirinci sebagaimana berikut :

1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24.323.310.483,00	25.653.177.004,00	(1.329.866.521,00)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	44.752.688.927,00	50.285.966.479,41	(5.533.277.552,41)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.076.149.609,00	1.084.493.950,00	(8.344.341,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	375.019.618,00	466.191.054,00	(91.171.436,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.103.834.780,00	1.320.652.806,00	(216.818.026,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.429.336.741,00	5.479.168.266,00	2.950.168.475,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	359.354.514,00	339.125.523,00	20.228.991,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	136.778.526,00	196.090.620,71	(59.312.094,71)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.000.578.507,00	981.448.064,00	19.130.443,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.045.621.553,50	1.149.456.634,00	(103.835.080,50)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.141.690.615,00	972.797.361,00	168.893.254,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	908.495.065,00	921.354.866,00	(12.859.801,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	935.541.312,00	1.283.496.431,00	(347.955.119,00)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	861.675.870,00	780.826.779,00	80.849.091,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	546.558.054,00	560.677.441,00	(14.119.387,00)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	332.896.229,00	255.146.221,00	77.750.008,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	183.715.570,00	161.333.173,00	22.382.397,00
18	DINAS PARIWISATA	262.694.986,00	260.677.089,00	2.017.897,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	599.231.426,00	494.657.492,00	104.573.934,00
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	437.201.160,00	638.926.121,00	(201.724.961,00)
21	SEKRETARIAT DAERAH	2.267.028.104,00	2.875.423.084,00	(608.394.980,00)
22	SEKRETARIAT DPRD	1.462.345.401,00	1.714.170.765,00	(251.825.364,00)
23	INSPEKTORAT DAERAH	463.777.116,00	265.701.492,00	198.075.624,00
24	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH DAERAH	602.775.785,00	582.354.481,00	20.421.304,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	941.092.828,00	974.096.978,00	(33.004.150,00)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	117.736.368,00	238.547.079,00	(120.810.711,00)
27	KECAMATAN DEMAK	246.558.152,00	273.076.734,00	(26.518.582,00)
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	82.892.799,00	91.382.010,00	(8.489.211,00)
29	KECAMATAN DEMPET	68.786.482,00	78.300.792,00	(9.514.310,00)
30	KECAMATAN WONOSALAM	82.696.862,00	96.293.702,00	(13.596.840,00)
31	KECAMATAN MIJEN	78.531.345,00	91.618.780,00	(13.087.435,00)
32	KECAMATAN GAJAH	88.904.612,00	96.849.119,00	(7.944.507,00)
33	KECAMATAN BONANG	63.629.152,00	75.219.562,00	(11.590.410,00)
34	KECAMATAN WEDUNG	59.938.643,00	70.888.442,00	(10.949.799,00)
35	KECAMATAN SAYUNG	75.820.086,00	91.804.448,00	(15.984.362,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	126.328.712,00	106.979.674,00	19.349.038,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	75.795.452,00	78.282.234,00	(2.486.782,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	99.438.001,00	95.530.924,00	3.907.077,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	63.891.324,00	66.429.374,00	(2.538.050,00)
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	93.543.487,00	98.105.554,00	(4.562.067,00)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	164.241.360,00	156.333.968,00	7.907.392,00
	JUMLAH	96.138.125.616,50	101.503.052.571,12	(5.364.926.954,62)

2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO	SKPD	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.225.568.793,00	13.513.145.565,00	712.423.228,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	8.001.471.160,00	7.901.933.672,00	99.537.488,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	721.191.942,00	711.760.112,00	9.431.830,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	64.138.985,00	61.407.359,00	2.731.626,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.811.368,00	9.330.818,00	1.480.550,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	86.303.802,00	86.303.802,00	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	148.232.916,00	144.500.264,00	3.732.652,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	67.732.570,00	59.329.400,00	8.403.170,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	839.172.467,00	842.735.791,00	(3.563.324,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	182.819.113,00	183.462.840,00	(643.727,00)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	275.982.692,00	274.121.500,00	1.861.192,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	101.063.947,00	102.488.792,00	(1.424.845,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	56.303.783,00	47.072.198,00	9.231.585,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	270.945.190,00	266.864.362,00	4.080.828,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.347.235.540,00	1.317.890.046,00	29.345.494,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	89.844.447,00	89.844.447,00	-
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	287.105.839,00	313.192.333,00	(26.086.494,00)
18	DINAS PARIWISATA	267.529.365,00	270.184.557,00	(2.655.192,00)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	239.869.521,00	274.784.132,00	(34.914.611,00)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	543.403.462,00	282.468.058,00	260.935.404,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	488.500.503,00	379.142.315,00	109.358.188,00
22	SEKRETARIAT DPRD	244.058.406,00	234.967.823,00	9.090.583,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	183.613.385,00	189.777.649,00	(6.164.264,00)
24	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH DAERAH	193.209.912,00	188.151.333,00	5.058.579,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	72.296.707,00	67.086.084,00	5.210.623,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	217.717.193,00	217.717.193,00	-
27	KECAMATAN DEMAK	188.573.605,00	186.600.708,00	1.972.897,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	45.227.217,00	17.770.522,00	27.456.695,00
29	KECAMATAN DEMPET	22.570.664,00	22.780.641,00	(209.977,00)
30	KECAMATAN WONOSALAM	20.369.055,00	20.723.332,00	(354.277,00)
31	KECAMATAN MIJEN	5.920.300,00	5.920.300,00	-
32	KECAMATAN GAJAH	12.175.142,00	12.175.142,00	-
33	KECAMATAN BONANG	27.319.921,00	27.331.803,00	(11.882,00)
34	KECAMATAN WEDUNG	28.344.133,00	27.234.164,00	1.109.969,00
35	KECAMATAN SAYUNG	91.757.944,00	93.846.085,00	(2.088.141,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	16.153.317,00	15.146.145,00	1.007.172,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	8.759.614,00	8.759.614,00	-
38	KECAMATAN GUNTUR	58.236.260,00	52.745.077,00	5.491.183,00
39	KECAMATAN KARANGAWEN	84.410.721,00	19.749.559,00	64.661.162,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	23.226.698,00	26.826.698,00	(3.600.000,00)
	JUMLAH	29.859.167.599,00	28.567.272.235,00	1.291.895.364,00

3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	SKPD	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	502.201.108,00	530.343.467,00	(28.142.359,00)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	1.442.505.121,00	1.335.596.419,00	106.908.702,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	208.901.827.350,00	207.175.805.607,00	1.726.021.743,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.397.710.928,00	5.919.975.906,00	477.735.022,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	37.901.378,00	39.194.700,00	(1.293.322,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	58.291.418,00	58.291.418,00	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.356.605,00	5.356.605,00	-
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	11.990.931,00	11.990.930,00	1,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.145.106.731,00	3.146.035.131,00	(928.400,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.962.750,00	15.962.750,00	-
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100.000,00	100.000,00	-
12	DINAS PERHUBUNGAN	608.085.992,00	603.985.929,00	4.100.063,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41.970.357,00	41.970.356,00	1,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.217.564,00	4.217.564,00	-
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	19.792.295,00	96.361.152,00	(76.568.857,00)
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.771.920,00	1.771.920,00	-
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	73.311.351,00	105.827.566,00	(32.516.215,00)
18	DINAS PARIWISATA	77.464.704,00	77.464.703,00	1,00
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11.749.301,00	11.980.855,00	(231.554,00)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	965.416.251,00	964.858.719,00	557.532,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	92.727.423,00	92.727.423,00	-
22	SEKRETARIAT DPRD	42.528.400,00	42.528.400,00	-
23	INSPEKTORAT DAERAH	18.092.691,00	18.092.691,00	-
24	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	19.449.513,00	19.449.513,00	-
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	66.564.290,00	62.442.282,00	4.122.008,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.179.583,00	9.179.585,00	(2,00)
27	KECAMATAN DEMAK	6.148.110.137,00	6.044.279.919,00	103.830.218,00
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	6.090.484,00	5.985.000,00	105.484,00
29	KECAMATAN DEMPET	3.024.550,00	3.024.550,00	-
30	KECAMATAN WONOSALAM	-	-	-
31	KECAMATAN MIJEN	969.750,00	969.750,00	-
32	KECAMATAN GAJAH	8.966.114,00	8.966.114,00	-
33	KECAMATAN BONANG	585.786,00	10.540.287,00	(9.954.501,00)
34	KECAMATAN WEDUNG	2.040.800,00	2.040.800,00	-
35	KECAMATAN SAYUNG	1.413.730,00	1.413.730,00	-
36	KECAMATAN KARANGANYAR	717.578,00	5.699.878,00	(4.982.300,00)
37	KECAMATAN MRANGGEN	-	-	-
38	KECAMATAN GUNTUR	5.829.500,00	5.829.500,00	-
39	KECAMATAN KARANGAWEN	1.048.832,00	991.000,00	57.832,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	55.015.293,00	55.015.293,00	-
	JUMLAH	228.805.088.509,00	226.536.267.412,00	2.268.821.097,00

4) Beban Penyusutan Properti Investasi

NO	SKPD	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.776.378,00	18.438.865,00	(1.662.487,00)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	5.001.400,00	5.001.400,00	-
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.886.000,00	13.886.000,00	-
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.449.264,00	40.317.358,00	131.906,00
5	DINAS PARIWISATA	167.599.018,00	167.599.018,00	-
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	33.696.000,00	-	33.696.000,00
7	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.750.740.765,00	4.508.671.400,00	242.069.365,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	6.078.680,00	6.078.680,00	-
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	130.739.175,00	136.755.115,00	(6.015.940,00)
10	KECAMATAN DEMAK	17.136.000,00	17.136.000,00	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
11	KECAMATAN GUNTUR	186.854,00	186.854,00	-
	JUMLAH	5.182.289.534,00	4.914.070.690,00	268.218.844,00

5) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	SKPD	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
1	DINAS KESEHATAN DAERAH	419.215.791,00	486.430.633,00	(67.214.842,00)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.820.000,00	29.820.000,00	-
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	46.236.116,00	79.026.200,33	(32.790.084,33)
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30.586.413,00	29.759.000,00	827.413,00
5	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	13.840.000,00	13.840.000,00	-
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.425.000,00	9.900.000,00	(2.475.000,00)
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.906.185,00	19.906.185,00	-
8	DINAS PERHUBUNGAN	11.165.900,00	16.348.900,00	(5.183.000,00)
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.091.840,00	59.731.802,00	(23.639.962,00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	27.656.100,00	80.477.017,00	(52.820.917,00)
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	24.814.208,00	26.015.500,33	(1.201.292,33)
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.446.990,00	4.590.960,00	2.856.030,00
13	DINAS PARIWISATA	29.663.600,00	29.663.600,00	-
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	49.915.968,00	47.049.500,00	2.866.468,00
15	SEKRETARIAT DAERAH	46.456.322,00	49.083.800,00	(2.627.478,00)
16	SEKRETARIAT DPRD	34.686.112,00	37.015.179,00	(2.329.067,00)
17	INSPEKTORAT DAERAH	1.656.666,00	-	1.656.666,00
18	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	19.900.302,00	19.900.302,00	-
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	166.746.450,00	116.489.633,00	50.256.817,00
20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.915.400,00	17.915.400,00	-
	JUMLAH	1.041.145.363,00	1.172.963.611,66	(131.818.248,66)

j. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang dibuka sebesar penambahan penyisihan piutang dari tahun sebelumnya. Besarnya beban penyisihan piutang Tahun 2025 adalah sebesar Rp9.408.758.123,22 yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

KODE REKENING	URAIAN	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.233.221.905,09	5.229.514.252,78	3.707.652,31
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	2.567.794.499,10	222.255.267,92	2.345.539.231,18
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.532.107.581,36	3.512.911.163,83	(1.980.803.582,47)
8.1.07.06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	75.634.137,67	66.782.122,25	8.852.015,42
	JUMLAH	9.408.758.123,22	9.031.462.806,78	377.295.316,44

Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap besaran beban penyisihan piutang retribusi dan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan tahun 2024 yang disebabkan karena perubahan nomenklatur pendapatan BLUD. Pada tahun 2024 Pendapatan BLUD masuk dalam akun Lain-Lain PAD yang Sah beserta



piutang dan penyisihan piutangnya. Namun pada tahun 2025 pendapatan Rumah Sakit beserta seluruh puskesmas masuk untuk dalam akun retribusi pelayanan kesehatan.

Secara rinci beban penyisihan piutang terdistribusi pada SKPD berikut.

No.	SKPD	PENYISIHAN 2025	PENYISIHAN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		(Rp)	(Rp)	
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	782.880.665,53	554.325.496,09	228.555.169,44
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	211.251.542,91	301.669.314,99	(90.417.772,08)
3	PUSKESMAS DEMAK I	10.900,00	10.900,00	-
4	PUSKESMAS DEMAK II	703.350,00	35.050,00	668.300,00
5	PUSKESMAS DEMAK III	23.000,00	10.000,00	13.000,00
6	PUSKESMAS BONANG I	3.951.930,00	520.430,00	3.431.500,00
7	PUSKESMAS BONANG II	540.600,00	208.195,00	332.405,00
8	PUSKESMAS WEDUNG I	603.510,00	296.300,00	307.210,00
9	PUSKESMAS WEDUNG II	355.215,00	317.675,00	37.540,00
10	PUSKESMAS MIJEN I	2.478.685,00	2.182.870,00	295.815,00
11	PUSKESMAS MIJEN II	79.450,00	67.150,00	12.300,00
12	PUSKESMAS KARANGANYAR I	249.330,00	209.070,00	40.260,00
13	PUSKESMAS KARANGANYAR II	1.238.410,00	334.695,00	903.715,00
14	PUSKESMAS GAJAH I	225.730,00	373.410,00	(147.680,00)
15	PUSKESMAS GAJAH II	489.500,00	286.390,00	203.110,00
16	PUSKESMAS SAYUNG I	449.640,00	53.400,00	396.240,00
17	PUSKESMAS SAYUNG II	652.250,00	303.325,00	348.925,00
18	PUSKESMAS KARANGAWEN I	359.420,00	336.450,00	22.970,00
19	PUSKESMAS KARANGAWEN II	1.429.452,14	26.575,00	1.402.877,14
20	PUSKESMAS DEMPET	241.425,00	311.720,00	(70.295,00)
21	PUSKESMAS GUNTUR I	1.583.569,57	442.677,90	1.140.891,67
22	PUSKESMAS GUNTUR II	73.800,00	107.600,00	(33.800,00)
23	PUSKESMAS MRANGGEN I	379.710,00	45.045,00	334.665,00
24	PUSKESMAS MRANGGEN II	532.590,00	22.035,00	510.555,00
25	PUSKESMAS MRANGGEN III	420.610,00	188.045,00	232.565,00
26	PUSKESMAS WONOSALAM I	87.900,00	72.775,00	15.125,00
27	PUSKESMAS WONOSALAM II	305.430,00	307.720,00	(2.290,00)
28	PUSKESMAS KARANGTENGAH	3.282.150,00	97.550,00	3.184.600,00
29	PUSKESMAS KEBONAGUNG	1.222.895,00	387.950,00	834.945,00
30	DINAS PERHUBUNGAN	16.806.000,00	228.150.000,00	(211.344.000,00)
31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	2.250,00	(2.250,00)
32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	207.453.170,00	(207.453.170,00)
33	DINAS PARIWISATA	80.000,00	7.497.764,58	(7.417.764,58)
34	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.617.726.561,50	650.810.857,70	966.915.703,80
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	6.758.042.901,57	7.073.998.950,52	(315.956.048,95)
JUMLAH		9.408.758.123,22	9.031.462.806,78	377.295.316,44

k. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Demak mencatat beban transfer sebesar realisasi belanja transfer Tahun 2025 (dengan mengeliminasi Belanja Dana Desa) sebesar Rp180.801.589.592,00. Terhadap transfer yang bersumber dari transfer Dana Desa dalam laporan operasional bukan bagian dari Beban transfer Pemerintah Daerah (terhadap akun Pendapatan Hibah-LO/ dana desa dan beban transfer telah mengeliminir Dana Desa). Beban Transfer ini terdiri atas Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BKK), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

KODE REKUNING	URAIAN	BEBAN 2025	BEBAN 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	22.359.694.336,00	19.431.583.635,00	2.928.110.701,00
8.3.01.02	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.373.134.956,00	3.147.047.617,00	1.226.087.339,00
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	154.068.760.300,00	149.360.401.500,00	4.708.358.800,00
	JUMLAH	180.801.589.592,00	171.939.032.752,00	8.862.556.840,00

Terdapat perbedaan antara beban transfer dan belanja transfer sebesar Rp201.121.654.524,00. Perbedaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

SKPD	NOMINAL	PENJELASAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Rp18.000.000,00	Utang transfer ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas Bagi Hasil Masjid Agung Demak
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Rp201.113.654.524,00	Dana Desa

1. Beban Non Operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Pemerintah kabupaten Demak Tahun 2025 membukukan beban non operasional sebesar Rp60.575.533.148,66 yang terdiri dari pembukuan Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp59.939.349.797,41 yang merupakan nilai buku dari aset tetap yang dihapuskan ditahun 2025 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp636.183.351,25.

KODE REKUNING	URAIAN	DEFISIT 2025	DEFISIT 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
8.4.01.04	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			
8.4.01.04.02	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	89.063.855,00	519.507.436,50	(430.443.581,50)
8.4.01.04.03	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	26.894.080.188,81	11.529.338.316,50	15.364.741.872,31
8.4.01.04.04	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	4.005.399.338,00	78.487.747,00	3.926.911.591,00
8.4.01.04.05	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	3.026.756.176,60	5.257.727.713,00	(2.230.971.536,40)
8.4.01.04.07	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	25.924.050.239,00	8.641.320.218,00	17.282.730.021,00
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO			
8.4.03.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	636.183.351,25	354.273.958,58	281.859.392,67
	JUMLAH	60.575.533.148,66	26.380.655.389,58	34.194.827.759,08



Secara rinci beban non operasional per-SKPD dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

1) Surplus dan defisit dari kegiatan operasional

NO	SKPD	Defisit 2025	Defisit 2024	BERTAMBAH/
		(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	22.200.794.229,60	(14.836.454.932,50)	37.037.249.162,10
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	1.167.252.728,00	(660.361.667,00)	1.827.614.395,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.156.852.458,00	(8.634.733.817,00)	38.791.586.275,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.938.752,00	(2.210.667,00)	6.149.419,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	800.000,00	(10.200.000,00)	11.000.000,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	501.459.200,00	(69.003.722,00)	570.462.922,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(38.241.623,50)	38.241.623,50
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	435.929.418,81	(12.353.333,00)	448.282.751,81
10	DINAS PERHUBUNGAN	514.697.196,00	-	514.697.196,00
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150.792.072,00	-	150.792.072,00
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	(24.767.269,00)	24.767.269,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	49.324.000,00	-	49.324.000,00
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	620.673.441,00	-	620.673.441,00
16	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	496.817.649,00	-	496.817.649,00
17	DINAS PARIWISATA	110.839.835,00	(31.054.780,08)	141.894.615,08
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	372.901.226,00	(330.416.884,00)	703.318.110,00
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	464.500.270,00	(1.082.083,00)	465.582.353,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	650.378.391,00	(1.121.169.496,00)	1.771.547.887,00
21	SEKRETARIAT DPRD	-	(110.357.142,00)	110.357.142,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	18.360.000,00	-	18.360.000,00
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	805.695.770,00	(307.474.670,50)	1.113.170.440,50
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.362.779,00	(115.000,00)	20.477.779,00
25	KECAMATAN DEMAK	372.706.080,00	(2.560.000,00)	375.266.080,00
26	KECAMATAN KARANGANYAR	6.883.750,00	(52.243.517,00)	59.127.267,00
27	KECAMATAN MIJEN	-	-	-
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	180.546.326,00	-	180.546.326,00
29	KECAMATAN DEMPET	57.273.600,00	-	57.273.600,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	263.600.960,00	-	263.600.960,00
31	KECAMATAN GAJAH	-	-	-
32	KECAMATAN BONANG	-	-	-
33	KECAMATAN WEDUNG	-	-	-
34	KECAMATAN SAYUNG	189.901.047,00	-	189.901.047,00
35	KECAMATAN MRANGGEN	-	-	-
36	KECAMATAN GUNTUR	-	-	-
37	KECAMATAN KARANGAWEN	39.786.833,00	(135.854.786,00)	175.641.619,00
38	KECAMATAN KEBONAGUNG	86.281.786,00	-	86.281.786,00
	JUMLAH	59.939.349.797,41	(26.380.655.389,58)	86.320.005.186,99



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

m. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Beban Luar Biasa Kabupaten Demak pada tahun 2025 sebesar Rp339.610.000,00 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp0,00. Adapun rincian peruntukan beban luar biasa dijabarkan sebagai berikut :

NAMA SKPD	NOMINAL	PERUNTUKAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	37.000.000,00	Pengembalian penerimaan pajak BPHTB tahun 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	302.610.000,00	Pengembalian dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan pendidikan (BOP) kesetaraan reguler hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi dan Pengembalian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) KB ADILA karena tidak ada proses/kegiatan belajar mengajar (tutup).

n. Surplus / Defisit

Pemerintah Kabupaten Demak membukukan Defisit-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp39.050.997.612,27 dan Defisit-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp2.200.600.521,26.

NO	NAMA SKPD	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(801.397.703.452,10)	(781.619.043.874,50)	(19.778.659.577,60)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	(277.082.620.154,20)	(276.153.390.759,05)	(929.229.395,15)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(313.562.038.875,01)	(311.221.838.728,00)	(2.340.200.147,01)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(81.098.016.584,00)	(74.281.670.084,45)	(6.816.346.499,55)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(13.977.390.180,00)	(13.528.848.361,00)	(448.541.819,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(15.113.825.550,00)	801.159.378,00	(15.914.984.928,00)
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(25.938.595.666,00)	(25.772.610.039,00)	(165.985.627,00)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	(10.280.141.734,00)	(7.651.670.797,71)	(2.628.470.936,29)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(28.413.598.397,00)	(26.581.828.986,00)	(1.831.769.411,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(10.415.163.156,50)	(10.098.520.099,50)	(316.643.057,00)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(30.954.573.636,56)	(29.055.375.019,83)	(1.899.198.616,73)
12	DINAS PERHUBUNGAN	(30.011.903.612,00)	(29.810.986.699,00)	(200.916.913,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(11.196.868.973,00)	(11.187.571.293,00)	(9.297.680,00)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(6.833.308.956,33)	13.124.110.498,00	(19.957.419.454,33)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	(15.576.959.936,00)	(16.597.053.258,33)	1.020.093.322,33
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(6.336.231.684,00)	(5.410.823.443,00)	(925.408.241,00)
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(9.243.626.533,00)	(7.707.377.454,00)	(1.536.249.079,00)
18	DINAS PARIWISATA	(7.885.790.328,42)	(7.296.019.488,41)	(589.770.840,01)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(49.156.234.484,53)	(54.229.499.709,33)	5.073.265.224,80

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA SKPD	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	(14.741.741.274,33)	(16.399.902.746,15)	1.658.161.471,82
21	SEKRETARIAT DAERAH	(51.178.465.320,00)	(54.388.627.915,00)	3.210.162.595,00
22	SEKRETARIAT DPRD	(66.687.805.260,67)	(69.549.589.386,83)	2.861.784.126,16
23	INSPEKTORAT DAERAH	(15.610.388.886,00)	(10.759.770.266,00)	(4.850.618.620,00)
24	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	(12.308.033.499,00)	(11.340.949.407,00)	(967.084.092,00)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.938.746.423.338,64	1.938.917.639.953,71	(171.216.615,07)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(9.375.459.371,00)	(8.489.390.859,00)	(886.068.512,00)
27	KECAMATAN DEMAK	(15.669.814.923,00)	(14.655.455.759,00)	(1.014.359.164,00)
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	(2.823.982.461,00)	(2.363.312.789,00)	(460.669.672,00)
29	KECAMATAN DEMPET	(1.968.603.336,00)	(1.915.048.327,00)	(53.555.009,00)
30	KECAMATAN WONOSALAM	(2.618.189.655,00)	(2.264.055.375,00)	(354.134.280,00)
31	KECAMATAN MIJEN	(2.203.739.554,00)	(2.193.457.710,00)	(10.281.844,00)
32	KECAMATAN GAJAH	(2.557.271.333,00)	(2.399.113.722,00)	(158.157.611,00)
33	KECAMATAN BONANG	(2.468.741.869,00)	(2.385.054.622,00)	(83.687.247,00)
34	KECAMATAN WEDUNG	(2.618.712.957,00)	(2.440.116.201,00)	(178.596.756,00)
35	KECAMATAN SAYUNG	(3.014.761.679,00)	(3.080.246.798,00)	65.485.119,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	(2.483.671.478,00)	(2.288.450.580,00)	(195.220.898,00)
37	KECAMATAN MRANGGEN	(2.233.746.523,00)	(2.132.517.872,00)	(101.228.651,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	(2.702.858.931,17)	(2.574.385.935,97)	(128.472.995,20)
39	KECAMATAN KARANGAWEN	(2.801.552.873,67)	(2.892.347.699,00)	90.794.825,33
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	(2.168.693.812,67)	(1.912.754.697,66)	(255.939.115,01)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(15.086.594.061,75)	(50.414.833.589,25)	35.328.239.527,50
	JUMLAH	(39.050.997.612,27)	(2.200.600.521,26)	(36.850.397.091,01)

**5.5. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan informasi penerimaan (arus kas masuk) dan pengeluaran (arus kas keluar), perubahan kas selama periode tertentu dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Arus Kas dapat diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Laporan Arus Kas Tahun 2025 disajikan dari transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Transaksi di Bendahara Umum Daerah (BUD), Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Demak dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar se-Kabupaten Demak, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah non formal/kesetaraan se-Kabupaten Demak. Penjelasan Laporan Arus Kas Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2025 merupakan selisih dari arus kas masuk dari aktivitas operasi dengan arus kas keluar atas aktivitas operasi. Realisasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Arus kas masuk dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk dari aktivitas operasi untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 diperoleh dari penerimaan PAD, pendapatan transfer pusat, pendapatan transfer Provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	340.767.901.524,00	223.506.943.362,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	329.598.514.265,83	40.980.185.098,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	38.477.679.571,00	32.847.401.892,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	24.969.076.506,00	296.978.911.783,42
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.509.639.702.893,00	1.567.338.134.973,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	221.984.381.524,00	285.105.666.000,00
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	131.270.431.705,00	204.204.249.782,00
8	Bantuan Keuangan - LRA	63.882.866.717,00	46.206.818.600,00
9	Pendapatan Hibah - LRA	4.488.538,00	5.708.106.446,00
10	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	717.493.800,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.660.595.043.243,83	2.703.593.911.736,42

Arus kas masuk dari aktivitas operasi untuk Tahun 2025 sebesar Rp2.660.595.043.243,83 mengalami penurunan sebesar Rp42.998.868.492,59 atau sebesar 1,59% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.703.593.911.736,42. Penurunan dikarenakan adanya pengurangan pendapatan transfer bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat. Meskipun Pendapatan pajak daerah dan Retribusi daerah mengalami kenaikan. Pendapatan Bagi Hasil dari



Pemerintah Provinsi mengalami penurunan karena adanya perubahan peraturan dimana bagai hasil pajak kendaraan bermotor dialihkan menjadi Opsen di penerimaan Pajak daerah.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus kas keluar untuk aktivitas operasi pada Tahun 2025 dan 2024 terutama digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain/tak terduga dan belanja transfer – bagi hasil. Realisasi masing-masing belanja untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
1	Belanja Pegawai	1.037.230.057.560,00	1.009.311.372.825,00
2	Belanja Barang dan Jasa	848.323.852.961,20	783.547.087.306,00
3	Belanja Hibah	78.198.840.531,00	131.867.184.339,00
4	Belanja Bantuan Sosial	11.795.422.000,00	13.948.600.000,00
5	Belanja Tak Terduga	339.610.000,00	0,00
6	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	22.359.694.336,00	19.431.583.635,00
7	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.355.134.956,00	3.448.574.617,00
8	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	355.182.414.824,00	414.395.816.500,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.357.785.027.168,20	2.375.950.219.222,00

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2025 sebesar Rp2.357.785.027.168,20 turun sebesar Rp18.165.192.053,80 atau sebesar 0,76% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.375.950.219.222,00. Beberapa belanja mengalami kenaikan, seperti belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga, dan Transfer bagi Hasil pajak dan retribusi. Namun belanja hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa mengalami penurunan.

Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2025 surplus sebesar Rp302.810.016.075,63, sedangkan pada tahun 2024 mengalami surplus sebesar Rp327.643.692.514,42.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas investasi aset non keuangan. Realisasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Pada Tahun Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Demak mencatat Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp729.776.320,00 mengalami kenaikan sebesar Rp155.350.420,00 jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp574.425.900,00.



NO	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LRA	729.776.320,00	574.425.900,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	729.776.320,00	574.425.900,00

b) Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar dari aktivitas investasi selama Tahun 2025 sebesar Rp221.122.666.897,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp281.183.716.609,00 dipergunakan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah serta menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang, seperti, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya. Rincian masing-masing belanja dan penyertaan modal adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
1	Belanja Modal Tanah	0,00	1.650.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.211.657.041,00	75.084.342.345,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.369.633.602,00	46.410.432.388,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.752.972.060,00	148.336.825.951,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.724.364.194,00	7.543.183.725,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	64.040.000,00	158.932.200,00
7	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	221.122.666.897,00	281.183.716.609,00

Sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2025 defisit sebesar Rp220.392.890.577,00, sedangkan pada tahun 2024 juga mengalami defisit sebesar Rp280.609.290.709,00.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan. Realisasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk dari Aktivitas pendanaan tahun 2025 sebesar Rp38.797.125,00 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp19.246.675,00 yang merupakan pembayaran kembali dana bergulir.

NO	URAIAN	2025 Rp	2024 Rp
1	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	38.797.125,00	19.246.675,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	38.797.125,00	19.246.675,00

**b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan**

Pada Tahun 2025 dan tahun 2024 tidak terdapat Arus keluar dari Aktivitas pendanaan.

Sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2025 sebesar Rp38.797.125,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp19.246.675,00.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran Pemerintah. Aktivitas Transitoris berisi Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang merupakan transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri, dan iuran asuransi kesehatan, tabungan perumahan pegawai negeri, serta pajak untuk disalurkan/dikembalikan kepada pihak ketiga.

Realisasi kas bersih dari aktivitas transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, dan dapat disajikan sebagai berikut.

URAIAN	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Jumlah Arus Kas Masuk (Penerimaan PFK)	103.579.122.452,00	99.023.874.967,00
Jumlah Arus Kas Keluar (Pengeluaran PFK)	103.579.122.452,00	99.023.874.967,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-

Kas Transitoris tersebut merupakan pembayaran pajak dari SKPD dan Sekolah Dasar Negeri serta SMP Negeri seluruh Kabupaten Demak.

5. Kenaikan/Penurunan Kas

Dari empat aktivitas tersebut, maka kenaikan kas bersih selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

URAIAN	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	302.810.016.075,63	327.643.692.514,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(220.392.890.577,00)	(280.609.290.709,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	38.797.125,00	19.246.675,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
JUMLAH	82.455.922.623,63	47.053.648.480,42

Jumlah kenaikan Kas selama Tahun 2025 sebesar Rp82.455.922.623,63 dengan saldo awal sebesar Rp171.217.674.971,34, sehingga Saldo akhir Kas sebesar Rp253.673.597.594,97.

Saldo akhir kas sebesar Rp253.673.597.594,97 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2025 yang dirinci sebagai berikut:

1. Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah adalah sebesar Rp216.898.926.252,00.



2. Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan adalah sebesar Rp1.736.146,00.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan adalah sebesar Rp0,00.
4. Kas di Bendahara BLUD
Saldo Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah, dan semua Puskesmas di Kabupaten Demak Tahun 2025 sebesar Rp36.417.719.910,97 dengan rincian sebagai berikut.

NO	UNIT BLUD	SALDO AWAL Rp	PENDAPATAN Rp	BELANJA/ PENGELUARAN Rp	SALDO AKHIR Rp
1	RSUD SUNAN KALIJAGA	16.223.309.153,35	145.145.517.929,00	147.877.750.712,00	13.491.076.370,35
2	RSUD SULTAN FATAH	16.252.578.451,99	83.162.104.046,83	85.756.141.616,20	13.658.540.882,62
3	PUSKESMAS DEMAK I	114.609.161,00	1.412.040.947,00	1.360.724.862,00	165.925.246,00
4	PUSKESMAS DEMAK II	95.470.605,00	1.640.011.620,00	1.526.280.659,00	209.201.566,00
5	PUSKESMAS DEMAK III	44.152.751,00	1.363.593.042,00	1.301.556.716,00	106.189.077,00
6	PUSKESMAS BONANG I	558.627.394,00	4.673.584.371,00	4.859.524.703,00	372.687.062,00
7	PUSKESMAS BONANG II	420.304.301,00	3.026.203.909,00	2.995.741.395,00	450.766.815,00
8	PUSKESMAS WEDUNG I	659.252.817,00	3.553.139.531,00	3.485.552.709,00	726.839.639,00
9	PUSKESMAS WEDUNG II	327.831.542,00	2.813.862.430,00	2.767.245.574,00	374.448.398,00
10	PUSKESMAS MIJEN I	422.454.958,00	2.582.362.321,00	2.361.636.542,00	643.180.737,00
11	PUSKESMAS MIJEN II	130.033.910,00	1.537.616.755,00	1.490.764.131,00	176.886.534,00
12	PUSKESMAS KARANGANYAR I	198.989.643,00	2.510.193.678,00	2.405.537.696,00	303.645.625,00
13	PUSKESMAS KARANGANYAR II	459.997.139,00	2.589.688.734,00	2.308.293.178,00	741.392.695,00
14	PUSKESMAS GAJAH I	211.033.654,00	2.793.350.842,00	2.759.481.415,00	244.903.081,00
15	PUSKESMAS GAJAH II	161.211.818,00	2.000.391.891,00	1.790.506.826,00	371.096.883,00
16	PUSKESMAS SAYUNG I	291.887.355,00	2.472.128.548,00	2.449.789.263,00	314.226.640,00
17	PUSKESMAS SAYUNG II	372.180.483,00	2.572.373.261,00	2.449.818.446,00	494.735.298,00
18	PUSKESMAS KARANGAWEN I	270.328.821,00	3.212.778.968,00	3.107.686.794,00	375.420.995,00
19	PUSKESMAS KARANGAWEN II	194.385.003,00	3.020.637.764,00	3.054.821.408,00	160.201.359,00
20	PUSKESMAS DEMPET	452.145.118,00	3.666.093.209,00	3.659.864.946,00	458.373.381,00
21	PUSKESMAS GUNTUR I	172.195.029,00	4.000.181.826,00	4.049.238.164,00	123.138.691,00
22	PUSKESMAS GUNTUR II	155.117.689,00	2.407.731.037,00	2.386.725.250,00	176.123.476,00
23	PUSKESMAS MRANGGEN I	88.468.413,00	2.205.282.808,00	2.150.371.016,00	143.380.205,00
24	PUSKESMAS MRANGGEN II	105.486.138,00	1.846.024.901,00	1.809.840.660,00	141.670.379,00
25	PUSKESMAS MRANGGEN III	327.140.478,00	2.567.695.718,00	2.560.740.107,00	334.096.089,00
26	PUSKESMAS WONOSALAM I	557.419.206,00	2.209.480.868,00	2.503.920.935,00	262.979.139,00
27	PUSKESMAS WONOSALAM II	638.204.198,00	2.572.288.315,00	2.977.417.289,00	233.075.224,00
28	PUSKESMAS KARANGTENGAH	453.923.203,00	2.808.986.063,00	2.763.657.904,00	499.251.362,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	UNIT BLUD	SALDO AWAL Rp	PENDAPATAN Rp	BELANJA/ PENGELUARAN Rp	SALDO AKHIR Rp
29	PUSKESMAS KEBONAGUNG	681.307.212,00	2.760.383.500,00	2.777.423.650,00	664.267.062,00
	JUMLAH	41.040.045.644,34	299.125.728.832,83	303.748.054.566,20	36.417.719.910,97

5. Kas di Bendahara Dana BOS
Kas di bendahara dana BOS pada per 31 Desember 2025 sebesar Rp270.733.434,00.
6. Kas dana BOK Puskesmas
Saldo Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah, dan semua Puskesmas di Kabupaten Demak Tahun 2025 sebesar Rp84.481.852,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Puskesmas	Anggaran (Rp)	Penerimaan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo (Rp)
1	PUSKESMAS DEMAK I	67.833.118,00	667.412.882,00	734.131.000,00	1.115.000,00
2	PUSKESMAS DEMAK II	119.628.749,00	605.185.251,00	724.472.000,00	342.000,00
3	PUSKESMAS DEMAK III	46.842.122,00	689.661.878,00	736.504.000,00	0,00
4	PUSKESMAS BONANG I	33.251.772,00	697.400.228,00	730.214.886,00	437.114,00
5	PUSKESMAS BONANG II	26.016.265,00	728.167.735,00	752.143.000,00	2.041.000,00
6	PUSKESMAS WEDUNG I	38.236.236,00	724.662.764,00	761.932.994,00	966.006,00
7	PUSKESMAS WEDUNG II	41.283.085,00	703.211.915,00	744.151.000,00	344.000,00
8	PUSKESMAS MIJEN I	53.583.328,00	701.085.672,00	750.733.836,00	3.935.164,00
9	PUSKESMAS MIJEN II	42.718.752,00	691.508.248,00	726.333.320,00	7.893.680,00
10	PUSKESMAS KARANGANYAR I	57.692.827,00	689.168.173,00	724.310.000,00	22.551.000,00
11	PUSKESMAS KARANGANYAR II	40.767.805,00	686.460.195,00	726.457.670,00	770.330,00
12	PUSKESMAS GAJAH I	50.097.691,00	696.185.309,00	741.732.000,00	4.551.000,00
13	PUSKESMAS GAJAH II	36.547.196,00	691.117.804,00	724.388.563,00	3.276.437,00
14	PUSKESMAS SAYUNG I	68.639.166,00	701.054.834,00	769.397.000,00	297.000,00
15	PUSKESMAS SAYUNG II	36.875.099,00	704.388.901,00	740.358.000,00	906.000,00
16	PUSKESMAS KARANGAWEN I	62.823.695,00	711.375.305,00	771.775.256,00	2.423.744,00
17	PUSKESMAS KARANGAWEN II	36.472.916,00	719.659.084,00	755.964.094,00	167.906,00
18	PUSKESMAS DEMPET	30.635.909,00	735.139.091,00	765.611.057,00	163.943,00
19	PUSKESMAS GUNTUR I	38.625.877,00	714.214.123,00	752.528.000,00	312.000,00
20	PUSKESMAS GUNTUR II	42.485.074,00	696.001.926,00	736.037.000,00	2.450.000,00
21	PUSKESMAS MRANGGEN I	46.042.168,00	729.150.832,00	769.663.717,00	5.529.283,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Puskesmas	Anggaran (Rp)	Penerimaan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo (Rp)
22	PUSKESMAS MRANGGEN II	99.730.210,00	662.403.790,00	758.800.504,00	3.333.496,00
23	PUSKESMAS MRANGGEN III	46.510.895,00	720.214.105,00	764.200.036,00	2.524.964,00
24	PUSKESMAS WONOSALAM I	40.961.266,00	725.418.734,00	765.652.886,00	727.114,00
25	PUSKESMAS WONOSALAM II	40.891.927,00	710.346.073,00	742.558.000,00	8.680.000,00
26	PUSKESMAS KARANGTENGAH	23.183.564,00	753.579.436,00	768.181.329,00	8.581.671,00
27	PUSKESMAS KEBONAGUNG	45.362.211,00	720.958.789,00	766.159.000,00	162.000,00
	TOTAL	1.313.738.923,00	18.975.133.077,00	20.204.390.148,00	84.481.852,00

7. Setara Kas

Setara kas pemerintah daerah Kabupaten Demak pada tahun 2025 sebesar Rp0,00.

**5.6. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pergerakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Demak yang terjadi selama Tahun 2025 menyajikan pos-pos sebagai berikut.

1. Ekuitas awal

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan ekuitas akhir Tahun 2024 dari Neraca yang tercatat sebesar Rp5.807.325.295.171,89 yang secara rinci terdapat pada tabel berikut ini.

NO	NAMA SKPD	EKUITAS 2025 (Rp)	EKUITAS 2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	769.361.549.527,66	759.530.915.730,16	9.830.633.797,50
2	DINAS KESEHATAN	622.696.684.776,40	629.152.619.952,45	(6.455.935.176,05)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.417.980.936.890,90	2.502.053.864.420,48	(84.072.927.529,58)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	452.694.807.965,83	445.105.963.333,28	7.588.844.632,55
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.762.022.059,00	5.376.182.292,00	385.839.767,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21.151.207.169,00	14.154.735.992,00	6.996.471.177,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.742.227.968,00	10.674.449.972,00	67.777.996,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	5.449.160.540,05	5.190.663.836,76	258.496.703,29
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	84.747.073.221,00	86.001.452.927,00	(1.254.379.706,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.335.528.346,50	14.030.534.039,00	(1.695.005.692,50)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.960.816.764,27	16.535.693.392,10	1.425.123.372,17
12	DINAS PERHUBUNGAN	33.730.927.856,81	34.284.246.920,81	(553.319.064,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.500.538.853,00	7.047.831.920,00	(547.293.067,00)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.035.720.387,00	16.677.134.373,00	358.586.014,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	73.116.814.855,23	73.099.008.249,56	17.806.605,67
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.902.449.908,00	7.344.424.105,00	558.025.803,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.342.971.052,08	16.345.139.427,08	(2.168.375,00)
18	DINAS PARIWISATA	25.365.538.425,64	25.022.306.052,05	343.232.373,59
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	18.155.120.155,99	16.803.991.532,32	1.351.128.623,67
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	263.592.167.859,02	256.241.037.853,17	7.351.130.005,85
21	SEKRETARIAT DAERAH	36.980.926.916,52	41.501.705.054,52	(4.520.778.138,00)
22	SEKRETARIAT DPRD	19.658.039.459,02	19.694.679.535,85	(36.640.076,83)
23	INSPEKTORAT DAERAH	10.513.387.404,00	10.716.301.497,00	(202.914.093,00)
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	17.521.174.014,00	15.364.836.388,00	2.156.337.626,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA SKPD	EKUITAS 2025 (Rp)	EKUITAS 2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	577.203.829.902,37	526.138.624.816,99	51.065.205.085,38
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9.909.866.632,00	10.287.161.092,00	(377.294.460,00)
27	KECAMATAN DEMAK	223.363.771.782,51	221.150.663.739,93	2.213.108.042,58
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	1.915.886.130,00	2.018.820.488,00	(102.934.358,00)
29	KECAMATAN DEMPET	1.676.368.229,00	1.719.263.515,00	(42.895.286,00)
30	KECAMATAN WONOSALAM	1.227.099.428,00	1.286.634.813,00	(59.535.385,00)
31	KECAMATAN MIJEN	867.455.751,00	941.308.090,00	(73.852.339,00)
32	KECAMATAN GAJAH	1.739.181.822,00	1.811.148.644,00	(71.966.822,00)
33	KECAMATAN BONANG	1.371.735.487,00	1.485.086.500,00	(113.351.013,00)
34	KECAMATAN WEDUNG	1.356.359.692,00	1.426.663.078,00	(70.303.386,00)
35	KECAMATAN SAYUNG	6.543.257.706,00	6.674.088.001,00	(130.830.295,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	1.096.242.402,00	898.898.315,00	197.344.087,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	1.245.809.965,00	1.290.768.622,00	(44.958.657,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	3.090.069.107,67	2.753.257.212,64	336.811.895,03
39	KECAMATAN KARANGAWEN	4.584.529.991,00	830.277.163,00	3.754.252.828,00
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	2.267.275.107,67	2.346.353.276,33	(79.078.168,66)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	568.763.661,75	675.832.020,00	(107.068.358,25)
JUMLAH		5.807.325.295.171,89	5.811.684.568.182,48	(4.359.273.010,59)

2. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan

Pada Laporan Operasional periode Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Demak mencatat Defisit-LO sebesar minus Rp39.050.997.612,27 sehingga mengurangi ekuitas awal tahun 2025.

Berikut rincian Surplus/Defisit-LO per SKPD.

NO	NAMA SKPD	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(801.397.703.452,10)	(781.619.043.874,50)	(19.778.659.577,60)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	(277.082.620.154,20)	(276.153.390.759,05)	(929.229.395,15)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(313.562.038.875,01)	(311.221.838.728,00)	(2.340.200.147,01)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(81.098.016.584,00)	(74.281.670.084,45)	(6.816.346.499,55)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(13.977.390.180,00)	(13.528.848.361,00)	(448.541.819,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(15.113.825.550,00)	801.159.378,00	(15.914.984.928,00)
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(25.938.595.666,00)	(25.772.610.039,00)	(165.985.627,00)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	(10.280.141.734,00)	(7.651.670.797,71)	(2.628.470.936,29)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(28.413.598.397,00)	(26.581.828.986,00)	(1.831.769.411,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(10.415.163.156,50)	(10.098.520.099,50)	(316.643.057,00)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(30.954.573.636,56)	(29.055.375.019,83)	(1.899.198.616,73)



NO	NAMA SKPD	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
12	DINAS PERHUBUNGAN	(30.011.903.612,00)	(29.810.986.699,00)	(200.916.913,00)
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(11.196.868.973,00)	(11.187.571.293,00)	(9.297.680,00)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(6.833.308.956,33)	13.124.110.498,00	(19.957.419.454,33)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	(15.576.959.936,00)	(16.597.053.258,33)	1.020.093.322,33
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(6.336.231.684,00)	(5.410.823.443,00)	(925.408.241,00)
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(9.243.626.533,00)	(7.707.377.454,00)	(1.536.249.079,00)
18	DINAS PARIWISATA	(7.885.790.328,42)	(7.296.019.488,41)	(589.770.840,01)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(49.156.234.484,53)	(54.229.499.709,33)	5.073.265.224,80
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	(14.741.741.274,33)	(16.399.902.746,15)	1.658.161.471,82
21	SEKRETARIAT DAERAH	(51.178.465.320,00)	(54.388.627.915,00)	3.210.162.595,00
22	SEKRETARIAT DPRD	(66.687.805.260,67)	(69.549.589.386,83)	2.861.784.126,16
23	INSPEKTORAT DAERAH	(15.610.388.886,00)	(10.759.770.266,00)	(4.850.618.620,00)
24	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	(12.308.033.499,00)	(11.340.949.407,00)	(967.084.092,00)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.938.746.423.338,64	1.938.917.639.953,71	(171.216.615,07)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(9.375.459.371,00)	(8.489.390.859,00)	(886.068.512,00)
27	KECAMATAN DEMAK	(15.669.814.923,00)	(14.655.455.759,00)	(1.014.359.164,00)
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	(2.823.982.461,00)	(2.363.312.789,00)	(460.669.672,00)
29	KECAMATAN DEMPET	(1.968.603.336,00)	(1.915.048.327,00)	(53.555.009,00)
30	KECAMATAN WONOSALAM	(2.618.189.655,00)	(2.264.055.375,00)	(354.134.280,00)
31	KECAMATAN MIJEN	(2.203.739.554,00)	(2.193.457.710,00)	(10.281.844,00)
32	KECAMATAN GAJAH	(2.557.271.333,00)	(2.399.113.722,00)	(158.157.611,00)
33	KECAMATAN BONANG	(2.468.741.869,00)	(2.385.054.622,00)	(83.687.247,00)
34	KECAMATAN WEDUNG	(2.618.712.957,00)	(2.440.116.201,00)	(178.596.756,00)
35	KECAMATAN SAYUNG	(3.014.761.679,00)	(3.080.246.798,00)	65.485.119,00
36	KECAMATAN KARANGANYAR	(2.483.671.478,00)	(2.288.450.580,00)	(195.220.898,00)
37	KECAMATAN MRANGGEN	(2.233.746.523,00)	(2.132.517.872,00)	(101.228.651,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	(2.702.858.931,17)	(2.574.385.935,97)	(128.472.995,20)
39	KECAMATAN KARANGAWEN	(2.801.552.873,67)	(2.892.347.699,00)	90.794.825,33
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	(2.168.693.812,67)	(1.912.754.697,66)	(255.939.115,01)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(15.086.594.061,75)	(50.414.833.589,25)	35.328.239.527,50
	JUMLAH	(39.050.997.612,27)	(2.200.600.521,26)	(36.850.397.091,01)

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mencatat koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, diantaranya koreksi persediaan, Koreksi aset tetap, penambahan penyertaan modal karena penilaian penyertaan modal kepada perusahaan daerah berdasar nilai ekuitas, pemberian deviden, dan koreksi ekuitas lainnya. Pemerintah Kabupaten Demak mencatat



penambahan/pengurangan ekuitas secara langsung Rp3.637.885.283,87. Secara rincian dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Koreksi Persediaan	410.135.825,00
2	Koreksi Piutang	(345.026.060,00)
3	Koreksi Penyisihan	(65.002.820,26)
4	Koreksi Aset Tetap	3.774.699.920,00
5	Koreksi Investasi Jangka Panjang	882.884.419,33
6	Koreksi Aset Lainnya	(1.019.806.000,20)
JUMLAH		3.637.885.283,87

a. Koreksi Persediaan

Pada tahun 2025 terdapat koreksi persediaan sebesar Rp410.135.825,00 dikarenakan pendapatan hibah pada tahun 2024 namun baru mendapatkan dokumen penyerahan/Berita Acara Serah Terima pada tahun 2025. Sehingga dilakukan penyesuaian berupa koreksi persediaan. Koreksi persediaan terdapat di 3 SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pertanian dan Pangan mendapatkan hibah pada tahun 2024 berupa spuit sehingga menambah persediaan awal sebesar Rp8.550.000,00
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai bibit ikan hasil perbangbiakan dari ikan yang dikelola. Sehingga dilakukan koreksi penambahan nilai persediaan bibit ikan dengan nilai sebesar Rp83.415.825,00
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat hibah dari BNPB berupa bahan-bahan persediaan untuk penanggulangan bencana tahun 2024 sebesar Rp318.170.000,00 yang baru dicatat ditahun 2025 karena menyesuaikan dengan BAST.

b. Koreksi Piutang

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Demak terdapat koreksi piutang sebesar minus Rp345.026.060,00. Koreksi piutang tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Koreksi tambah piutang di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga dari Perbedaan pengakuan biaya pelayanan pasien umum, pasien Taspen dan dari BPJS sebesar Rp308.305.072,00. Koreksi tersebut terdiri dari perbedaan antara catatan piutang dengan hasil pembayaran atas klaim serta koreksi karena salah catat.
 - a) Koreksi atas perbedaan antara catatan piutang dengan hasil pembayaran atas klaim secara rinci sebagai berikut:



NO	URAIAN	CATATAN PADA	PEMBAYARAN	LEBIH/KURANG BAYAR
		PIUTANG 2024		(KOREKSI)
1	Piutang BPJS Bulan Desember	10.697.765.900,00	10.974.651.433,00	276.885.533,00
2	Piutang PT. Taspen bl Desember	23.329.696,00	30.420.559,00	7.090.863,00
3	Piutang In Health bl September	339.352,00	-	(339.352,00)
4	Piutang In Health bl Oktober	3.614.707,00	3.580.203,00	(34.504,00)
5	Piutang In Health bl Desember	435.500,00	221.000,00	(214.500,00)
6	Piutang BPJS Ketenagakerjaan bl Juli	77.947.119,00	71.949.360,00	(5.997.759,00)
7	Piutang BPJS Ketenagakerjaan bl Desember	90.625.748,00	51.324.639,00	(39.301.109,00)
8	Piutang Kemenkes 2022	91.433.000,00	162.648.900,00	71.215.900,00
JUMLAH				309.305.072,00

b) Selain Itu Juga Terjadi Salah Catat Atas Piutang Pasien Umum Tahun 2023 Yang Tercatat Sebesar Rp83.524.787,00 yang seharusnya Rp82.524.787,00. Sehingga perlu dikoreksi sebesar minus Rp1.000.000,00

- 2) Koreksi kurang atas Piutang PBJT Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp653.151.132,00 dikarenakan hasil verifikasi ulang dilapangan.
- 3) Koreksi kurang piutang di Puskesmas Wedung 1 karena perbedaan antara realisasi penerimaan dengan Klaim ke BPJS Kesehatan dengan yang selisih sebesar Rp180.000,00.

c. Koreksi Penyisihan Piutang

Terdapat koreksi penyisihan piutang sebagai dampak dari koreksi piutang sebesar minus Rp65.002.820,26 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan dari RSUD Sunan Kalijaga sebesar minus Rp68.269.475,92
- 2) Koreksi Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran di BPKPAD sebesar Rp3.265.755,66
- 3) Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wedung 1 sebesar Rp900,00

d. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset tetap yang dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas tahun 2025 ini sebesar Rp3.756.483.920,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan hibah dari BNPB pada tahun 2024 sebesar Rp3.657.291.420,00 berupa peralatan SAR dan perahu, namun baru dicatat pada tahun 2025 karena baru diperoleh dokumen BAST-nya.



- 2) Dinas Pertanian dan Pangan juga mendapatkan hibah pada tahun 2024 yang baru dicatat pada tahun 2025 sebesar Rp80.100.000,00 berupa komputer dan kelengkapannya.
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah mendapatkan hibah laptop alat audio yang tidak dapat diperoleh BAST, sehingga di catat koreksi masuk sebesar Rp16.212.500,00
- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat koreksi tambah sebesar Rp2.880.000,00 berupa tanah persil yang diperoleh hasil inventarisasi internal.
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga pada tahun 2016 memiliki bangunan berupa rumah pompa dengan nilai Rp18.216.000,00 sehingga masuk ekstrakomptable karena Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak nilai bangunan dibawah Rp25.000.000,00 belum dapat dikategorikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan. Pada tahun 2025 rumah pompa tersebut dilakukan pemeliharaan dan pengembangan sebesar Rp82.150.000,00. Jika diakumulasikan nilai tersebut menjadi sebesar Rp100.366.000,00. Sehingga perlu dilakukan koreksi dari aset ekstrakomp menjadi aset tetap untuk di kapitalisasikan dengan nilai pemeliharaan tersebut.

e. Koreksi Investasi Jangka Panjang

Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp882.884.419,33 merupakan koreksi penyertaan modal karena penilaian penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) dikarenakan metode pengakuan menggunakan metode ekuitas yang dipengaruhi oleh laba BUMD, deviden yang disetorkan, dan besaran persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Demak. Berikut perhitungan perubahan investasi kami jelaskan dalam tabel berikut ini.

No	Nama BUMD	Ekuitas Pengakuan 2024 Rp	Modal Disetor		Persentase Kepemilikan pemkab	Ekuitas Perusda (Laporan BUMD) Rp	Ekuitas Pengakuan 2025 Rp
			Pihak lain Rp	Pemkab Rp			
1	PD. BPR. BKK DEMAK	30.515.398.084,05	14.740.000.000	14.700.000.000	49,93	55.907.819.886,00	27.914.774.469,08
2	Perumda Air Minum	144.384.535.549,00		134.504.475.608	100,00	150.280.985.470,00	150.280.985.470,00
3	PT. LKM Demak Sejahtera	31.232.958.212,67	250.000.000	28.111.000.000	99,12	31.078.801.175,00	30.805.307.724,66
4	Perseroda Demak Sarana Sehat	28.179.709.014,00		26.500.000.000	100,00	28.807.839.125,00	28.807.839.125,00
5	PT. Demak Aneka Wira Usaha	22.570.477.240,00		20.950.000.000	100,00	23.137.844.603,00	23.137.844.603,00
	JUMLAH	256.883.078.099,72	14.990.000.000	224.765.475.608		289.213.290.259,00	260.946.751.391,74

No	Nama BUMD	Laba BUMD (Laporan BUMD) Rp	Laba Pengakuan LO Rp	Setor Deviden/ Pendapatan LRA Rp	Saldo Akhir Rp	Koreksi Ekuitas Rp
1	PD. BPR. BKK DEMAK	4.343.976.306,00	2.168.947.369,59	3.278.662.052,00	29.405.683.401,64	(1.490.908.932,56)
2	Perumda Air Minum	5.764.262.037,00	5.764.262.037,00	2.544.934.530,00	147.603.863.056,00	2.677.122.414,00
3	PT. LKM Demak Sejahtera	1.420.086.921,00	1.407.590.156,10	1.262.018.892,00	31.378.529.476,77	(573.221.752,11)



No	Nama BUMD	Laba BUMD (Laporan BUMD) Rp	Laba Pengakuan LO Rp	Setor Dividen/ Pendapatan LRA Rp	Saldo Akhir Rp	Koreksi Ekuitas Rp
4	Perseroda Demak Sarana Sehat	564.007.084,00	564.007.084,00	550.372.611,00	28.193.343.487,00	614.495.638,00
5	PT. Demak Aneka Wira Usaha	1.345.183.234,00	1.345.183.234,00	433.212.923,00	23.482.447.551,00	(344.602.948,00)
	JUMLAH	13.437.515.582,00	11.249.989.880,69	8.069.201.008,00	260.063.866.972,41	882.884.419,33

f. Koreksi Aset Lainnya

Koreksi kurang atas Aset lainnya sebesar minus Rp1.019.806.000,20, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi atas catatan Treasury Deposit Facility (TDF) pada tahun 2024 yang telah dicatat sebesar Rp1.015.934.000,00. Namun sesuai surat dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-35/PK/PK.2/2025 tentang Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah TA 2025, nilai TDF Kabupaten Demak Rp0,00. Sehingga perlu dilakukan koreksi penghapusan atas TDF tersebut.
- 2) Koreksi Aset lainnya atas Tuntutan Ganti Rugi atas nama CV. PK yang sebelumnya tercatat sebesar Rp3.872.000,20. Pada tahun 2025 dilakukan kajian atas Tuntutan Ganti Rugi atas CV PK tersebut dan ditemukan bahwa pada tahun 2018 telah terdapat pembayaran/transferan dengan nilai yang sama namun tercatat CV NM. Setelah dilakukan pendalaman diketahui bahwa terjadi kesalahan pencatatan nama CV. Sehingga perlu dilakukan penghapusan atas catatan Tuntutan Ganti Rugi CV PK tersebut.

Selain Koreksi tersebut diatas, juga terdapat koreksi mutasi Aset tetap, mutasi kas dan mutasi persediaan antar SKPD yang jika dikonsolidasikan tercatat Rp0,00, namun akan terlihat di Laporan Perubahan Ekuitas di SKPD.

a. Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap

Mutasi aset tetap antar SKPD menyebabkan ekuitas antar SKPD menjadi berubah, tetapi secara keseluruhan pencatatan di Pemerintah Kabupaten Demak masih tetap. Secara terperinci koreksi mutasi antar SKPD dijelaskan dalam tabel berikut ini.

NO	OPD	MUTASI MASUK Rp	MUTASI KELUAR Rp
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.122.822.500,00	177.882.000,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	214.845.000,00	10.642.200.950,00
3	PUSKESMAS MRANGGEN III	4.892.800,00	-
4	PUSKESMAS KARANGAWEN II	394.007.730,00	-
5	PUSKESMAS SAYUNG I	2.687.690.120,00	-
6	PUSKESMAS BONANG I	1.281.934.710,00	-
7	PUSKESMAS BONANG II	4.892.800,00	-
8	PUSKESMAS DEMAK I	895.233.818,00	-
9	PUSKESMAS DEMAK II	4.892.800,00	-
10	PUSKESMAS WONOSALAM II	1.773.341.000,00	-
11	PUSKESMAS DEMPET	1.270.944.720,00	-
12	PUSKESMAS KEBONAGUNG	1.956.910.050,00	-



NO	OPD	MUTASI MASUK Rp	MUTASI KELUAR Rp
13	PUSKESMAS GAJAH I	-	214.845.000,00
14	PUSKESMAS GAJAH II	391.924.400,00	-
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	13.202.802.848,99
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	242.520.000,00	2.543.357.000,00
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	50.092.000,00
18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	31.400.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.400.000,00	-
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	162.870.000,00	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	50.092.000,00	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	75.362.880,00	-
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	778.459.250,00	363.760.000,00
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	363.760.000,00	265.600.000,00
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	24.463.998,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	1.122.822.500,00
27	DINAS PARIWISATA	-	32.500.000,00
28	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	281.631.250,00
29	SEKRETARIAT DAERAH	291.071.000,00	253.689.000,00
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	778.991.000,00	120.895.000,00
31	INSPEKTORAT DAERAH	-	177.440.000,00
32	KECAMATAN KARANGAWEN	1.659.534.000,00	49.007.880,00
33	KECAMATAN GUNTUR	25.432.000,00	-
34	KECAMATAN KARANGTENGAH	6.905.621.000,00	-
35	KECAMATAN WONOSALAM	12.570.000,00	-
36	KECAMATAN GAJAH	25.432.000,00	-
37	KECAMATAN DEMAK	5.787.663.848,99	-
38	KECAMATAN KEBONAGUNG	25.432.000,00	-
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	331.846.000,00	-
	JUMLAH	29.554.389.426,99	29.554.389.426,99

b. Koreksi Mutasi Persediaan SKPD

Mutasi persediaan SKPD di dalam Laporan Perubahan Ekuitas memang bernilai Rp0,00, namun sebenarnya terdapat mutasi antar SKPD.

- 1) *Dropping* bahan cetak berupa karcis dari BPKPAD ke SKPD pengelola pendapatan sebesar Rp86.297.600,00. Adapun rincian mutasi karcis sebagai berikut

No	NAMA SKPD/UNIT	PERSEDIAN MASUK Rp
1	DINAS PERHUBUNGAN	72.857.600,00
2	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	13.440.000,00
	JUMLAH	86.297.600,00

- 2) *Dropping* alat kontrasepsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ke Puskesmas dan Rumah



Sakit sebagai pelaksana dan pelayan teknis sebesar Rp529.066.202,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SKPD/UNIT	PERSEDIAAN MASUK Rp
1	PUSKESMAS DEMAK II	12.930.060,00
2	PUSKESMAS MRANGGEN II	11.995.940,00
3	PUSKESMAS KARANGAWEN I	46.220.330,00
4	PUSKESMAS MRANGGEN III	16.982.850,00
5	PUSKESMAS MRANGGEN I	13.505.560,00
6	PUSKESMAS GUNTUR I	51.850.660,00
7	PUSKESMAS DEMPET	14.381.590,00
8	PUSKESMAS KARANGAWEN II	11.881.190,00
9	PUSKESMAS MIJEN I	8.287.680,00
10	PUSKESMAS KEBONAGUNG	6.105.540,00
11	PUSKESMAS GUNTUR II	9.803.000,00
12	PUSKESMAS WONOSALAM I	28.095.690,00
13	PUSKESMAS SAYUNG II	16.978.310,00
14	PUSKESMAS DEMAK I	371.700,00
15	PUSKESMAS BONANG II	13.473.250,00
16	PUSKESMAS BONANG I	37.742.010,00
17	PUSKESMAS DEMAK III	10.747.740,00
18	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	29.188.320,00
19	PUSKESMAS MIJEN II	5.621.720,00
20	PUSKESMAS KARANGANYAR II	4.359.500,00
21	PUSKESMAS KARANGTENGGAH	32.643.400,00
22	PUSKESMAS GAJAH II	7.150.550,00
23	PUSKESMAS KARANGANYAR I	5.671.700,00
24	PUSKESMAS WEDUNG I	16.387.470,00
25	PUSKESMAS WEDUNG II	20.752.720,00
26	PUSKESMAS GAJAH I	10.411.430,00
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	19.340.102,00
28	PUSKESMAS WONOSALAM II	32.883.020,00
29	PUSKESMAS SAYUNG I	33.303.170,00
JUMLAH		529.066.202,00

c. Mutasi Kas

Mutasi Kas merupakan mutasi pencatatan kas dikarenakan penatausahaan penerimaan kas diatur di SKPKD, sedangkan penatausahaan belanja terdapat di SKPD. Adapun mutasi Kas terdiri dari:

- 1) Mutasi Kas BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas. BOK merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang Penatausahaan penerimaannya di catat di BPKPAD. Guna kesesuaian pencatatan kas neraca, maka perlu dilakukan mutasi kas ke Puskesmas. Adapun Mutasi Kas BOK dari BPKPAD sebesar Rp18.975.133.077,00 dengan rincian sebagai berikut:

	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH Rp
1	PUSKESMAS MIJEN II	691.508.248,00
2	PUSKESMAS DEMAK I	667.412.882,00
3	PUSKESMAS WEDUNG II	703.211.915,00



	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH Rp
4	PUSKESMAS DEMAK III	689.661.878,00
5	PUSKESMAS MIJEN I	701.085.672,00
6	PUSKESMAS GAJAH I	696.185.309,00
7	PUSKESMAS GAJAH II	691.117.804,00
8	PUSKESMAS BONANG I	697.400.228,00
9	PUSKESMAS DEMAK II	605.185.251,00
10	PUSKESMAS KARANGANYAR I	689.168.173,00
11	PUSKESMAS WEDUNG I	724.662.764,00
12	PUSKESMAS KARANGANYAR II	686.460.195,00
13	PUSKESMAS BONANG II	728.167.735,00
14	PUSKESMAS KARANGAWEN I	711.375.305,00
15	PUSKESMAS SAYUNG II	704.388.901,00
16	PUSKESMAS KARANGTENGAH	753.579.436,00
17	PUSKESMAS WONOSALAM II	710.346.073,00
18	PUSKESMAS MRANGGEN I	729.150.832,00
19	PUSKESMAS GUNTUR I	714.214.123,00
20	PUSKESMAS MRANGGEN III	720.214.105,00
21	PUSKESMAS GUNTUR II	696.001.926,00
22	PUSKESMAS KEBONAGUNG	720.958.789,00
23	PUSKESMAS SAYUNG I	701.054.834,00
24	PUSKESMAS KARANGAWEN II	719.659.084,00
25	PUSKESMAS MRANGGEN II	662.403.790,00
26	PUSKESMAS DEMPET	735.139.091,00
27	PUSKESMAS WONOSALAM I	725.418.734,00
JUMLAH		18.975.133.077,00

- 2) Mutasi Kas dari BPKPAD ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kas BOSP merupakan bagian dari DAK non Fisik yang penatausahaan pendapatannya dilakukan di BPKPAD, sehingga kas BOSP harus di mutasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengelola BOSP. Selain itu juga terdapat mutasi Kas Lainnya (dana TPG) karena penatausahaannya melalui transaksi Non Anggaran (TNA) yang secara otomatis melibatkan kas, maka perlu dilakukan mutasi Kas tersebut. Berikut jumlah kas yang dimutasikan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

NO	JENIS KAS	JUMLAH Rp
1	Kas dana BOSP	158.292.572.505,00
2	Kas lainnya (TPG)	200.092.348.300,00
3	Pengembalian Kas Dana BOSP	373.285.939,00
JUMLAH		358.758.206.744,00

d. Mutasi Dana Bergulir

Pencatatan Penerimaan kembali piutang (Dana Bergulir) dilakukan di BPKPAD melalui penerimaan pembiayaan. Namun pencatatan dana bergulir (aset Lainnya) di SKPD pelaksana. Pada tahun 2025 terdapat penerimaan kembali piutang



sebesar Rp38.797.125,00. Sehingga perlu melakukan mutasi pencatatan pengurangan dana bergulir di SKPD terkait dengan BPKPAD. Secara terperinci dijelaskan dalam tabel berikut ini:

NO	JENIS KAS	JUMLAH Rp
1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	13.226.500,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	25.570.625,00
JUMLAH		38.797.125,00

4. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.771.912.182.843,49 berkurang sebesar Rp35.413.112.328,40 dibanding ekuitas akhir Tahun 2024 sebesar Rp5.807.325.295.171,89.

NO	NAMA SKPD	EKUITAS 2025 (Rp)	EKUITAS 2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	764.197.282.792,56	769.361.549.527,66	(5.164.266.735,10)
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	616.111.685.289,28	622.696.684.776,40	(6.584.999.487,12)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.283.152.786.205,90	2.417.980.936.890,90	(134.828.150.685,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	452.388.706.527,83	452.694.807.965,83	(306.101.438,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.108.337.322,00	5.762.022.059,00	(653.684.737,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.776.494.157,00	21.151.207.169,00	(3.374.713.012,00)
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.647.934.255,00	10.742.227.968,00	905.706.287,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	5.259.680.045,05	5.449.160.540,05	(189.480.495,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	81.147.369.483,00	84.747.073.221,00	(3.599.703.738,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.537.395.070,00	12.335.528.346,50	(798.133.276,50)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.159.199.642,71	17.960.816.764,27	(801.617.121,56)
12	DINAS PERHUBUNGAN	42.865.746.980,81	33.730.927.856,81	9.134.819.124,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.055.480.044,00	6.500.538.853,00	554.941.191,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.748.625.702,67	17.035.720.387,00	(1.287.094.684,33)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	74.640.145.202,23	73.116.814.855,23	1.523.330.347,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.968.352.784,00	7.902.449.908,00	65.902.876,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.847.134.475,08	16.342.971.052,08	(1.495.836.577,00)
18	DINAS PARIWISATA	24.898.524.995,22	25.365.538.425,64	(467.013.430,42)
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	17.041.209.387,46	18.155.120.155,99	(1.113.910.768,53)
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	268.690.168.574,69	263.592.167.859,02	5.098.000.715,67
21	SEKRETARIAT DAERAH	37.533.163.208,52	36.980.926.916,52	552.236.292,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA SKPD	EKUITAS 2025 (Rp)	EKUITAS 2024 (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
22	SEKRETARIAT DPRD	18.805.632.127,35	19.658.039.459,02	(852.407.331,67)
23	INSPEKTORAT DAERAH	12.557.474.799,00	10.513.387.404,00	2.044.087.395,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	18.298.106.823,00	17.521.174.014,00	776.932.809,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	674.677.285.216,80	577.203.829.902,37	97.473.455.314,43
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.653.561.421,00	9.909.866.632,00	(256.305.211,00)
27	KECAMATAN DEMAK	223.723.052.944,50	223.363.771.782,51	359.281.161,99
28	KECAMATAN KARANGTENGAH	8.544.030.748,00	1.915.886.130,00	6.628.144.618,00
29	KECAMATAN DEMPET	1.724.914.786,00	1.676.368.229,00	48.546.557,00
30	KECAMATAN WONOSALAM	979.795.612,00	1.227.099.428,00	(247.303.816,00)
31	KECAMATAN MIJEN	868.266.473,00	867.455.751,00	810.722,00
32	KECAMATAN GAJAH	1.718.342.750,00	1.739.181.822,00	(20.839.072,00)
33	KECAMATAN BONANG	1.425.300.214,00	1.371.735.487,00	53.564.727,00
34	KECAMATAN WEDUNG	1.433.706.644,00	1.356.359.692,00	77.346.952,00
35	KECAMATAN SAYUNG	6.423.234.529,00	6.543.257.706,00	(120.023.177,00)
36	KECAMATAN KARANGANYAR	1.146.630.045,00	1.096.242.402,00	50.387.643,00
37	KECAMATAN MRANGGEN	1.224.925.109,00	1.245.809.965,00	(20.884.856,00)
38	KECAMATAN GUNTUR	3.022.528.631,50	3.090.069.107,67	(67.540.476,17)
39	KECAMATAN KARANGAWEN	6.137.910.694,33	4.584.529.991,00	1.553.380.703,33
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	2.152.375.119,00	2.267.275.107,67	(114.899.988,67)
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	619.686.012,00	568.763.661,75	50.922.350,25
JUMLAH		5.771.912.182.843,49	5.807.325.295.171,89	(35.413.112.328,40)



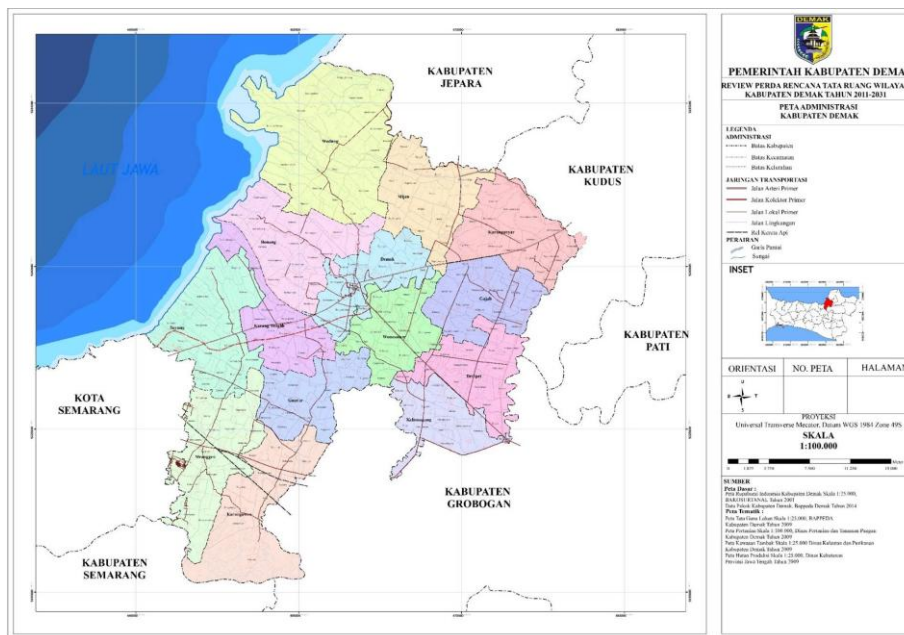
BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Demak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak diresmikan berdiri tanggal 28 Maret 1950. Sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak di daerah pantura dan berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Letak astronomisnya antara 6043'26'' dan 7009'43'' Lintang Selatan serta antara 110027'58'' dan 110048'47'' Bujur Timur.

Peta Kabupaten Demak



Sesuai peta Kabupaten Demak secara administratif luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan.

B. Struktur Organisasi

Pada Tahun 2017 telah terjadi perubahan susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. Adapun rincian nomenklatur organisasi Perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



- a. Dinas Daerah Kabupaten Demak, terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - 3) Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - 4) Dinas Kesehatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan UPT terdiri 27 Puskesmas, 2 Rumah sakit umum daerah;
 - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 8) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran;
 - 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 10) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 11) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 - 13) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
 - 14) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 15) Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 16) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 17) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;



- 18) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- b. Badan Daerah terdiri dari :
- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B; dan
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B.
- c. Sekretariat
- 1) Sekretariat Daerah dengan Tipe A; dan
 - 2) Sekretariat DPRD dengan Tipe A.
- d. Pengawasan
- 1) Inspektorat Daerah dengan Tipe B.
- e. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- 1) Kecamatan Mranggen dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Karangawen dengan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Guntur dengan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Sayung dengan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Karangtengah dengan Tipe A;
 - 6) Kecamatan Wonosalam dengan Tipe A;
 - 7) Kecamatan Dempet dengan Tipe A;
 - 8) Kecamatan Gajah dengan Tipe A;
 - 9) Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
 - 10) Kecamatan Mijen dengan Tipe A;
 - 11) Kecamatan Demak dengan Tipe A;
 - 12) Kecamatan Bonang dengan Tipe A;
 - 13) Kecamatan Wedung dengan Tipe A; dan
 - 14) Kecamatan Kebonagung dengan Tipe A.
- f. Kelurahan
- 1) Kelurahan Bintoro;
 - 2) Kelurahan Kadilangu;
 - 3) Kelurahan Mangunjiwan;
 - 4) Kelurahan Kalicilik;



- 5) Kelurahan Betokan; dan
 - 6) Kelurahan Singorejo.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- 1) RSUD Sunan Kalijaga; dan
 - 2) RSUD Sultan Fatah.
- h. Puskesmas
- 1) Puskesmas Demak 1;
 - 2) Puskesmas Demak 2;
 - 3) Puskesmas Demak 3;
 - 4) Puskesmas Bonang 1;
 - 5) Puskesmas Bonang 2;
 - 6) Puskesmas Wedung 1;
 - 7) Puskesmas Wedung 2;
 - 8) Puskesmas Mjen 1;
 - 9) Puskesmas Mijen 2;
 - 10) Puskesmas Karanganyar 1;
 - 11) Puskesmas Karanganyar 2;
 - 12) Puskesmas Gajah 1;
 - 13) Puskesmas Gajah 2;
 - 14) Puskesmas Dempet;
 - 15) Puskesmas Kebonagung;
 - 16) Puskesmas Guntur 1;
 - 17) Puskesmas Guntur 2;
 - 18) Puskesmas Karangawen 1;
 - 19) Puskesmas Karangawen 2;
 - 20) Puskesmas Mranggen 1;
 - 21) Puskesmas Mranggen 2;
 - 22) Puskesmas Mranggen 3;
 - 23) Puskesmas Karantengah;
 - 24) Puskesmas Wonosalam 1;
 - 25) Puskesmas Wonosalam 2;
 - 26) Puskesmas Sayung 1; dan
 - 27) Puskesmas Sayung 2.

**BAB VII**
INFORMASI PENTING LAINNYA**7.1 PENANGANAN DAMPAK INFLASI**

Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 211/PMK.07/2022, Pemerintah Daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja dari Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant.

Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2025 mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp1.004.375.982.000,00 yang terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp894.517.558.000,00 dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*Spesific Grant*) sebesar Rp72.972.157.000,00 yang di bagi dalam 4 (empat) Bidang. Adapun realisasi transfer dan belanja dari DAU SG dapat kami jelaskan dalam table berikut ini:

No	Bidang	Anggaran	Transferan	Realisasi Belanja	Sisa
1	Pendidikan	33.739.561.000,00	33.739.561.000,00	33.735.035.550,00	4.525.450,00
2	Kesehatan	23.025.127.000,00	21.201.369.200,00	20.472.810.971,00	728.558.229,00
3	Kelurahan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.192.491.500,00	7.508.500,00
4	PPPK	15.007.469.000,00	15.007.469.000,00	15.007.469.000,00	-
Jumlah		72.972.157.000,00	71.148.399.200,00	70.407.807.021,00	740.592.179,00

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Demak tidak mendapatkan alokasi DAU SG bidang Pekerjaan Umum, yang pada tahun 2024 mendapatkan alokasi sebesar Rp4.200.235.000,00.

7.2 TANAH SMP N 5 DEMAK

Pemerintah Kabupaten Demak telah mencatat aset tanah yang digunakan SMP N 5 Demak senilai Rp371.347.200,00.

Tanah SMP N 5 Demak tersebut terdiri dari 3 bidang tanah sebagai berikut:

- Tanah seluas 1.675 m² berdasarkan sertipikat Hak Pakai Nomor 330 Bintoro atas nama Pemerintah Kabupaten Demak.
- Tanah seluas 2.350 m² berdasarkan C Desa Bintoro Nomor 88 Persil 191c.
- Tanah seluas 2.850 m² berdasarkan C Desa Bintoro Nomor 88 Persil 197a.

Khusus untuk tanah seluas 2.350 m² berdasarkan C Desa Bintoro Nomor 88 Persil 191c dan tanah seluas 2.850 m² berdasarkan C Desa Bintoro Nomor 88 Persil 197a, karena di atas tanah tersebut telah terbit sertipikat:

- Hak Milik Nomor 216 atas nama R. Soeftimboel untuk tanah seluas 2.350 m².
- Hak Milik Nomor 217 atas nama R. Soeftimboel untuk tanah seluas 2.850 m².

Pemerintah Kabupaten Demak telah menghadapi gugatan:

- Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dari Kuasa Hukum Ahli Waris R. Soeftimboel dengan Nomor perkara: 8/P/FP/2020/PTUN.SMG yang diputus pada tanggal 4 Januari 2021 dengan putusan dalam pokok perkara:
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp759.000,0 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- b. Di Pengadilan Negeri Demak dari Kuasa Hukum Ahli Waris R. Soeftimboel dengan dengan Nomor perkara: 51/Pdt.G/2021/PN Dmk yang diputus pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan putusan:
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima; dan
 3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.745.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

7.3 TANAH DIKUASAI PIHAK LAIN

Terdapat 2 (Dua) bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Demak yang berada dalam penguasaan pihak lain dengan data sebagai berikut:

No	Nama Aset	Luas (M2)	Nilai Aset (Rupiah)	Pihak Ketiga	Permasalahan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1,181	2.033.682.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Keluarga Ibu Sugianti• Keluarga Bapak Pajjo	Yang bersangkutan menempati tanah milik negara tanpa MoU sejak tahun 1958.
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1,086	870.972.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Keluarga Sumardi• Keluarga Nurcahyo Aji Guwondo	Yang bersangkutan menempati tanah milik negara tanpa MoU sejak tahun 1960-an.

Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan pengamanan secara administrasi atas 2 (Dua) bidang tanah tersebut dengan melakukan pencatatan ke Buku Inventaris Kabupaten Demak pada tanggal 19 April 2021. Pemerintah Kabupaten Demak juga telah melakukan upaya pengamanan secara hukum dengan mendaftarkan pensertipikatan atas tanah dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III (Samping Rutan) sudah didaftarkan pensertipikatan ke BPN dengan berkas pendaftaran Nomor 84377/2022 tahun 2022.
- b. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III (Samping Pegadaian) sudah didaftarkan pensertipikatan ke BPN dengan berkas pendaftaran Nomor 84161/2022 tahun 2022.

7.4 DAERAH IRIGASI SUMBEREJO

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa D.I. Sumberejo merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Demak, namun



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Lanjutan Data Daerah Irigasi TA. 2018 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 telah disepakati bahwa D.I. Sumberejo masuk sistem D.I. Dolok yang merupakan kewenangan Pusdataru Provinsi Jawa Tengah dan Tanahnya sudah tercatat pada KIB A Tanah Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pemerintah Kabupaten Demak tidak mencatat tanah D.I. Sumberejo.

**BAB VIII
PENUTUP**

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak selama Tahun 2025 dapat melampaui target pendapatan yang ditetapkan namun terdapat penghematan belanja daerah. Selain itu laporan sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 ini juga sudah menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga sudah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Demak bertekad untuk terus melakukan peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demak, 25 Mei 2026


BUPATI DEMAK,
EISTI'ANAH